



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filosofi penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu, *Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa*. Dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 juga ditegaskan, *Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*. Selanjutnya disebutkan, *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan bagi dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*.

Peran negara dalam arti luas yakni seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, mendapatkan mandat untuk turut serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah termasuk penanggulangan masalah kemiskinan. Masing-masing pelaku memiliki peran signifikan, jika bersama bergerak hingga menjadi potensi besar dalam penanggulangan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan, karena hasilnya belum optimal dan membawa pengaruh buruk terhadap sektor pembangunan lain. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan pembangunan prioritas menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Isu kemiskinan dalam konteks global telah menjadi agenda internasional, yang ditandai pertemuan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 di Markas Besar PBB. Hasilnya, mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*). Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia, dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda *Millennium Development Goals (MDGs)* dalam upaya mencapai indikatornya. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDGs. SDGs menggunakan prinsip pembangunan: *No One will be left Behind* artinya pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada mencerdaskan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. RPJMN mengamanahkan bahwa pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah membentuk kelembagaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kelembagaan TNP2K merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaannya diketuai Wakil Presiden, yang memiliki tugas yaitu menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota. Terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan tugas, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Selanjutnya TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan di daerah, Kepala Daerah membentuk Sekretariat TKPK Provinsi/Kab/Kota. Tata kerja dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, yang dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan dokumen RPKD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan juga sebagai evaluasi keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan terutama yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir terutama dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan progres yang relatif lamban dalam penurunannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebanyak 7,09 persen, yang menurun menjadi 6,56 persen pada September 2020 atau menurun 0,53 persen. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat melalui TNP2K memberikan perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, dan melakukan pendampingan sejak dimulainya penyusunan dokumen RPKD, sampai pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis dan terarah, serta terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan SDGs perlu diarahkan memperkuat partisipasi penduduk dalam keseluruhan proses pembangunan. Pembangunan yang dituju tidak hanya diartikan sebatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu. Untuk itu, rangkaian target dan indikator di dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan harus berkaitan dengan upaya peningkatan kesempatan dan kemampuan setiap penduduk. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan masyarakat dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Penggulangan Kemiskinan Daerah merupakan pengganti dari dokumen terdahulu yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dimaksudkan membentuk komitmen dan sinergitas lintas sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu, berdasarkan amanah Permendagri Nomor 53 pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian

dari dokumen RPJMD. Ini berarti bahwa dokumen akhir RPKD akan menjadi bahan untuk disinergikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun pedoman dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan dokumen RPKD memuat dan menguraikan secara utuh dan rinci tentang penanganan masalah kemiskinan, mulai dari identifikasi masalah pada setiap bidang, identifikasi akar masalah dan identifikasi wilayah prioritas. Sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua perangkat daerah adalah penduduk miskin dan rentan miskin. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan sasaran penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yakni untuk:

- a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin,
- b. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, dan
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
	4. Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS)	%	49,60	49,70	49,75	49,80	49,85	49,90	49,90	· Disnakertrans · Dinas Pendidikan · Dinas Koperasi dan UKM · Dinas Perindag · Balitbang · DPMD · Dinas Sosial
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah											
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Indeks	62,78	62,80	62,80	62,80	62,90	62,90	62,90	· Badan Kesbangpol · Satpol PP · Biro Kesra · Dinas Sosial
	2. Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	11,05	13	14	15	16	17	17	· Dinas Kearsipan & Perpustakaan · Dinas Kebudayaan · Dinas Pendidikan
	3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga,	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	57,22	59,30	61,38	63,46	65,54	67,62	67,62	-DP3AP2KB
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,09	94,11	94,25	94,60	95,00	95,08	95,08	-DP3AP2KB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
	anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,20	61,75	62,42	62,42	· DP3AP2KB
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,75	65,85	65.95	66,05	66,15	66,25	66,25	· DP3AP2KB
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan											
Meningkatkan kesejahteraan petani IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,79	100,99	100,19	101,40	101,60	101,80	101,80	· Dinas Pangan · Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura · Dinas Peternakan dan Keswan · Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	%	102,95	103,47	103,98	104,50	105,03	105,55	105,55	· Dinas Pangan · Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura · Dinas Peternakan dan Keswan · Dinas Kelautan dan Perikanan · Biro Perekonomian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Pendapatan pembudidayaan ikan	Rp. Jt	45.800	47.175	48.590	50.048	51.549	53.096	53.096	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendapatan nelayan	Rp. Jt	39.995	40.795	41.611	42.443	43.292	44.158	44.158	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendapatan Peternak	Rp. Jt	45.592	47.872	50.265	52.779	55.418	58.199	58.199	Dinas Peternakan dan Keswan
		Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,60	82,05	83,22	83,22	· Dinas Pangan · Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura · Dinas Peternakan dan Keswan · Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Meningkatnya pendapatan petani Hutan	Peningkatan pendapatan petani hutan	%	5	5	5	5	5	5	5	· Dinas Kehutanan
	Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital										
Mewujudkan perdagangan dan industri	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju pertumbuhan sektor	%	-1,14	-1,10	-1,00	1,00	1,01	1,02	1,02	· Dinas Perindustrian dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing IK: · Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) · Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		perdagangan									Perdagangan · Dinas Koperasi dan UKM
	2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	sentra	358	368	379	390	401	413	413	· Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28	2,33	2,33	· Dinas Perindustrian dan Perdagangan · Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	1,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,2	· Dinas Koperasi dan UKM
	4. Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	orang	97.633	112.594	130.482	150.658	173.711	197.703	197.703	· Dinas Pangan · Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura · Dinas Peternakan dan Keswan · Dinas Kelautan dan Perikanan · Dinas Koperasi dan UKM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
											· Dinas perindustrian dan perdagangan · Dinas Pemberdayaan Masyarakat · Dinas Pariwisata · Disnakertrans · Dispora · DP3AP2KB
	5. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	6,00	6,00	8,00	9,50	10,50	11,50	11,50	· DPMPTSP
	6. Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	%	6,44	6,54	6,70	7,10	7,25	7,65	7,65	· Dinas Koperasi dan UKM · Dinas Perindustrian dan Perdagangan · Dinas Kominfo dan Statistik
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan											
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi,	%	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	1,27	· Dinas Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
IK: Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		makanan dan minuman)									
	2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi ekraf pada PDRB	%	6,02	6,02	6,02	6,10	6,18	6,26	6,26	- Dinas Pariwisata - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Kebudayaan
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan											
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	Rasio konektifitas	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	0,695	- Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kemantapan Jalan	%	73,92	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00	82,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	BPBD
	3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas Lingkungan hidup	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	79,25	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
											Kehutanan · Dinas Perkimtan · Dinas Kelautan dan Perikanan · Dinas ESDM · Dinas Pehubungan · Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Akses air minum	%	80,04	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	· Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan tata Ruang · Dinas Perkimtan · Dinas Kesehatan · Dinas Lingkungan Hidup
		2. Akses sanitasi layak	%	81,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	· Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan tata Ruang · Dinas Perkimtan · Dinas Kesehatan · Dinas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
											Lingkungan Hidup
		Presentase bangunan strategis terbangun	%	38,05	40,22	55,55	66,67	83,33	100	100	· Dinas Bina Marga, Cipta karya dan tata Ruang
		Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36	71,92	73,48	75,04	76,60	76,60	· Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
		Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	59,78	· Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,55	73,55	· Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
	5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	84,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	· Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas											
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)	A (80,01)	· Biro Organisasi · Bappeda · Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
dengan aparaturnya yang melayani IK : indeks reformasi birokrasi	akuntabel	Nilai EPPD	Skor	3,0000	3,0010	3,0020	3,0030	3,0040	3,0050	3,0050	· Biro Pemerintahan
		Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	· BPKAD · Inspektorat
		Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00	41,00	· Bapenda
	2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,60	· Diskominfo
		Indeks Profesionalitas ASN	indeks	71,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	- BKD - BPSDM
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks persepsi kualitas pelayanan	Indeks	84	85	86	87	88	89	89	· Biro Organisasi

Perumusan rencana kerja dan pendanaan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, RPKD disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD sebagai perwujudan cita politik kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan, dan secara substansi penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RPKD. Hingga RPKD Provinsi Sumatera Barat yang minimal memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi program menjadi bagian yang terintegrasi dari dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai acuan kebijakan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktaharan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengacu ketentuan uraian minimal yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, untuk selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Perekonomian
- 2.2. Geografis
- 2.3. Demografis
- 2.4. Pemerintahan
- 2.5. Sosial Budaya
- 2.6. Kemiskinan Ekstrim

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Profil Kemiskinan Konsumsi
- 3.2. Profil Kemiskinan Non Konsumsi

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1. Prioritas Intervensi
- 4.2. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

BAB V LOKASI PRIORITAS

- 5.1. Lokasi Prioritas Program Berdasarkan ToC
- 5.2. Target Penurunan Persentase Kemiskinan

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

Bab II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Posisi astronomi Provinsi Sumatera Barat terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.012,89 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi atas 19 (sembilan belas) kabupaten/kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

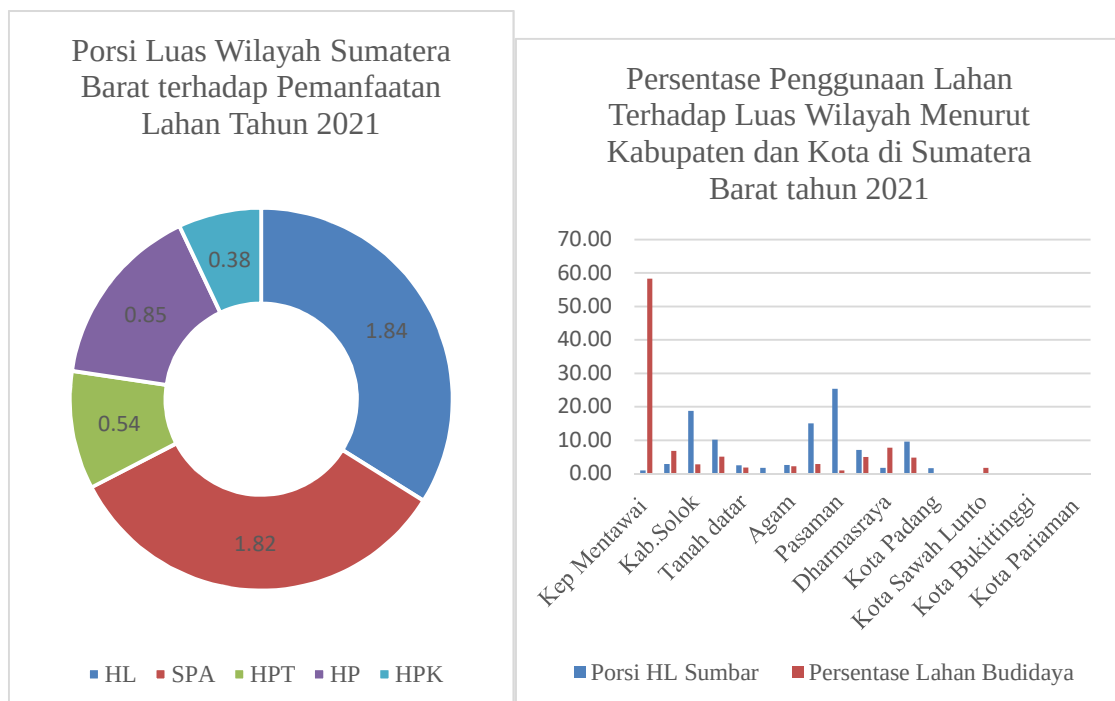
No	Kabupaten/kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	6.011,35	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.738,00	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.130,40	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.336,10	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	1.804,30	16	-	82	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.947,63	12	-	37	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.346,20	7	-	39	-

No	Kabupaten/kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
11.	Kab. Dharmasraya	2.961,13	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.887,77	11	-	19	-
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	-	55
	Jumlah	42.012,89	179	230	803	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas, apabila dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, disusul oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Gambar 2.1
Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat



Sumber : Hasil analisis

Gambar 2.1 di atas juga memperlihatkan bahwa porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung, sedangkan lahan untuk hutan

produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan berkelanjutan ke depan.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35°C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan kawasan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Ditas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada kabupaten/kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

2.1.2. Topografi

Kondisi Topografi wilayah Sumatera Barat beragam, meliputi daerah pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 mdpl. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 – 100 mdpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 mdpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 mdpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 mdpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 mdpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan daerah lainnya dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl.

Gambaran karakteristik daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
1	Kepulauan Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 113, 4 buah pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (Sibaru-baru dan Sinyaunyu)	0° 50' LS – 03° 30' LS 97° 30' BT – 100° 30' BT
2	Pesisir Selatan	5.749,89	Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Selatan Barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Kota Bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pegunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 48 pulau-pulau kecil	0° 59' LS – 2° 28' LS 100° 19' – 100° 18' BT
3	Solok	3.738,00	Kabupaten Solok terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi yang bervariasi berlembah-lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memiliki 1 buah Gunung Berapi yaitu Gunung Talang, serta memiliki beberapa danau (D. Singkarak, D. Di atas, D. Dibawah, D. Talang)	0° 31' LS – 01° 19' LS 100° 27' BT – 101° 15' BT
4	Sijunjung	3.130,40	Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur utama antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi, topografi Kabupaten Sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl	0° 18' LS – 1° 42' LS 100° 42' BT – 100° 52' BT
5	Tanah Datar	1.336,10	Kabupaten Tanah Datar terletak bagian tengah arah ke timur Provinsi Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Pekanbaru Provinsi Riau serta jalur-jalur yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan 1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung	0° 17' LS – 03° 39' LS 100° 19' BT – 100° 51' BT

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
			Singalang, Gunung Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.	
6	Padang Pariaman	1.332,51	Kabupaten Padang Pariaman terletak di bagian barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu jalur yang menghubungkan antara Pekanbaru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumatera Barat dan jalur yang menghubungkan Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (Gunung Tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando)	0° 11' LS – 03° 30' LS 98° 36' BT – 101° 53' BT
7	Agam	1.804,30	Kabupaten Agam pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gunung (gunung merapi=2.891 mtr) dan (gunung singgalang=2.877 mtr), panjang garis pantai 43 meter dan 2 buah pulau	0° 02" LS - 00° 29' LS 99° 52" BT – 100° 33' BT
8	Lima Puluh Kota	3.571,14	Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261, Gunung Bungsu=1.253, Gunung Sanggul = 1.495,)	00° 22' LU – 00° 23' LS 100° 16" BT – 100° 51' BT
9	Pasaman	3.947,63	Kabupaten Pasaman terletak paling utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan-Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera Barat dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (Gunung Ambun, Gunung Sigapuak, Gunung Kalabu, Gunung Malenggang, Gunung Tambian)	0° 55' LU – 0° 06' LS 99° 45' BT – 100° 21' BT
10	Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Kerinci Provinsi Jambi, kabupaten ini memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter dpl, dimana 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor.	0° 43' LS – 01° 43' LS 101° 01' BT – 101° 30' BT
11	Dharmasraya	2.961,13	Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat Dharmasraya mempunyai topografi yang sebagian besar landai antara 0%-40%.	0° 47' LS – 03° 42' LS 101° 09' BT – 101° 54' BT
12	Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di utara Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Provinsi Sumatera Utara yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan antara Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera Barat, topografi Pasaman Barat dengan ketinggian antara 0-2.912 m (Gunung Malintang, Gunung	0° 30' LS – 0° 11' LS 99° 10' BT – 100° 04' BT

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
			Talamau). Kabupaten Pasaman Barat memiliki 26 buah pulau.	
13	Kota Padang	693,66	Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekanbaru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengan 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai $\pm$ 84 Km dan mempunyai 21 pulau-pulau kecil.	0° 44' LS – 01° 08' LS 100° 05' BT – 100° 34' BT
14	Kota Solok	71,29	Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kelerengan 0 - > 45%.	0°32' LS' – 0°42' LS 100°32' – 101° 41' BT
15	Kota Sawahlunto	231,93	Kota Sawahlunto merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 M dpl, kemiringan 0 - > 40%. Kota Sawahlunto merupakan pusat dari Ombilin <i>Coal Mining Heritage</i> (OCMH) yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan Dunia	0° 33' LS – 0° 43' LS 100° 43' BT – 100°50' BT
16	Kota Padang Panjang	23,00	Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 m dpl – 900 m dpl.	0° 27' LS– 0° 30' LS 100° 20' BT – 100° 27' BT
17	Kota Bukittinggi	25,24	Kota Bukittinggi terletak dibagian tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekanbaru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl.	01° 16'LS – 00°19' LS 100° 21' – 100° 25' BT
18	Kota Payakumbuh	85,22	Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Provinsi Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara Gunung Api Podam (Gunung Malintang) pada ketinggian 500m dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%.	0° 10' LS – 0° 17' LS 100° 35' BT – 100° 45' BT
19	Kota Pariaman	66,13	Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumatera Utara, dengan kemiringan antara 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 4 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km.	0° 33' LU – 0° 40' LS 100° 04' BT – 100° 10' BT

Ket : Perda I/2020 tentang Perubahan RTRW Kab. Pessel 2010-2030

Dengan kondisi topografi di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal,

sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan. Sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Secara geologis, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

2.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Kebijakan pengelolaan sumber daya air tidak dapat dilakukan secara terpisah, akan tetapi perlu dilaksanakan secara terpadu sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dalam suatu wilayah sungai. Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dialiri sungai terbagi dalam 9 (sembilan) Wilayah Sungai, yaitu Wilayah Sungai Masang-Pasaman (5.653 km²), Wilayah Sungai Silaut-Tarusan (7.074 km²), Wilayah Sungai Rokan (2.190 km²), Wilayah Sungai Kampar (2.591 km²), Wilayah Sungai Inderagiri (7.592 km²), Wilayah Sungai Akuaman (2.953 km²), Wilayah Sungai Batang Hari (8.264 km²), Wilayah Sungai Siberut-Pagai-Sipora (7.338 km²), Wilayah Sungai Natal-Batahan (380 km²). Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Sungai Masang-Pasaman dan Wilayah Sungai Silaut-Tarusan.

Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Ditas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas

107,8 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 99,5 km², sedangkan Danau Diatas (12.3 km²), Danau Dibawah (11,2 km²), dan Danau Talang (5 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, menjelaskan tentang luasan sawah yang menjadi kewenangan pemerintah yang berada pada wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Luas Sawah Beririgasi Provinsi Sumatera Barat

No.	Prov/Kab/Kota	Luas Baku (Ha) Permenpu No. 14 th 2015	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)
I	Kewenangan Pusat	74,471	98,004	26,361
II	Kewenangan Provinsi	65,007	50,646	33,884
III	Kewenangan Kab/Kota	222,828	147,800	105,830
1	Kab. Mentawai		468	468
2	Kah. Pasaman		10,620	10,620
3	Kab. Pasaman Barat		12,138	5,024
4	Kab. Again		19,842	10,974
5	Kab. 50 Kota		16,061	16,061
6	Kab.Tanah Datar		17,404	17,404
7	Kab. Padang Pariaman		8,555	6,519
8	Kab.Solok		21,119	10,272
9	Kab Solok Selatan		4,263	4,263
10	Kab. Sijunjung		6,069	4,440
11	Kab. Dharmasraya		1,499	1,499
12	Kab. Pesisir Selatan		20,907	10,092
13	Kota Bukittingi		214	214
14	Kota Payakumbuh		1,270	1,270
15	Kota Padang Panjang		492	492
16	Kota Pariaman		1,495	1,517
17	Kota Solok		479	479
18	Kota Padang		4,240	3,558
19	Kota Sawahlunto		663	663
Jumlah		362,306	296,450	166,075

Catatan :

TOTAL SAWAH SUMBAR 199,048 Ha
SAWAH BERIRIGASI 166,075 Ha
SAWAH NON KEWENANGAN 32,972 Ha

2.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut

menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2019 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4^oC sampai 26,1^oC serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu di Sumatera Barat tercatat antara 18^o – 34^o C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5^o C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^o – 7^o C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4^o – 6^o C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Sementara dari sisi iklim, Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan berdasarkan curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian Barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budi daya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura. Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah menyebabkan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Tabel 2.20
Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
	Kabupaten :				
1	Kepulauan Mentawai	Menengah	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat dan Laut
2	Pesisir Selatan	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Gempa Laut
3	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
4	Sijunjung	Menengah	-	-	-
5	Tanah Datar	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
6	Padang Pariaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
7	Agam	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
8	Lima Puluh Kota	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
9	Pasaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
10	Solok Selatan	Menengah – Tinggi	-	-	Gempa Darat
11	Dharmasraya	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
12	Pasaman Barat	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
	Kota :				
13	Padang	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
14	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
15	Sawahlunto	Menengah – Tinggi	-	-	-
16	Padang Panjang	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
17	Bukittinggi	Menengah	Menengah	-	Gempa Darat
18	Payakumbuh	-	Menengah - Tinggi	-	-
19	Pariaman	-	-	Menengah-Tinggi	Gempa Laut

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Keterangan :

1. Menengah – Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.

2. Menengah

Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

3. Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi bencana tsunami, pergerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana tsunami yang sangat tinggi akibat adanya megathrust Mentawai,

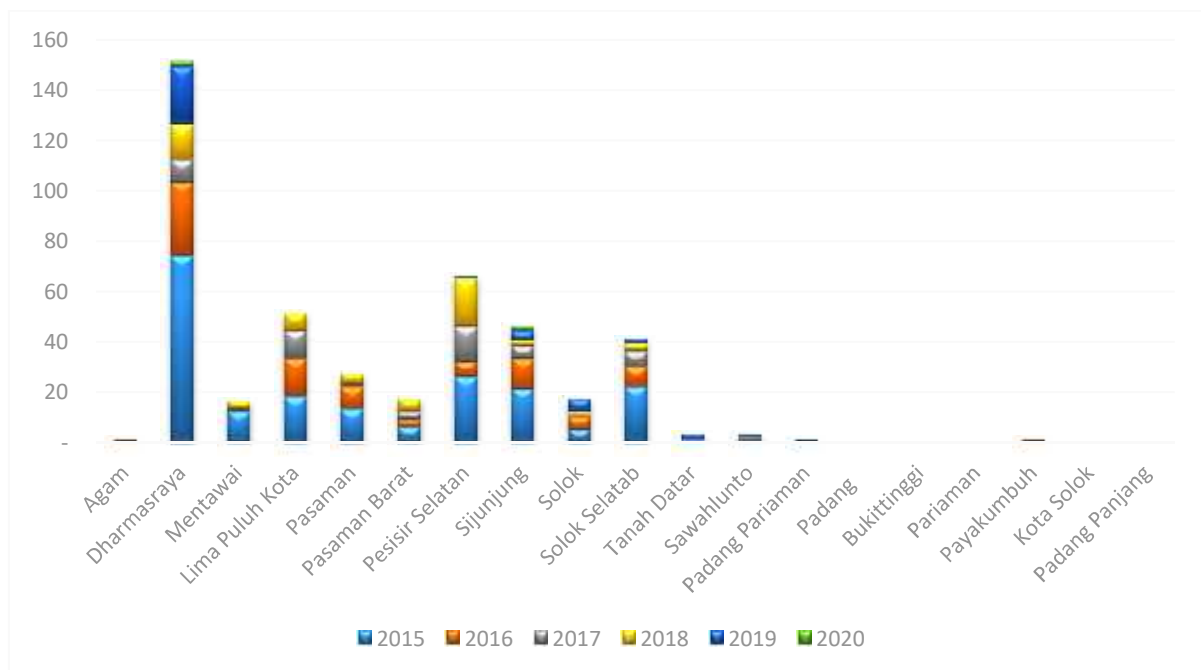
yang berdampak terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai.

Berdasarkan Tabel 2.19 semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk terjadinya bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Potensi bencana lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Grafik 2.6 menyajikan potensi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau melalui satelit NOAA. Dari grafik diatas, terlihat kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung memelihat sebaran titik api yang cukup banyak dari tahun 2015 sampai 2020. Kejadian kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan atau kelalaian masyarakat dalam beraktifitas di hutan dan lahan.

Grafik 2.6

Sebaran hotspot Perkabupaten/kota tahun 2015-2020



Sumber : Portal Si Pongi, Satelite NOAA dengan Tingkat Kepercayaan > 80% tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.20 dan Grafik 2.6 , semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk mengalami bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Prioritas Penanganan Bencana

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan DIBI BNPB.

Gambar 2.7

Tingkat Prioritas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani ditingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah: Banjir, Banjir Bandang, Gempa bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Api.

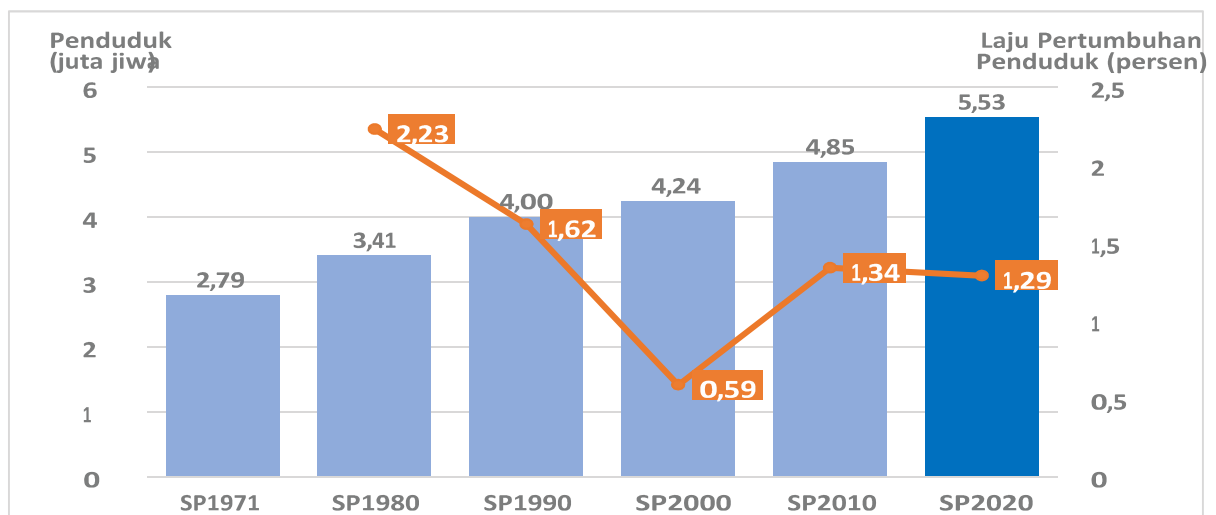
Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana lain (gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor), pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan, atau penanganannya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun stakeholders lainnya diluar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Kondisi Demografis

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebanyak 5.534.472 jiwa.

Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami penambahan sekitar 687.563 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat sebesar 1,29 persen per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk hampir satu persen jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,23 persen.

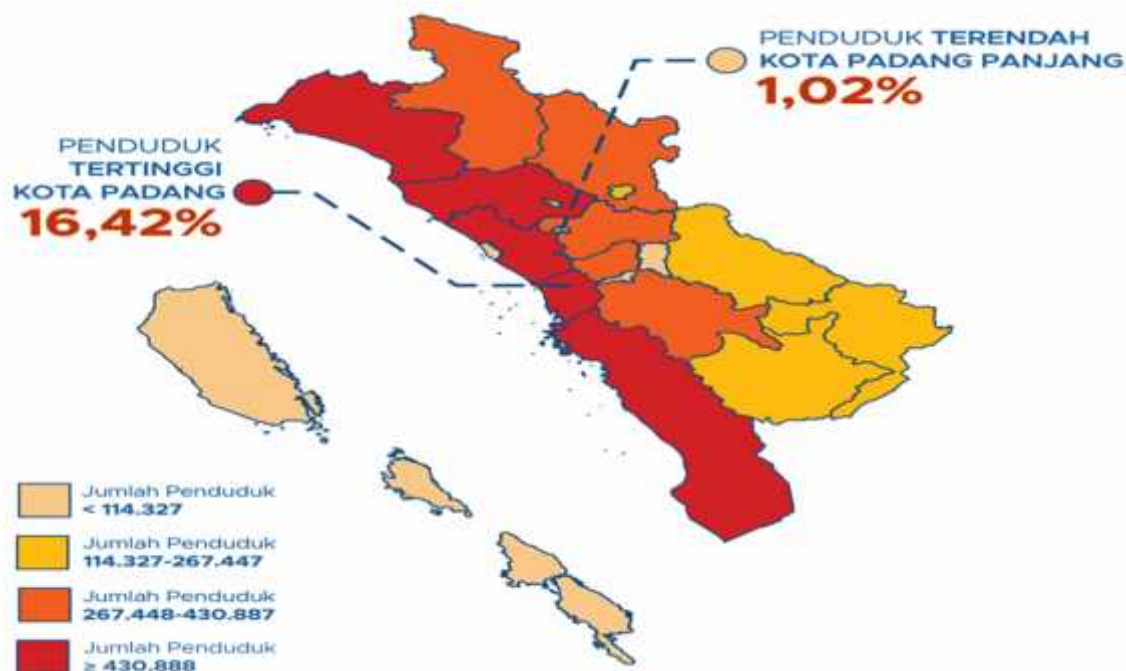
Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat dari 1971 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dengan luas daratan Sumatera Barat sebesar 42 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 132 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 100 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 115 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Sumatera Barat menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan distribusi penduduk terendah adalah di Kota Padang Panjang sebesar 1,02 persen hingga yang tertinggi adalah di Kota Padang sebesar 16,43 persen. Kota padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, memiliki penduduk terbanyak yaitu 909 ribu jiwa, menempati 1,65% luas Sumatera Barat.

Gambar 2.8
Sebaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

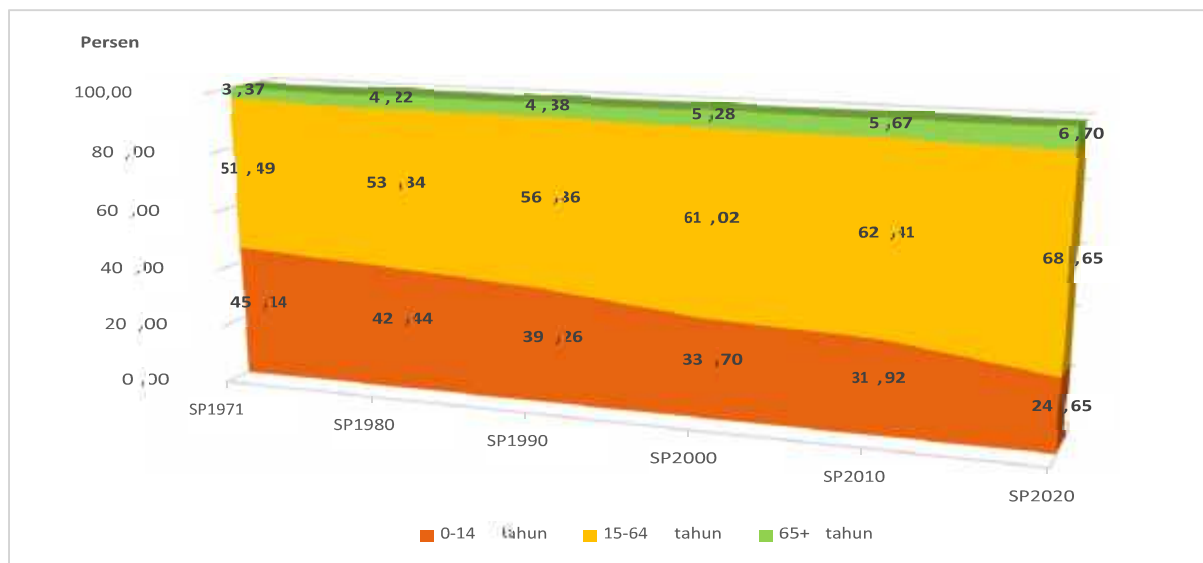
Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2020 (jiwa)

KABUPATEN/ KOTA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
Kepulauan Mentawai	45.477	42.146	87.623
Pesisir Selatan	253.854	250.564	504.418
Kab. Solok	196.899	194.598	391.497
Sijunjung	119.126	115.919	235.045
Tanah Datar	186.134	185.570	371.704
Padang Pariaman	215.038	215.588	430.626
Agam	266.848	262.290	529.138
Lima Puluh Kota	191.736	191.789	383.525
Pasaman	150.798	149.053	299.851
Solok Selatan	92.859	89.168	182.027
Dharmasraya	116.310	112.281	228.591
Pasaman Barat	218.573	213.099	431.672
Padang	456.329	452.711	909.040
Kota Solok	36.990	36.448	73.438
Sawahlunto	32.767	32.371	65.138
Padang Panjang	28.286	28.025	56.311
Bukittinggi	60.515	60.513	121.028
Payakumbuh	70.250	69.326	139.576
Pariaman	47.571	46.653	94.224
SUMATERA BARAT	2.786.360	2.748.112	5.534.472

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 51,49 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 68,65 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Barat masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 68,65 persen penduduknya masih berada di usia produktif

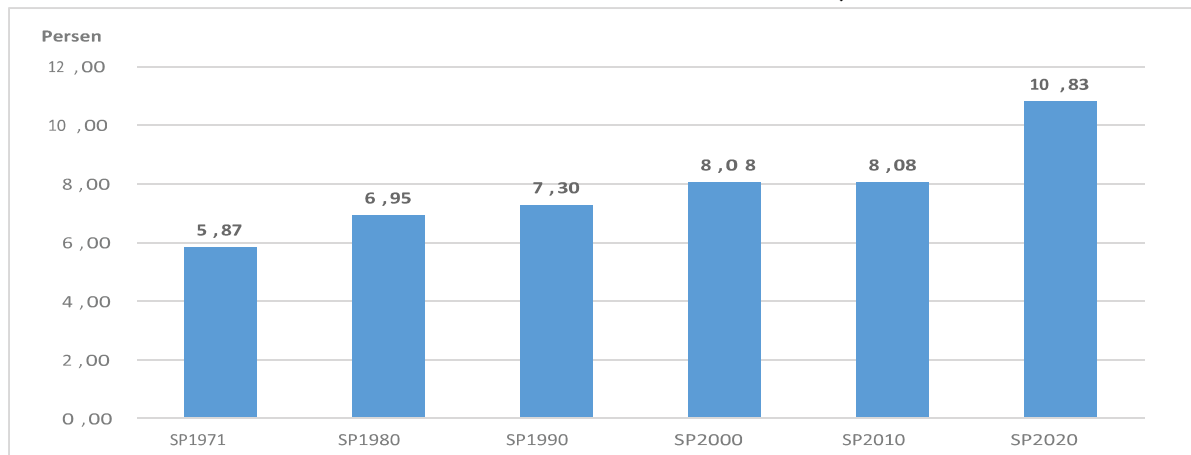
Gambar 2.9
Komposisi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur, 1971-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Indonesia meningkat menjadi 10,83 persen di tahun 2020 dari 8,08 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010 (Gambar 6). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia berada dalam masa transisi menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10 persen. Grafik 2.8 Persentase Penduduk Lansia Sumatera Barat, 1971-2020.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Lansia Sumatera Barat, 1971-2020

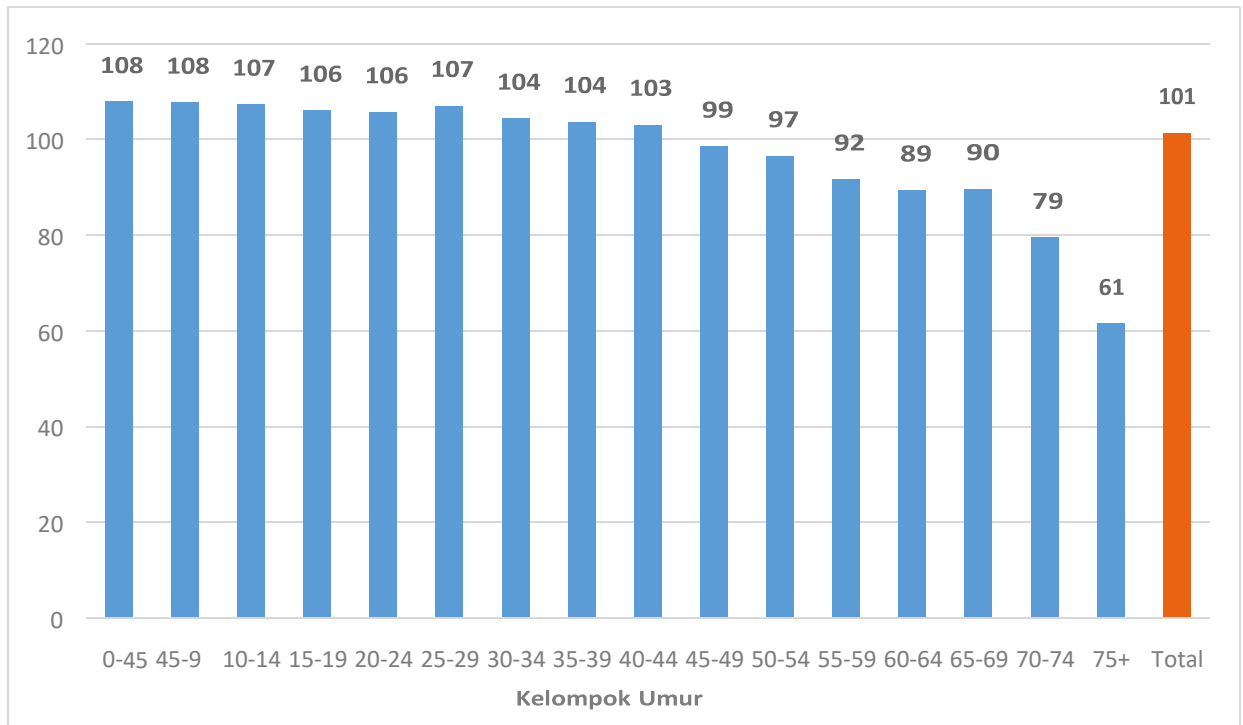


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Barat sebanyak 2,79 juta jiwa, atau 50,35 persen dari penduduk Sumatera Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat sebanyak 2,75 juta orang, atau 49,65 persen dari penduduk Sumatera Barat. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Barat sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2020.

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur (Grafik 2.9). Secara umum, rasio jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan pola yang semakin menurun dengan bertambahnya umur. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 0-9 tahun sebesar 108 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebesar 61. Rasio jenis kelamin pada umur 75 tahun ke atas yang sebesar 61 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk lansia laki-laki.

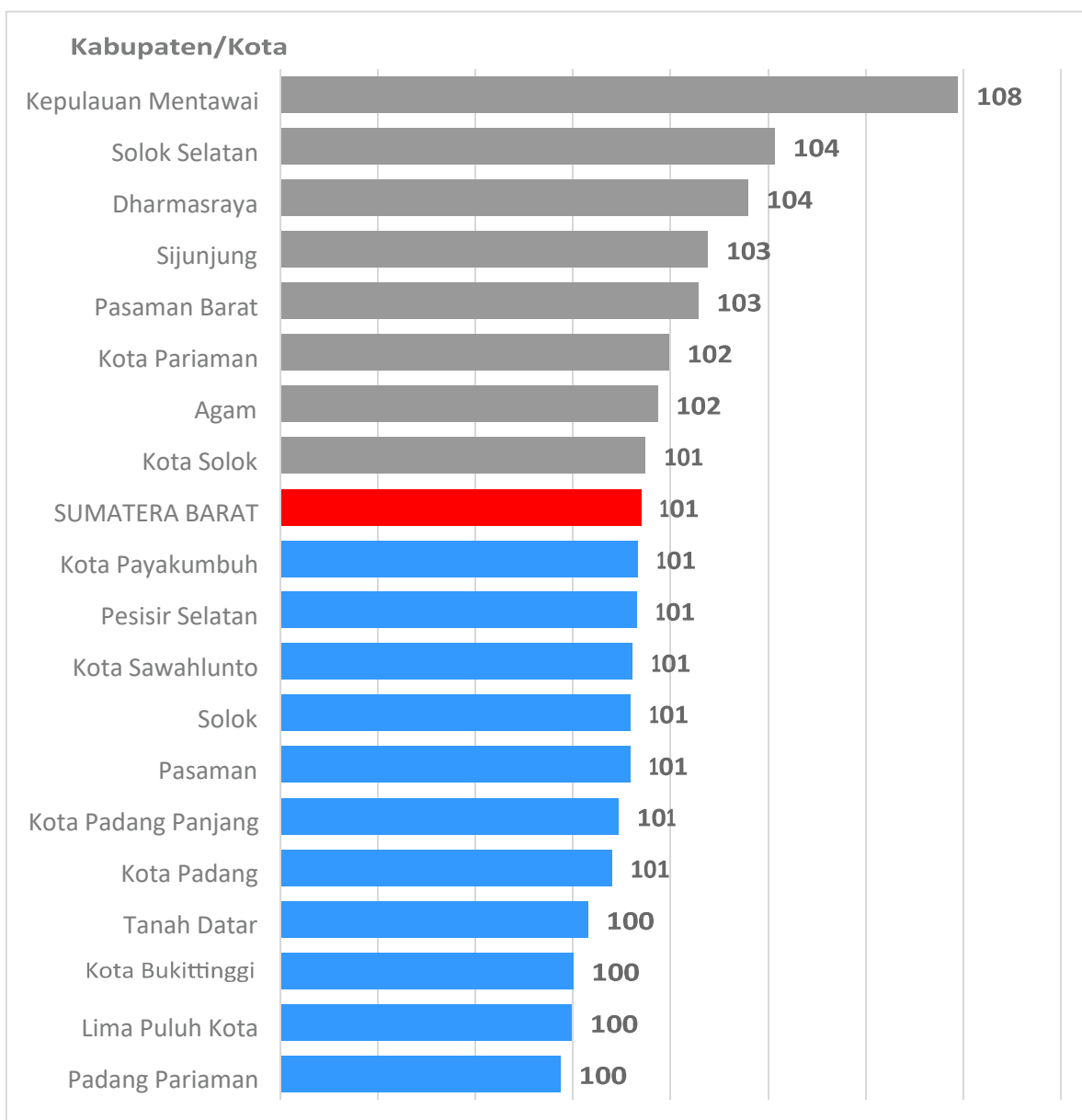
Grafik 2.9
Rasio Jenis Kelamin Sumatera Barat menurut Kelompok Umur, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (Gambar 8). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 108 dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 100.

Grafik 2.10
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/kota, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3. Kondisi Perekonomian

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diamati dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB disajikan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan produksi atau menurut lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB juga disajikan dengan dua acuan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Perkembangan ekonomi dapat ditunjukkan pula oleh pertumbuhan lapangan usaha pada PDRB serta distribusi yang menggambarkan perkembangan struktur ekonomi.

Nilai PDRB Sumatera Barat menurut harga berlaku telah mengalami peningkatan selama rentang tahun 2016 hingga 2020, dari Rp. 196,009 trilyun menjadi Rp. 242,118 trilyun. Adapun PDRB atas harga konstan meningkat dari Rp. 148,134 trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp. 169,458 trilyun pada tahun 2020. Berdasarkan PDRB harga konstan ini diperoleh pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebelum terjadi pandemi COVID-19 terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian menunjukkan kecenderungan perlambatan yaitu dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 sebagaimana kecenderungan internasional dan nasional akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat minus -1,6 persen.

Dari sisi produksi, lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh secara konsisten melebihi 8 (delapan) persen dalam 5 tahun terakhir bahkan saat pandemic pertumbuhannya semakin meningkat mencapai 9,76 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh melebihi 8 persen antara 2016-2019, namun mengalami kontraksi terbesar sebesar -15,95 persen pada tahun 2020, setelah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan lapangan usaha ini secara lebih rinci disajikan pada tabel 2.22.

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 menunjukkan sejumlah sektor yang mampu bertahan dari pengaruh pandemi. Kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian tetap tumbuh 1,19 persen pada tahun 2020. Angka ini mengalami perlambatan dari 3,54 % tahun 2018 dan 2,51% di tahun 2019. Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang semakin meningkat. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan juga tetap tumbuh cukup tinggi pada tahun 2020 sebesar 5,03 persen dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan angka di atas 7 persen.

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,52	2,51	1,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31
3. Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,28
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,00	8,47	-2,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	7,03	7,33	-1,14
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,43	4,75	-16,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,52	8,73	9,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	6,96	-0,69
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

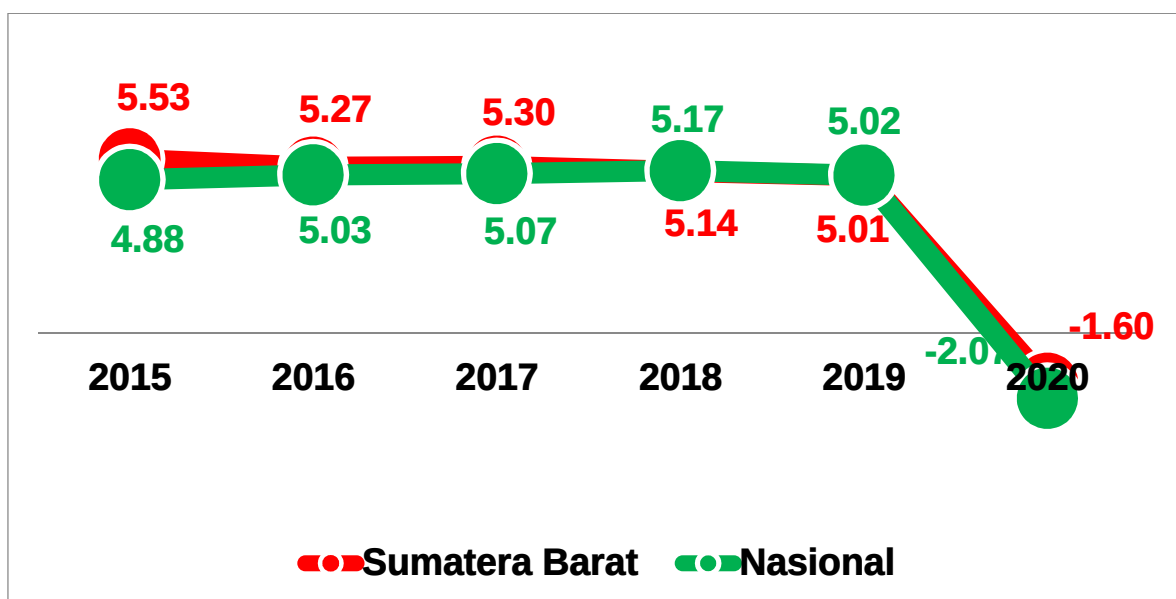
Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan provinsi se- Sumatera dan nasional pada tahun 2020, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kontraksi dan berada di posisi ke tujuh namun berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2016-2020 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37
2. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
3. Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60
4. Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,12
5. Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46
6. Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
7. Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
8. Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
9. Kep.Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30
10. Kep.Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

Grafik 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha pada tahun 2020 ditunjukkan oleh distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar mencapai 22,38%. Diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,76%, dan transportasi dan pergudangan 10,44%. Sumbangan ketiga lapangan usaha ini menunjukkan struktur perekonomian Sumatera sebagai daerah agraris yang ditunjang dan terkait dengan struktur perdagangan dan jasa transportasi. Gambaran struktur ekonomi ini ditampilkan pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	24,06	23,61	23,17	22,15	22,38
2. Pertambangan dan Penggalan	4,53	4,27	4,27	4,30	4,27
3. Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
5. Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,38	9,29	9,63	10,09	10,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,61	14,76	15,30	15,78	15,76
8. Transportasi dan Pergudangan	12,23	12,46	12,65	12,60	10,44
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,29	1,37	1,43	1,24
10. Informasi dan Komunikasi	4,85	4,99	5,46	5,81	6,44
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,17	3,01	2,91	3,04
12. Real Estate	2,00	2,01	1,96	2,01	2,06
13. Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,70	5,82	5,92	6,13	6,71
15. Jasa Pendidikan	3,67	3,84	4,20	4,35	4,30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,28	1,39	1,42	1,62
17. Jasa Lainnya	1,68	1,77	1,93	2,00	1,88
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan yaitu -2,47% dan -8,50% pada tahun 2020, begitu pula halnya dengan pengeluaran konsumsi lembaga non profit mengalami penurunan menjadi -4,39 % pada tahun 2020.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,06%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 54,40%. Penyumbang kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,00% dan Pengeluaran konsumsi

pemerintah sebesar 11,92%. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2018-2020

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	53,23	54,40	54,06
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,54	11,85	-4,39	1,06	1,14	1,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,13	-8,50	12,59	12,64	11,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	5,16	-2,62	29,82	30,10	30,00
Perubahan Inventori	-	-	-	0,11	0,04	0,15
Net Ekspor Barang dan Jasa	16,56	5,99	17,57	3,19	1,67	2,67
PDRB SUMATERA BARAT	5,16	5,05	-1,60	100	100	100

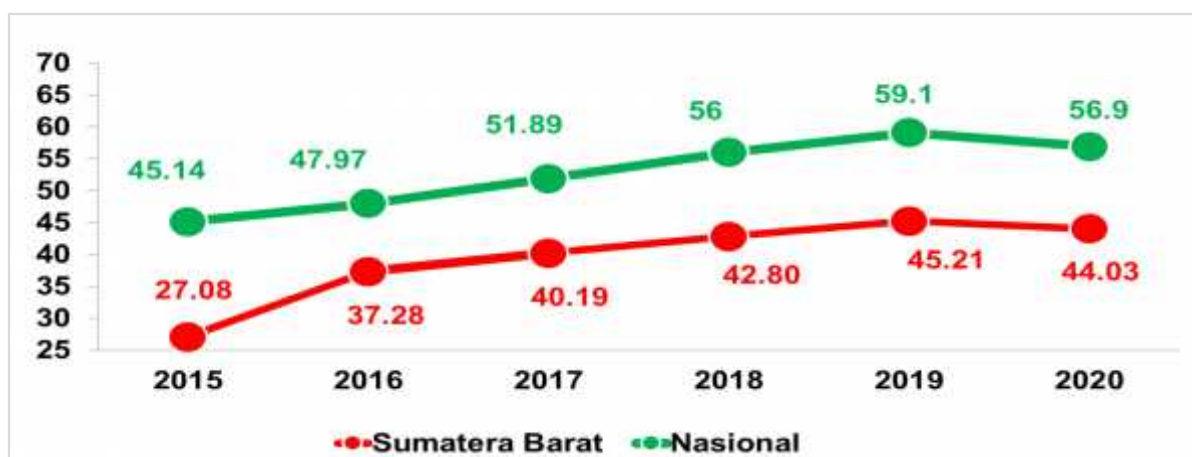
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3.3 PDRB Perkapita

Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB per kapita yang mengindikasikan rata-rata pendapatan masyarakat Sumatera Barat. PDRB per kapita Sumatera Barat atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir, meskipun sedikit terkoreksi pada tahun 2020 yaitu dari Rp. 37,29 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 44, 03 juta pada tahun 2020.

Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan nasional memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Sumatera Barat berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, rata-rata nasional telah mencapai Rp. 56,09 juta. Capaian penting dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi konvergensi atau semakin mengecilnya selisih PDRB per kapita Sumatera Barat dengan rata-rata nasional.

Grafik 2.12
Perbandingan PDRB per Kapita (ADHB) Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2015-2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan PDRB per kapita secara regional di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	26,85	28,10	29,52	30,56	30,47
2. Sumatera Utara	44,39	48,00	51,42	54,90	55,17
3. Sumatera Barat	37,29	40,19	42,80	45,20	44,03
4. Riau	104,86	105,84	110,38	109,09	102,29
5. Jambi	49,49	53,99	58,22	59,88	56,24
6. Sumatera Selatan	43,36	46,31	50,10	53,55	53,50
7. Bengkulu	29,07	31,35	33,82	36,20	36,30
8. Lampung	34,05	36,99	39,71	42,22	41,61
9. Kep.Bangka Belitung	46,40	48,82	50,08	50,91	49,77
10. Kep.Riau	106,50	109,33	116,46	122,23	113,39

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

2.3.4 Laju Inflasi

Daya beli sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh stabilitas harga-harga barang dan jasa. Stabilitas harga ini diindikasikan oleh tingkat inflasi yang turut mempengaruhi perekonomian. Penghitungan tingkat inflasi berupa indeks harga konsumen di Sumatera Barat diwakili oleh Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi Kota Padang pada tahun 2020 adalah sebesar 2,12 %. Sedangkan di Kota Bukittinggi laju sebesar 2,02 %. Dari inflasi kedua kota tersebut maka inflasi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 2,07 %.

Inflasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi antara lain oleh kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minum, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Secara umum inflasi di Sumatera Barat cenderung berada di bawah nasional, kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2020 yang berada di atas inflasi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Padang	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12
Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

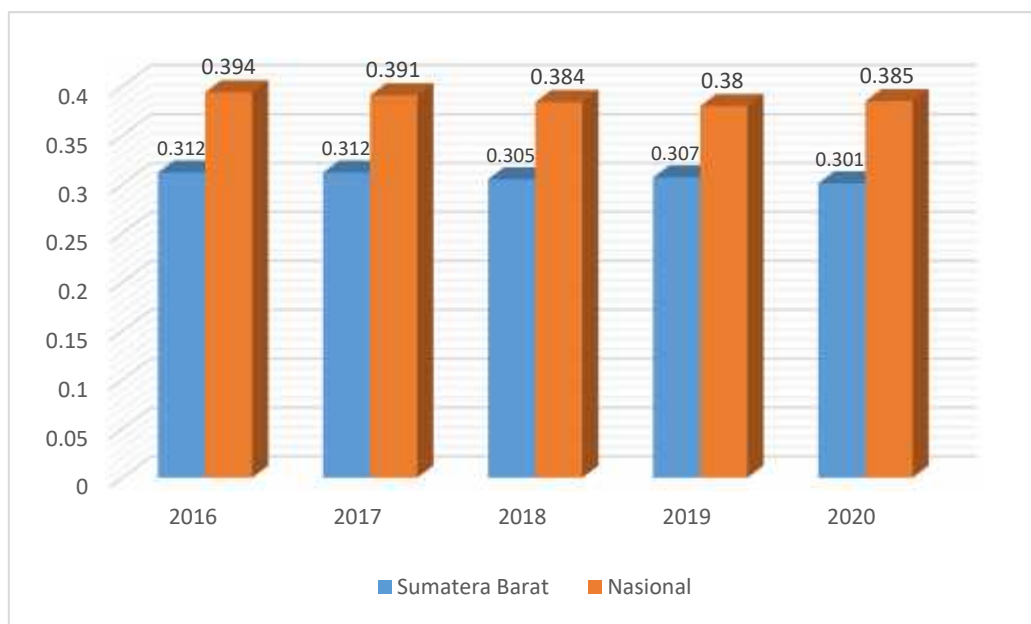
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3.5. Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan pendapatan merupakan indikator penting dalam menilai sejauhmana kinerja pembangunan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan atau pemerataan pendapatan masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Angka Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukan semakin membaiknya distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini pada tahun 2016 sebesar 0,312 telah menurun menjadi 0,301 pada tahun 2020. Dibandingkan angka Koefisien Gini nasional pada tahun 2020 sebesar 0,385 memperlihatkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Sumatera Barat lebih baik daripada angka nasional, seperti terlihat pada Grafik 2.13.

Grafik 2.13
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



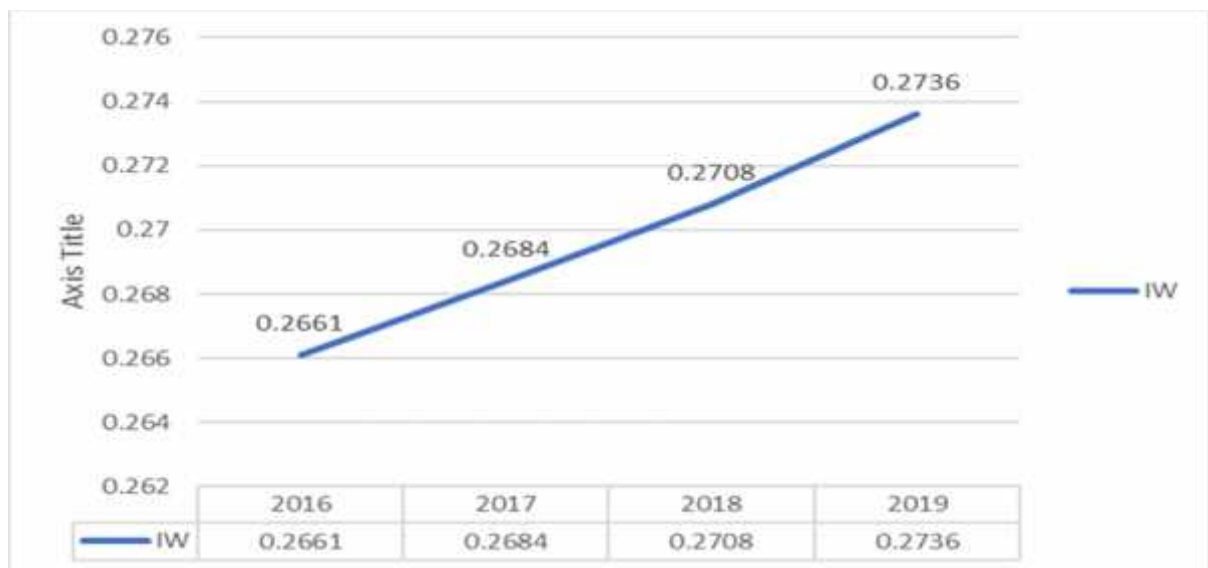
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3.6. Ketimpangan Wilayah

Pemerataan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah, dalam hal ini antar kota/kabupaten di Sumatera Barat dapat diukur menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan nilai variasi PDRB per kapita antar daerah. Berdasarkan nilai indeksnya, ketimpangan wilayah dikategorikan rendah jika indeks Williamson $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang jika nilainya $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi jika indeksnya $>0,7$.

Indeks Williamson Sumatera Barat antara tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan dari 0,2661 menjadi 0,2736. Peningkatan Indeks Williamson ini menandakan terjadinya peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian secara kategori, ketimpangan wilayah Provinsi Sumatera tergolong rendah. Perkembangan indeks ini diilustrasikan oleh Grafik 2.12 Perkembangan penting dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat yaitu telah berkurangnya daerah tertinggal. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2020 hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tergolong sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapat prioritas pembangunan.

Grafik 2.14
Indeks Williamson Sumatera Barat 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.4. Potensi Sektoral

2.4.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Luas lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2020 tercatat seluas 218.440 hektar (Ha), yang terdiri dari lahan sawah irigasi 182.235 Ha dan sawah tadah hujan 35.723 Ha, yang tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Potensi lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 521.677 Ha, yang terdiri dari lahan sawah irigasi 451.615 Ha dan sawah tadah hujan 67.343 Ha. Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

KOMODITI	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi					
Padi (Ton)	2.503.452	2.824.509	2.993.752	2.874.006	2.934.835
Palawija (Ton)	1.058.689	1.312.556	1.341.745	1.219.689	1.232.907
Sayuran dan Buah Semusim (Ton)	639.384	720.981	849.017	1.011.850	1.383.869
Buah-Buahan (Ton)	538.000	584.234	494.829	532.593	748.103
Tanaman Hias (pohon, kg, tangkai)	671.114	403.380	447.721	318.059	477.416
Tanaman Biofarmaka (Kg)	11.921.026	10.082.101	10.215.313	14.813.554	20.110.650
Produktifitas					
Padi (Kw/Ha)	50,90	52,47	51,57	51,17	51,11
Palawija (Kw/Ha)	92,19	84,95	84,30	86,05	84,60
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	133,11	139,26	150,41	146,57	202,68
Buah-Buahan (Kw/Ha)	30,91	33,94	32,92	33,95	
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M ²)	5,91	3,97	7,82	6,76	10,42
Tanaman Biofarmaka (Kg/M ²)	4,01	2,79	2,53	2,22	3,69

Sumber :Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 2.6 terlihat bahwa produksi utama tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami peningkatan seperti padi, pada tahun 2016 sebesar 2.503.452 ton menjadi 2.934.835 ton pada tahun 2020, palawija pada tahun 2016 sebesar 1.058.689 ton menjadi 1.232.907 ton pada tahun 2020, Sayuran dan Buah Semusim dari 639.384 ton pada tahun 2016 menjadi 1.383.869 ton pada tahun 2020.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat tahun 2016 – 2020 diiringi dengan peningkatan produktivitas komoditi seperti padi pada tahun 2016 produktivitasnya sebesar 50,90 kuintal

per hektar menjadi 51,11 kuintal per hektar pada tahun 2020, Sayuran dan Buah Semusim dari 133,11 kuintal per hektar menjadi 202,68 kuintal per hektar pada tahun 2020.

2.4.2 Sektor Perkebunan

Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain. Luas tanam dan produksi perkebunan di Sumatera Barat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan komoditi terlihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Tanam (Ha)						
1	Kelapa Sawit	409.986	411.314	418.420	423.314	324.968
2	Karet	182.765	181.017	182.130	182.348	182.348
3	Kelapa Dalam	87.298	86.493	87.415	87.615	87.572
4	Kakao	159.413	147.784	132.555	108.464	114.719
5	Kopi Arabica	18.168	15.881	14.879	12.452	12.472
6	Kopi Robusta	20.196	18.291	17.646	17.178	17.174
7	Gambir	31.791	27.758	29.433	28.740	28.016
8	Cassiavera	38.966	36.276	32.891	30.370	30.342
Produksi (Ton)						
1	Kelapa Sawit	1.205.301	1.184.259	1.269.926	1.278.245	1.246.989
2	Karet	166.318	156.476	186.197	186.393	167.754
3	Kelapa Dalam	78.902	69.538	80.351	80.380	78.348
4	Kakao	69.535	61.212	61.223	58.579	53.070
5	Kopi Arabica	12.484	9.335	9.272	8.598	8.598
6	Kopi Robusta	10.288	8.697	9.660	9.225	9.186
7	Gambir	17.057	6.157	7.574	7.582	7.582
8	Cassiavera	16.022	9.049	12.065	11.930	8.636

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

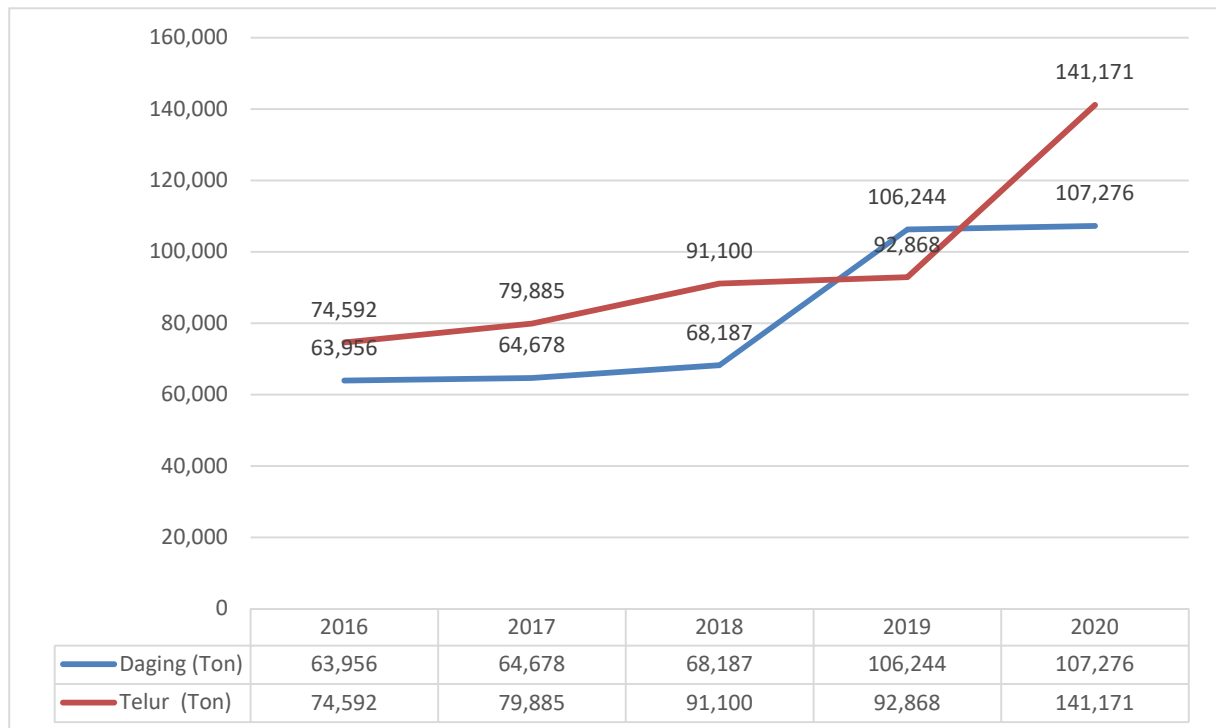
Luas Tanam komoditi perkebunan Tahun 2020 memperlihatkan peningkatan untuk komoditi kakao yaitu 114.719 Ha dibandingkan dengan luas tanam Tahun 2019 sebesar 108.464 Ha, dengan peningkatan 6.255 ha. Untuk peningkatan produksi perkebunan beberapa komoditi menunjukkan penurunan seperti penurunan produksi kelapa sawit, hal ini disebabkan karena berdasarkan pemetaan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat seluas 98.727 ha perlu diremajakan karena umur tanaman sudah melewati umur produktif, dan beberapa tanaman rusak karena terserang hama dan penyakit yang menyebabkan penurunan produksi.

Terkait dengan Produksi kakao Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 53.070 Ton, bila dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 58.579. Penurunan produksi disebabkan banyak tanaman kakao yang sudah tua dan rusak, disamping minat petani dalam melakukan pemeliharaan kakao juga menurun sehingga produksi menjadi tidak maksimal.

2.4.3 Sektor Peternakan

Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan peternakan. Produksi peternakan di Sumatera Barat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan komoditi terlihat pada Tabel 2.10.

Grafik 2.3
Produksi Beberapa Komoditi Peternakan di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Produksi komoditi peternakan Tahun 2020 memperlihatkan peningkatan 107.276 Ton bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2019 sebanyak 106.244 Ton, terjadi peningkatan produksi Tahun 2020 sebanyak 1.032 Ton. Peningkatan Produksi Daging Tahun 2020 walaupun mengalami peningkatan tapi tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pada masa pandemi COVID-19 terjadinya penurunan permintaan pasar dimana pelaku usaha peternakan hanya menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar.

Bila dibandingkan peningkatan produksi daging pada Tahun 2019 sebanyak 106.244 Ton bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 68.187 Ton terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena seiring dengan peningkatan populasi ternak, terutama pada ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelur melalui program kemitraan serta adanya peningkatan fasilitas pembiayaan dari pemerintah.

Untuk produksi telur di Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 141.171 Ton dibandingkan Tahun 2019 yang produksinya 92.868 Ton. Peningkatan produksi telur dimasa Pandemi COVID-19.

2.4.4 Sektor Industri

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi di sektor industri, terutama industri hilir dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Hilirisasi produk sektor-sektor utama tersebut perlu dilakukan agar tidak selalu memasarkan bahan baku. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di Sumatera Barat telah disusun melalui Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) untuk kurun waktu 2018-2038 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018.

Pertumbuhan sektor industri dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pelambatan. Hal ini dapat kita lihat dari sumbangan Sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku Tahun 2016 adalah sebesar 10,11 %. Namun dalam 5 (lima) Tahun terakhir terjadi penurunan menjadi 8,64 % pada Tahun 2020. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri di Sumatera Barat kurang menggembirakan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain SDM industri, sarana prasarana, kelembagaan, kerjasama dan pengembangan wilayah industri. baik faktor internal maupun eksternal. Berikut ini Tabel 2.14 memperlihatkan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.

Tabel 2.14
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10,11	9,71	9,10	8,37	8,64
Laju Pertumbuhan Industri (%)	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Sumatera Barat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terus mengalami pelambatan hingga tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar -0,54%. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sektor industri belum mampu tumbuh seperti yang di harapkan. Grafik 2.4 memperlihatkan pertumbuhan industri pengolahan di Sumatera Barat dibandingkan dengan Nasional selama periode 2016-2020.

Grafik 2.4
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Sumatera Barat
Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya nilai produksi industri kecil menengah (IKM) Tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2018. Nilai Produksi Tahun 2019 sebesar 14.836.288 Juta bila dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp. 11.224.985 Juta, walaupun nilai investasi turun menjadi Rp. 548.852 juta dengan peningkatan tenaga kerja 118.685 orang serta unit usaha sebanyak 36.009 Unit. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.15. Data Tahun 2020 belum tersedia, menurut BPS masih dalam proses perhitungan.

Tabel 2.15
Perkembangan IKM Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
2016	21 944	79 030	1 342 150	14 070 893,29
2017	28 174	95 315	1 191 637	14 323 800,04
2018	35 592	95.315	2 965 503	11 224 985,75
2019	36.009	118.685	548.852	14.836.288,99
2020	NA	NA	NA	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

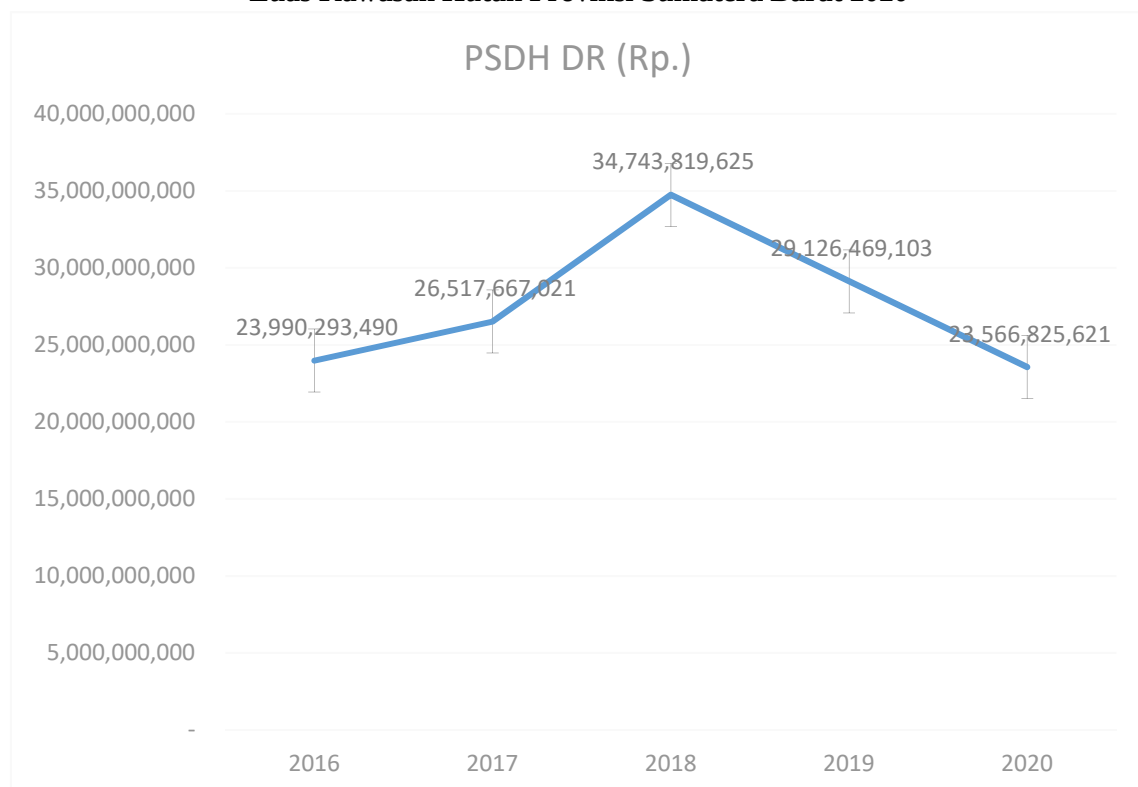
Untuk masa mendatang usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pembentukan ekonomi Sumatera Barat.

2.4.5 Sektor Kehutanan

Sekitar 54,43 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan kawasan hutan. Sumber daya hutan memiliki sejumlah hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Sejumlah kawasan hutan tersebut juga telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan dan korporasi (perusahaan), terutama untuk kawasan hutan dengan fungsi lindung (Hutan Lindung) dan kawasan hutan dengan fungsi produksi (Hutan Produksi). Pemanfaatan hutan tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian Sumatera Barat dan mendatangkan penerimaan negara dalam bentuk iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke kas negara.

Grafik dibawah menyajikan penerimaan negara dalam bentuk PSDH dan DR tahun dalam 5 tahun terakhir 2016-2020. Penerimaan negara tersebut berasal dari produksi kayu dan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti getah, rotan, manau, tabu-tabu, dan getah karet. Dari data tersebut dari tahun 2018 ke tahun 2020 pendapatan dari PSDH dan DR mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan para pemegang hak belum melakukan kegiatan secara optimal, dan pada tahun 2020 ditambah dengan adanya pandemi COVID-19.

Grafik 2.1
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat 2020



Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2021

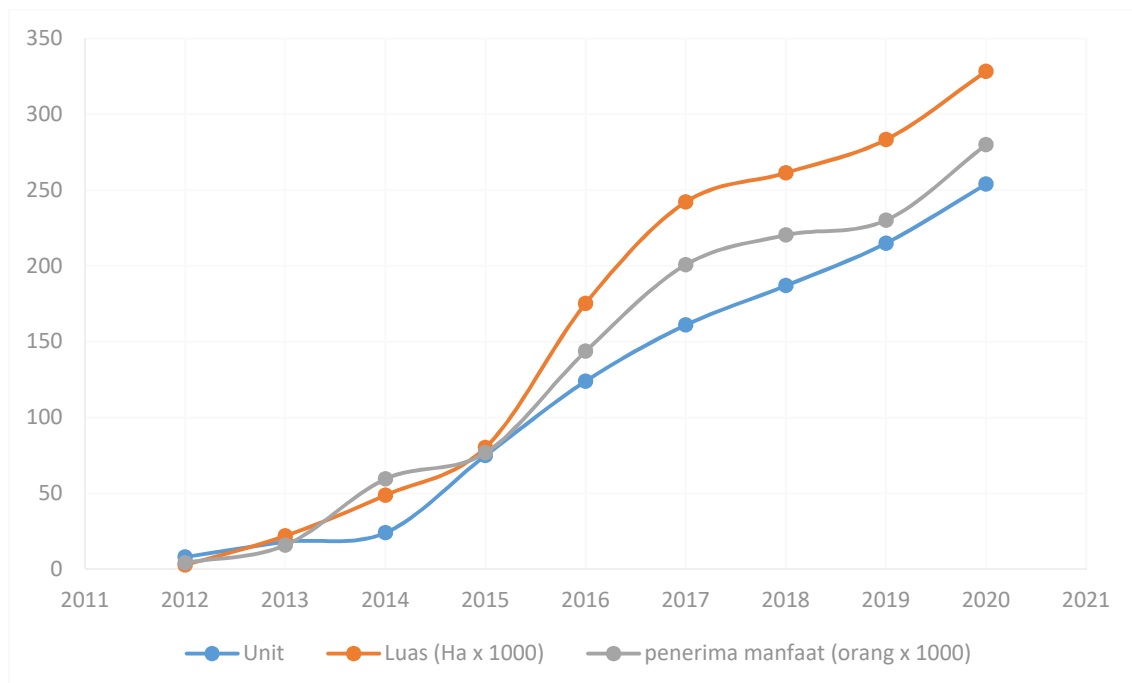
Tabel 2.5.
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	JENIS/Types (Kg, btg/ton)						
		Getah Pinus (kg)	Damar (kg)	Rotan (btg)	Manau (btg)	Tabu-tabu (btg)	Semambu (btg)	Getah Karet (Kg)
1	2020	1.082.530,00	-	25.828,00	345.358,00	42.472,00	-	77.120,00
2	2019	1.329.741,00	92.452,00	127.883,00	635.121,00	218.408,00	1,276	-
3	2018	890.600,00		-	207.773,00	36.985,00	-	116,470
4	2017	1.187.241,00		-	213.000,00	30.000,00	-	31,756
5	2016	3.880.199,00		250,00	212.207,00	41.017,00	-	

Sumber Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan di Sumatera Barat mulai meluas dengan pemberian hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mendorong perluasan skema-skema perhutanan sosial, terutama untuk hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Pada grafik dibawah dijelaskan pelaksanaan Perhutanan Sosial dari tahun 2012 – 2020, dimana terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi unit dan para penerima manfaat dari perhutanan sosial ini.

Grafik 2.2
Pelaksanaan Perhutanan Sosial



Sumber: Dinas Kehutanan tahun 2020

2.4.6 Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a) Pusat Pelayanan Primer (Kota Padang) dan Sekunder (Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto) Pariwisata;
- b) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari :
 1. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau (*Marine Tourism*);
 2. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 3. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);
 4. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara (*Coal Mining Heritage Tourism*);
 5. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (*Whitesand Tourism*).
- c) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
- d) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi :
 1. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.
 2. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya;
 3. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 4. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya;
 5. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 6. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;

7. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
8. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
9. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
10. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
11. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
12. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
13. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
14. Kawasan gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya;

Potensi sumberdaya kepariwisataan Sumatera Barat sangat besar terutama dalam jumlah destinasi wisata termasuk anugerah keindahan alam dan budaya masyarakat Sumatera Barat, hampir disetiap wilayah kabupaten dan Kota di Sumatera Barat terdapat berjenis dan beragam daya tarik wisata yang masih bersifat natural, sehingga perlu usaha untuk meningkatkan daya tariknya menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan nusantara dan mancanegara.

Tabel 2.19
Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat

NO	NAMA DUPP	Wilayahnya	Tema Pengembangan Pariwisata
1	Padang dan sekitarnya	Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan	"Marine adventure tourism"
2	Bukittinggi dan sekitarnya	Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman	"Geopark Tourism"
3	Tanah datar dan sekitarnya	Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota Padang Panjang	"Ancient Minangkabau Tourism"
4	Sawahlunto dan sekitarnya	Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya	"Colonial the Old Mining Town Tourism"
5	Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	"Whitesand Tourism"

Sumber: RIPPAPROV Sumatera Barat, 2014-2025

2.4.7 Kelautan dan Perikanan

Sumatera Barat memiliki panjang garis pantai 1.973,246 km sudah termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200 mil, sehingga total luas perairan Sumatera Barat menjadi 186.580 km². Dengan kondisi laut tersebut maka potensi perikanan laut lebih besar dari pada Perikanan Lepas Pantai dan Samudera. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - 572: Samudera Hindia bagian barat Sumatera Barat dan Selat Sunda.

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Tabel 2.8

Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat

Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Produksi perikanan tangkap (termasuk perikanan perairan umum) (ton)	218.082,80	222.604,40	223.445	226.253,0	218.581,78
b	Produksi perikanan budidaya (ton)	269.837,92	266.991,30	270.440,87	284.320,0	245.498,40
c	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	310,24	233,369	233,20	233,00	61,43

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Pada Tahun 2020 diketahui produksi perikanan sebesar 218.581,78 ton yang terdiri dari produksi perairan laut sebesar 208.556,14 ton dan perairan umum sebesar 10.025,64 ton. Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi sangat penting dari hasil tangkapan adalah ikan tuna, cakalang, dan udang. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada fishing ground utama perairan laut Sumatera Barat, disamping itu ada pula jenis ikan lainnya yang mempunyai nilai tinggi untuk ekspor seperti tenggiri, kakap, kuwe dan Kerapu.

Berdasarkan tingkat produksi masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai produsen perikanan laut terbesar Kabupaten Pasaman Barat.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di kabupaten/kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas dan Danau Di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 54.197 Ha, potensi jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha yang terdiri dari komoditi unggulan nila, mas, lele, gurami dan kerapu. Pada Tahun 2020 produksi perikanan budidaya laut sebesar 61,43 ton dan jumlah produksi budidaya air tawar sebesar 245.498,40 ton pada tahun 2020, jumlah pembudidaya ikan 85.718 orang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi ikan perikanan budidaya ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah sistem kolam, kolam air deras, karamba, jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan Rumpuk laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

-) Kabupaten Pesisir Selatan
-) Kabupaten Kepulauan Mentawai
-) Kabupaten Pasaman Barat

Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di ekosistem pesisir (ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reef), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (spawning ground) dan ekosistem pesisir berupa hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reef), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut. Karena, ekosistem-ekosistem tersebut selain sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (spawning ground) dan pembesaran (nursery ground) dari populasi lain yang membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Terumbu karang di Sumatera Barat banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh proses yang berlangsung secara alami di samping dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, membom ikan, pengambilan karang, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (coral farming).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.9. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (fringing reef). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (patch reef).

Tabel 2.9

Luas Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	1.2557,94
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.238,15
3.	Kabupaten Padang Pariaman	268,47

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	34.515,43
5.	Kabupaten Agam	120,48
6.	Kota Padang	957,23
7.	Kota Pariaman	261,72
	Jumlah	39.619,42

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Hutan Mangrove di Sumatera Barat juga mengalami tekanan perubahan. Sumber utama tekanan hutan mangrove adalah akibat dampak pemanfaatan hutan mangrove secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah pemanfaatan hutan mangrove yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambakan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan mangrove dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan mangrove untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau. Sebaran luas hutan mangrove di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	2.756,09
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.251,00
3.	Kabupaten Padang Pariaman	204,78
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.997,60
5.	Kabupaten Agam	469,87
6.	Kota Padang	403,88
7.	Kota Pariaman	37,49
	Total	20.120,71

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman Barat yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acocoides*, *Halodule universis*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhaulus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*.

Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria* sp dan *Gellidum* sp. Luas padang lamun berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.11

Luas Padang Lamun Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	17
2	Kota Padang	4
3	Kabupaten Padang Pariaman	50
4	Kota Pariaman	-
5	Kabupaten Agam	-
6	Kabupaten Pasaman Barat	75
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	452,85
	Jumlah	598,85

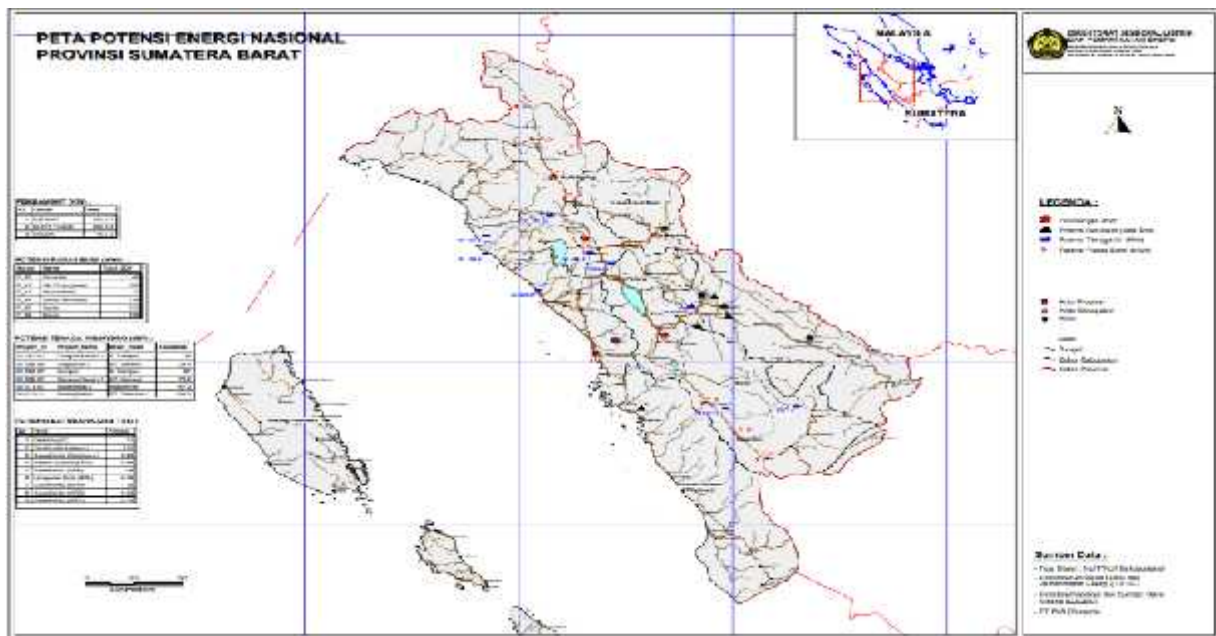
Sumber : Universitas Bung Hatta

2.4.8 Panas Bumi

Potensi panas bumi di Sumatera Barat sejumlah 1.890 MWe yang terdiri dari potensi sumber daya spekulatif 750 MWe, sumber daya hipotesis 140 MWe, dan potensi cadangan terduga sebesar 1.000 MWe. Potensi tersebut berlokasi di Simisoh, Talu, Panti, Lubuk Sikaping, Situjuh, Kota Baru Merapi, Maninjau, Sumani, Pariangan, Surian, Pincurak (dengan potensi sumberdaya spekulatif), Bonjol, Kecamatan Bonjol dengan cadangan terduga sebesar 165 MWe (3 x 55 MWe).

Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Panas Bumi Bonjol melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1150.K/30/MEM/2011 dengan luas 10.100 Ha, telah dilaksanakan pelelangan pada tahun 2012 dan pada saat itu belum ada pemenang karena penawaran melebihi harga patokan tertinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2012, dan akan dilelang kembali pada tahun berikutnya. Kawasan Cubadak, Kabupaten Pasaman dengan potensi cadangan terduga 100 MWe (berdasarkan survei Badan Geologi tahun 2011). Bukit Kili, Kabupaten Solok dengan potensi cadangan sebesar 58 MWe. Gunung Talang, Kabupaten Solok dengan potensi cadangan sebesar 36 MWe. Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan sebesar 194 MWe. Liki-Pinang awan, Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan sebesar 412 MWe.

Gambar 2.4
Peta Potensi Energi Nasional Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

2.5. Pemerintahan

2.5.1 Administrasi Pemerintahan

2.5.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2.5.3 Sumber Daya Manusia

Perkembangan realisasi target kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) terlihat pada table 2.60, dimana indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2017

s.d 2020. Namun demikian angka indeks pencapaian target tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan pada Tahun 2019 realisasi kinerja hanya mencapai setengah (50%) dari target yang ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain : *database* kepegawaian yang belum *up to date*; manajemen ASN belum berjalan secara optimal; tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi yang belum akuntabel; sistim merit belum diterapkan dengan sangat baik; minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; penataan ASN belum dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi daerah; sistim kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN yang perlu terus diupayakan perbaikan; perlunya pengadaan ASN yang berkelanjutan karena adanya data/proyeksi tujuh tahun ke depan akan terjadi PNS pensiun dalam skala besar; kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung terhadap perkembangan teknologi terbaru; kompetensi PNS yang masih rendah dan belum merata; terdapatnya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansinya; serta *database* dan sistim informasi ASN kurang lengkap dan tidak mutakhir serta tidak terintegrasi.

Tabel 2.79
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Profesionalitas ASN	N.A		68	88,43	70	76	72	76,69	50	53,75
2	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	N.A		87	82	89	80,39	92	46	50	39,21

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	1,10	5,03	1,15	1,80	1,17	1,04	1,43	5,20	2,0	3,57
2	Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan	90	98,66	90	98,62	91	98,5	92	99,3	93	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	jabatan										

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti, Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya cukup berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 data pengembangan kompetensi yang diambil adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia saja. Sehingga target ditetapkan sesuai dengan jumlah pengembangan kompetensi yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baru pada tahun 2019 data yang diambil juga berasal dari data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga target dan capaiannya menjadi meningkat. Pada tahun 2020 tercapai realisasi 3,57%, walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19, dimana kegiatan tatap muka dan menimbulkan kerumunan dilarang. Sehingga banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia batal dilaksanakan. Namun dengan adanya pelatihan, sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan secara daring atau online, angka pelaksanaan pengembangan kompetensi tetap tinggi sehingga realisasi dapat melebihi target.

Capaian indikator Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan pun juga terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020 tercapai 100 %. Walaupun pada tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat sedikit penurunan, namun pada tahun 2019 dan 2020 capaiannya kembali naik.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain yakni :

1. Terlaksananya dengan baik program dan kegiatan Pendidikan Kedinasan yang merupakan program urusan penunjang pendidikan dan pelatihan.
2. Berjalannya monitoring dan evaluasi kegiatan dengan baik.

Adanya pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara daring yang dapat diikuti oleh banyak peserta dan efisien dari segi anggaran.

2.6. Sosial Budaya

2.6.1 Sosial

Perkembangan indikator urusan wajib sosial fokus pada pencapaian indikator peningkatan pelayanan terhadap penyandang kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan pelayanan PMKS (%)	16,99	1,10	16,99	1,40	16,99	2,62	16,99	4,06	16,99	5,06

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Penetapan Target Capaian Kerja Urusan Wajib Sosial Tahun 2020 mengikuti Capaian Kinerja tahun-tahun sebelumnya, target yang belum tercapai pada tahun 2020 dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak berjalan (*Refocusing*) pada Tahun 2020

Secara capaian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 1,10% menjadi 5,06% di tahun 2020. Hal ini dikarenakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagian besar melakukan rehabilitasi sosial dalam panti selain dengan melakukan peningkatan kapasitas PMKS yang berada diluar panti.

Adapun program dan kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk remaja, penyandang disabilitas, wanita tuna susila, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar, dan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan peningkatan kapasitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

2.6.2 Budaya

Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan tahun 2020 pada indikator jumlah warisan budaya tak benda (*Intangible*) yang ditetapkan oleh pemerintah sudah baik yaitu sebanyak 34 jenis jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebanyak 30 jenis, Capaian terbaiknya adalah ketika di Tetapkan Ombilin Coal Mining Heritage (OCMH) sebagai warisan dunia, sedangkan untuk indikator jumlah warisan budaya benda (*tangible*) yang ditetapkan pemerintah belum dapat terpenuhi karena belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat provinsi.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan jumlah warisan budaya tak benda (<i>intangible</i>) yang ditetapkan oleh pemerintah	10	80	15	6	20	5	25	65	30	34
2	Peningkatan jumlah warisan budaya benda (<i>tangible</i>) yang	NA	0	10	0	15	0	20	0	25	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ditetapkan pemerintah										

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Faktor pendorong banyaknya warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada tahun 2020 antara lain 1). meningkatnya kesadaran pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat pelaku budaya akan pentingnya pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dibuktikan dengan mulai adanya anggaran untuk pelestarian nilai kebudayaan yang diawali dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, serta 2). sebanyak 18 (delapan belas) pemerintah kabupaten/kota kecuali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru menyusun tahun 2020 ini, telah memiliki dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang berisikan antara lain inventarisasi data-data 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan beserta dengan kondisi nya, permasalahan serta arah kebijakan.

Namun untuk warisan budaya benda masih nihil realisasi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 hal ini disebabkan karena sebagian besar kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak tahun 2018, Penetapan Cagar Budaya/Warisan Budaya Benda dilakukan secara berjenjang oleh TACB kabupaten/kota yang kemudian diteruskan oleh TACB provinsi.

2.6.3 Kriminalitas

Penurunan angka kriminalitas terus diupayakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.31

Tabel 2.31
Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di Sumatera Barat, 2016-2019

NO	KASUS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kejahatan terhadap Ketertiban	4	4	1	1	3
2	Kebakaran/Pembakaran	148	96	66	80	67
3	Perkosaan/melanggar kesopanan	57	53	32	30	31
4	Perjudian	245	202	177	145	107
5	Merusak	600	465	433	265	192
6	Pembunuhan	20	15	17	16	20
7	Penganiayaan	2.305	2.193	1.994	1.782	1.648
8	Penculikan	8	1	4	-	2
9	Pemerasan	336	305	149	131	98
10	Penggelapan	1.118	1.018	934	798	589
11	Penipuan	1.158	1.085	1.060	590	415

NO	KASUS	2016	2017	2018	2019	2020
12	Penadahan	7	2	-	1	5
	Jumlah	6.006	5.439	4.867	3.839	3.177

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan cenderung menurun, dari tahun 2016 yang tercatat sebanyak 6.006 kasus, menjadi 5.439 pada tahun 2017, turun menjadi 4.867 pada tahun 2018, dan terus menurun pada tahun 2019 dan 2020, yang masing-masing menjadi 3.839 dan 3.177 kasus. Jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Sumatera Barat setiap tahunnya adalah kasus penganiayaan lebih dari 40 persen selama periode 2016-2020, kecuali pada tahun 2016 (38,38%). Kasus penipuan merupakan kasus kedua terbanyak di Sumatera Barat, selanjutnya diikuti oleh kasus penggelapan. Sementara kasus yang paling sedikit terjadinya di Provinsi Sumatera Barat adalah kasus penadahan dan kasus penculikan.

Untuk menurunkan angka kriminalitas, selain upaya kerja keras aparat keamanan juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bisa diterjemahkan dengan dua kemungkinan; yaitu angka kriminalitas yang berhasil ditekan atau masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan ke aparat terkait. Dengan demikian, dalam upaya menjaga kestabilan keamanan dan menekan jumlah kasus tersebut membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkannya.

2.7. Kemiskinan Ekstrim

Penghapusan angka kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus dicapai tahun 2030. Komitmen Pemerintah menangani kemiskinan, kini difokuskan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori sangat miskin, dan berharap kemiskinan ekstrem dapat ditangani pada 2024 mendatang.

Pengertian penduduk sangat miskin atau miskin ekstrem menurut Bank Dunia, merupakan **orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,91 dolar AS per/hari atau kurang dari Rp 30 ribu per/hari**. Dengan asumsi hitungan kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 14.130.

Penduduk miskin masih memiliki peluang naik kelas dan mengembangkan usahanya, hal ini berbeda dengan penduduk miskin ekstrem yang umumnya hidup serba pas-pasan, bahkan selalu kekurangan. Penduduk miskin ekstrem tidak memiliki aset produksi dan usaha yang layak untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Jangankan memiliki tabungan, justru mereka sering terperangkap jerat utang sehingga membuat posisi tawar mereka semakin rendah.

Penduduk miskin ekstrem tidak memiliki kemampuan dan peluang mengembangkan usahanya, bahkan mereka hanya berperan sebagai tenaga buruh kasar dengan upah harian yang murah. Kaum buruh tani, buruh

serabutan, atau buruh nelayan merupakan kelompok penduduk miskin ekstrem yang hanya bermodal tenaga tidak memiliki keahlian.

Ciri penduduk miskin ekstrem biasanya rentan atau rapuh, mereka tidak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan tidak memiliki tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Tidak dimilikinya tabungan ditambah tanggungan utang, menjadi kombinasi tekanan sosial yang menyebabkan penduduk miskin masuk dalam perangkap kemiskinan berkelanjutan dan tidak memungkinkan untuk keluar secara mandiri.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin Indonesia terus menurun. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin tercatat masih 11,13 persen, lalu turun menjadi satu digit menjadi 10,19 persen pada September 2020. Dari jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 sebanyak 27,5 juta penduduk miskin, lebih dari 9 juta di antaranya masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim.

Khusus Provinsi Sumatera Barat, BPS mencatat angka per September 2020, jumlah penduduk miskin 403,7 ribu atau 13,06 persen. Atas jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrim termasuk di dalamnya yang tersebar di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah penduduk miskin ekstrim (jiwa) didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Kementerian Sosial. Atas DTKS dimaksud, ditetapkan prioritas wilayah tahap pertama tahun 2022 untuk penanganan kemiskinan ekstrim setiap Provinsi. Berikut wilayah penanganan kemiskinan ekstrim Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Memastikan target 2024, angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai titik nol atau sama sekali habis, harus diakui bukan pekerjaan mudah. Selain dibutuhkan pemutakhiran data keluarga miskin ekstrem untuk mencegah intervensi program menjadi salah sasaran, yang berikutnya pemerintah daerah harus mampu melaksanakan program inovatif penanggulangan kemiskinan daerah.

Selama ini kekeliruan kerap dilakukan, berupa pandangan untuk menolong dan memberdayakan penduduk miskin melalui jalur garis lurus (linier). Ketika pemerintah mengucurkan modal atau pelatihan keterampilan, asumsi yang melandasi bahwa semua itu dapat mendorong perkembangan usaha penduduk miskin hingga memperbaiki taraf ekonomi dan naik level tingkat.

Logika mengedepankan penambahan kapasitas produksi dan memperbesar usaha penduduk miskin ekstrem ini, dalam kenyataannya justru menjadi masalah berulang. Kasus membuktikan, meminta penduduk miskin naik kelas dengan menghadapi pesaing usaha yang lebih mapan, ternyata menjadi titik balik penduduk miskin kembali jatuh dalam kelas sosial lebih miskin. Tidak dimilikinya akses jaringan pasar membuat usaha yang ditekuni penduduk miskin rawan bangkrut karena tidak mampu bersaing di pasar.

Demikian pula dengan mengandalkan program populis seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, dan program Indonesia Pintar, menjadikan pemberdayaan penduduk miskin ekstrem tidak akan pernah terwujud. Upaya program populis ini tidak efektif jika tidak dilandasi upaya

memberdayakan sekaligus melindungi penduduk miskin dari jangkauan pengaruh usaha berskala besar. Memberi kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan taraf kehidupan penduduk miskin ekstrem niscaya hanya bisa dilakukan jika posisi mereka dalam pembagian margin keuntungan diperbaiki.

Jadi beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. *Pertama*, Mengikis nilai budaya negatif yang dapat menghambat proses penanggulangan kemiskinan seperti rasa malas bekerja, apolitis, ketidakberdayaan, dan sebagainya.

Kedua, Meningkatkan kemampuan produktivitas pendapatan melalui perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, penggunaan teknologi, akses jaringan kerja, dan informasi pasar.

Ketiga, Melakukan pemberdayaan kepada populasi miskin karena masyarakat miskin mampu membangun dirinya sendiri jika diberi kebebasan untuk mengatur dan memberdayakan diri sendirinya. Pemerintah daerah hadir memberikan dukungan dan bantuan dengan memperhatikan kondisi budaya dan lokalitas populasi penduduk miskin.

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan perekonomian. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama.

Menurut Adji dkk. (2020) mengutip publikasi Bank Dunia yang berjudul: *Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PBB mengajukan beberapa indikator teknis yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Ini berarti bahwa perspektif yang digunakan menentukan miskin dan tidaknya seseorang pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam penyusunan dokumen RPKD Provinsi Sumatera Barat, TNP2K membagi profil kemiskinan daerah

menjadi dua kelompok bidang besar yakni kemiskinan bidang konsumsi dan kemiskinan bidang non konsumsi, serta beberapa sub bidang dan indikator kinerja (berisi realisasi/capaian dan target) yakni pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, ekonomi, fiskal, pendapatan dan belanja daerah, serta indikator daerah lainnya.

3.1 Profil Kemiskinan Bidang Konsumsi

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis tersebut didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan minimum untuk memperoleh: (i) sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori tertentu; dan (ii) pengeluaran bukan makanan minimum untuk hidup secara layak (Adji dkk, 2020).

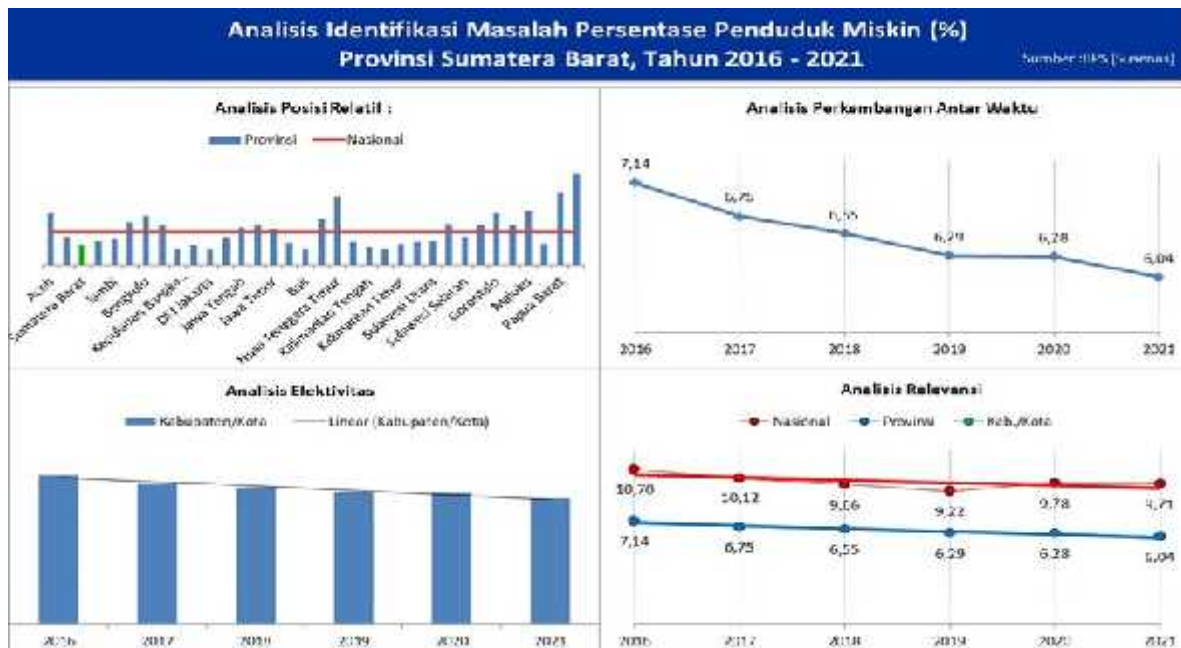
Berdasarkan pengelompokan tersebut maka Kemiskinan Bidang Konsumsi terkait dengan pengeluaran atau belanja makanan dan non makanan yang dilakukan oleh rumahtangga guna memenuhi kebutuhan kalori dan sosial. Beberapa Indikator penting diuraikan untuk mengkaji permasalahan kemiskinan bidang konsumsi di Sumatera Barat meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan baik di perdesaan dan perkotaan.

2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (PO)

Persentase penduduk miskin menurut BPS dan Permendagri 86 tahun 2017, yang menjelaskan formulasi dan pengukuran indikator kinerja daerah, merupakan persentase perbandingan antara jumlah orang miskin dengan jumlah penduduk pada suatu daerah dan waktu tertentu. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Hasil analisis permasalahan persentase penduduk miskin (%) di Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana nilai perbedaan persentase tersebut mencapai 3 digit. Dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan persentase Kemiskinan Ekstrem dan 14 Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Secara Nasional Provinsi Sumatera Barat nomor 6 terendah dari 34 Provinsi yaitu sebesar 5,92% (BPS, Maret 2022) dan di Tingkat Regional Pulau Sumatera, Sumatera Barat peringkat 2 tersendah Kemiskinannya setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,45%

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7,14 Tahun 2016 menjadi 6,04 persen Tahun 2021, yang berarti setiap tahun mengalami penurunan 0,22 persen. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat cukup efektif. Efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut sudah menunjukkan hasil yang maksimal dengan dilihat dari tahun ketahun mengalami penurunan yang relatif stabil

dalam periode 2016-2021. Ini juga diperkuat oleh data persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada bulan Maret 2022 dengan angka 5,29 persen yang menunjukkan angka penurunan dari bulan September 2021 lalu dengan angka 6,04 persen.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 10,70 persen tahun 2016 menjadi 9,22 pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,71 persen tahun 2021.

Demikian pula persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan yang stabil dari tahun 2016 dengan angka sebesar 7,14 menjadi 6,04 sampai September 2021 dan mengalami penurunan lagi menjadi 5,29 pada Maret 2022. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat relevansi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

2.1.2 Persentase Penduduk Miskin Kota

Gambar 3.2 di bawah ini memperlihatkan hasil analisis persentase penduduk miskin di perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Gambar 3.2
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Kota
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada

di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana nilai perbedaan persentase tersebut mencapai 3 digit. Dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan persentase Kemiskinan Ekstrem dan 14 Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Secara Nasional Provinsi Sumatera Barat nomor 6 terendah dari 34 Provinsi yaitu sebesar 5,92% (BPS, Maret 2022) dan di Tingkat Regional Pulau Sumatera, Sumatera Barat peringkat 2 tersendah Kemiskinannya setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,45%

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin kota di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 dengan angka 5,52 persen menjadi angka 4,79 persen pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah perkotaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik namun pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,97 persen akibat bencana pandemi covid19 pada tahun 2020, juga memberikan andil dalam meningkatkan persentase angka penduduk miskin kota. Akan tetapi tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 4,83 persen.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin kota dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan Sumatera Barat cukup efektif. Namun efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan relatif rentan akan bencana sehingga relatif tidak stabil. Beberapa program pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur dan program padat karya secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

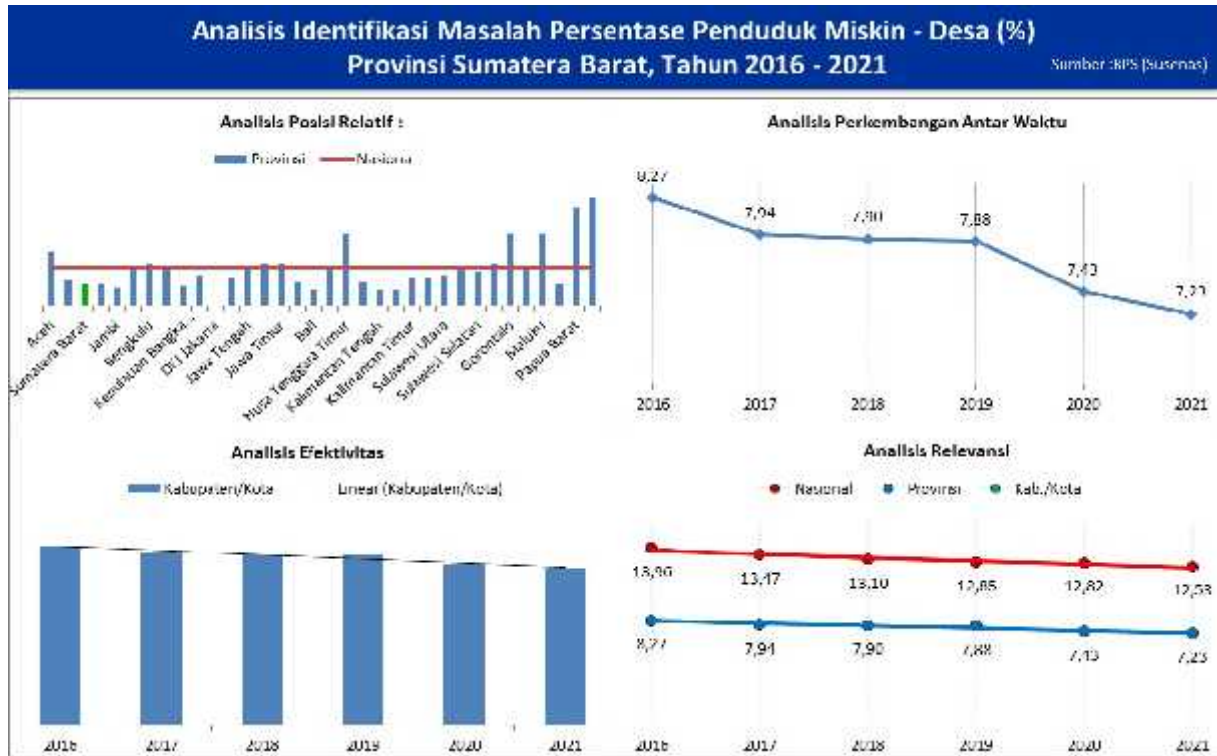
Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin kota di Sumatera Barat juga berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin kota secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari tahun 2016 ke tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi di tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021. Demikian pula persentase penduduk miskin kota di Sumatera Barat sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020, namun mengalami penurunan sampai Maret 2021 dan meningkat kembali dalam jumlah yang sangat kecil pada September 2021. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemi Covid19 secara nasional, yang dampaknya sangat terasa di wilayah perkotaan bagi provinsi Sumatera Barat maupun secara nasional. Ini berarti bahwa terdapat relevansi kemiskinan kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional.

2.1.3 Persentase Penduduk Miskin Desa

Gambar 3.3 di bawah memperlihatkan data persentase penduduk miskin di pedesaan Sumatera Barat Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Gambar 3.3
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Desa
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berada (7,23 persen) di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional (12,53 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke enam persentase penduduk miskin terendah, setelah Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah. Di tingkat regional Pulau Sumatera, persentase penduduk miskin desa di Provinsi di Sumatera berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk desa masih tinggi, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah sudah memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskinnya dibandingkan dari wilayah perkotaan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumahtangga miskin di desa.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator persentase penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Baik di Kota dan di Perdesaan, persentase masyarakat miskin di Sumatera Barat umumnya masuk 10 (sepuluh) besar nasional terendah atau masuk dalam kategori rendah
2. Kemiskinan di wilayah perdesaan berkontribusi agak tinggi terhadap masih tingginya persentase masyarakat miskin. Namun demikian, persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan mendekati rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
3. Walaupun persentase kemiskinan di perkotaan Sumatera Barat berada di bawah persentase kemiskinan Nasional di daerah perkotaan, tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap berusaha menurunkan angka kemiskinan di daerah perkotaan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tingginya persentase masyarakat miskin di perdesaan menunjukkan bahwa intervensi program dan kegiatan selama lima tahun terakhir belum secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi di daerah kantong

kemiskinan perdesaan masih kecil kontribusinya dalam menurunkan biaya hidup masyarakat perdesaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Hasil analisis permasalahan jumlah penduduk miskin (orang) kota dan desa di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, dan Gambar 3.6.

Gambar 3.4
Analisis Identifikasi Permasalahan Jumlah Penduduk Miskin
Nasional Tahun 2021



Gambar 3.5
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kota pada tahun 2021 di Sumatera Barat sebesar 134.530 Jiwa, masih jauh lebih rendah dibanding provinsi di daerah Jawa, Sulawesi dan Papua. Namun dalam skala regional Sumatera, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Sumatera Barat masih berada di atas Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung , namun lebih rendah dibanding dengan kelima provinsi lain di Sumatera. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Provinsi

Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk miskin yang paling rendah yaitu sebesar 49.450 Jiwa

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.5 dan 3.6 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin perkotaan di Sumatera Barat relatif mengalami fluktuatif. Sementara jumlah penduduk miskin di desa cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

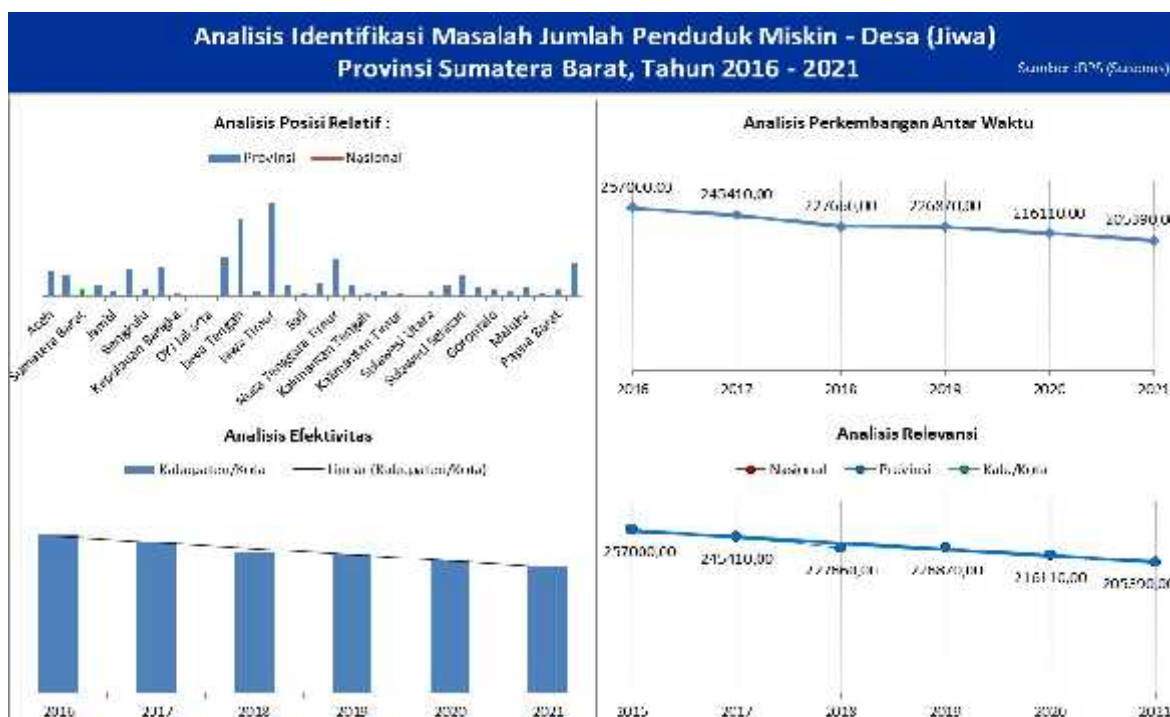
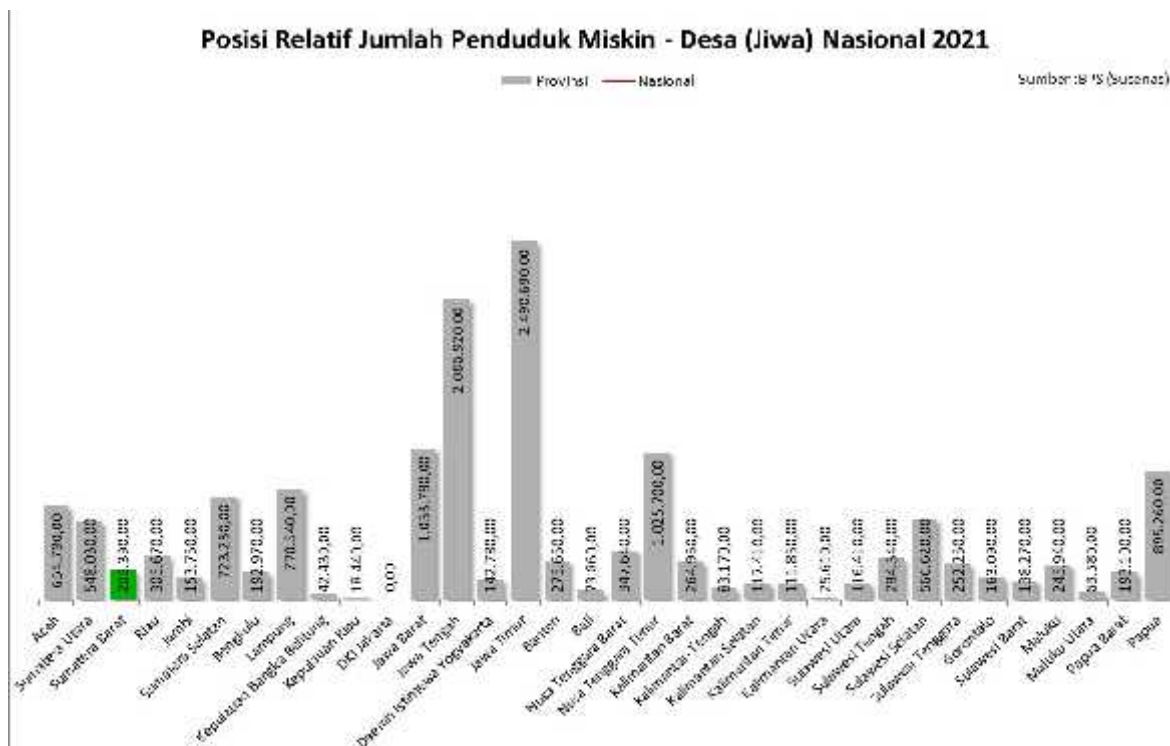
Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumahtangga miskin di desa.

Gambar 3.6
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Desa
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin desa pada tahun 2021 di Sumatera Barat sebesar 205.390 Jiwa, masih jauh lebih rendah dibanding provinsi di daerah Jawa, Sulawesi dan Papua. Namun dalam skala regional Sumatera, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Sumatera Barat masih berada di atas Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, namun lebih rendah dibanding dengan kelima provinsi lain di Sumatera. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan

provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Provinsi DKI Jakarta mempunyai jumlah penduduk miskin yang paling rendah yaitu sebesar 0,00 Jiwa

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin perkotaan di Sumatera Barat relatif mengalami fluktuatif. Sementara jumlah penduduk miskin di desa cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 Jumlah penduduk Miskin Desa sebesar 257.000 jiwa menjadi 205.390 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumah tangga miskin di desa.

3.1.5 Garis Kemiskinan (GK)

Menurut BPS, garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang

dan jasa lainnya. Hasil identifikasi permasalahan garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ditampilkan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7
Analisis Identifikasi Permasalahan Garis Kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, garis kemiskinan di Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional atau menempati urutan ke 9 tertinggi di Indonesia, dimana nilai garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi pertama, kemudian Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kep Riau, Maluku, Papua Barat dan Papua. Jika dibandingkan dengan provinsi lain dalam regional Sumatera, garis kemiskinan di Sumatera Barat menempati urutan kedua dari sepuluh provinsi. Secara Nasional Garis Kemiskinan tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa harga makanan dan non makanan di Sumatera Barat terbilang cukup tinggi.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir sebesar Rp. 425.141 tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 568.703 pada Tahun 2021. Peningkatan ini memicu peningkatan jumlah penduduk miskin terutama bagi masyarakat yang pertumbuhan pendapatannya sangat lambat.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi di Sumatera Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat

kurang efektif. Ketidakefektifan ini diduga bersumber dari intervensi kebijakan yang belum mampu meningkatkan secara signifikan pendapatan perkapita masyarakat. Di lain pihak, meningkatnya harga komoditi untuk bahan kebutuhan pokok (makanan) diduga karena harga sarana produksi pertanian dan perikanan yang cukup tinggi sehingga produsen menerapkan harga lebih tinggi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi belum sepenuhnya membantu kelancaran distribusi barang guna menjamin ketersediaannya sehingga harga barang cenderung tinggi dan fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari sisi pengendalian harga belum efektif.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi dari peningkatan garis kemiskinan provinsi Sumatera Barat, hampir berbanding lurus dengan peningkatan garis kemiskinan secara nasional yang cenderung meningkat tipis. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Nasional dan Sumatera Barat hampir sama, dari tahun 2018-2021 peningkatan garis kemiskinan Sumatera Barat melebihi nasional. Ini menunjukkan bahwa peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat, tidak serta merta meningkatkan garis kemiskinan nasional. Ini berarti bahwa terdapat provinsi lain yang perkembangan garis kemiskinan yang menurun atau rendah dalam lima tahun terakhir dan umumnya provinsi tersebut berada di wilayah regional Sumatera.

Kesimpulan

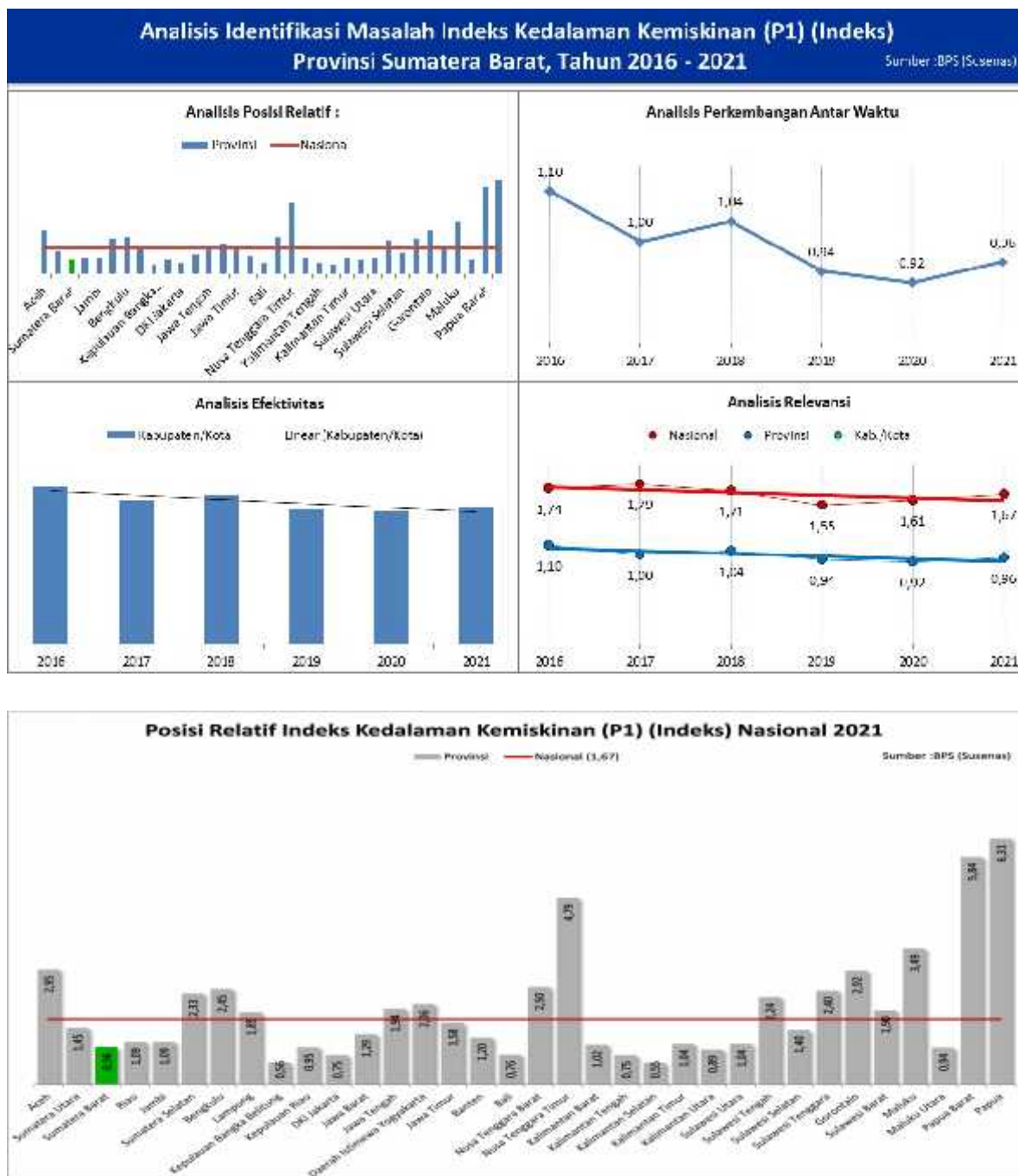
1. Berdasarkan analisis relatif, besarnya garis kemiskinan di Sumatera Barat masih dalam kategori cukup tinggi (10 besar) di Indonesia yaitu sebesar Rp. 568.703
2. Selain garis kemiskinan yang cukup tinggi, besarnya mengalami peningkatan yang cukup besar dengan nilai perubahan rata-rata Rp 28.703 per tahun. Walaupun secara nasional terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan, namun perubahan peningkatan garis kemiskinan Sumatera Barat lebih tinggi dibanding nasional.

3.1.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8
Analisis Identifikasi Permasalahan Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021

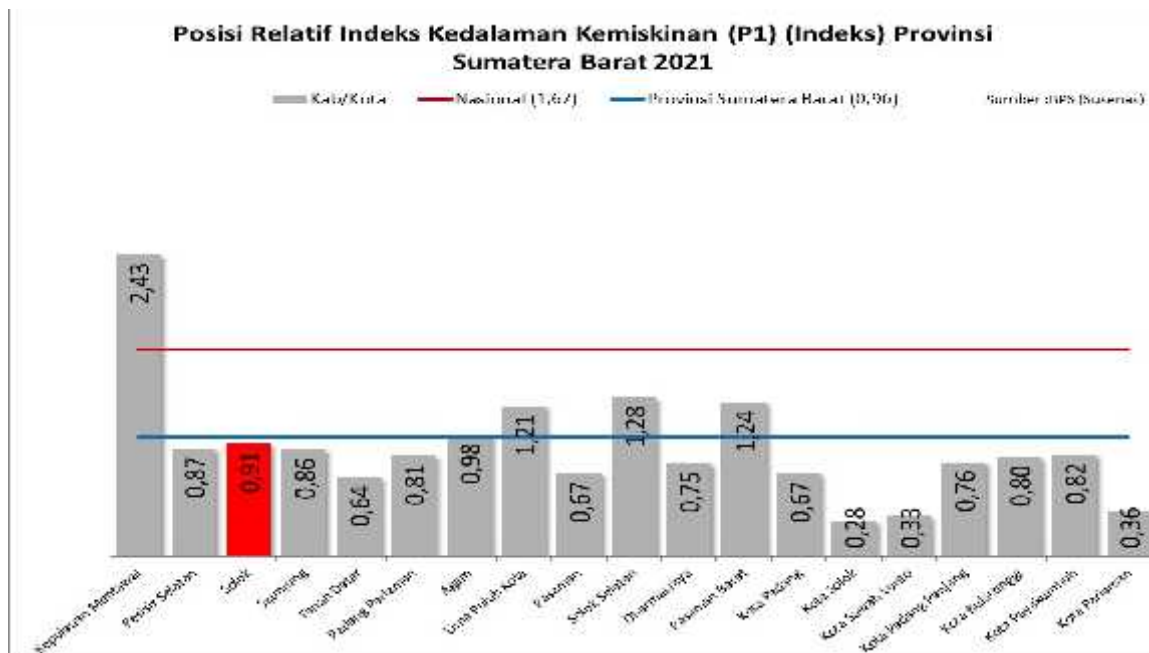
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2021, berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 0,96. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, terdapat 6 (enam) provinsi seperti Aceh, NTT, Maluku dan Papua Barat dan Papua yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumatera indeks kedalaman kemiskinan yang terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan untuk Wilayah Indonesia, Provinsi yang Indeks Kedalaman Kemiskinannya berada di bawah Provinsi Sumatera Barat adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2021



No.	Provinsi / Kabupaten Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Menurut Kab/Kota											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Nasional	2,21	2,08	1,90	1,89	1,75	1,84	1,74	1,79	1,71	1,55	1,61	1,67
	Sumatera Barat	1,49	1,50	1,24	1,27	0,75	0,98	1,10	1,00	1,04	0,94	0,92	0,96
1	Kepulauan Mentawai	5,06	3,94	3,21	2,02	2,21	2,83	2,56	2,58	2,42	1,87	2,84	2,43
2	Pesisir Selatan	1,66	1,81	1,11	0,88	0,76	0,84	1,17	1,07	0,77	0,76	0,81	0,87
3	Solok	1,68	1,62	1,09	1,36	1,05	1,12	1,19	1,11	1,40	0,71	1,16	0,91
4	Sijunjung	2,19	1,16	1,09	1,57	1,10	1,05	1,25	1,12	0,88	0,94	0,97	0,86
5	Tanah Datar	0,86	0,65	0,80	0,35	0,48	0,45	0,81	0,55	0,87	0,42	0,42	0,64
6	Padang Pariaman	1,36	1,61	1,45	1,18	1,11	1,06	1,36	1,13	1,25	1,02	0,67	0,81
7	Agam	1,36	1,29	0,78	0,98	0,77	0,89	0,96	0,96	1,13	0,82	0,79	0,98
8	Lima Puluh Kota	1,96	1,23	1,13	1,07	0,82	0,89	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78	1,21
9	Pasaman	1,30	1,45	1,01	1,15	1,06	1,09	0,42	0,80	0,93	0,59	0,70	0,67
10	Solok Selatan	1,33	1,39	1,24	1,20	0,62	1,06	1,23	0,89	1,03	0,84	0,79	1,28
11	Dharmasraya	1,83	1,07	1,40	1,14	0,90	1,04	1,21	0,66	0,70	0,89	0,71	0,75
12	Pasaman Barat	1,40	1,00	0,94	0,74	0,63	1,33	1,09	1,17	1,22	0,81	0,62	1,24
13	Kota Padang	1,10	0,80	0,91	0,53	0,43	0,54	0,55	0,54	0,73	0,63	0,45	0,67
14	Kota Solok	1,15	1,06	0,68	0,48	0,57	0,49	0,13	0,62	0,42	0,29	0,27	0,28
15	Kota Sawah Lunto	0,19	0,25	0,26	0,32	0,23	0,18	0,12	0,29	0,27	0,23	0,07	0,33
16	Kota Padang Panjang	1,06	0,60	1,17	0,80	0,79	0,54	0,66	0,94	0,88	0,53	0,46	0,76
17	Kota Bukittinggi	0,69	0,99	0,97	0,93	0,95	0,93	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56	0,80
18	Kota Payakumbuh	1,59	1,41	1,27	0,65	0,80	0,79	0,87	0,75	0,71	0,46	0,71	0,82
19	Kota Pariaman	0,89	0,46	0,73	0,47	0,75	0,58	0,90	0,59	0,68	0,49	0,49	0,36

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan namun sifatnya berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks yang naik turun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar (1.10), menurun ditahun 2017 (1.00), meningkat kembali menjadi (1.04) pada 2018 dan kembali menurun di tahun

2019 (0,94). Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat mencapai (0,92) dan naik lagi menjadi

Ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam berbelanja sangat dipengaruhi konsistensi pendapatan dari matapencahariannya dan perubahan dalam harga-harga barang pembentuk garis kemiskinan. Trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin membaik.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan fluktuasi indeks yang berarti sangat rentan akan perubahan (tidak stabil). Ini berarti bahwa intervensi yang diberikan hanya efektif pada saat program dan kegiatan diberikan ke masyarakat miskin. Namun pada saat masa proyek (intervensi) berakhir, maka perilaku dan kondisi masyarakat kembali seperti pada saat intervensi belum diberikan.

Kondisi ini terjadi jika intervensi yang diberikan tidak tepat sasaran, pendampingan tidak bersifat jangka panjang sehingga tidak menyebabkan adanya perubahan perilaku produksi masyarakat sasaran ke arah yang lebih baik, dan output yang dihasilkan masyarakat terutama petani dan nelayan tidak terdistribusi secara kontinyu dan kurang bernilai tambah.

Menurut Alif Basuki (2007), ada dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, kedua adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan haruslah berperspektif kepada hak.

Analisis Relevansi

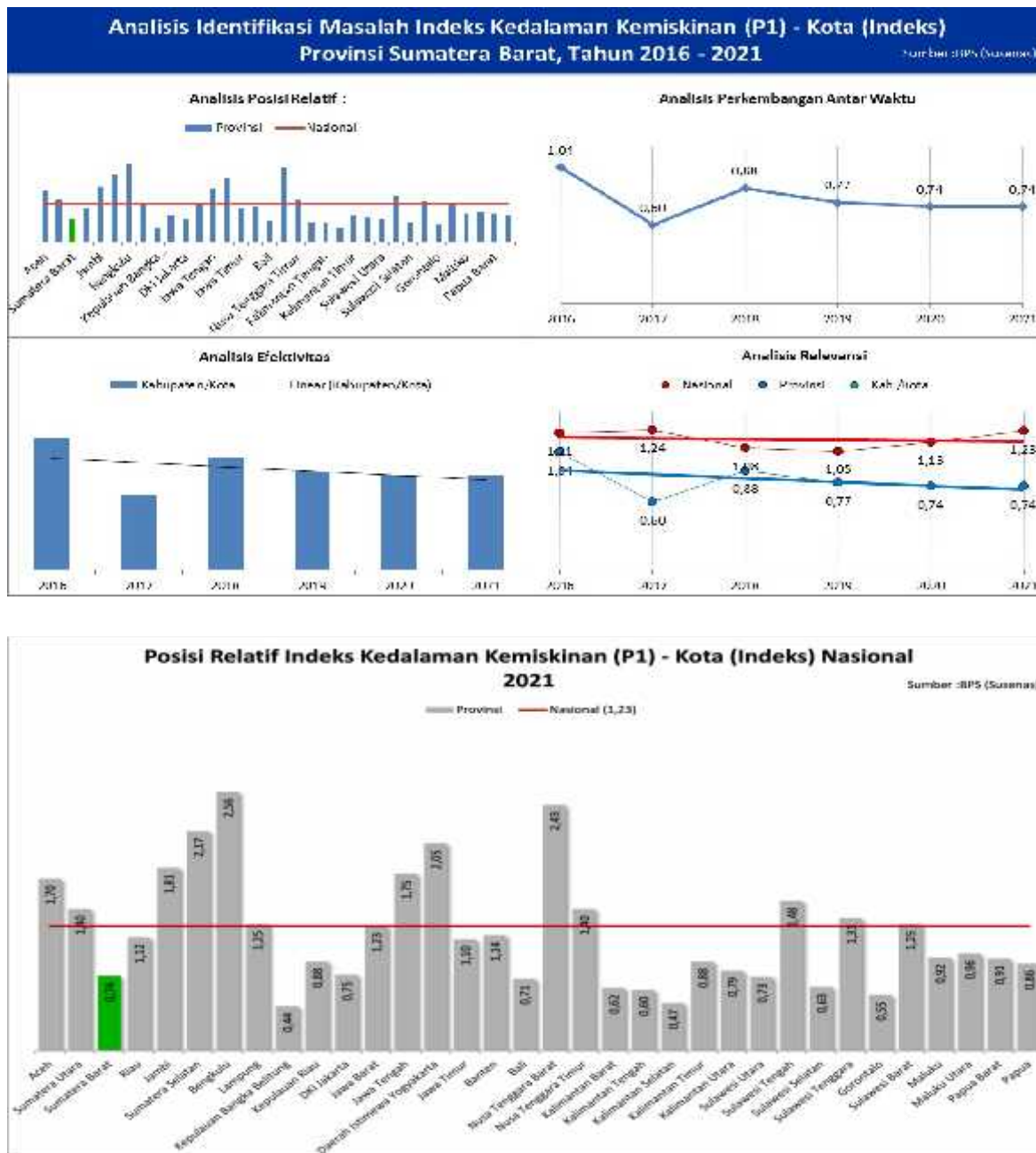
Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Perbedaannya terletak pada tingginya fluktuasi dalam perubahan indeks di Provinsi Sumatera Barat. Kesamaan yang ditunjukkan baik nasional maupun tingkat provinsi Sumatera Barat ditunjukkan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemic Covid19 secara nasional, dan dampaknya bagi provinsi Sumatera Barat baru terasa pada September 2020, dengan adanya pembatasan kegiatan dalam mikro. Peningkatan indeks kemiskinan pada tahun 2020 umumnya disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat sehingga menurunkan kegiatan ekonomi terutama di sektor transportasi dan sektor produksi lainnya.

3.1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota (P1)

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks kedalaman kemiskinan kota, maka Gambar 3.9 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.

Gambar 3.9
Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Kedalaman Kemiskinan-Kota
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,74, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 1,23. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 8 (delapan) provinsi seperti Aceh, Jambi Bengkulu, NTB, Sumatera Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan DIY

yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan kota yang jauh lebih tinggi dari Sumatera Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa baik indeks kedalaman kemiskinan kota maupun desa berada di bawah rata-rata nasional, dan masuk 10 besar provinsi yang memiliki indeks kedalaman terendah Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia bagian Timur yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih baik dari salah satu kategori baik desa maupun kota. Misalnya Dua Provinsi Papua yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan kota yang lebih rendah (lebih baik) dibanding kemiskinan desa sehingga arah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terfokus pada wilayah pedesaan.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan kota di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan, Pada Tahun 2016 Indeks Kemiskinan Kota sebesar 1,04 menurun menjadi 0,60 pada tahun 2017 kemudian meningkat lagi tahun 2018 menjadi 0,88 sampai akhirnya menurun menjadi 0,74 pada tahun 2021.

Analisis Relevansi

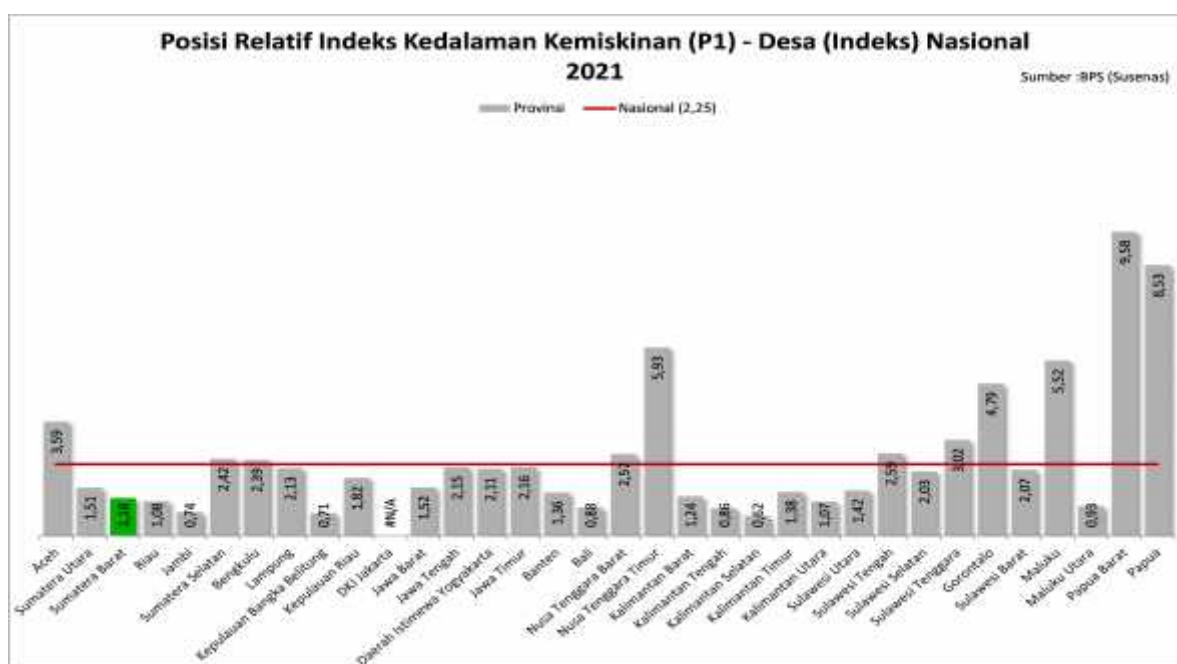
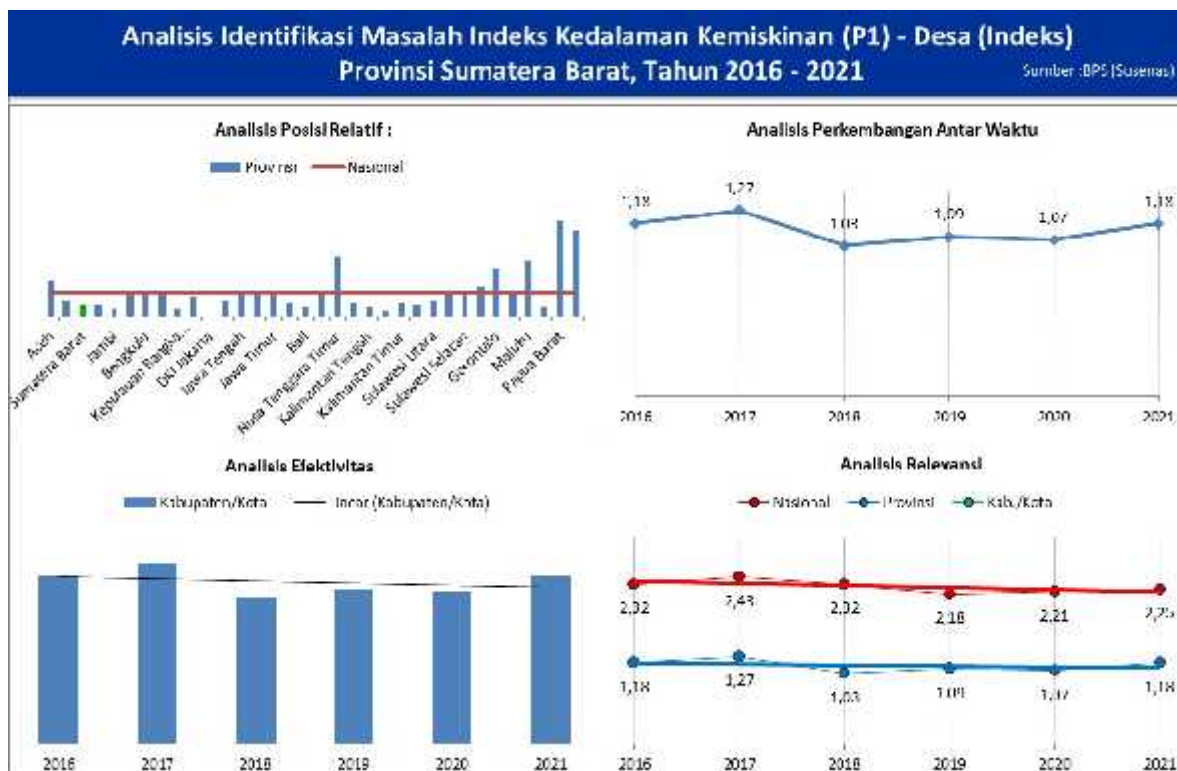
Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan kota di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun perubahan indeks kedalaman Kemiskinan Kota di Sumatera Barat jauh lebih rendah dibanding nasional.

3.1.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa (P1)

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks kedalaman kemiskinan desa, maka Gambar 3.10 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.

Gambar 3.10
Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Kedalaman Kemiskinan- Desa
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026



Analisis Posisi Relatif

Jika ditinjau dari indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Sumatera Barat (Gambar 3.10) pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 1.18, juga berada di bawah rata-rata nasional sebesar 2,25. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 6 (enam) provinsi seperti seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, dan Aceh yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan desa yang lebih tinggi dari Sumatera Barat. Sementara untuk Wilayah

Sumatera, Provinsi Sumatera Barat diatas Provinsi Jambi dengan indeks kedalaman kemiskinan desa sebesar 0,74 kemudian Riau sebesar 1,04 dan Bangka Belitung sebesar 0,71.

Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa untuk wilayah Indonesia yang terendah adalah Bangka Belitung sebesar 0,71. Untuk Wilayah Jawa masih diatas Provinsi Sumatera Barat. Untuk Pulau Kalimantan yang berada di bawah Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara kemudian Provinsi Bali dan Maluku Utara,

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan desa di Sumatera Barat, walaupun cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2017 (1,03), naik menjadi (1,09) tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi (0,18). Fenomena perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di desa dan kota di Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana tahun 2017 mengalami penurunan, dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan desa dalam lima tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat (Gambar 3.10), dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat belum efektif pelaksanaannya terutama di daerah perdesaan. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan desa selain dipengaruhi dampak bencana alam (gempa, likuifaksi dan tsunami) tahun 2018, juga dipengaruhi oleh pandemi Covid19 tahun 2020. Beberapa kasus intervensi program penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang salah sasaran, bukan masyarakat yang dikategorikan miskin. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi di daerah pedesaan berjalan lamban.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks kedalaman kemiskinan kota di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun berbeda dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan desa di Sumatera Barat yang berbanding terbalik dengan penurunan indeks secara nasional, atau ada kecenderungan peningkatan dalam indeks yang dicapai oleh Sumatera Barat. Peningkatan indeks kemiskinan desa pada tahun 2021 di Sumatera Barat tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan desa secara nasional.

Kesimpulan

1. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat baik di kota maupun desa termasuk dalam kategori Rendah (masuk dalam 10 besar) di Indonesia, dan berada di bawah rata-rata nasional.
2. Indeks kedalaman kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kemiskinan kota. Indeks kedalaman kemiskinan kota di

Sumatera Barat cukup rendah namun tidak lebih baik dari beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia terutama Papua.

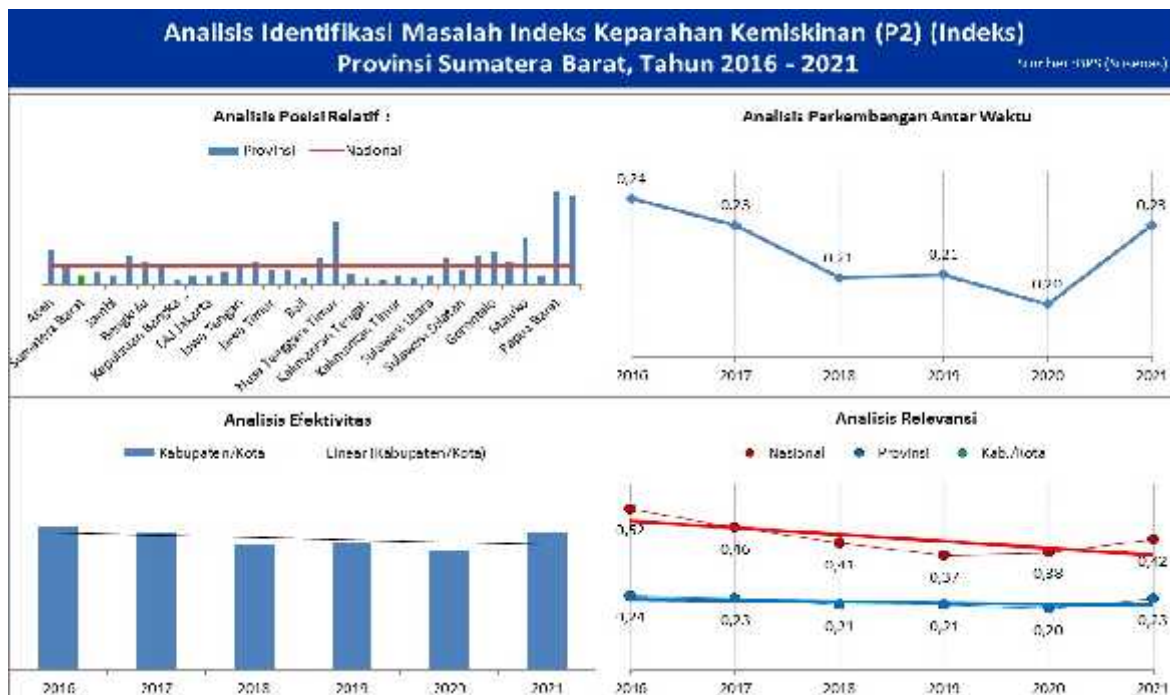
3. Dari sisi perkembangan antar waktu, dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan desa di Sumatera Barat mengalami penurunan, sementara indeks kedalaman kemiskinan kota mengalami berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

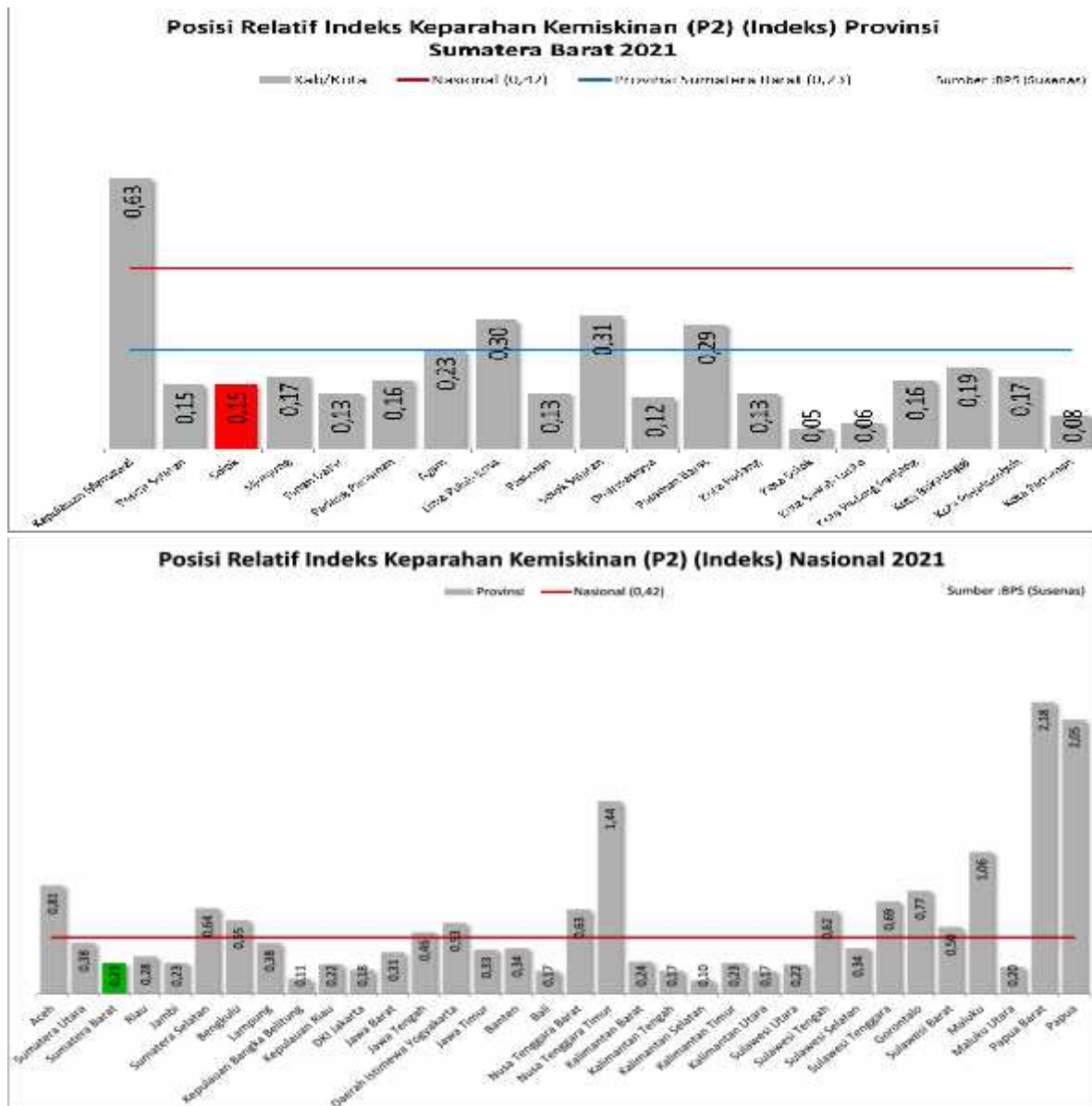
3.1.9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11
Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Keparahan Kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



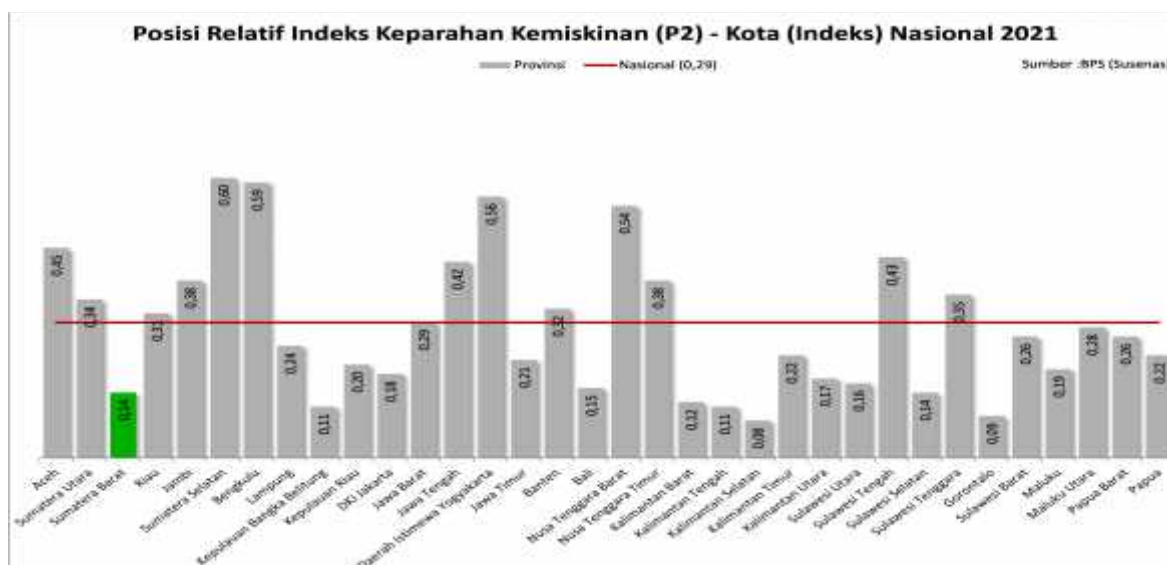


Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2021 yang sebesar (0,23) berada di bawah rata-rata nasional sebesar (0,42). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat jauh lebih baik dari 4 provinsi yakni Provinsi Aceh, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada diatas Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.11 dan Kepulauan Riau (0,22)

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2021 indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,24 dan terus turun tahun berikutnya sampai tahun 2020 sebesar 0,20. Akan tetapi pada tahun 2021 naik lagi menjadi sebesar 0,23. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,14, sudah berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,29. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 7 (tujuh) provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Sulawesi Tengah yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang jauh lebih tinggi dari Sumatera Barat, juga terdapat satu provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang sama dg Sumatera Barat yakni DIY dan Sulawesi Selatan. Kemudian Provinsi yang berada dibawah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kepulauan Bangka Belitung (0,11), Kalimantan Barat (0,12), Kalimantan Tengah (0,11), dan Gorontalo (0,09) Kalimantan Selatan (0,08). Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota terendah di Indonesia. Di tingkat regional Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan kota tertinggi adalah Sumatera Selatan (0,60) dan yang terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,11).

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Serupa dengan gabungan indeks keparahan kemiskinan, Gambar 3.12 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan kota di Sumatera Barat cenderung menurun, walaupun pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan (0,21), akan tetapi terus menurun samapai dengan Tahun 2021 menjadi (0,14). Berbeda dengan indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga berdampak secara total pada indek keparahan kemiskinan. Perkembangan dalam lima tahun terakhir pencapaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan indeks keparahan desa juga selalu lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan kota. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan desa di Sumatera Barat mencapai 0,31.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau indeks keparahan kemiskinan kota dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat (Gambar 3.12) menunjukkan trend penurunan sampai berfluktuatif pada tahun 2018 dan 2019. Ini dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat cukup efektif pelaksanaannya di wilayah perkotaan. Sebaliknya trend indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yang berarti bahwa penerapan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang efektif.(lebih banyak diarahkan kepada penanganan Covid-19)

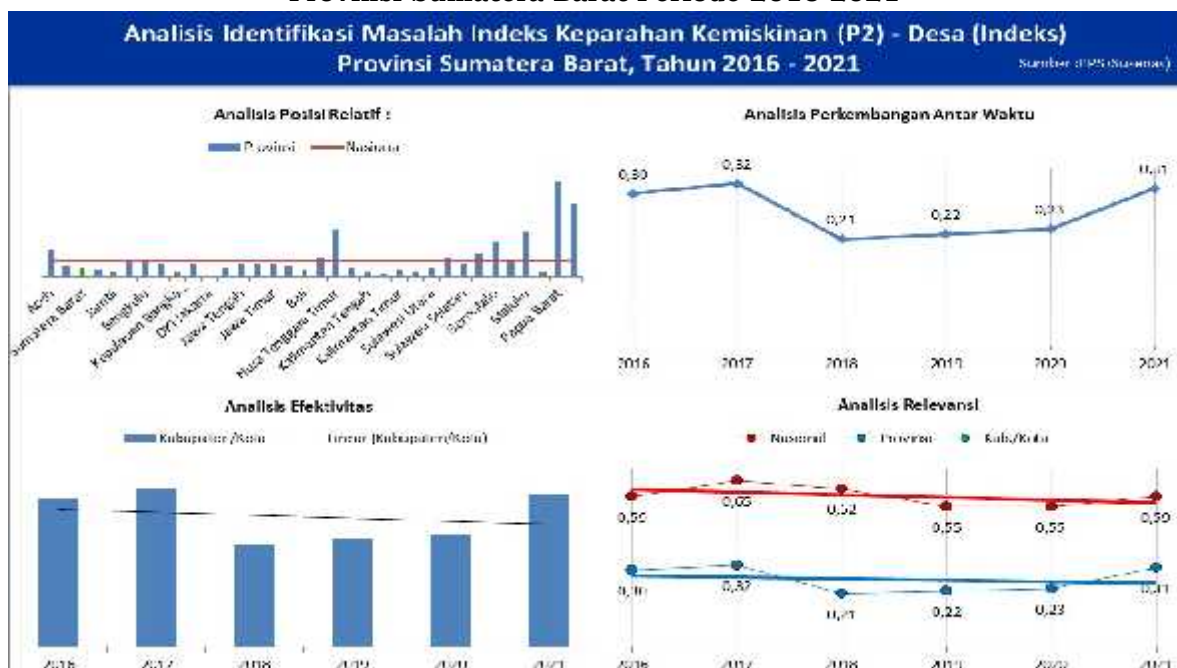
Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks keparahan kemiskinan kota di Sumatera Barat berbanding terbalik dengan penurunan indeks secara nasional. Pada tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan kota di Sumatera Barat Turun menjadi 0,17 dari 0,25 pada tahun 2016, sementara untuk Nasional Indeks keparahan nya meningkat menjadi 0,30. Begitu juga pada Tahun 2018 dan 2019, untuk Sumatera Barat terjadi Peningkatan, tetapi Untuk Nasional terjadi penurunan.

3.1.11. Indeks Keparahannya Kemiskinan Desa

Jika dikaji secara spesifik perbandingan antara indeks keparahan kemiskinan desa, maka Gambar 3.13 menampilkan hasil analisis identifikasi masalahnya.

Gambar 3.13
Analisis Identifikasi Permasalahan Indeks Keparahannya Kemiskinan-Desa
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.13 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan desa Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,31, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,50. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, juga terdapat 3 (tiga) provinsi seperti Aceh, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua yang memiliki indeks keparahan kemiskinan desa yang jauh lebih tinggi dari Sumatera Barat, juga terdapat satu provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan kota yang sama dg Sumatera Barat yakni Kalimantan Barat. Provinsi Kepulauan bangka Belitung (0,12) dan Kalimantan Selatan (0,11) merupakan provinsi yang memiliki indeks keparahan kemiskinan desa terendah di Indonesia. Di tingkat regional Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan Desa terendah adalah Kepulauan bangka Belitung (0,12) dan yang tertinggi adalah DI Aceh.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Serupa dengan gabungan indeks keparahan kemiskinan, Gambar 3.13 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan desa di Sumatera Barat cenderung menurun dan berfluktuatif dan akhirnya meningkat tahun 2021 menjadi (0,31) , walaupun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan (0,21). Indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga berdampak secara total pada indek keparahan kemiskinan. Perkembangan dalam lima tahun terakhir pencapaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan indeks keparahan desa juga selalu lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan kota.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau indeks keparahan kemiskinan desa dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat (Gambar 3.13) menunjukkan trend penurunan sampai berfluktuatif pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat kurang efektif pelaksanaannya di wilayah perdesaan. Sebaliknya trend indeks keparahan kemiskinan desa yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yang

berarti bahwa penerapan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang efektif.(lebih banyak diarahkan kepada penanganan Covid-19)

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya penurunan indeks keparahan kemiskinan desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan indeks secara nasional. Namun berbeda dengan capaian indeks keparahan kemiskinan kota di Sumatera Barat yang berbanding terbalik dengan penurunan indeks keparahan kota secara nasional. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan desa pada tahun 2021 di Sumatera Barat tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan indeks keparahan kemiskinan desa secara nasional.

Kesimpulan

1. Di lihat dari Posisi Relatif, Indeks keparahan kemiskinan-Kota Sumatera Barat (0,14) masuk dalam kategori rendah (urutan ke-6) setelah Kepulauan Bangka Belitung (0,11), Kalimantan Barat (0,12), Kalimantan Tengah (0,11), dan Gorontalo (0,09) Kalimantan Selatan (0,08) di Indonesia, dan jauh di dibawah rata-rata nasional (0,29). Namun secara spesifik, indeks keparahan kemiskinan kota kelima Provinsi tersebut hamper dsam dan sebanding dengan Provinsi Sumatera Barat.
Sebaliknya Indeks keparahan kemiskinan-desa berada pada 10 (sepuluh) terendah di Indonesia (0,31) jauh berada di bawah Nasional (0,59) dan Indeks keparahan kemiskinan di desa di Sumatera Barat masih lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan kota.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, dalam lima tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan kota di Sumatera Barat cenderung berfluktuatif dan indikasi meningkat, sementara indeks kedalaman kemiskinan kota mengalami penurunan.
3. Dari sisi Efektifitas, Indeks Keparahen Kemiskinan Kota menurun dan cenderung berfluktuatif tetapi cukup efektif pelaksanaanya di wilayah perkotaan, sebaliknya Indeks Keparahen Kemiskinan Desa, kurang efektif dan lebih banyak diarahkan kepada penanganan Covid-19

3.2 Profil Kemiskinan Non Konsumsi

Secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia, selain disebabkan oleh tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan dasar, juga berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kewirausahaan, pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta rendahnya kemampuan keuangan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk merealisasikan program dan kegiatan (intervensi kebijakan) penanggulangan kemiskinan.

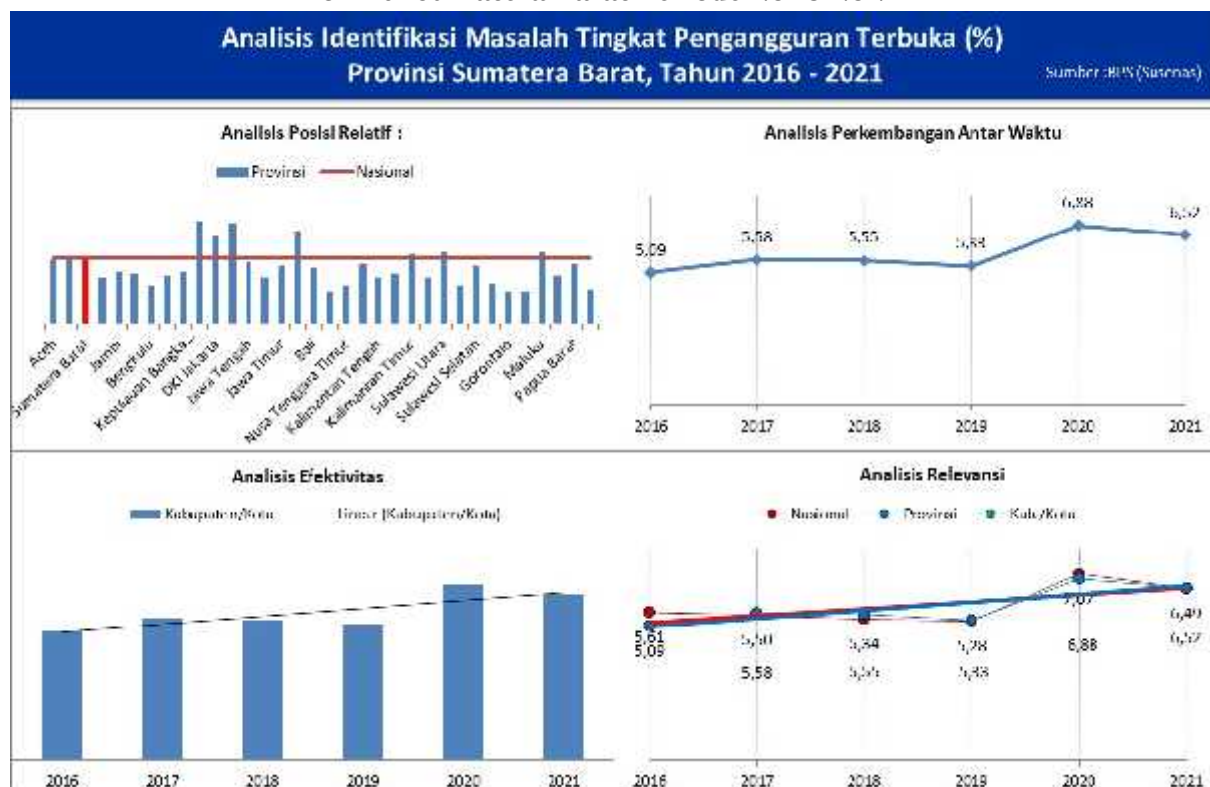
3.2.1 Bidang Ketenagakerjaan

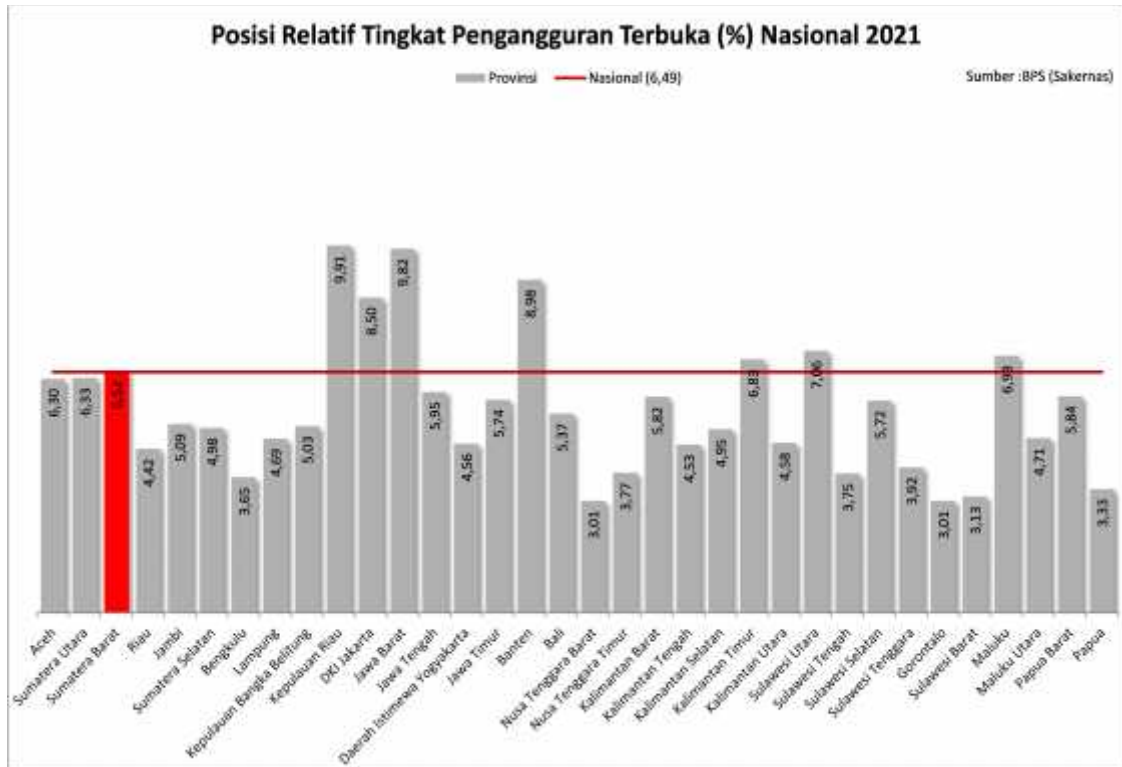
Beberapa indikator yang dibahas dalam mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sementara TPAK sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2005).

3.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil analisis masalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14
Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021





Posisi Relatif

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Tahun 2021 sedikit diatas angka TPT nasional yaitu sebesar 6,52% sedangkan TPT Nasional sebesar 6,49%. Provinsi Sumatera Barat termasuk 10 besar tertinggi Angka TPT nya (nomor 8 tertinggi secara Nasional) setelah Kepulauan Riau (9,91%), Jawa Barat (9,82%), Banten (8,98%), DKI Jakarta (8,50%), Sulawesi Utara (7,06%), Maluku (6,98%), dan Kalimantan Timur (6,83%) yang berada diatas rata-rata Nasional . TPT tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau dan TPT terendah berada pada Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan dimensi kemiskinan bidang ketenagakerjaan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu tahun terakhir 2016-2021 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88% dan pada tahun ini angka tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2021 Teingkat Pengangguran Terbuka menurun lagi di angka 6,52%, tetapi masih diatas rata-rata nasional sebesar 6,49%.

Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88%. Peningkatan yang terjadi ditahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat melalui penyediaan lapangan kerja masih belum efektif dan berdampak besar pada serapan tenaga kerja yang terjadi.

Analisis Relevansi

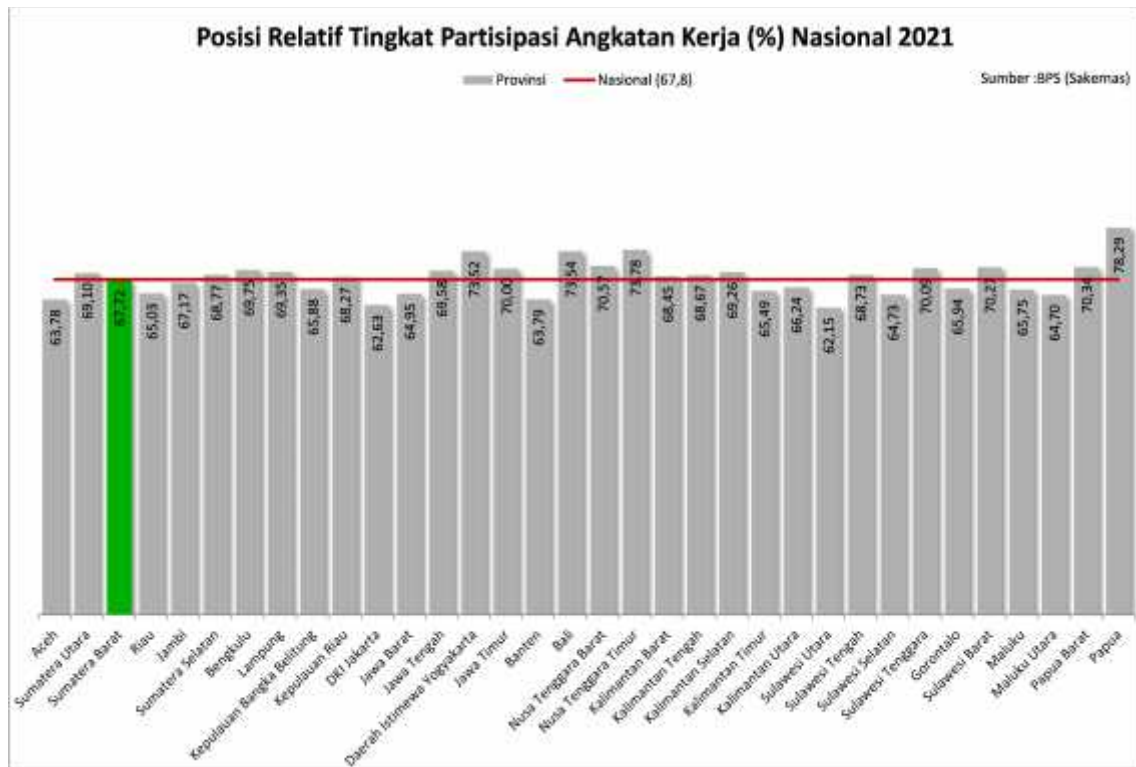
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun waktu 2016-2021, berdasarkan analisis relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun tahun tersebut, secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum optimal, dimana pada tahun 2016 sebesar 5,09 persen meningkat menjadi 6,52 persen pada Tahun 2021, dari garis *trendline* di atas menggambarkan adanya relevansi dengan tingkat pengangguran secara Nasional kurun waktu 2016-2021 yang perkembangannya sejalan.

3.2.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil analisis masalah tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15
Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa TPAK Sumatera Barat masih lebih rendah dibanding TPAK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TPAK Sumatera Barat masuk kategori tinggi. Pada tahun 2021 TPAK Sumatera Barat sebesar 67,72% dan TPAK Nasional sebesar 67,8%. TPAK tertinggi ada pada daerah Provinsi Papua sebesar 78,29% dan TPAK terendah ada pada daerah Provinsi DKI Jakarta dengan angka sebesar 62,63%. Dilihat dari posisi relatif ini, angka TPAK Provinsi seluruh Indonesia tidak ada angka yang terlalu ekstrim karena secara rata-rata mendekati angka Nasional.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Antar Waktu tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 naik turun setiap tahunnya dan meningkat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,01% dan kemudian turun lagi pada tahun hingga tahun 2021 sebesar 67,72 persen.

Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 naik turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2020 sebesar 69,01persen dan menurun lagi pada tahun 2021 sebesar 67,72%.

Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan belum cukup efektif dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan TPT dan TPAK

1. Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat tergolong tinggi dibanding nasional dan regional. Hal ini didukung oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, baik Sumatera Barat dan nasional terjadi peningkatan pengangguran terbuka pada tahun 2021. Perubahan tingkat pengangguran terbuka nasional lebih tinggi dibanding Sumatera Barat.
3. Peningkatan pengangguran terbuka juga diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 67,08 persen tahun 2016 menjadi 67,72 persen tahun 2021.

3.2.1.3. Kesempatan Kerja

Hasil analisis masalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.16 sebagai berikut.

Gambar 3.16
Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Kesempatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.16 menunjukkan bahwa TKK Sumatera Barat masih lebih tinggi dibanding TKK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TKK Sumatera Barat berada pada urutan kedua terbesar setelah Provinsi Sulawesi Barat. TKK Kabupaten yang tertinggi dan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Poso adalah yang tertinggi (97,61%), kemudian Kabupaten Banggai (97,58%), Banggai Kepulauan (97,53%), Donggala (97,42%) dan Kabupaten Parigi Moutong (97,30%) serta Kabupaten Tojo Una-Una (97,16%). Sedangkan TKK terendah dibanding kabupaten lain dan Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Palu (91,62%). Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat kemiskinan penduduk, dimana kabupaten seperti Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Tojo Una-Una yang memiliki persentase kemiskinan yang sangat tinggi dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan tingkat kesempatan kerja di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang relatif berfluktuatif, namun dengan kisaran perubahan yang relatif sangat kecil, dimana pada tahun 2016 (96,71%), namun menurun pada tahun 2017 (96,19%) lalu mengalami peningkatan sampai tahun 2019 (96,85%). Walaupun TKK mengalami penurunan pada tahun 2020, namun penurunan tersebut belum melewati angka TKK pada tahun 2017.

Analisis Efektivitas

Kondisi tingkat kesempatan kerja yang menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif namun cenderung konstan, dimana nilai perubahan TKK yang terjadi berada pada kisaran angka TKK 96 % atau besarnya perubahan TKK sebesar 0,0294 yang berarti bahwa perubahan TKK yang cenderung menurun hanya 0,0294 %. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dalam bidang ketenagakerjaan terutama dalam menyediakan lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan bagi masyarakatnya cukup efektif dilaksanakan.

Analisis Relevansi

Berdasarkan analisis relevansi menunjukkan bahwa Tingkat Kesempatan Terbuka (TKK) di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2016-2020, secara umum menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Kondisi TKK Sumatera Barat memiliki kesamaan dengan penurunan TKK pada tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan oleh garis *trendline* yang cenderung menurun yang menggambarkan adanya relevansi antara TKK Nasional kurun waktu 2016-2020 dengan TKK Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian terdapat perbedaan dalam besaran tingkat perubahan keduanya, dimana perubahan TKK di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibanding perubahan TKK nasional yang mencapai 0,27 %.

Kesimpulan Tingkat Kesempatan Kerja

1. Tingkat kesempatan kerja di Sumatera Barat tergolong tinggi (urutan kedua terbaik) atau di atas TKK nasional dan provinsi lain di Indonesia selain Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, TKK di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan dengan perubahan yang sangat kecil dibanding TKK nasional perubahannya cenderung lebih tinggi.
3. Berdasarkan analisis relevansi, penurunan TKK nasional tidak berdampak pada penurunan TKK, TPAK dan peningkatan pengangguran terbuka Sumatera Barat.

3.2.2 Bidang Kesehatan

3.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Secara nasional, target penurunan angka kematian bayi dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

3.2.2.2. Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, target penurunan angka kematian BALITA dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

3.2.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

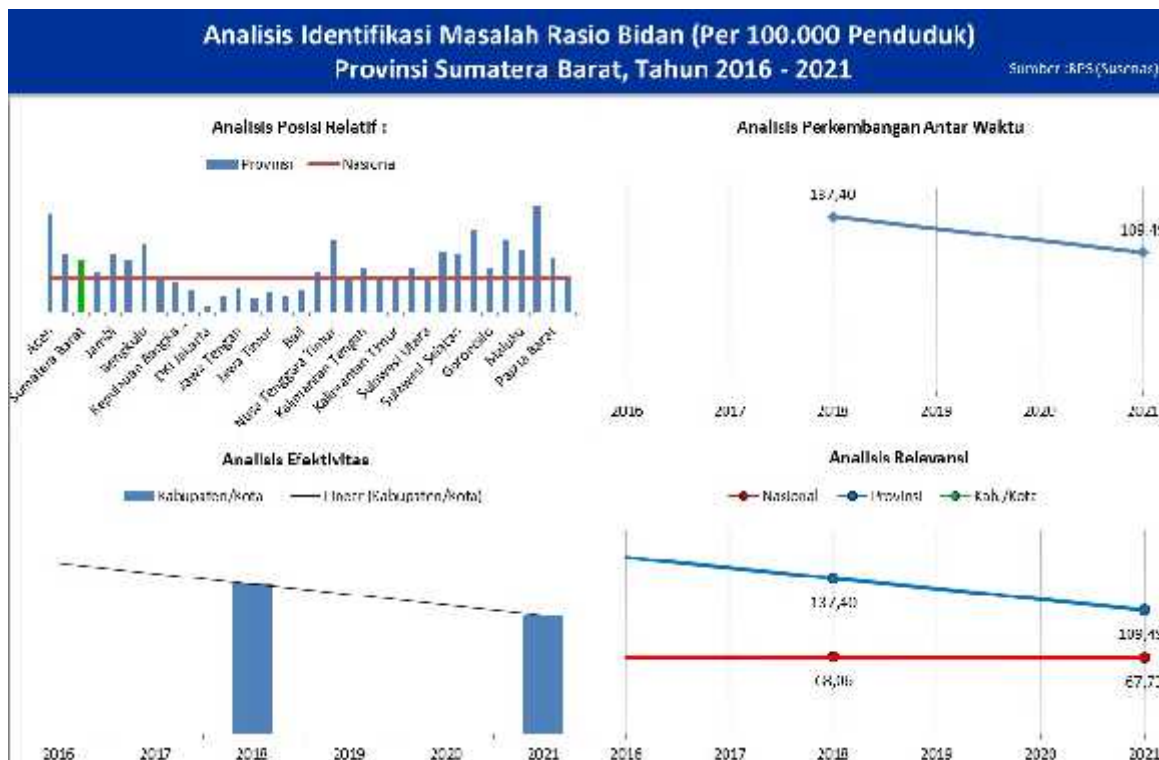
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

3.2.2.4. Balita Pendek dan Sangat Pendek (%)

Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2006. Dalam RPJMN 2020-2024, target penurunan angka *stunting* adalah 14%

3.2.2.5. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)

Rasio bidan menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga bidan per 100.000 penduduk. Berikut diuraikan gambaran rasio bidan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.



Gambar 3.21
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Analisis Perkembangan Antar Waktu

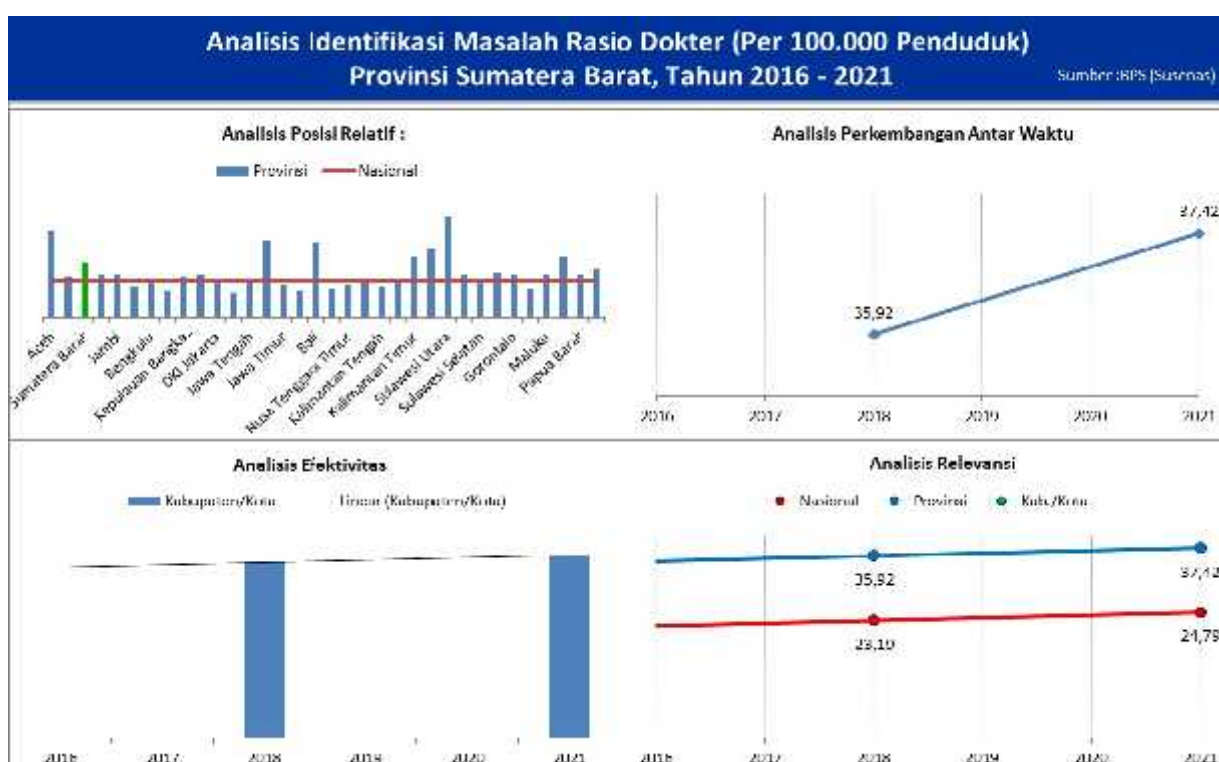
Dari tahun 2016-2020, rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk terus mengalami perbaikan dengan rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 188,68% per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni sebesar 164,98% dan berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif naik-turun namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 rasio bidan sejumlah 130,27 per 100.000 penduduk, hingga tahun 2020 sejumlah 164,98 per 100.000 penduduk.

3.2.2.6. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah perbandingan ketersediaan tenaga dokter untuk 100.000 jiwa penduduk. Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai telah ditetapkan target ketersediaan tenaga dokter per 100.000 penduduk hingga tahun 2025 sebanyak 112 orang.



Gambar 3.22
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Analisis Posisi Relatif

Secara umum, posisi relatif Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional dari sisi rasio dokter per 100.000 penduduk.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Rasio dokter Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2016 rasio dokter per 100.000 penduduk sejumlah 26,56 persen, hingga tahun 2020 sejumlah 42,17 persen.

Analisis Efektifitas

Atas peningkatan rasio dokter selama lima tahun terakhir menunjukkan program-program pendidikan dan penempatan dokter di Provinsi Sumatera Barat terbilang efektif, dan ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Analisis Relevansi

Jika peningkatan rasio dokter di Sumatera Barat menunjukkan trend peningkatan sebesar 4,07%, namun rata-rata nasional justru menunjukkan trend penurunan hingga 6,4%.

3.2.2.7. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Semakin tinggi presentase penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan buruknya derajat kesehatan penduduk tersebut.

3.2.2.8. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Pengobatan sendiri atau sering disebut swamedikasi adalah upaya pengobatan atau perawatan diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas atau obat wajib apotek yang didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek berdasarkan keterangan obat yang ada di brosur sesuai dengan penyakitnya (Izzatin, 2015).

3.2.2.9. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga tidak terlatih/tidak terampil.

3.2.2.10. Angka Morbiditas (%)

Angka Morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

3.2.2.11. Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan (%)

Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut.

3.2.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur dasar dapat mempengaruhi kualitas kehidupan warga terutama dengan kualitas kesehatan. Prasarana dan sarana infrastruktur yang buruk berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit.

3.2.3.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Gambar 3.30

Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Dalam skala nasional, Tahun 2021 posisi Sumatera Barat terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 68,68 persen. Bahkan skala regionalpun, posisi Sumatera Barat berada di peringkat terbawah dari 9 propinsi di Sumatera.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sumatera Barat terus mengalami perkembangan positif. Tahun 2016 Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi Layak sebesar 53,24 persen meningkat terus sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 68,68 persen.

Analisis Efektivitas

Berbagai strategi dan pendekatan selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektifitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2016 sejumlah 53,24 persen hingga tahun 2021 menjadi 68,68 persen.

Analisis Relevansi

Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional.

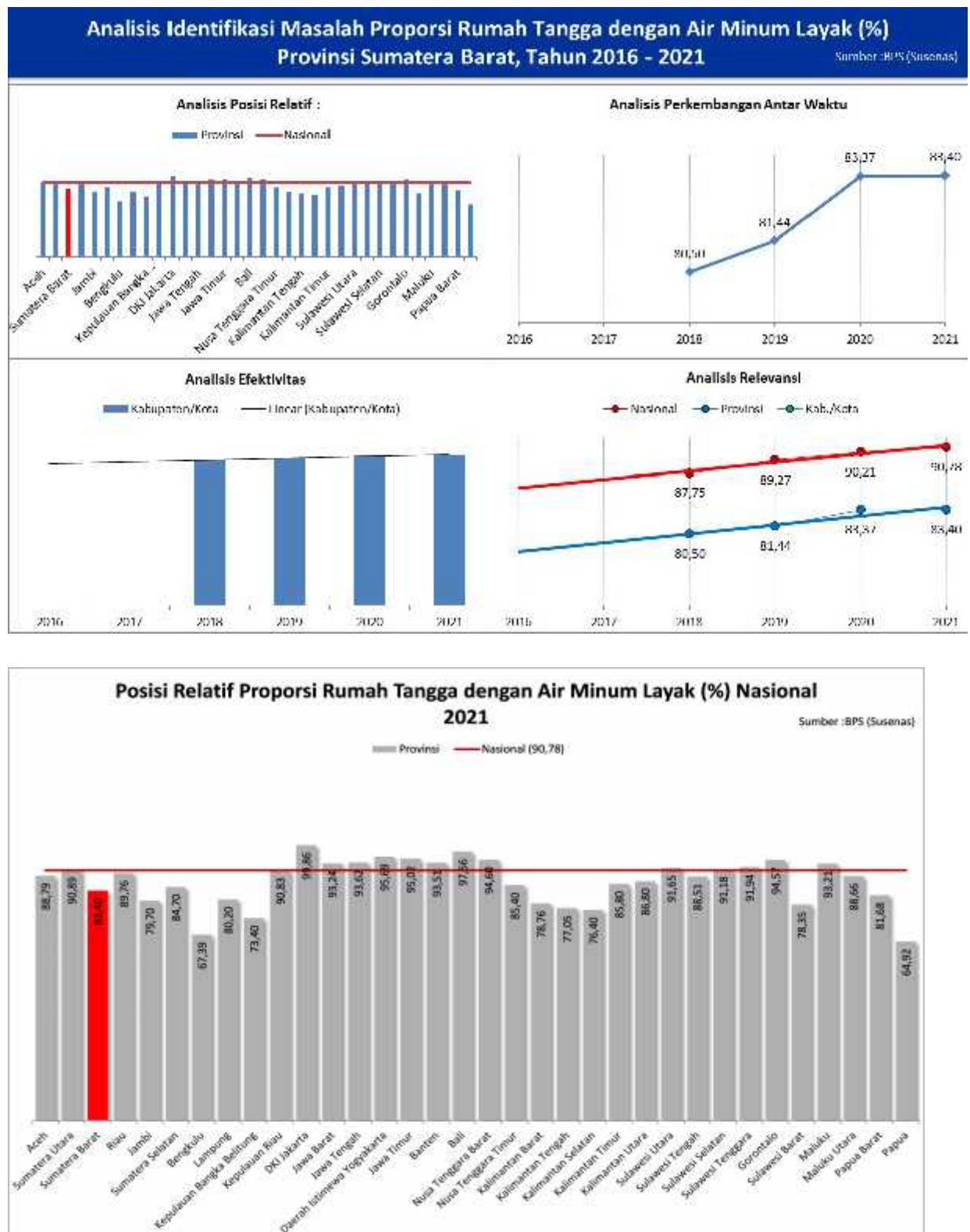
3.2.3.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. (Metadata SDGs)

Gambar 3.31
Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Posisi Sumatera Barat untuk akses air minum layak sebesar 83,40 persen masih di bawah rata-rata nasional sebesar 90,78 persen. Untuk skala regional Sumatera Propinsi Sumatera Barat berada di posisi ke 4 di atas propinsi Jambi. Provinsi teringgi untuk akses air minum layak adalah DKI Jakarta sebesar 99,86 persen di atas rata-rata nasional dan Provinsi terendah yaitu Papua sebesar 64,92 persen

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2018-2021, perkembangan antar waktu capaian akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana sejak tahun 2018-2018 mengalami kenaikan dari 80,50 persen pada tahun 2018 menjadi 83,40 persen pada tahun 2021

Analisis Efektivitas

Berbagai strategi dan pendekatan capaian akses air minum layak selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektivitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2018 sejumlah 80,50 persen hingga tahun 2021 menjadi 83,40 persen

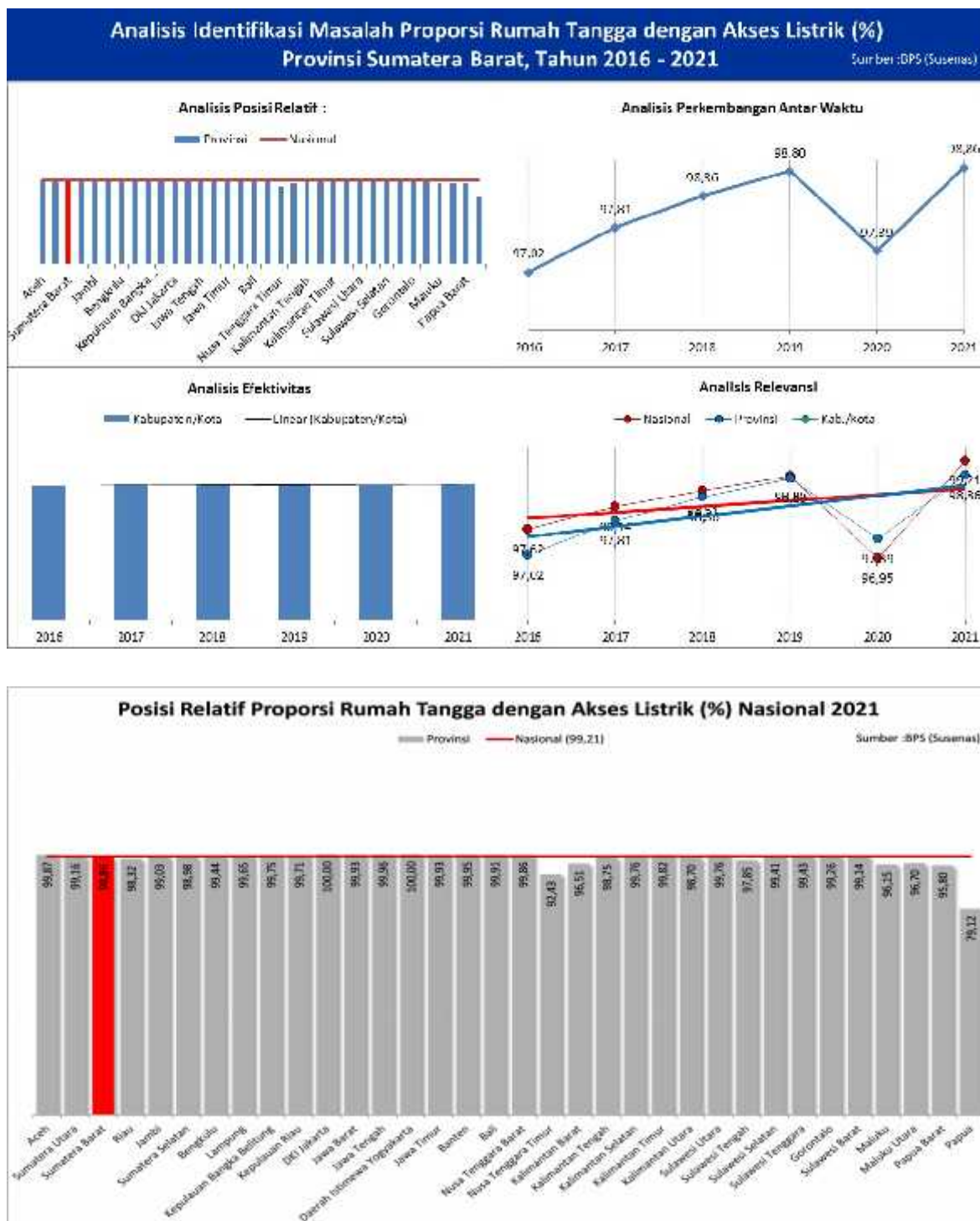
Analisis Relevansi

Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan capaian penanganan nasional. Pada tahun 2021, kenaikan akses air minum layak nasional mencapai 90,78 persen sedangkan provinsi Sumatera Barat mencapai 83,40. Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih di bawah rata-rata nasional

3.2.3.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Gambar 3.32
Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Persentase rumah tangga dengan akses listrik di Sumatera Barat sudah dalam posisi baik yaitu sebesar 98,86 persen pada tahun 2021 tapi masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 99,21 persen. Provinsi dengan

posisi akses listrik tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 100 persen dan Provinsi terendah adalah Papua dengan akses listrik hanya sebesar 79,12 persen.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari perkembangan waktu sejak tahun 2016-2021, rumah tangga dengan akses listrik di Sumatera Barat rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar 97,02 persen teruse meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar 98,80 persen, tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 97,39 persen dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 98,86 persen.

Analisis Efektivitas

Berbagai program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah selama ini telah memberi kontribusi untuk menaikkan persentase rumah tangga dengan akses listrik. Memerlihatkan dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan peningkatan akses listrik.

Analisis Relevansi

Dari trend kenaikan, Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 0,85% dan nasional sebesar 0,34%. Namun demikian trend kenaikan tersebut belum melampaui capaian nasional.

Kesimpulan Bidang Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisis masing-masing indikator di atas, dihasilkan isu dan permasalahan bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

-) Dalam skala nasional, posisi Sumatera Barat terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 68,68%. Bahkan skala regionalpun, posisi Sumatera Barat berada di peringkat terbawah dari 9 propinsi di Sumatera.
-) Akses air minum layak masih di bawa rata-rata nasional. Untuk skala regional Sumatera Propinsi Sumatera Barat berada di posisi ke 4 di atas propinsi Jambi.
-) Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat cukup relevan dengan capaian penanganan nasional.
-) Persentase rumah tangga dengan akses listrik di Sumatera Barat masih berada di bawa rata-rata nasional.

3.2.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa Pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara Pendidikan yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Jika dilakukan analisis masalah perkembangan bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2021) menunjukkan kecenderungan yang sangat variatif, khususnya tingkat partisipasi masyarakat bersekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga setara Sekolah Menengah Umum. Data yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dari siswa yang sekolah sesuai usia dan jenjang pendidikannya.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam seperti apa perkembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, berikut ini diuraikan analisis identifikasi APK dan APM dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA dengan menggunakan (a) analisis Posisi Relatif, (b) analisis perkembangan antar waktu, (c) analisis efektifitas dan (d) Analisis Relevansi.

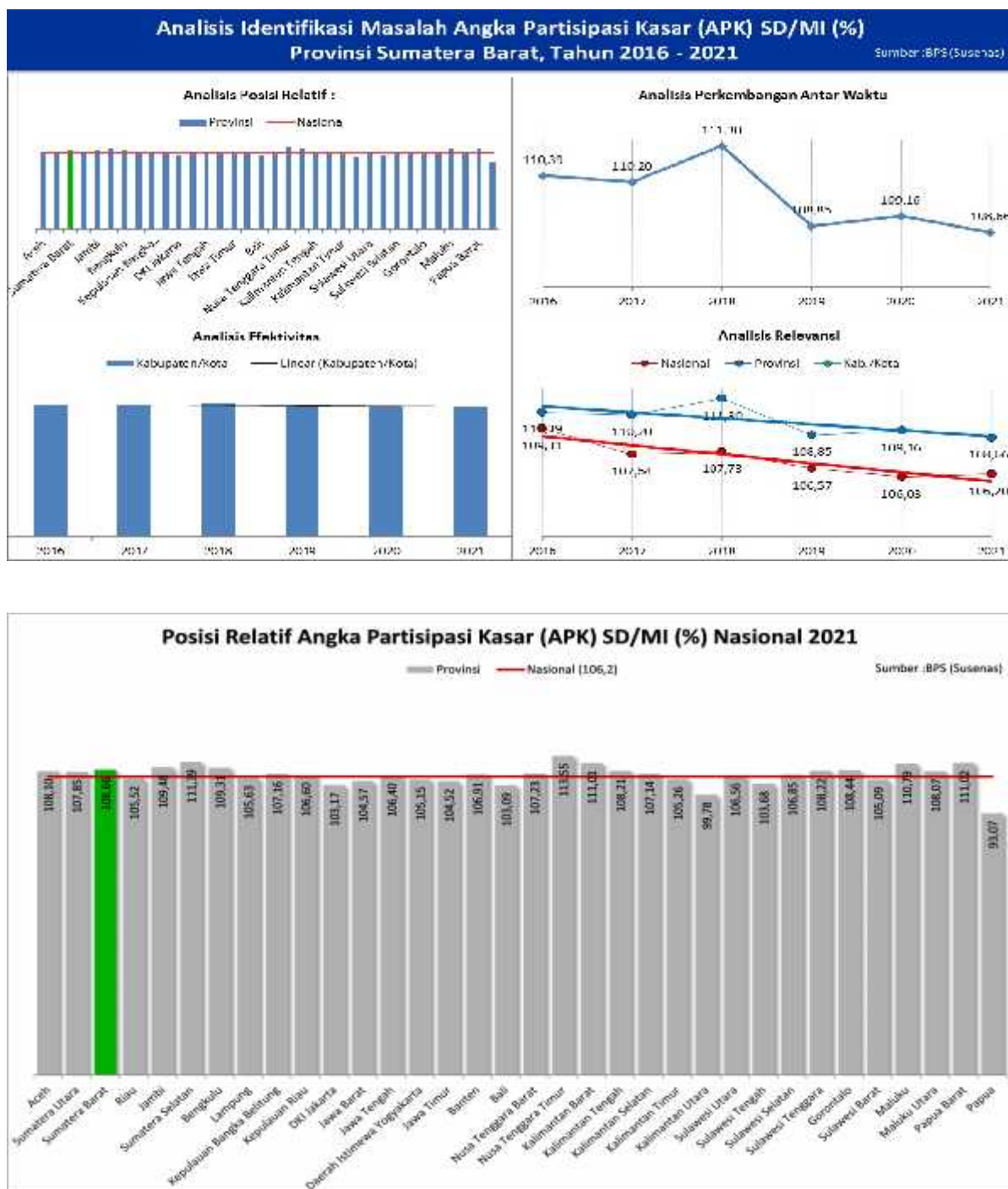
3.2.4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang Pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Secara umum data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MD dengan kisaran usia 7 s/d 12 tahun di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 rata-rata capaiannya 109,76%, sudah diatas capaian rata-rata nasional 108,66%.

Tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 7 – 12 tahun untuk masuk di Sekolah Dasar umumnya melebihi 100 %, namun demikian jika dilihat dari pendekatan analisis identifikasi masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 – 2021 memperlihatkan kecenderungan yang berbeda khususnya jika dilihat dari aspek Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada Gambar di bawah ini :

Gambar 3.1
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif adalah mengukur tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Gambar Analisis Posisi Relatif Angka

Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sumatera Barat (108,66), sudah diatas capaian rata-rata nasional (106,20). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tertinggi tingkat Nasional adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 113,55 persen dan Angka Partisipasi Kasar terendah adalah Provinsi Papua sebesar 93.07 persen.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI memperlihatkan grafik yang fluktuatif dari tahun ketahun. Jika merujuk pada gambar Analisis Perkembangan Antar Waktu, Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar pada tahun 2016 sebesar 110,39 persen kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 111,30 persen dan menurun lagi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 108,66 persen. Akan tetapi APK SD/MI Provinsi Sumatera Barat tetap berada diatas angka rata-rata Nasional yang hanya sebesar 106,20 persen.

Analisis Efektifitas

Data analisis efektifitas memperlihatkan seperti apa efektifitnya Angka Partisipasi Kasar masyarakat Sumatera Barat usia 7 s/d 12 tahun ke Sekolah Dasar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Jika dihitung dari hasil analisis tersebut, maka terjadi penurunan rata-rata pertahun hanya mencapai 0,19 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang lebih baik.

Analisis Relevansi

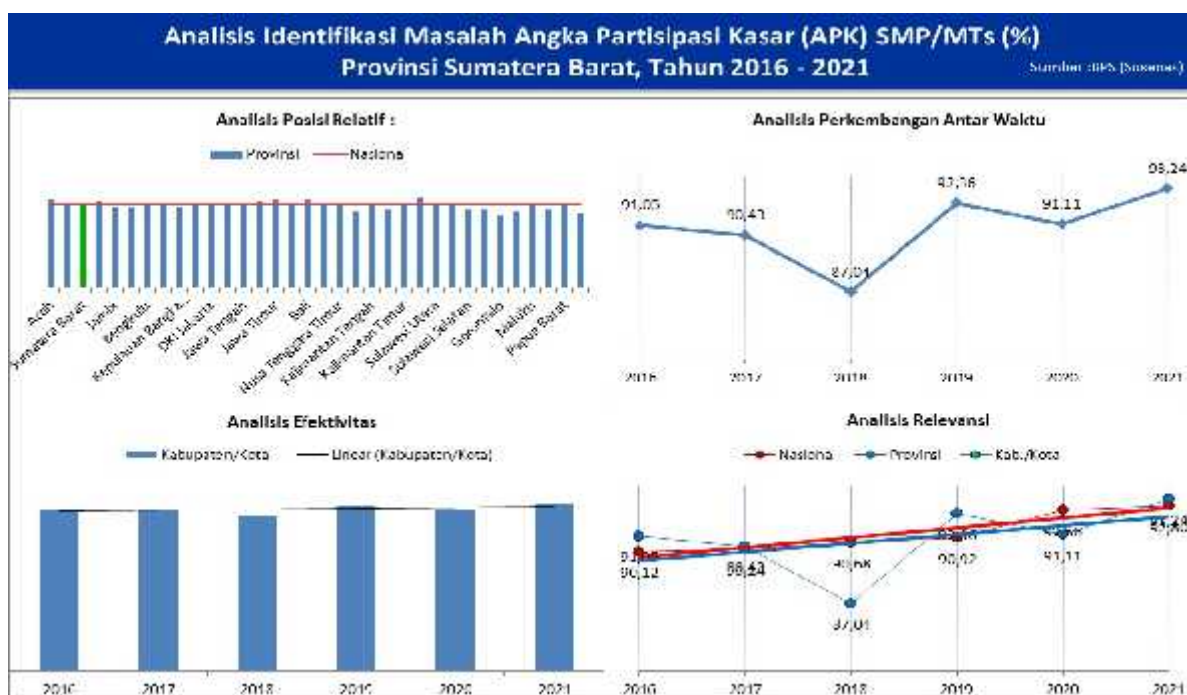
Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Kasar masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir menunjukkan hasil yang belum memadai jika dibanding hasil capaian secara nasional. Itu artinya pendekatan analisis relevansi menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat menyekolahkan anaknya ke jenjang SD/MI jika dibandingkan dengan capaian secara nasional belum relevan. Dalam rentang waktu lima tahun capaian nasional naik 0,21% sementara provinsi Sumatera Barat hanya 0,19%. Tahun 2021 memperlihatkan capaian nasional 106,20 persen dan Provinsi Sumatera Barat 108,66 persen. Masih terdapat gap 2,46 persen.

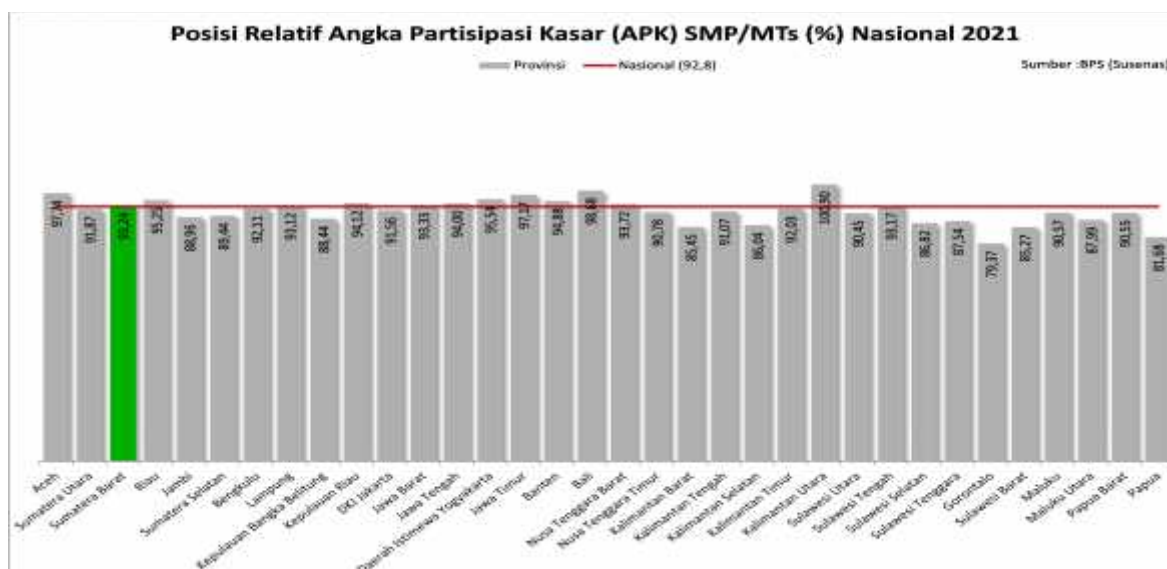
3.2.4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)

Secara umum data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMP/MTs dengan kisaran usia 13 s/d 15 tahun di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 rata-rata capaiannya 90,87 persen, sedikit dibawah capaian rata-rata nasional sebesar 90,90 persen.

Tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 13 s/d 15 tahun untuk masuk di Sekolah Menengah Pertama umumnya masih dibawah 100 %, namun demikian jika dilihat dari pendekatan analisis identifikasi masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 – 2021 memperlihatkan kecenderungan yang berbeda khususnya jika dilihat dari aspek Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada Gambar di bawah ini :

Gambar 3.2
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif adalah mengukur tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/ MTs (%) Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Gambar Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebesar 93,24 persen, sudah diatas capaian rata-rata nasional sebesar 92,80 persen. Provinsi tertinggi dalam pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs secara Nasional adalah Kalimantan Utara dengan capaian sebesar 100,90 persen dan Provinsi terendah tingkat capaiannya adalah Gorontalo dengan capaian 79,37 persen.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat untuk menyekolahkan anaknya usia 13 s/d 15 tahun di SMP/MTs memperlihatkan angka yang berfluktuatif dari tahun ketahun, walau pada akhir periode tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 93,24 persen, walaupun kenaikannya relative kecil. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar hanya sebesar 91,05 kemudian menurun menjadi 87,40 tahun 2018 kemudian meningkat lagi tahun 2019 menjadi sebesar 92,39 dan menurun lagi tahu 2020 yaitu sebesar 91,17 dan naik lagi tahun 2021. Jika merujuk pada gambar Analisis Perkembangan Antar Waktu, Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Menengah Pertama hanya naik rata-rata 0,19% pertahun.

Analisis Efektifitas

Data analisis efektifitas memperlihatkan seperti apa efektifitas Angka Partisipasi Murni masyarakat Sumatera Barat usia 13 s/d 15 tahun ke Sekolah Menengah Pertama dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Jika dihitung hasil analisis tersebut, maka rata-rata kenaikan pertahun hanya mencapai 0,19 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah menengah pertama belum menunjukkan hasil yang optimal.

Analisis Relevansi

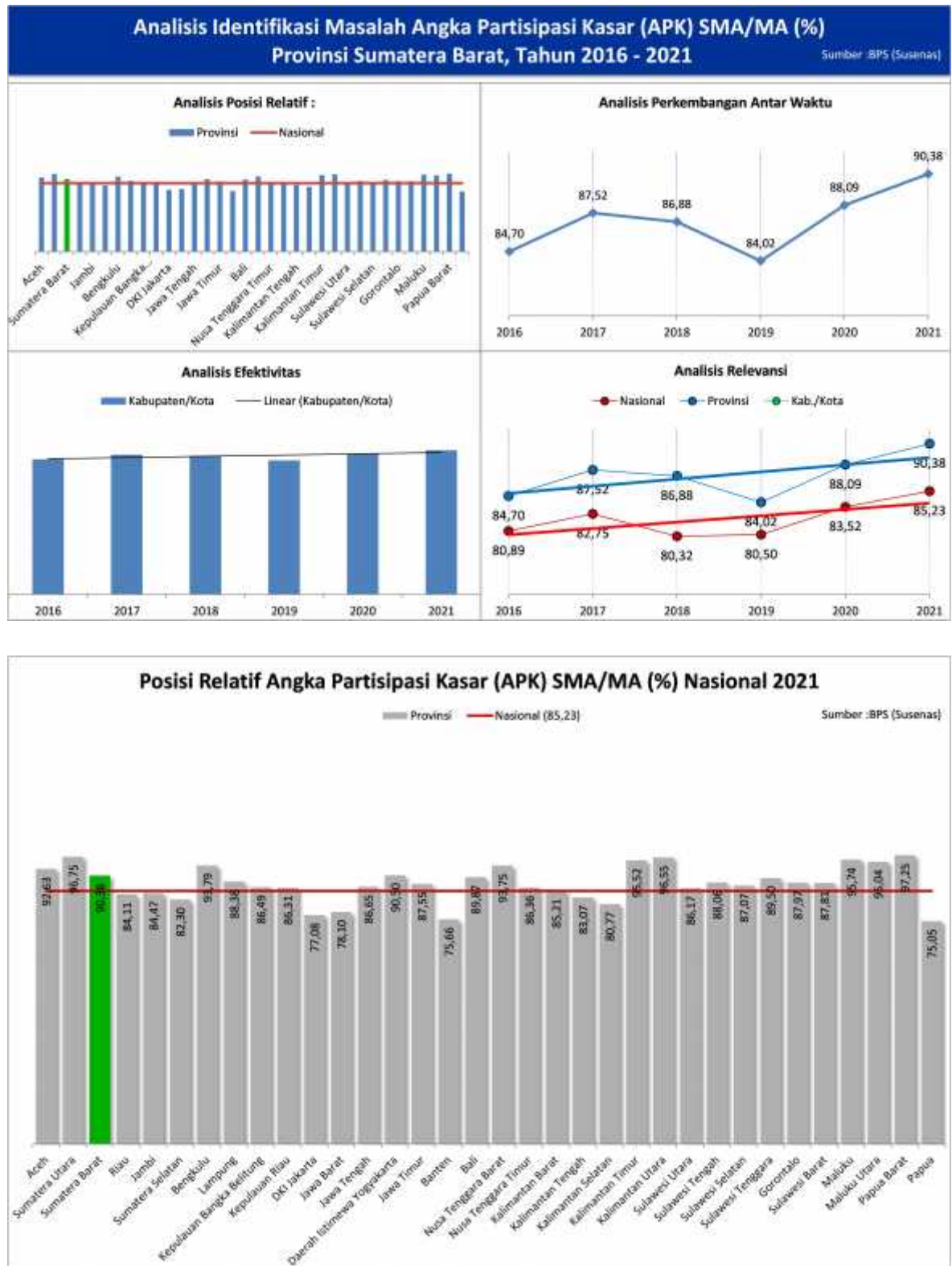
Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) terakhir menunjukkan hasil yang belum memadai jika dibanding hasil capaian secara nasional. Itu artinya pendekatan analisis relevansi menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat menyekolahkan anaknya ke jenjang SD/MI jika dibandingkan dengan capaian secara nasional belum relevan. Dalam rentang waktu lima tahun capaian nasional naik 0,21% sementara provinsi Sumatera Barat hanya 0,19%. Tahun 2021 memperlihatkan capaian nasional 92,8% dan Provinsi Sumatera Barat 93,24%. Masih terdapat sedikit gap yaitu sebesar 0,44%.

3.2.4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

Secara umum data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMP/MTs dengan kisaran usia 16 s/d 18 tahun di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 rata-rata capaiannya 87,43%, sudah diatas capaian rata-rata nasional 85,23%.

Tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 16–18 tahun untuk masuk di Sekolah Menengah Atas umumnya tidak lebih dari 90 %, namun demikian jika dilihat dari pendekatan analisis identifikasi masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 – 2021 memperlihatkan kecenderungan yang berbeda khususnya jika dilihat dari aspek Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada Gambar di bawah ini :

Gambar 3.3
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif adalah mengukur tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Gambar Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 di angka (90,38%), sudah diatas capaian rata-rata nasional (85,23%). Provinsi dengan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA adalah Papua Barat dengan angka sebesar 97,25% kemudian disusul oleh Sumatera Utara dengan angka sebesar 96,75 % kemudian Kalimantan Utara sebesar 96,55%. Untuk Provinsi terendah adalah Provinsi Papua dengan capaian sebesar 75,05%. Untuk wilayah Sumatera, capaian angka tertinggi adalah Sumatera Utara sebesar 96,75% dan capaian angka partisipasi terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian hanya 82,30%

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat untuk menyekolahkan anaknya usia 16 s/d 18 tahun di SMA/MA memperlihatkan angka yang fluktuatif dari tahun ketahun, walau kenaikan (partisipasi masyarakat) tersebut relatif kecil. Pada Tahun 2016 Capaian Angka Partisipasi sebesar 84,70 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 88,09, kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi sebesar 90,38. Jika merujuk pada gambar Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Menengah Atas hanya naik rata-rata 1,15 % pertahun.

Analisis Efektifitas

Data analisis efektifitas memperlihatkan seperti apa efektifitas Angka Partisipasi Murni masyarakat Sumatera Barat usia 16 s/d 18 tahun ke Sekolah Menengah Pertama dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Jika dihitung hasil analisis tersebut, maka rata-rata kenaikan pertahun hanya mencapai 1,15 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang optimal.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir menunjukkan hasil yang sudah memadai atau belum jika dibanding hasil capaian secara nasional. Itu artinya pendekatan analisis relevansi

menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA/MA jika dibandingkan dengan capaian secara nasional belum relevan. Dalam rentang waktu lima tahun capaian nasional naik 1,01% sementara provinsi Sumatera Barat hanya 1,15%. Tahun 2021 memperlihatkan capaian nasional 85,23% dan Provinsi Sumatera Barat 90,38%. Masih terdapat gap antara Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional sebesar 5,15%.

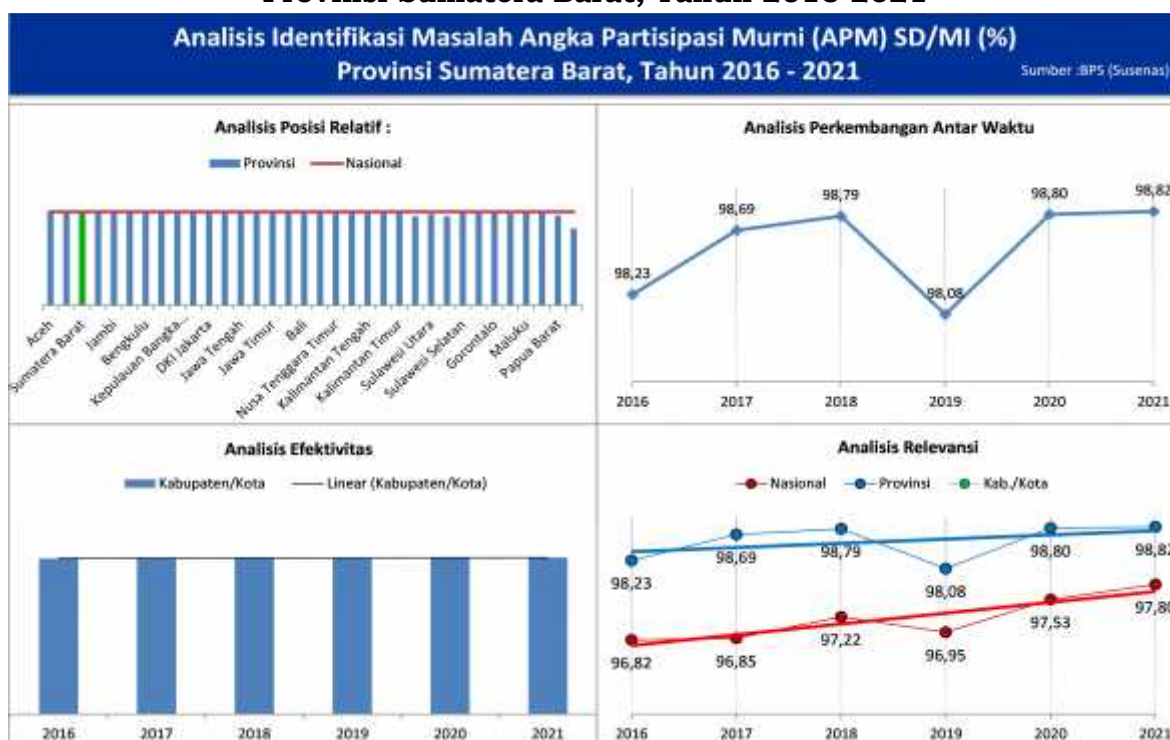
3.2.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)

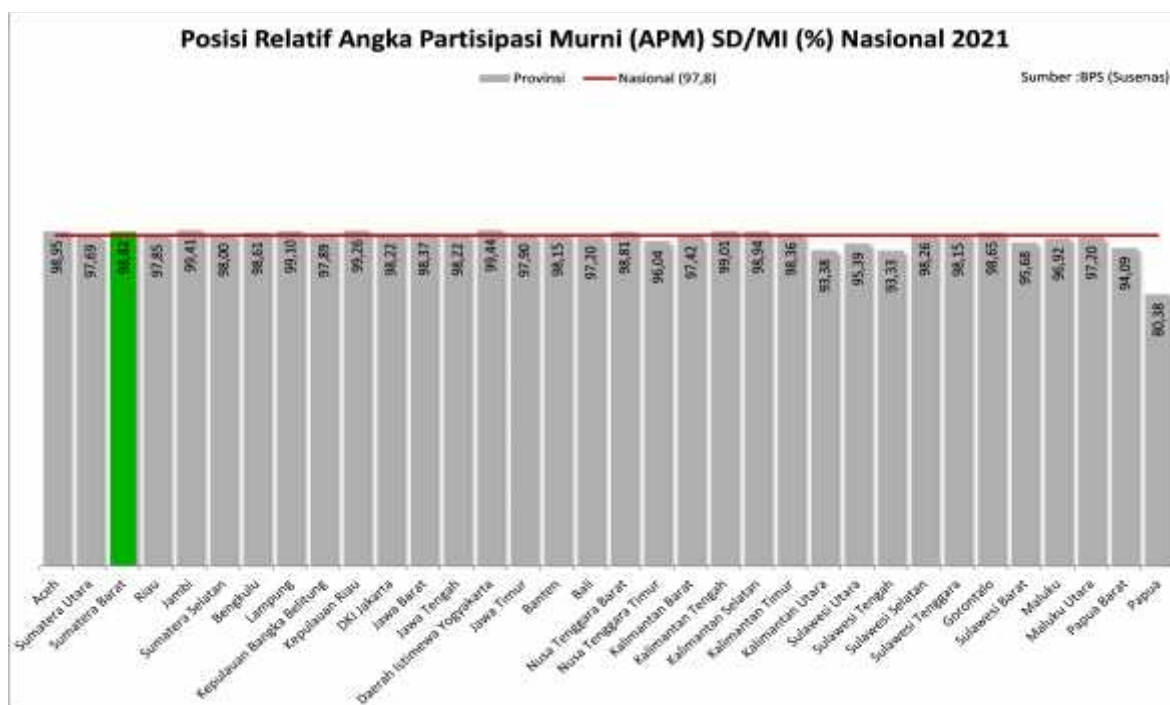
Secara umum data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MI dengan kisaran usia 7 s/d 12 Tahun di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 dengan rata-rata capaiannya 98,82%, sudah diatas capaian rata-rata nasional 97,8%.

Tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 7 – 12 tahun untuk masuk di Sekolah Dasar umumnya sudah melebihi 90 %, Namun demikian jika dilihat dari pendekatan analisis identifikasi masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016 – 2021 memperlihatkan kecenderungan yang berbeda khususnya jika dilihat dari aspek Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi.

Selengkapnya pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif adalah mengukur tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Gambar Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya menunjukkan, tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (98,82), Sudah diatas capaian rata-rata nasional (97,80%). Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Capaian sebesar (99,44%) dan Capaian angka partisipasi terendah yaitu Provinsi Papua sebesar (80,38%)

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI memperlihatkan angka yang fluktuatif dari tahun ketahun dan kecenderungan untuk naik, walau kenaikan (partisipasi masyarakat) tersebut relatif sangat kecil. Jika merujuk pada gambar Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK), masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar hanya naik rata-rata 0,17% pertahun.

Pada tahun 2016 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar (98,23%) terus meningkat di tahun berikutnya dan kemudian turun pada tahun 2019 sebesar (98.08%) dan naik lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar (98,82%)

Analisis Efektifitas

Data analisis efektifitas memperlihatkan seperti apa efektifitas Angka Partisipasi Murni masyarakat Sumatera Barat usia 7 s/d 12 tahun ke Sekolah Dasar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Jika dihitung hasil analisis tersebut, maka rata-rata kenaikan pertahun hanya mencapai 0,17 %. Kecenderungan ini memperlihatkan ketentuan wajib belajar dimulai dari sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang optimal.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir menunjukkan hasil yang belum memadai jika dibanding hasil capaian secara nasional. Itu artinya pendekatan analisis relevansi menunjukkan, tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat menyekolahkan anaknya ke jenjang SD/MI jika dibandingkan dengan capaian secara nasional belum relevan. Dalam rentang waktu lima tahun capaian nasional naik 0,09% sementara provinsi Sumatera Barat hanya 0,17%. Tahun 2021 memperlihatkan capaian nasional 97,80% dan Provinsi Sumatera Barat 98,82%. Masih terdapat gap 1.02%.

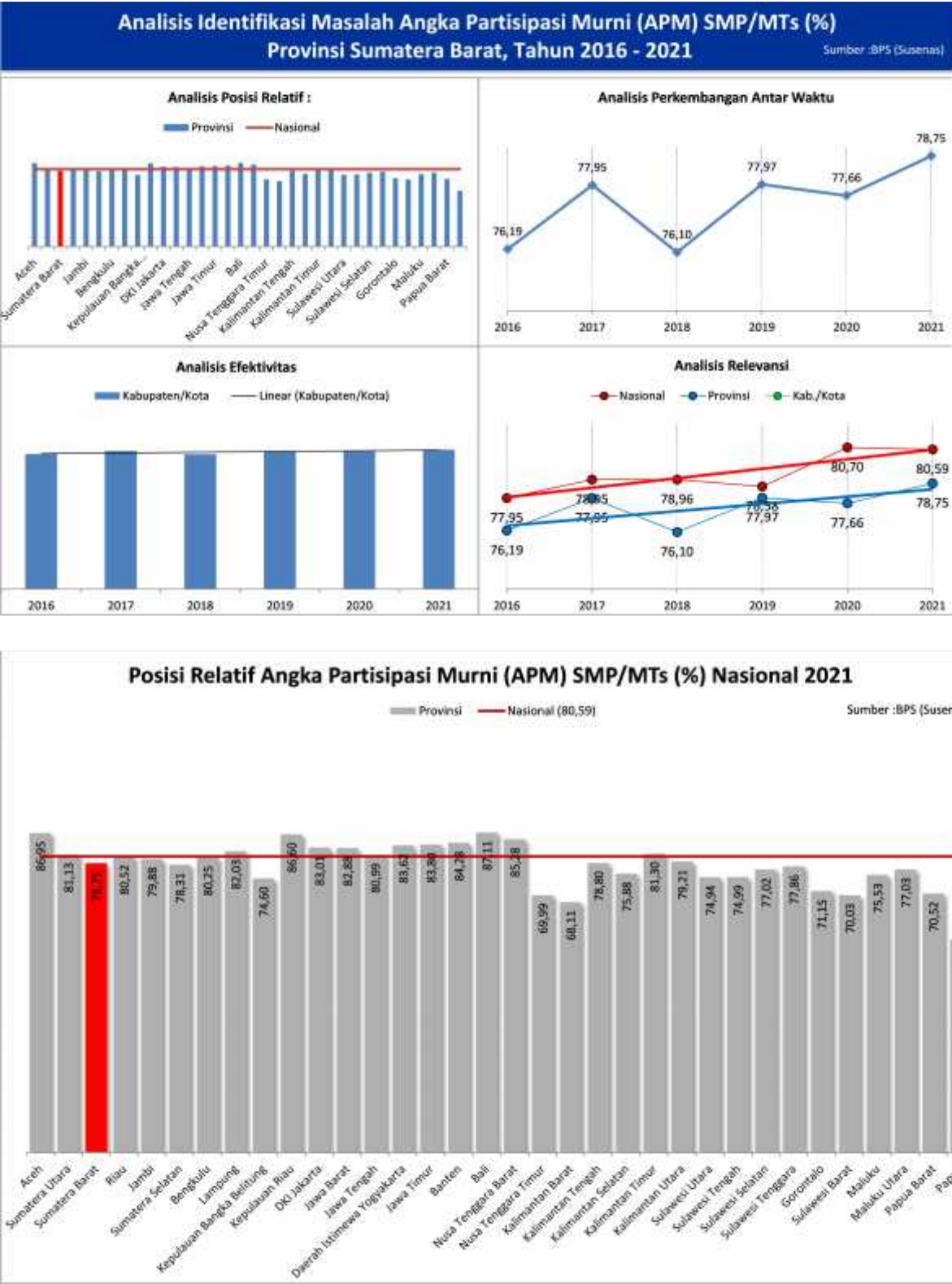
3.2.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

Secara umum jika kita merujuk pada data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/MTs dengan kisaran usia 13 s/d 15 tahun di Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 rata-rata capaiannya 72,99 %, masih berada dibawah angka angka partisipasi secara nasional 78,69%. Hal lainnya, masih terdapat 25,58 % penduduk usia 13 s/d 15 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMP/MTs di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 2016-2020 untuk capaian rata-rata dalam lima tahun, terdapat sepuluh kabupaten/kota APM melebihi capaian provinsi, namun demikian masih terdapat tiga kabupaten capaiannya masih dibawah 70 %,

Untuk melihat perkembangan lebih detail di Provinsi Sumatera Barat, antara tahun 2016 – 2021 akan terlihat pada Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas dan Analisis Relevansi. Selengkapnya pada gambar berikut ini:

Gambar 3.5
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan, capaian Provinsi Sumatera Barat 78,75%, sementara capaian rata-rata nasional 80,59 %, atau masih terdapat gap 1,87%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APM untuk jenjang pendidikan setara SMP/MTs, sementara provinsi lainnya, termasuk Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 13 s/d 15 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 13 s/d 15 tahun di SMP/MTs di Provinsi Sumatera Barat perkembangan yang berfluktuatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 76,19 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SMP/MTs. Kemudian naik menjadi sebesar 77,95% pada tahun 2017, akan tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 76,10%. Pada tahun 2019 hanya naik 1,87 % atau rata-rata 77,97 % dan tahun 2020 77,66%. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 78,75% Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 1,07 %.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 13 s/d 15 tahun ke jenjang pendidikan SMP/MTs dalam lima tahun terakhir (2016-2021) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 1,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sumatera Barat.

Analisis Relevansi

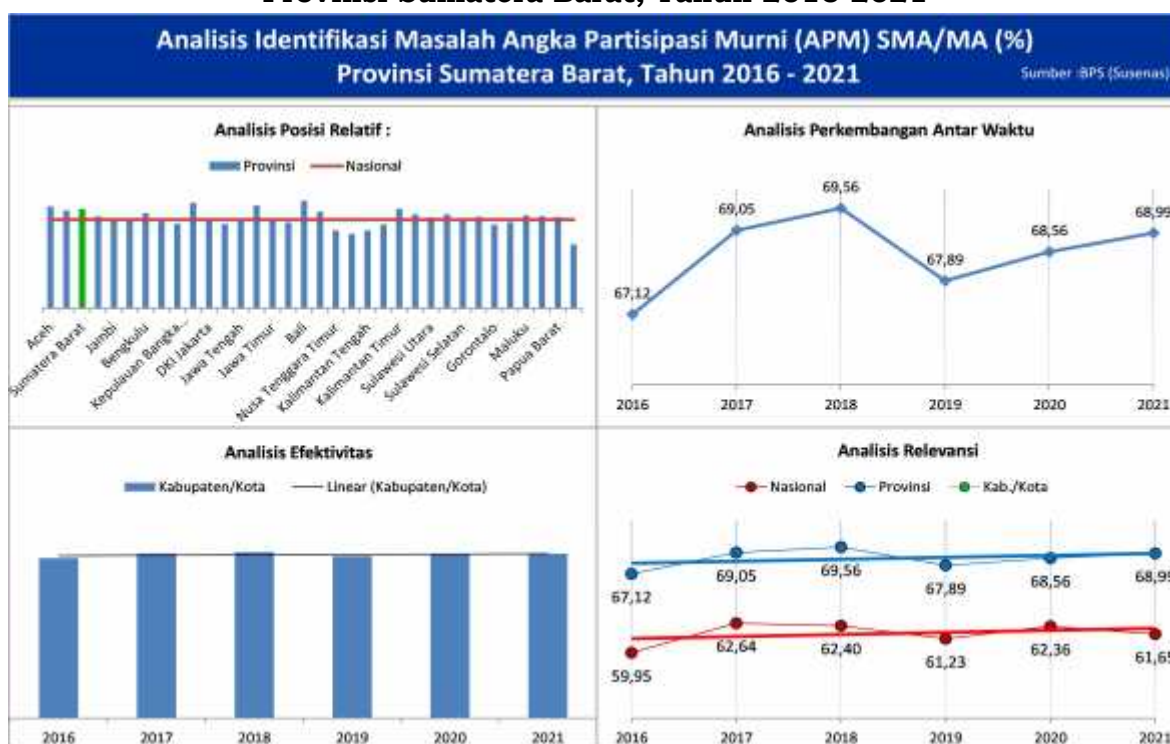
Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,59%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 1,87 % dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (78,75%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami kenaikan dari 77,66% tahun 2020 menjadi 78,73 % tahun 2021. Di tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif 1,07 % dari tahun 2020 ke 2021 dengan relevansi pertumbuhan 78,75

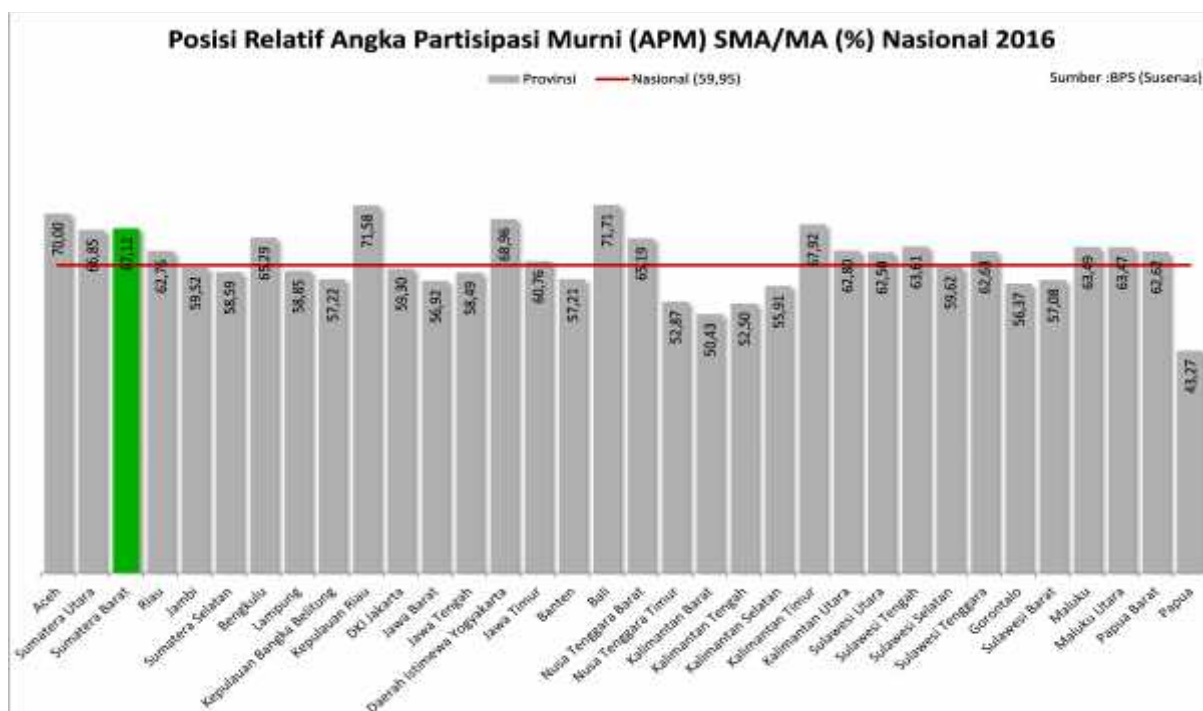
3.2.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Secara umum jika kita merujuk pada data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021 berada pada kisaran rata-rata 64,26 % melebihi capaian rata-rata nasional 60,61%. Walau melebihi rata-rata nasional, namun masih terdapat permasalahan karena 35,74% penduduk usia 16 s/d 18 tahun tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SMA/MA di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kecenderungan lain yang bisa dibaca pada Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun (2016-2021), terdapat enam kabupaten capaiannya masih dibawah APM Nasional dan data selengkapnya pada gambar berikut ini:

Gambar 3.6
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021





Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/MA menunjukkan, capaian Provinsi Sumatera Barat 78,75%, sementara capaian rata-rata nasional 80,59 %, atau masih terdapat gap 1,87%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APM untuk jenjang pendidikan setara SMA/MA, sementara provinsi lainnya, termasuk Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 15 s/d 18 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 15 s/d 18 tahun di SMA/MA di Provinsi Sumatera Barat perkembangan yang berfluktuatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 76,19 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SMP/MTs. Kemudian naik menjadi sebesar 77,95% pada tahun 2017, akan tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 76,10%. Pada tahun 2019 hanya naik 1,87 % atau rata-rata 77,97 % dan tahun 2020 77,66%. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 78,75% Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 1,07 %.

Analisis Efektifitas

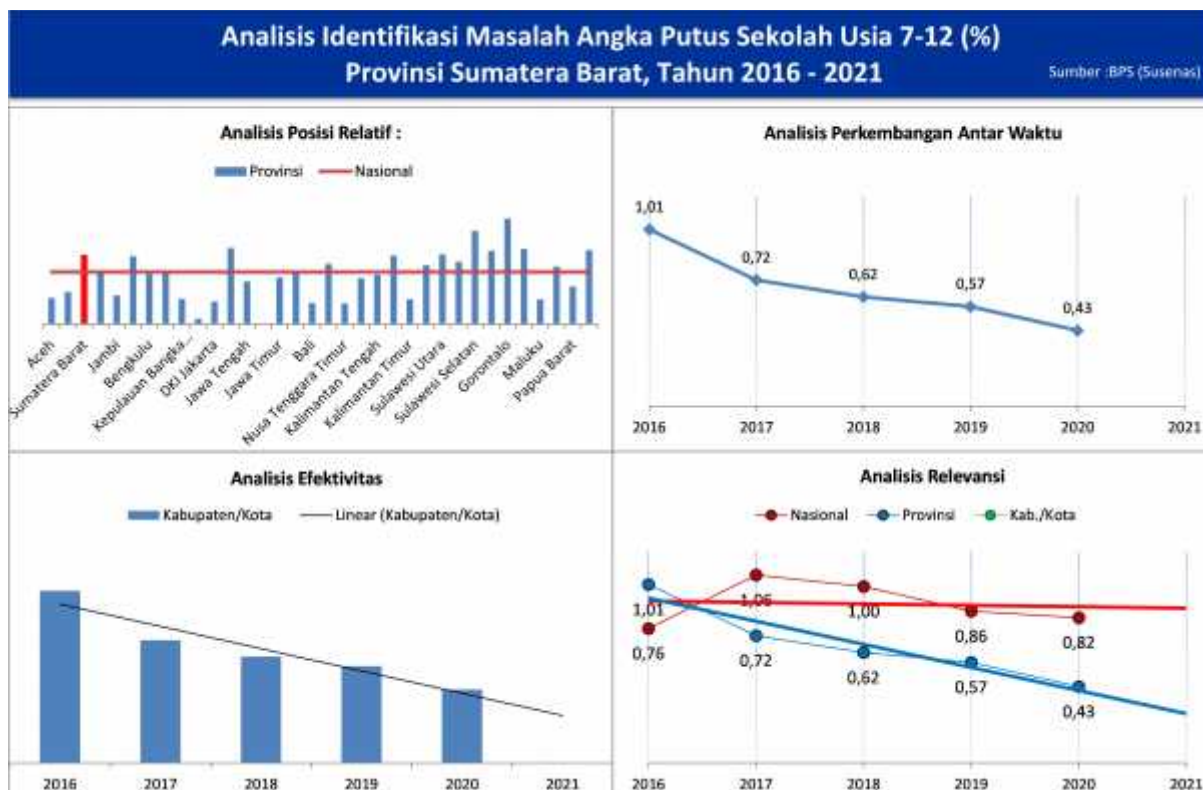
Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 15 s/d 18 tahun ke jenjang pendidikan SMA/MA dalam lima tahun terakhir (2016-2021) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 1,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sumatera Barat.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Partisipasi Murni masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir untuk jenjang pendidikan SMA/MA Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,59%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 1,87 % dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (78,75%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami kenaikan dari 77,66% tahun 2020 menjadi 78,73 % tahun 2021. Di tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif 1,07 % dari tahun 2020 ke 2021 dengan relevansi pertumbuhan 78,75

3.2.4.4. Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)

Gambar 3.7
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus sekolah 7-12 (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Putus Sekolah 7-12 pada jenjang pendidikan SMA/MSD/MI menunjukkan, capaian Provinsi Sumatera Barat 78,75%, sementara capaian rata-rata nasional 80,59 %, atau masih terdapat gap 1,87%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APS untuk jenjang pendidikan setara SD/MI, sementara provinsi lainnya, termasuk Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 7 s/d 12 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan sd/MI.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI di Provinsi Sumatera Barat perkembangan yang berfluktuatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 76,19 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SSD.MI. Kemudian naik menjadi sebesar 77,95% pada tahun 2017, akan tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 76,10%. Pada tahun 2019 hanya naik 1,87 % atau rata-rata 77,97 % dan tahun 2020 77,66%. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 78,75% Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 1,07 %.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 7 s.d 12 tahun ke jenjang pendidikan SD/MI dalam lima tahun terakhir (2016-2021) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 1,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sumatera Barat.

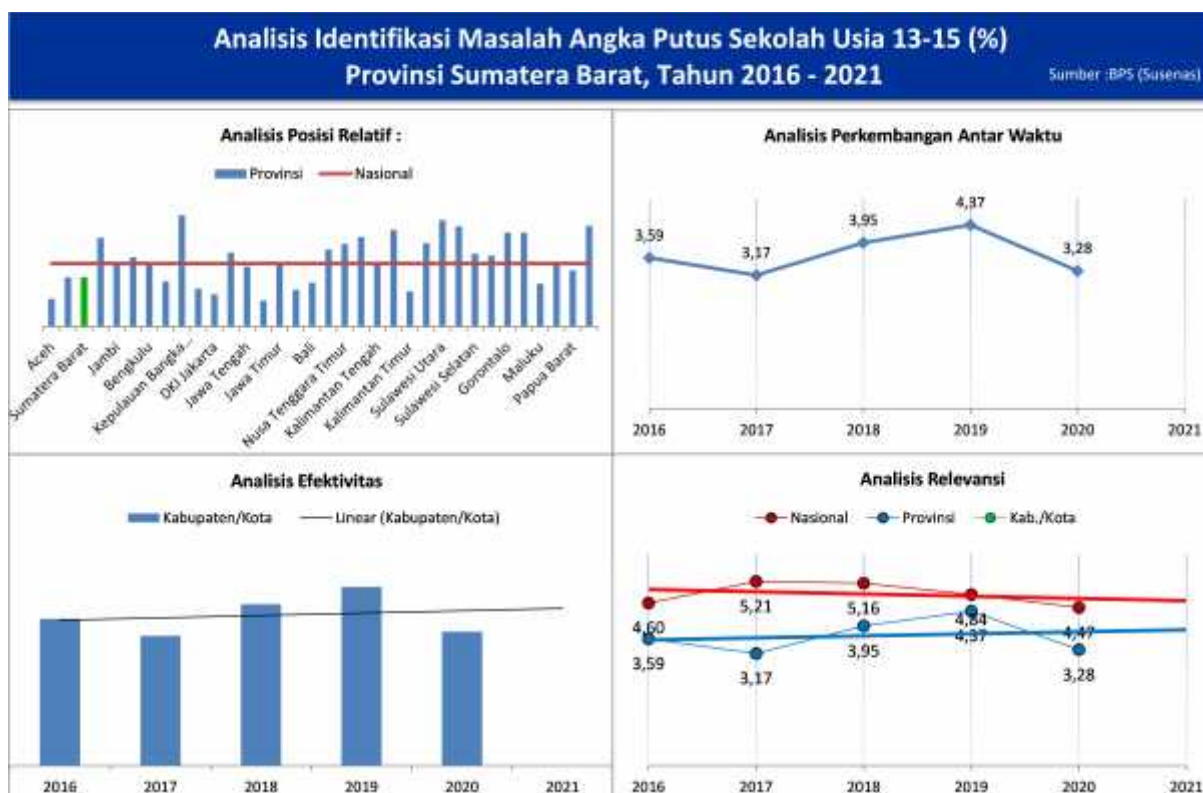
Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Putus Sekolah masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir untuk jenjang pendidikan SD/MI Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,59%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 1,87 % dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (78,75%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami kenaikan dari 77,66% tahun 2020 menjadi 78,73 % tahun 2021. Di

tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif 1,07 % dari tahun 2020 ke 2021 dengan relevansi pertumbuhan 78,75

3.2.4.5. Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)

Gambar 3.8
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus sekolah 13 - 15 (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Putus Sekolah 13-15 pada jenjang pendidikan SMA/MSD/MI menunjukkan, capaian Provinsi Sumatera Barat 78,75%, sementara capaian rata-rata nasional 80,59 %, atau masih terdapat gap 1,87%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APS untuk jenjang pendidikan setara SD/MI, sementara provinsi lainnya, termasuk Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 7 s/d 12 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan sd/MI.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan

anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI di Provinsi Sumatera Barat perkembangan yang berfluktuatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 76,19 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SSD.MI. Kemudian naik menjadi sebesar 77,95% pada tahun 2017, akan tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 76,10%. Pada tahun 2019 hanya naik 1,87 % atau rata-rata 77,97 % dan tahun 2020 77,66%. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 78,75% Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 1,07 %.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 7 s.d 12 tahun ke jenjang pendidikan SD/MI dalam lima tahun terakhir (2016-2021) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 1,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sumatera Barat.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Putus Sekolah masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir untuk jenjang pendidikan SD/MI Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,59%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 1,87 % dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (78,75%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami kenaikan dari 77,66% tahun 2020 menjadi 78,73 % tahun 2021. Di tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif 1,07 % dari tahun 2020 ke 2021 dengan relevansi pertumbuhan 78,75

3.2.4.6. Angka Putus Sekolah Usia 15-18 (%)

Gambar 3.9
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus sekolah 15 - 18 (%)
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi Relatif Angka Putus Sekolah 7-12 pada jenjang pendidikan SMA/MSD/MI menunjukkan, capaian Provinsi Sumatera Barat 78,75%, sementara capaian rata-rata nasional 80,59 %, atau masih terdapat gap 1,87%. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sepuluh provinsi yang bisa melampaui rata-rata capaian APS untuk jenjang pendidikan setara SD/MI, sementara provinsi lainnya, termasuk Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat usia setara 7 s/d 12 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan sd/MI.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI di Provinsi Sumatera Barat perkembangan yang berfluktuatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 76,19 % penduduk berpartisipasi dijenjang pendidikan setara SSD.MI. Kemudian naik menjadi sebesar 77,95% pada tahun 2017, akan tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 76,10%. Pada tahun

2019 hanya naik 1,87 % atau rata-rata 77,97 % dan tahun 2020 77,66%. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 78,75% Kenaikan rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya 1,07 %.

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas untuk tingkat partisipasi penduduk Sumatera Barat usia 7 s.d 12 tahun ke jenjang pendidikan SD/MI dalam lima tahun terakhir (2016-2021) rerata kenaikan pertahun terbilang rendah hanya 1,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa program wajib belajar belum efektif terimplementasi dengan baik di masyarakat Sumatera Barat.

Analisis Relevansi

Analisis Relevansi melihat apakah Angka Putus Sekolah masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) terakhir untuk jenjang pendidikan SD/MI Jika dibandingkan dengan capaian secara nasional (80,59%) belum menunjukkan hasil yang relevan karena masih terdapat gap 1,87 % dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (78,75%). Namun demikian dari segi perkembangan angka partisipasi murni secara nasional mengalami kenaikan dari 77,66% tahun 2020 menjadi 78,73 % tahun 2021. Di tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif 1,07 % dari tahun 2020 ke 2021 dengan relevansi pertumbuhan 78,75

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Analisis Determinan Kemiskinan

Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Teori Perubahan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan.

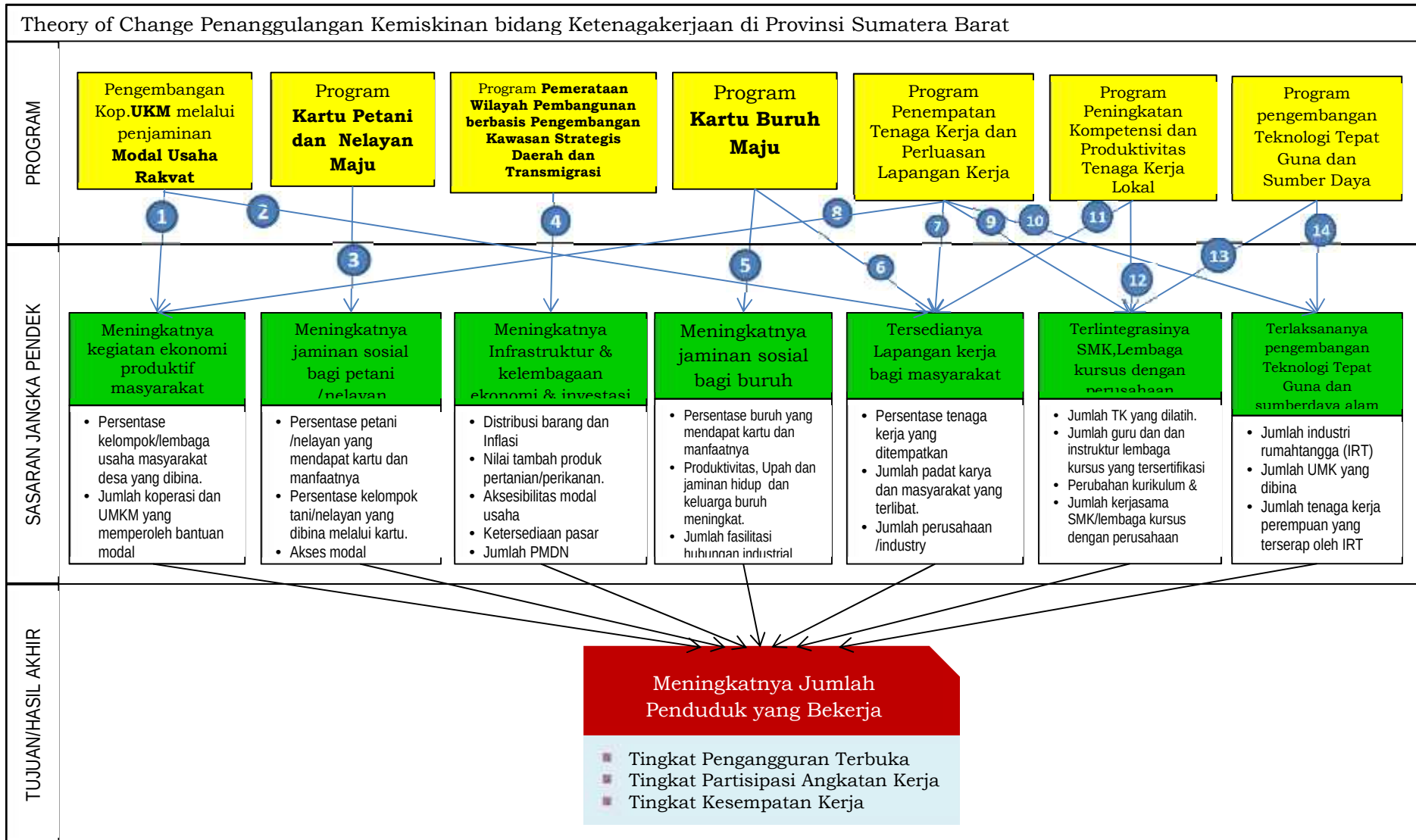
Teori Perubahan menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat dalam suatu inisiatif, yaitu, hasil jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Perubahan yang diidentifikasi dipetakan - sebagai "jalur hasil" - menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis dengan yang lainnya, serta alur kronologis. Hubungan antara hasil dijelaskan oleh "alasan" atau pernyataan mengapa satu hasil dianggap sebagai prasyarat untuk yang lain.

4.1.1. Theory of Change (ToC)/Logika Program

Theory of Change (ToC)/Logika Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat diurai dalam bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dan Kemiskinan. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

4.1.1.1. Analisis ToC Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.1. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan keterkaitan program penanggulangan kemiskinan melalui bidang ketenagakerjaan dengan sasaran kinerja yang diperoleh pada periode 2016-2020 adalah:

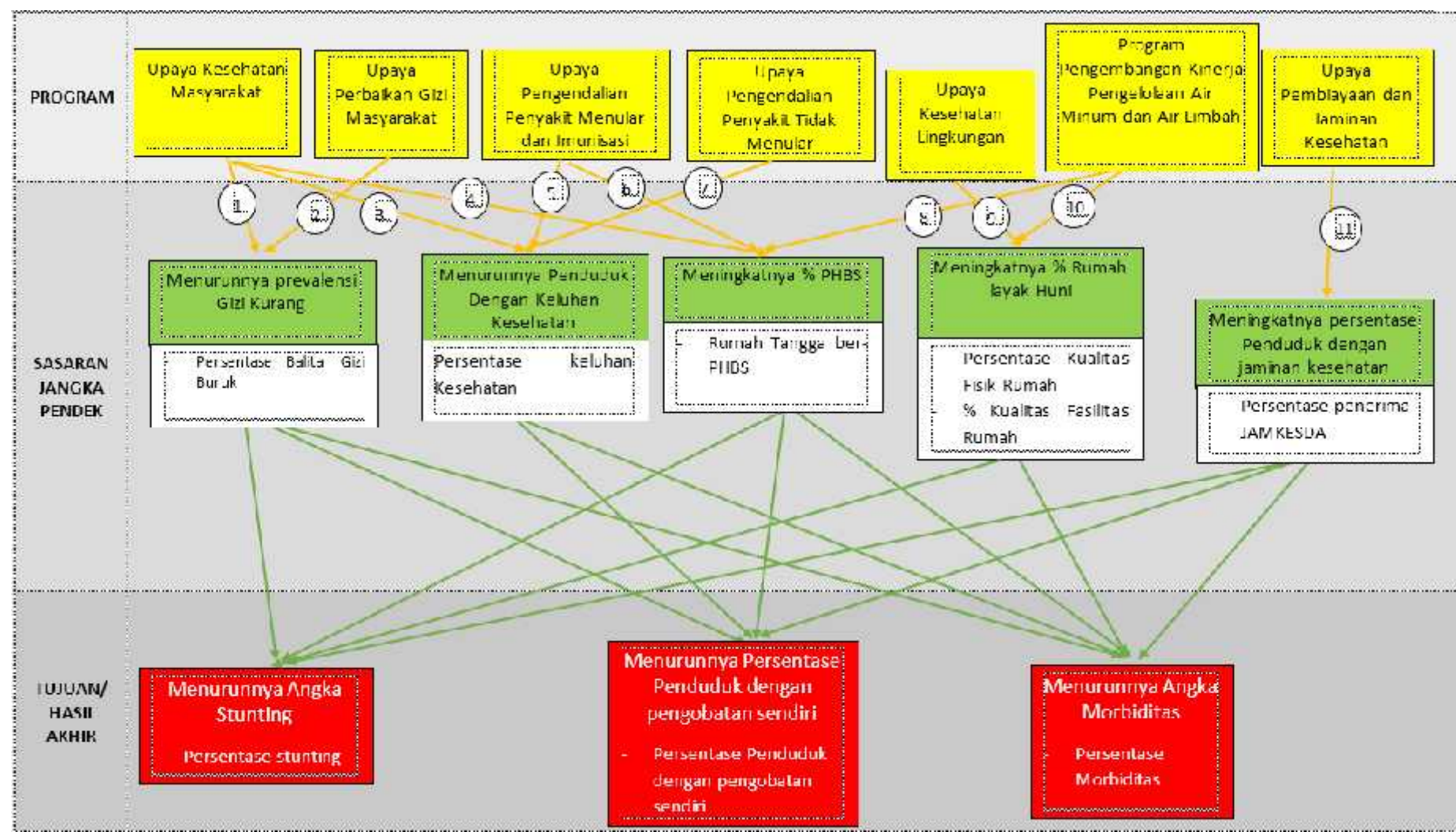
1. Program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produk produktif masyarakat. Indikator jangka pendek dari sasaran program tersebut adalah meningkatnya persentase kelompok usaha mikro (petani, nelayan, peternak dan usaha pengolahan hasil pertanian), dan kelompok lembaga non formal (kelompok perempuan dan pemuda, karang taruna, dan penyandang disabilitas). Selain itu program tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus peningkatan kapasitas modal usaha. Peningkatan jumlah jenis, modal skala usaha pertanian, koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan selanjutnya kesejahteraan masyarakat.
2. Selain menumbuhkan UMKM, program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan calon wirausaha.
3. Program pemerataan wilayah dan pembangunan berbasis pengembangan kawasan strategis daerah dan transmigrasi memiliki sasaran untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka memperlancar distribusi barang, membangun kelembagaan ekonomi guna mendukung peningkatan nilai tambah produk dan skala usaha dan investasi usaha agroindustri di daerah pedesaan. Lancarnya distribusi barang dari produsen di pedesaan ke pusat pasar diharapkan dapat menurunkan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Keterkaitan antara program pengembangan kawasan dan indikator ketenagakerjaan adalah pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi dan investasi di kawasan strategis dan transmigrasi dapat menyediakan lapangan kerja di pedesaan, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan usaha mikro dan kecil sehingga keberlanjutan pekerjaan di pedesaan tetap terjaga, meningkatkan TPAK serta menurunkan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan.
4. Indikator sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, produktivitas tenaga kerja terutama buruh, dan mempertahankan keberlanjutan hubungan antara pekerja dan perusahaan sehingga menekan angka pengangguran.
5. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Indikator sasaran jangka pendek terkait program ini adalah meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di daerah perkotaan dalam bentuk program padat karya yang sifatnya mendukung pendapatan kepala rumahtangga oleh anggota keluarga.

6. Program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan juga ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di wilayah pedesaan. Indikator sasaran jangka pendek lainnya adalah adanya kemudahan investor dalam menginvestasikan modalnya bagi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tumbuhnya kegiatan usaha ekonomi produktif dan penciptaan wirausaha baru diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
7. Sasaran lain program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan juga ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan perusahaan dalam penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan. Perusahaan berpartisipasi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan perusahaan, sehingga penempatan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan pekerja.
8. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan sumberdaya alam local.
9. Program kompetensi dan produktivitas memiliki indikator sasaran jangka pendek bagi penciptaan lapangan, dimana hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat diharapkan dapat mempercepat penyerapan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan local dan nasional.
10. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja memiliki indicator sasaran untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja local, dan peningkatan dan jumlah guru SMK serta instruktur lembaga pelatihan. Kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdampak pada meningkatnya kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan perusahaan/industry.
11. Indikator sasaran jangka pendek program peningkatan pengembangan teknologi tepat guna dan sumberdaya alam yakni terintegrasinya lembaga pendidikan dan pelatihan dengan masyarakat usaha dan yang berpotensi sebagai wirausaha baru dalam menyediakan teknologi pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Sasaran akhir program ini melalui indikator jangka pendek adalah penciptaan lapangan (kesempatan) kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
12. Sasaran program pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam adalah meningkatnya jumlah usaha-usaha skala rumah tangga (mikro), kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumberdaya alam lokal, dan ditindaklanjuti dengan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Sasaran program ini pengembangan teknologi tepat guna umumnya ditujukan pada masyarakat pedesaan terutama kelompok perempuan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berbasis pengolahan komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.

4.1.1.2. Analisis ToC Bidang Kesehatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.

Theory of Change Bidang Kesehatan Propinsi Sumatera Barat



Gambar 4.2. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat

A. Keterangan (Kegiatan Program):

1. Promosi tentang makanan bergizi,
2. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga kurang mampu
3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bagi keluarga kurang mampu
4. Kegiatan yang berpengaruh langsung pada PHBS bagi keluarga kurang mampu
5. Program imunisasi lengkap bagi keluarga kurang mampu
6. Bimbingan dan pengendalian penyakit menular bagi keluarga kurang mampu
7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa bagi keluarga kurang mampu
8. Kesadaran pemanfaatan air dengan kualitas yang baik bagi keluarga kurang mampu
9. Penyediaan dan pengamanan kualitas air dan sanitasi bagi keluarga kurang mampu
10. Penyediaan akses air minum bagi keluarga kurang mampu
11. Penambahan jumlah penerima JAMKESDA bagi keluarga kurang mampu.

B. Prioritas Intervensi

Logika program (*Theory Of Change*) bidang kesehatan menunjukkan bahwa untuk menurunkan angka stunting memiliki 4 determinan kunci yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang, meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi keluarga kurang mampu, meningkatnya persentase rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan persentase keluarga kurang mampu atas jaminan kesehatan.

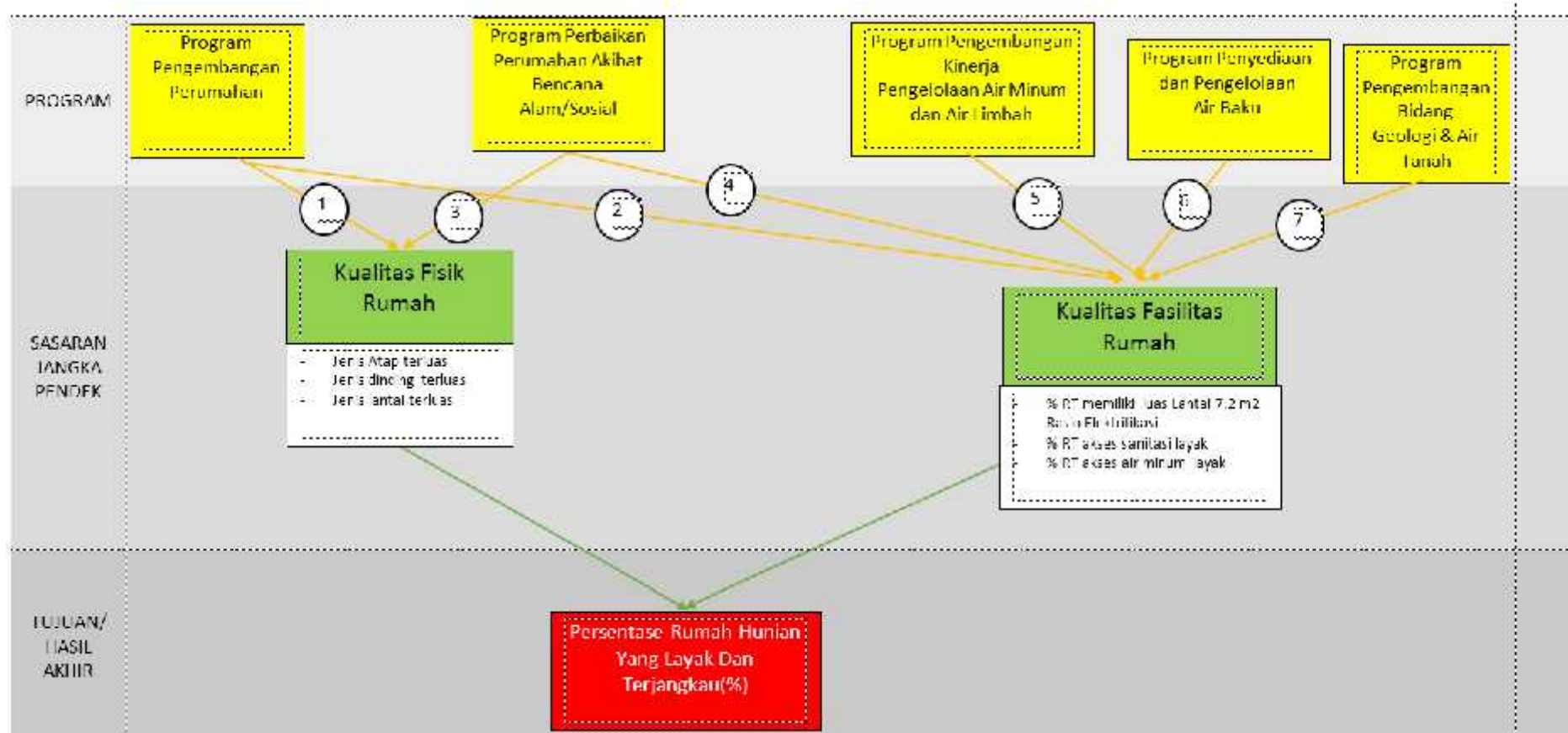
Berbeda dengan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri. Determinan kuncinya antara lain menurunnya prevalensi gizi kurang, menurunnya persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan persentase penduduk kurang mampu dengan jaminan kesehatan.

Sementara itu, untuk menurunkan tingkat kesakitan penduduk, memiliki determinan yang lebih kompleks yaitu menurunkan prevalensi gizi kurang, menurunkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, meningkatkan PHBS, meningkatnya % rumah layak huni dan meningkatnya penduduk dengan jaminan kesehatan.

4.1.1.3. Analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, berikut analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.

Theory of Change Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar Propinsi Sumatera Barat



Gambar 4.3. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Infrastruktur Dasar di Provinsi Sumatera Barat

A. Keterangan (Kegiatan Program)

1. Penyediaan rumah sehat bagi keluarga kurang mampu
2. Penyediaan fasilitas rumah bagi keluarga kurang mampu
3. Rehab rumah bagi korban bencana
4. Penyediaan fasilitas rumah bagi korban bencana
5. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi keluarga kurang mampu
6. Penyediaan air baku bagi keluarga kurang mampu
7. Penyediaan akses air minum layak di kawasan yang tidak terakses jaringan perpipaan bagi keluarga kurang mampu.

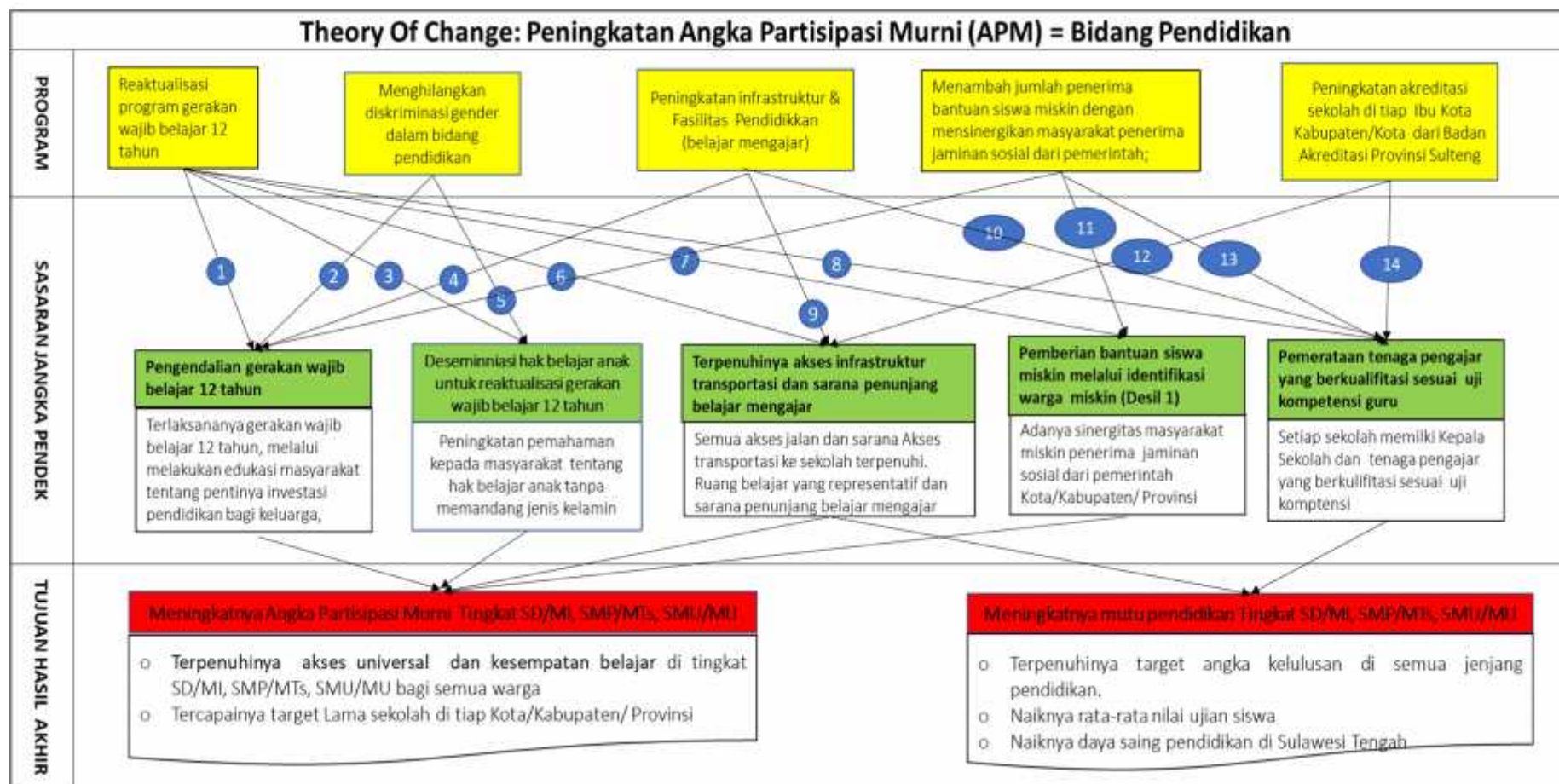
B. Prioritas Intervensi

Untuk meningkatkan presentase rumah layak huni, memiliki 2 determinan yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah memiliki 3 determinan yaitu jenis atas terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sementara itu, kualitas fasilitas rumah dipengaruhi oleh luas lantai rumah, penggunaan penerangan rumah (Listrik), ketersediaan air minum layak dan ketersediaan sanitasi layak.

4.1.1.4. Analisis ToC Bidang Pendidikan

Program Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)

- o Secara umum data Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MD kisaran usia 7 s/d 12 tahun kurun waktu 2016-2020 rata-rata capainnya 98,60%, diatas capaian rata-rata nasional 97,38%.
- o Jika merujuk pada data APM jenjang pendidikan SMP/MTs kisaran usia 13 s/d 15 tahun waktu 2016-2020 rata rata capainnya 77,25 %, dibawah angka APM nasional 78,69%.
- o Data APM Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2020 kisaran usia 16-18 tahun capaiannya rata-rata 67,87 % melebihi capaian rata-rata nasional 60,61%.



Gambar 4.4. Theory Of Change Peningkatan Angka Partisipasi Murni(APM) = Bidang Pendidikan

Sebagaimana yang telah diurai pada Bab III tentang Profil Kemiskinan, masalah pendidikan menjadi salah satu indikator penyebab tinggi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Sumber masalah tersebut bermuara pada soal APM, dari tingkat SD/MI, SMP/MTs.

A. Program Utama

Dari fakta seperti itu, hingga dalam analisis Theory Of Change Bidang Pendidikan yang menyoroti secara khusus soal APM di Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan lima determinan kunci, yang akan menjadi program bidang pendidikan yang diharapkan akan menaikkan APM masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Kelima program utama bidang pendidikan tersebut adalah:

1. Reaktualisasi gerakan program Wajib Belajar 12 Tahun
2. Menghilangkan diskriminasi gender dalam bidang pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur & Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar)
4. Menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah;
5. Peningkatan akreditasi sekolah di tiap Ibu Kota Kabupaten/Kota dari Badan Akreditasi Provinsi Sumbar.

Hal yang mendasari lahirnya lima program tersebut:

Pertama: Program Reaktuliasi gerakan program wajib belajar 12 Tahun.

Program Wajib Belajar 12 tahun gratis dalam mewujudkan “Indonesia Pintar” mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2015. Plaksanaan program wajar 12 tahun diharapkan dapat berjalan pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Untuk mewujudkan program wajib belajar tersebut dibutuhkan instrumen pendukung, mulai dari perencanaan, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan dilapangan.

Dasar hukum yang mendasari lahirnya program Wajib Belajar belajar 12 tahun adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tap MPR No.9 tahun 2007 Tentang anggaran dana Pendidikan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan.

Pencanangan program Wajar 12 tahun tersebut, dalam pelaksanaannya mempunyai konsekuensi. Konsekwensi pertama adalah semua anak bangsa akan wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah. Konsekwensi kedua, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan biaya (APBN/APBD) dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun gratis.

Kedua: Program Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar)

Salah satu masalah yang menjadi pemicu terjadinya penurunan APM di level sekolah menengah di Provinsi Sumatera Barat adalah terbatasnya sarana infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar). Data Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021 menunjukkan hal tentang Jumlah Desa1/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, 2018–2020. Untuk kategori SD terdapat 4103 unit bangunannya, mulai menurun pada jenjang pendidikan SMP, 1134 unit bangunan dan kembali berkurang menjadi 278 unit bangunan untuk kategori SMA dan 631 sekolah untuk kategori SMK.

Penurunan jumlah bangunan dari tingkat SD sampai SMA dan SMK tersebut berkorelasi dengan penurunan APM dari jenjang Sekolah Dasar hingga sekolah menengah. Data yang ditampilkan tersebut untuk kategori unit bangunan, belum untuk kategori sarana fasilitas pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar. Inilah alasan yang mendasari hingga diperlukan adanya Program Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar).

Ketiga: Menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah;

Salah satu sumber masalah angka putus sekolah adalah, soal biaya yang menopang kebutuhan siswa di sekolah. Untuk menunjang peningkatan APM dari level sekolah dasar sampai menengah, diperlukan adanya bantuan siswa miskin berupa bea siswa khusus untuk warga kategori Desil 1. Begitu banyak ditemukan siswa yang memiliki prestasi baik namun bermasalah dalam hal biaya sekolah.

Keempat : Peningkatan akreditasi sekolah di tiap Ibu Kota Kabupaten/Kota dari Badan Akreditasi Provinsi Sulteng

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Variabel utama untuk dinilai dalam akreditasi adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 , khusus sekolah negeri yang dinilai, BAN-SM Sumbar telah mengeluarkan akreditasi untuk 1.130 sekolah. Jumlah itu terdiri dari 666 SD, 33 MI, 153 SMP, 97 MTS, 53 SMA, 48 MA, 26 SMK dan 54 SLB. Akreditasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 784 sekolah, kemudian pada tahap dua sebanyak 346. Dari angka tersebut, akreditasi sekolah paling pada peringkat B sebanyak 50 persen, peringkat A hanya 38 persen, sementara peringkat C sebanyak 12 persen.

Fakta ini memperlihatkan bahwa untuk masalah pendidikan di Sumatera Barat masih bermasalah untuk beberapa hal, seperti mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

B. Sasaran Jangka Pendek.

Dari lima program utama bidang pendidikan, sasaran jangka pendek yang mau dicapai bertalitemali dengan program utama hingga menjadi kesatuan sistem yang menopang program pendidikan yang bertujuan pada peningkatan APM di Sumatera Barat.

1. Pengendalian gerakan wajib belajar 12 tahun

Target yang akan di capai:

Terlaksananya gerakan wajib belajar 12 tahun, melalui melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga,

2. Deseminniasi hak belajar anak untuk reaktualisasi gerakan wajib belajar 12 tahun

Target yang akan di capai:

Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang hak belajar anak tanpa memandang jenis kelamin

3. Terpenuhinya akses infrastruktur transportasi dan sarana penunjang belajar mengajar

Semua akses jalan dan sarana Akses transportasi ke sekolah terpenuhi. Ruang belajar yang representatif dan sarana penunjang belajar mengajar

4. Pemberian bantuan siswa miskin melalui identifikasi warga miskin (Desil 1)

Target yang akan di capai:

Adanya sinergitas masyarakat miskin penerima jaminan sosial dari pemerintah Kota/Kabupaten/ Provinsi

5. Peningkatan akreditasi status sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah

Target yang akan di capai:

Setiap kecamatan memiliki satu sekolah dengan kulifikasi A dari jenjang SD hingga sekolah menengah pertama dan atas.

C. Tujuan Hasil Akhir

Terdapat dua tujuan hasil akhir yang akan dicapai;

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU, dengan utama;

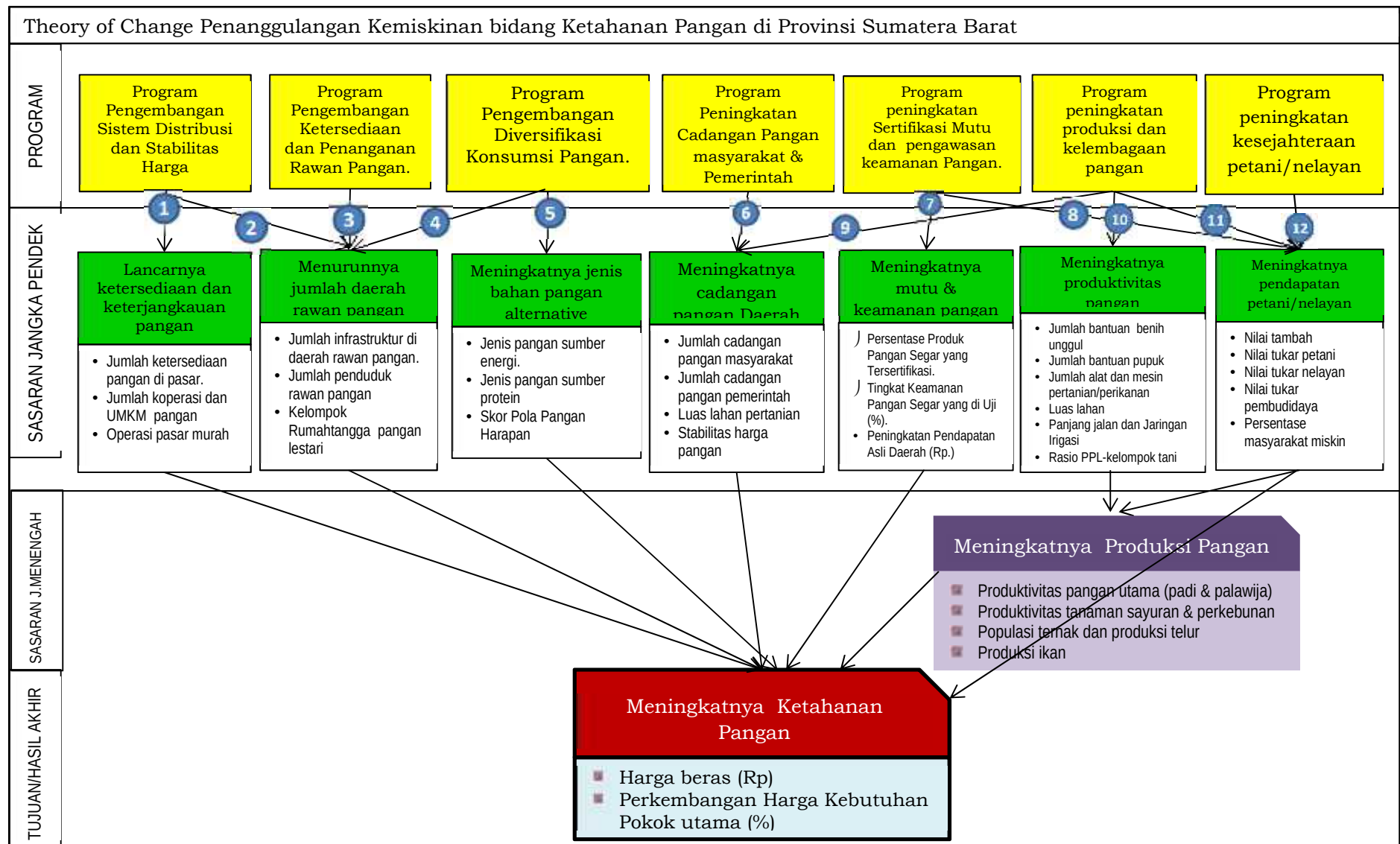
- o Terpenuhinya akses universal dan kesempatan belajar di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU bagi semua warga
- o Tercapainya target Lama sekolah di tiap Kota/Kabupaten/ Provinsi

2. Meningkatnya mutu pendidikan Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/MU, dengan target utama;

- o Terpenuhinya target angka kelulusan di semua jenjang pendidikan.
- o Naiknya rata-rata nilai ujian siswa
- o Naiknya daya saing pendidikan di Sumatera Barat.

4.1.1.5. Analisis ToC Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.5. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang ketahanan pangan dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020:

1. Lancarnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan sasaran jangka pendek program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan. Kegiatan ini dilakukan secara sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Indikator sasaran jangka pendek yang diperoleh dari pelaksanaan program adalah jumlah ketersediaan stok pangan di pasar, jumlah koperasi dan usaha perdagangan (UMKM) yang difasilitasi pemerintah dalam melakukan operasi pasar murah.
2. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan juga memiliki sasaran jangka pendek dalam menurunkan jumlah daerah rawan pangan. Bentuk indikator sasaran kegiatan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan jumlah infrastruktur di daerah rawan pangan, dan menurunnya jumlah penduduk di daerah rawan pangan.
3. Sasaran penurunan jumlah daerah rawan pangan di Sumatera Barat juga dilakukan melalui program pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Indikator sasaran yang dihasilkan dari program tersebut adalah meningkatnya ketersediaannya infrastruktur yang menunjang penurunan daerah rawan pangan seperti gudang pangan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan dari pusat produksi pangan. Penurunan daerah rawan pangan juga dilakukan dengan membentuk kelompok rumatangga pangan lestari (KRPL) sehingga keberadaan kelompok ini dalam jangka pendek mampu menutupi kebutuhan pangan keluarga.
4. Program pengembangan diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan alternative selain pangan utama pada daerah rawan pangan. Bentuk kegiatan KRPL adalah bantuan bibit dan benih sayuran serta ternak ruminansia yang nantinya hasil kegiatan digunakan untuk subsisten.
5. Penyediaan pangan utama dan alternative umumnya melalui program diversifikasi dilakukan oleh petani, peternak dan nelayan, dan juga oleh rumah tangga miskin. Ketersediaan pangan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang mencapai minimal 2.200 kkal, dan sumber protein bagi masyarakat. Terpenuhinya pangan untuk sumber energy dan protein dapat meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan. Indikator kinerja akhir dari pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan adalah selain untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, juga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan protein per kapita penduduk.
6. Program peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah memiliki sasaran untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembelian bahan pangan terutama beras dari petani jika terjadi over produksi di tingkat petani dan melakukan stabilitas harga beras dengan menyalurkan beras di pasar. Peningkatan cadangan pangan pemerintah juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui impor beras lalu disalurkan ke daerah-daerah rawan pangan atau bagi masyarakat miskin. Tujuan akhir dari program dan kegiatan

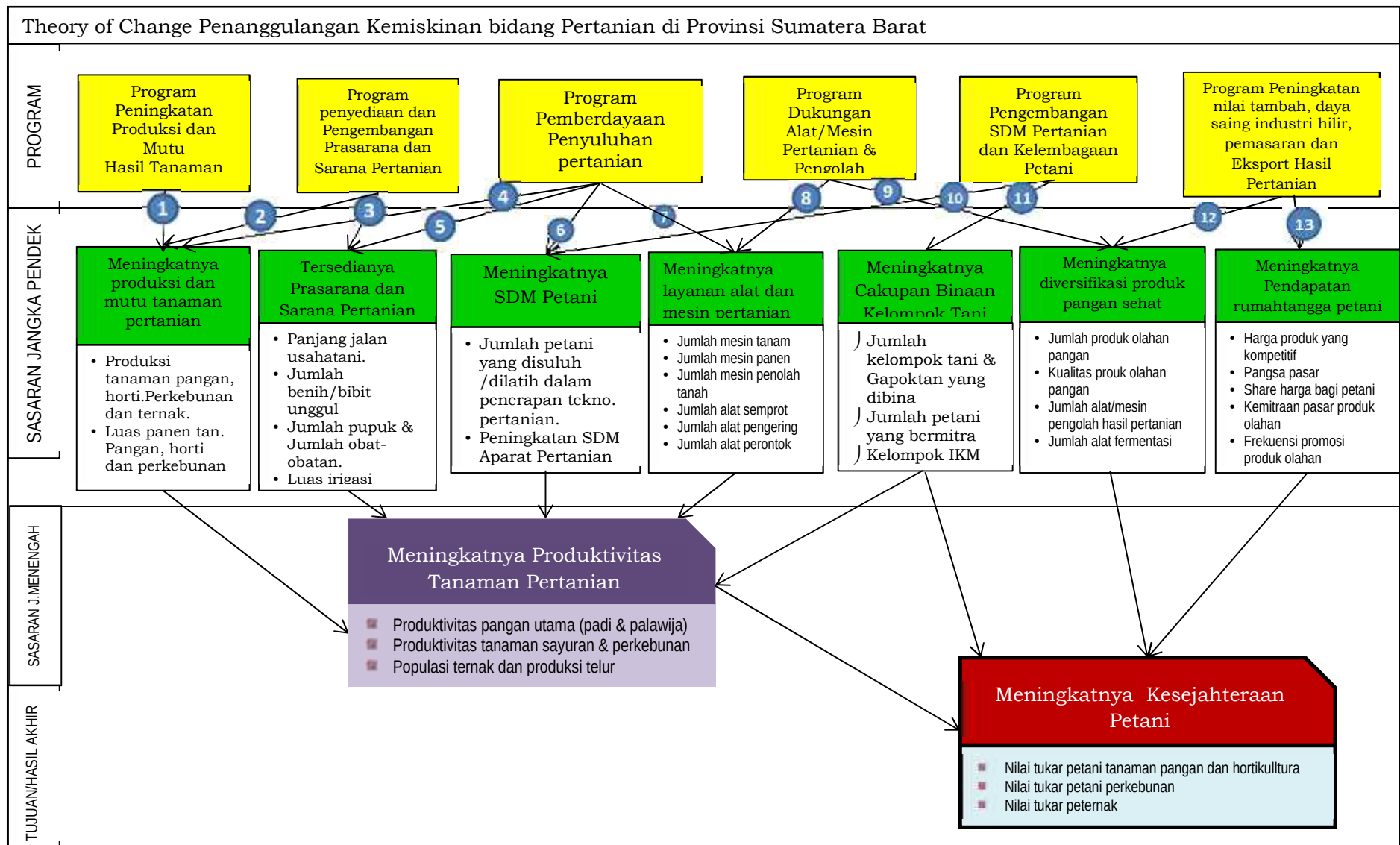
peningkatan ketersediaan cadangan pangan adalah terjangkau nya harga beras bagi konsumen.

7. Pemerintah Sumatera Barat juga memprogram peningkatan sertifikasi mutu dan pengawasan keamanan pangan. Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa indikator jangka pendek yang dihasilkan dalam program ini adalah meningkatnya persentase pangan segar yang tersertifikasi mutunya yang dijual ke pasar, tingkat keamanan pangan segar yang dikonsumsi meningkat dan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah melalui kegiatan sertifikasi pangan.
8. Sasaran jangka pendek lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan program sertifikasi mutu dan pengawasan keamanan pangan adalah meningkatnya pendapatan petani, nelayan, pembudidaya dan industri (usaha) mikro (rumah tangga) dan kecil pengolahan hasil pertanian. Hal ini diperoleh dari meningkatnya nilai tambah produk yang ditimbulkan dari komoditi maupun produk yang sudah teruji mutu dan keamanannya sehingga konsumen memiliki kepercayaan tinggi dalam mengkonsumsi barang yang dihasilkan dan berani membayar dalam nilai yang tinggi.
9. Program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan memiliki sasaran jangka pendek dalam meningkatkan cadangan pangan daerah melalui peningkatan luas lahan tanaman pangan (padi dan palawija) guna meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan bagi petani dijadikan sebagai cadangan pangan pemerintah melalui BULOG.
10. Sasaran jangka pendek program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan lainnya adalah peningkatan produktivitas pangan melalui kegiatan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. Indikator kegiatan tersebut meliputi perعتakan sawah baru (ekstensifikasi), jumlah bantuan benih bermutu (unggul) bagi petani setiap jenis komoditi pangan, jumlah bantuan pupuk kepada petani tanaman pangan, jumlah bantuan peralatan dan mesin. Guna mendukung produktivitas dan peningkatan aksesibilitas pasar, selanjutnya dilakukan kegiatan pengembangan jaringan irigasi dan pembangunan jalan usahatani. Hasil akhir yang diperoleh dari meningkatnya produktivitas akibat dari ketersediaan sarana produksi, prasarana jalan dan irigasi serta perbaikan kelembagaan kelompok tani/nelayan adalah meningkatnya produksi pangan utama (padi dan palawija), sayur-sayuran, populasi ternak dan produksi ikan.
11. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan juga merupakan sasaran jangka pendek dari pelaksanaan program peningkatan produksi dan kelembagaan pangan. Produksi pangan yang tinggi dan penataan kelembagaan pangan yang baik dan ditunjang oleh harga pangan kompetitif di pasar mampu meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan pembudidaya, serta mampu menurunkan masyarakat miskin.
12. Sasaran jangka pendek program peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani dan nelayan. Indikator kinerja kegiatan yang diperoleh meliputi meningkatnya nilai tambah dari produk pangan yang dihasilkan, dan Nilai Tukar Petani/Nelayan/Pembudidaya yang berada di atas nilai indeks 100. Sasaran jangka menengah dari pelaksanaan

program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan ini adalah meningkatnya produksi pangan (padi, sayuran, hasil ternak, hasil perkebunan dan ikan). Peningkatan produksi pangan diperoleh dari peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan menyebabkan kemampuan dalam mengorganisasikan usahatani, usaha peternakan dan usaha perikanan menjadi lebih optimal mengingat akumulasi modal yang diperoleh dengan meningkatnya pendapatan dapat mudah dialokasi baik untuk kebutuhan usahanya maupun untuk kebutuhan rumahtangga lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, social, dan pakaian. Sasaran akhir dari program ini adalah stabilitas harga kebutuhan pokok lebih terjaga.

4.1.1.6. Analisis ToC Bidang Pertanian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Pertanian Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.6. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Pertanian di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang pertanian dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020 di Provinsi Sumatera Barat:

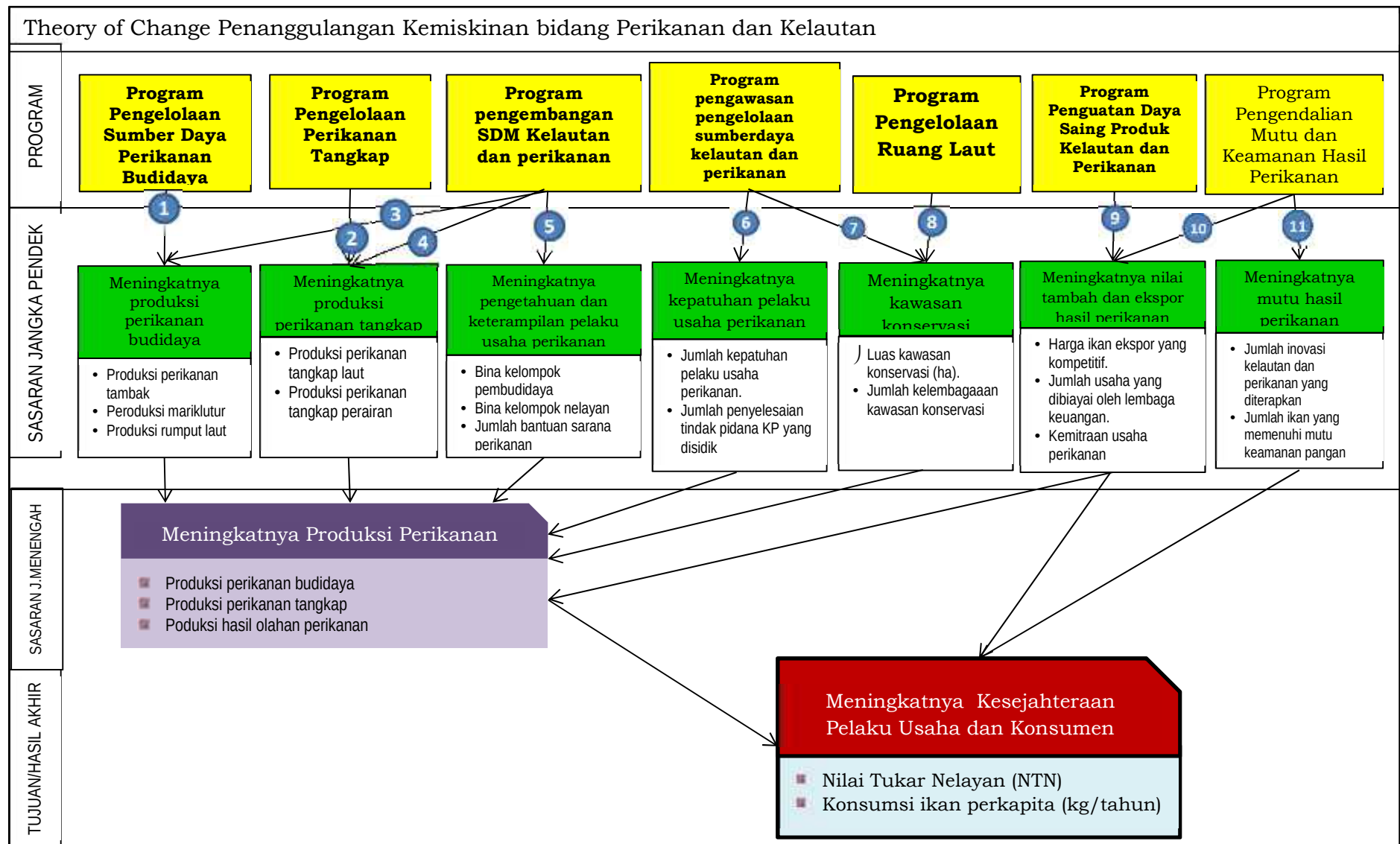
1. Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Selain peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman, juga diikuti dengan peningkatan luas panen dan kesuburan melalui penggunaan pupuk organik dan penggunaan teknologi pertanian lainnya. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian terutama tanaman pangan juga dapat dicapai melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
3. Pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian memiliki sasaran jangka pendek dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian seperti peningkatan panjang jalan usahatani, penyediaan benih/bibit bermutu, penyediaan pupuk dan obata-obatan dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat, serta peningkatan dan perbaikan saluran irigasi. Dengan tercapainya penyediaan prasarana dan sarana tersebut akan terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
4. Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman juga melalui program pemberdayaan penyuluhan pertanian, yang memiliki indikator peningkatan produksi tanaman dan peternakan.
5. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni mengawal penyediaan prasarana dan sarana pertanian agar dapat diaplikasikan oleh petani sesuai dengan metode dan anjuran pelaksanaannya guna meningkatkan produktivitas tanaman.
6. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian memiliki sasaran jangka pendek yang utama yakni meningkatnya sumberdaya manusia petani yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah petani yang mendapat penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penerapan teknologi pertanian yang disuluhkan. Selain itu program mengharapkan adanya peningkatan jumlah petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan kualitas SDM dalam mendampingi petani. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman, ternak dan kesejahteraannya.
7. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian juga memiliki sasaran jangka pendek yakni mengawal penyediaan alat/mesin pertanian dan pengolah agar dapat digunakan oleh petani sesuai dengan cara/teknik pelaksanaannya guna meningkatkan produktivitas tanaman.
8. Program dukungan alat dan mesin pertanian memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya layanan alat dan mesin pertanian dengan beberapa indikator kegiatan yakni jumlah alat/mesin tanam, mesin pengolah tanah, mesin panen, alat semprot, jumlah perontok dan pengering hasil panen. Keberadaan peralatan dan mesin yang sesuai dengan

penggunaannya dalam jangka menengah dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil panen, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.

9. Program dukungan alat dan mesin pertanian dan pengolahan juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk pangan yang sehat dan higienis. Secara spesifik indikator sasaran jangka pendek tersebut ditunjukkan oleh jumlah alat pengolahan, variasi jenis produk yang dihasilkan dan mutu produk yang dihasilkan yang semakin meningkat. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan peternak sebagai pengolahan hasil.
10. Meningkatnya sumberdaya manusia petani juga dapat dicapai melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. Capaian indikator kelembagaan petani melalui kelompok ditujukan agar peningkatan SDM petani diperoleh dari interaksi dalam kelompok tani dan gabungan kelompok taninya guna meningkatkan pengetahuan dan teknologi budidaya. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
11. Program pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan petani memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya cakupan bina kelompok tani. Indikator sasaran yang dicapai meliputi jumlah kelompok tani dan gapoktan yang dibina terutama dalam pengelolaan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemitraan dengan pengusaha pengolahan dan pedagang hasil pertanian. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani, dan peternak.
12. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk olahan hasil pertanian, dan mutu produk dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Indikator sasaran yang dicapai meliputi meningkatnya jumlah produk olahan, kualitas atau mutu produk olahan, jumlah alat yang dimiliki baik pasca panen dan alat pengolahan menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi. Pencapaian sasaran jangka pendek tersebut akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan peternak.
13. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya pendapatan rumah tangga petani dan peternak. Indikator sasaran jangka pendek secara spesifik yang diperoleh meliputi harga produk olahan yang kompetitif, meningkatnya pangsa pasar, meningkatnya share harga yang diterima petani, dan meningkatnya promosi produk olahan dapat meningkatkan kerjasama dengan mitra pasar dan pemasar produk olahan. Tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani, peternak dan industri pengolahan hasil pertanian.

4.1.1.7. Analisis ToC Bidang Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 4.7. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan bidang Perikanan dan Kelautan di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan dalam bidang perikanan dan kelautandengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020:

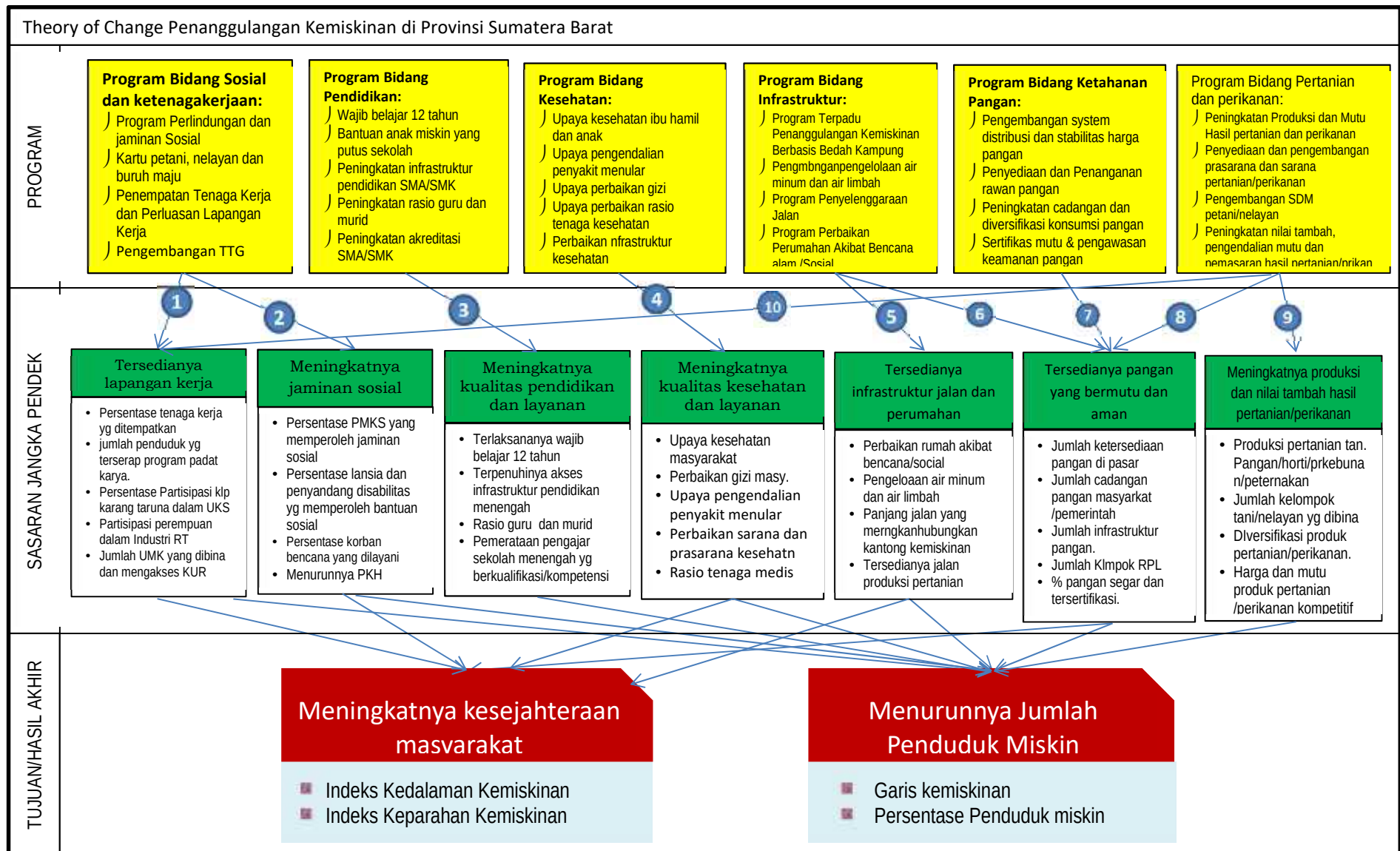
1. Program pengelolaan perikanan budidaya memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan budidaya yang terdiri dari produksi tambak (udang dan bandeng), produksi marikultur (karamba jaring), dan produksi rumput laut. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan budidaya dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan pembudidaya sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
2. Program pengelolaan perikanan tangkap memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan tangkap yang terdiri dari produksi perikanan tangkap laut (3 kelompok ikan: pelagis, demersal dan karang), dan produksi perikanan tangkap di perairan umum. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan tangkap dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan nelayan sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
3. Pelaksanaan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni produksi perikanan budidaya dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan teknologi budidaya guna meningkatkan produksi perikanan budidaya.
4. Pelaksanaan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan juga memiliki sasaran jangka pendek yakni produksi perikanan tangkap dalam bentuk pendampingan dalam pemberian bantuan teknologi penangkapan ikan guna meningkatkan produksi perikanan tangkap.
5. Program pengembangan SDM kelautan dan perikanan juga memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan. Program ini memiliki beberapa indikator sasaran yakni peningkatan pembinaan kelompok nelayan dan pembinaan kelompok budidaya, serta pendampingan dalam pengaplikasian teknik budidaya dan penangkapan ikan.
6. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan memiliki sasaran utama jangka pendek yakni meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui beberapa indikator sasaran yakni jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam menerapkan UU perikanan, dan jumlah penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dipertanggungjawabkan. Penerapan program ini berdampak pada peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
7. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan juga memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya kawasan konservasi. Indikator sasarannya adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi melalui terbentuknya lembaga yang mengelola kawasan konservasi dan berbasis masyarakat.
8. Program pengelolaan ruang laut juga memiliki sasaran jangka pendek yang sama dengan program pengawasan yakni meningkatnya kawasan konservasi. Indikator sasarannya adalah meningkatnya luas kawasan konservasi dan terbentuknya lembaga yang mengelola kawasan konservasi. Peningkatan luas kawasan konservasi dan terbentuknya lembaga konservasi

laut mampu meningkatkan populasi ikan dan hasil tangkapan nelayan, serta kelestarian ekosistem pesisir dan lautan.

9. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya nilai tambah dan ekspor hasil perikanan, dengan beberapa indikator sasaran spesifik yakni meningkatnya nilai jual produk ekspor perikanan yang kompetitif, jumlah usaha perikanan yang dibiayai lembaga permodalan dan kemitraan usaha perikanan. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pelaku usaha pemasaran perikanan.
10. Meningkatnya nilai tambah dan ekspor hasil perikanan juga dapat dicapai melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk perikanan ekspor.
11. Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya mutu hasil perikanan dengan indikator sasaran spesifik yakni jumlah (volume) ikan dan turunannya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu meningkatnya jumlah inovasi perikanan dan yang diterapkan oleh pelaku usaha perikanan guna menjamin keamanan pangan ikan. Jaminan mutu dan keamanan pangan dapat mempertahankan nilai gizi dan meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat Sumatera Barat.

4.1.1.8. Analisis ToC Penanggulangan Kemiskinan Bidang Konsumsi

Analisis ToC Penanggulangan kemiskinan bidang konsumsi merupakan kombinasi dari seluruh program dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Program-program yang ditampilkan merupakan program strategis pemerintah daerah Sumatera Barat pada periode 2016-2020 guna mengurangi tingkat kemiskinan. Analisis ToC Penanggulangan Kemiskinan bidang konsumsi di Provinsi Sumatera Barat diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 4.8. Theory of Change Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan konsumsi dengan sasaran yang diperoleh pada periode 2016-2020 di Provinsi Sumatera Barat:

1. Program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui penjaminan modal usaha ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produk produktif masyarakat. Indikator jangka pendek dari sasaran program tersebut adalah meningkatnya persentase kelompok usaha mikro (petani, nelayan, peternak dan usaha pengolahan hasil pertanian), dan kelompok lembaga non formal (kelompok perempuan dan pemuda, karang taruna, dan penyandang disabilitas). Selain itu program tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus peningkatan kapasitas modal usaha. Peningkatan jumlah jenis, modal skala usaha pertanian, koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan selanjutnya kesejahteraan masyarakat.
2. Sasaran program penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Indikator sasaran jangka pendek terkait program ini adalah meningkatnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di daerah perkotaan dalam bentuk program padat karya yang sifatnya mendukung pendapatan kepala rumahtangga oleh anggota keluarga.
3. Sasaran program pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam adalah meningkatnya jumlah usaha-usaha skala rumahtangga (mikro), kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumberdaya alam lokal, dan ditindaklanjuti dengan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Sasaran program ini pengembangan teknologi tepat guna umumnya ditujukan pada masyarakat pedesaan terutama kelompok perempuan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berbasis pengolahan komoditi pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Program utama bidang pendidikan adalah Reaktualisasi gerakan program Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan infrastruktur & Fasilitas Pendidikan (belajar mengajar), menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari pemerintah dan peningkatan rasio guru memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat melalui peningkatan APK, APM, rasio infrastruktur sekolah menengah dengan penduduk dan rasio guru murid.
5. Program promosi tentang makanan bergizi, pemberian makanan tambahan bagi keluarga kurang mampu memiliki sasaran untuk meningkatnya kesehatan masyarakat. Sementara program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bagi keluarga kurang mampu ditujukan untuk menurunkan kematian bayi dan ibu hamil. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa bagi keluarga kurang mampu.
6. Meningkatnya ketersediaan pemukiman layak huni dan ketersediaan air minum layak merupakan sasaran program infrastruktur khususnya penyediaan rumah sehat bagi keluarga kurang mampu, penyediaan fasilitas rumah bagi keluarga kurang mampu, rehab rumah bagi korban bencana,

penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi keluarga kurang mampu dan penyediaan fasilitas rumah bagi korban bencana. Selain itu untuk memperlancar distribusi bahan pangan, juga dilakukan program peningkatan infrastruktur jalan dari kantong kemiskinan dan jalan produk usahatani.

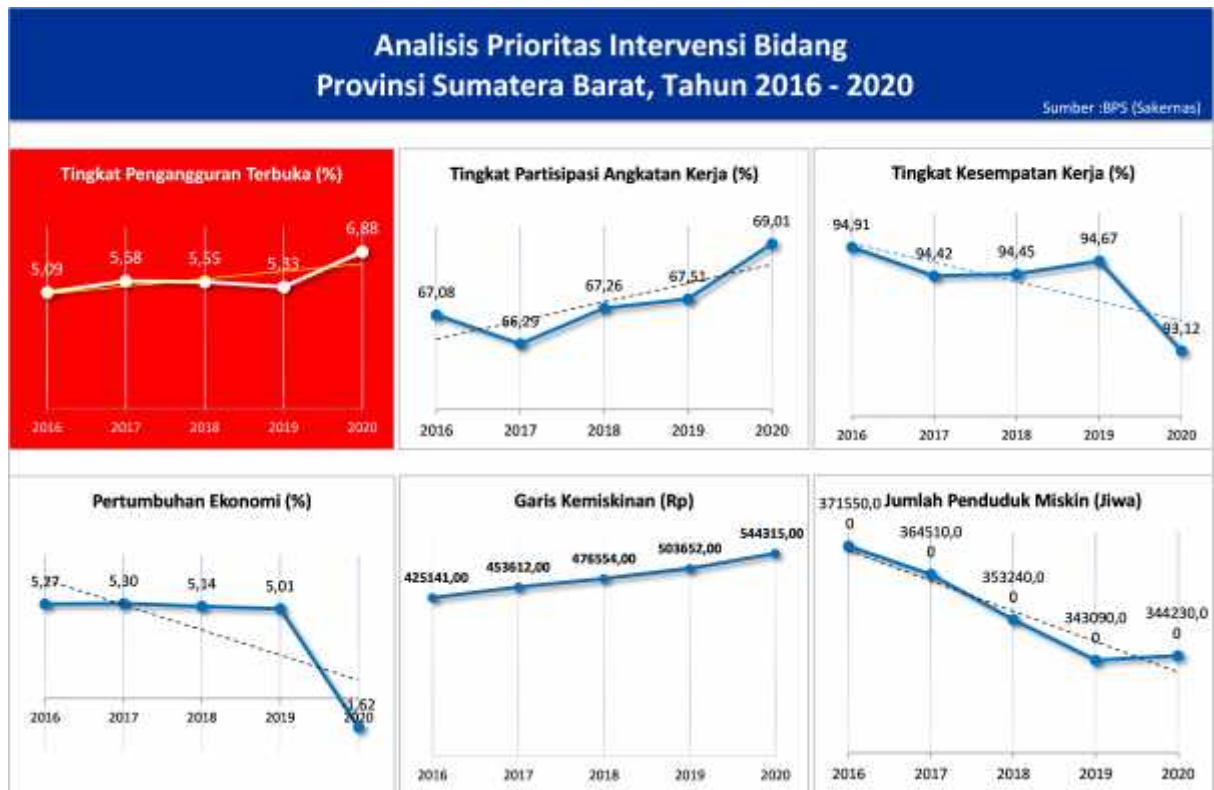
7. Tersedianya pangan bermutu dan aman merupakan sasaran jangka pendek program bidang ketahanan pangan yang meliputi program sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, penyediaan dan penanganan rawan pangan, cadangan pangan, diversifikasi dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan. Indikator sasaran jangka pendek yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah jumlah ketersediaan stok pangan di pasar, jumlah infrastruktur pangan, infrastruktur di daerah rawan pangan, RPL dan tersedianya pangan segar dan bermutu.
8. Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Selain peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman, juga diikuti dengan peningkatan luas panen, penyediaan saprodi, dan meningkatnya kesuburan melalui penggunaan pupuk organik dan penggunaan teknologi pertanian lainnya. Dengan tercapainya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peternak.
9. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian terutama tanaman pangan juga dapat dicapai melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui peningkatan panjang jalan usahatani, penyediaan benih/bibit bermutu, penyediaan pupuk dan obat-obatan dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat, serta peningkatan dan perbaikan saluran irigasi, peningkatan SDM petani, yang memiliki indikator peningkatan produksi tanaman dan peternakan, pembinaan kelompok tani dan gapoktan, kemitraan dengan pengusaha pengolah dan pedagang hasil pertanian. Dengan tercapaiannya sasaran jangka pendek tersebut terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani, dan peternak.
10. Program pengelolaan perikanan budidaya memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya produksi perikanan budidaya yang terdiri dari produksi tambak (udang dan bandeng), produksi marikultur (karamba jaring), dan produksi rumput laut. Peningkatan produksi pada seluruh sub sektor perikanan budidaya dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan pembudidaya sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.
11. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian memiliki sasaran jangka pendek yakni meningkatnya diversifikasi produk olahan hasil pertanian, dan mutu produk dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. Indikator sasaran yang dicapai meliputi meningkatnya jumlah produk olahan, kualitas atau mutu produk olahan, jumlah alat yang dimiliki baik pasca panen dan alat pengolah menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi. Pencapaian sasaran jangka pendek tersebut akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak.

4.1.2. Causal Attribution

Analisis Keterkaitan semua bidang (sebagai cara untuk menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana)

4.1.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang ketenagakerjaan di Sumatera Barat



Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Variabel Bidang Lain di Provinsi Sumatera Barat

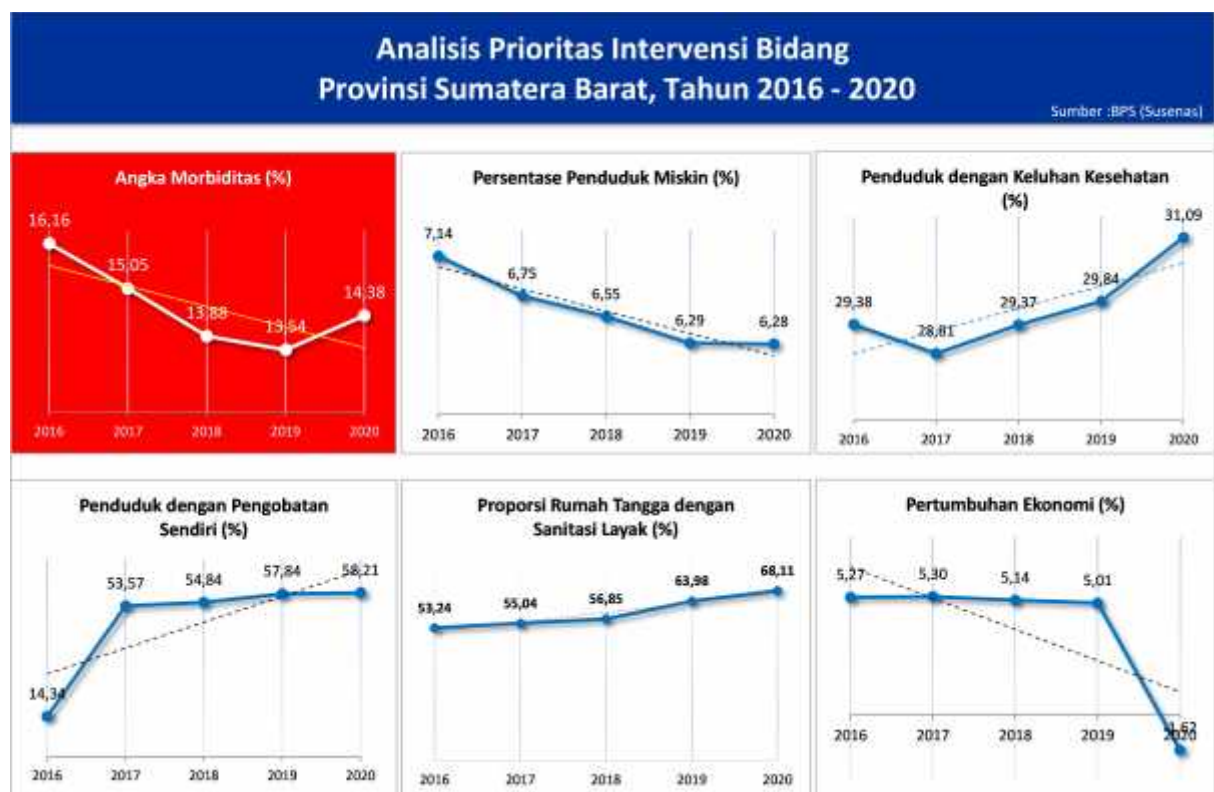
Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang cenderung berfluktuasi memiliki keterkaitan erat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan garis kemiskinan. Penurunan TPAK berkorelasi positif terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan tingkat pengangguran menurun atau sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran terbuka. Selanjutnya tingkat pengangguran yang cenderung naik di tahun 2020 juga disebabkan karena meningkatnya garis kemiskinan.

Sebaliknya tingkat inflasi yang meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka sampai 5,55 % pada tahun 2017 lalu menurun sampai 5,33 % pada tahun 2019, tetapi terjadi peningkatan sebesar 6,88 % pada tahun 2020. Namun penurunan harga barang pada tahun 2020 tidak diikuti penurunan tingkat pengangguran malah meningkat yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan dan industri mengurangi aktivitas dan kapasitas produksi sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja mengalami penurunan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi tersebut adalah intervensi program yang dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka terutama di masa pandemi Covid yakni dengan melakukan program padat karya terutama di daerah perkotaan dengan memperhatikan protocol kesehatan. Sementara kebijakan pemerintah untuk industry/perusahaan dan kegiatan ekonomi lainnya adalah tetap melakukan aktivitas produksi setengah dari kapasitas terpasang dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat di lingkungan kerja. Transaksi dalam pertukaran barang dan jasa lebih mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi atau melalui e-commerce.

4.1.2.2. Bidang Kesehatan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang kesehatan di Sumatera Barat disajikan pada Gambar berikut.

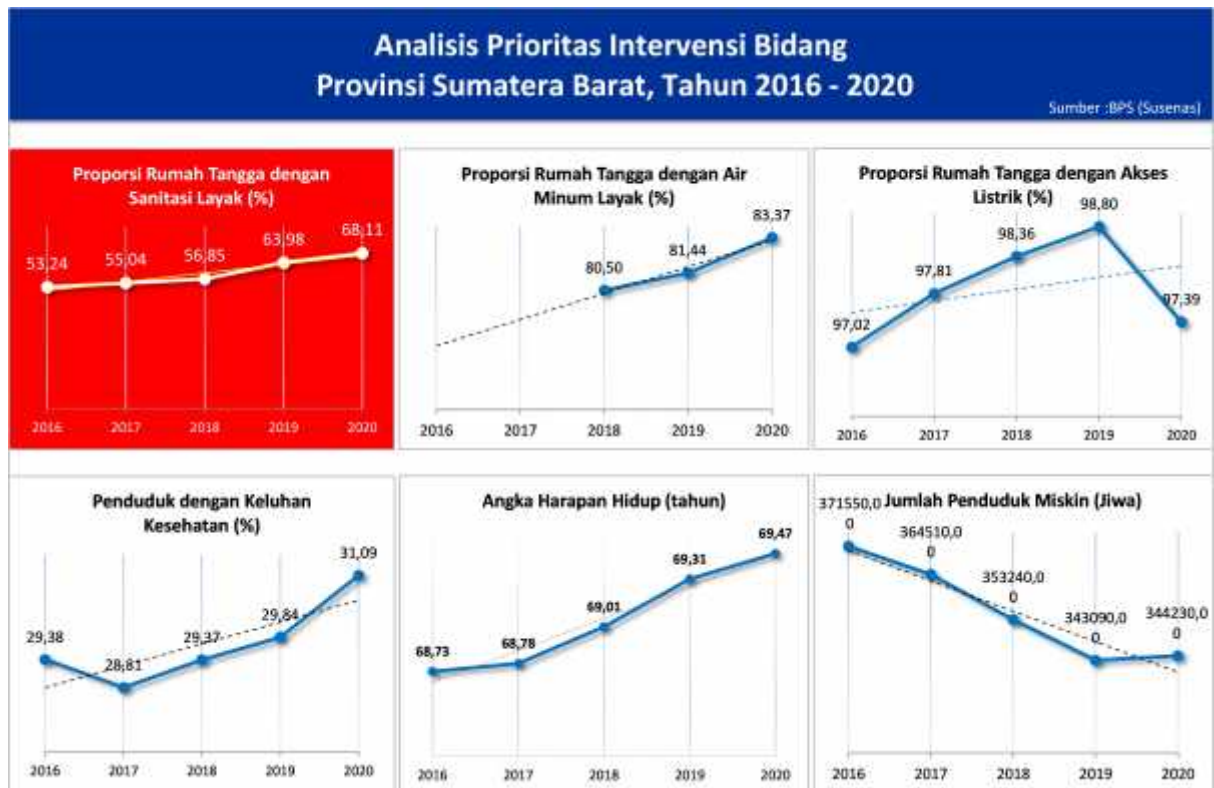


Gambar 4.9.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Morbilitas

Tingkat kesakitan sangat erat kaitannya dengan keluhan kesehatan, persentase penduduk dengan perokok umur >15 tahun dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan. Angka morbiditas berkurang jika penduduk dengan keluhan kesehatan berkurang, persentase penduduk merokok juga berkurang dan apabila persentase penduduk dengan jaminan kesehatan meningkat.

4.1.2.3. Bidang Infrastruktur Dasar

Hasil analisis prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar di Sumatera Barat disajikan pada Gambar berikut.

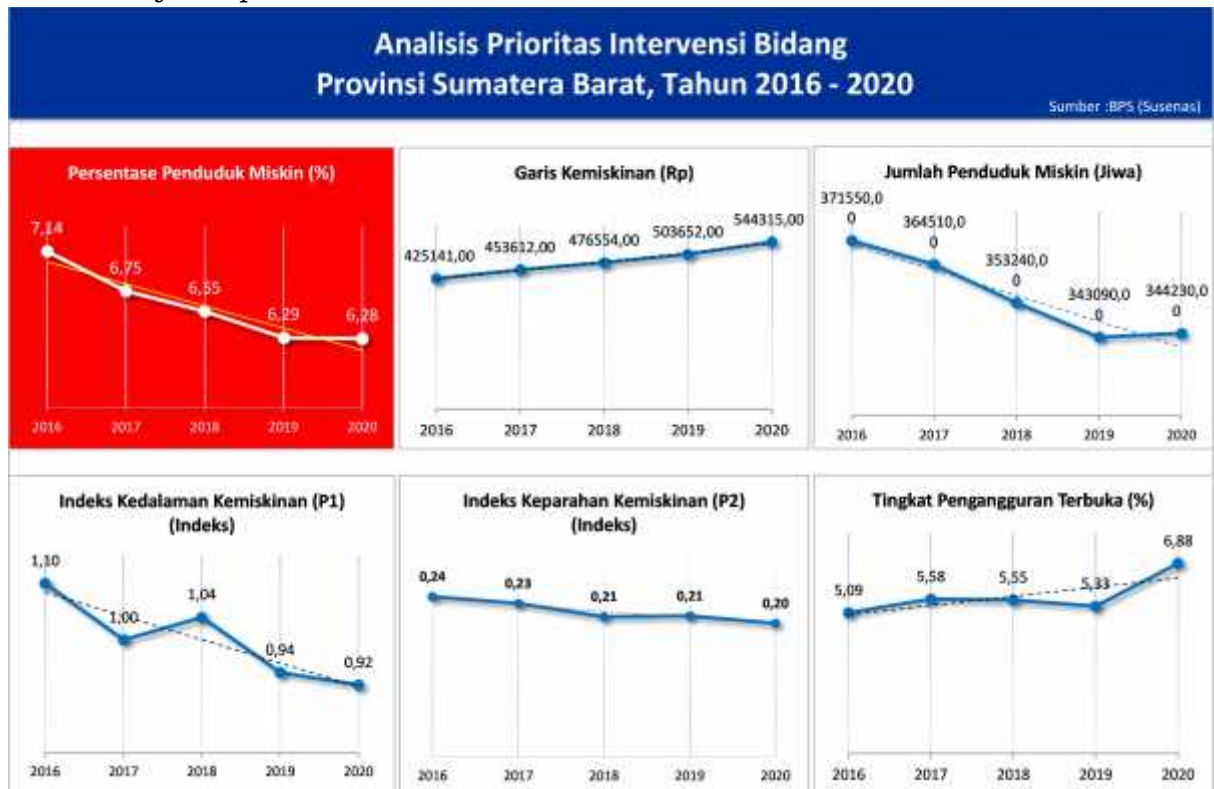


Gambar 4.10.
Analisis Prioritas Intervensi Terhadap Rumah Tangga Layak Huni dan Terjangkau

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dipengaruhi oleh proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Juga sangat erat kaitannya dengan angka morbiditas dan penduduk dengan keluhan kesehatan.

4.1.2.3. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Hasil analisis prioritas intervensi bidang kemiskinan konsumsi di Sumatera Barat disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.11.
Hubungan antara Persentase Penduduk Miskin dengan Variabel Bidang Lain di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan angka garis kemiskinan (Rp) selama lima tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat, namun tidak secara signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan persentase penduduk miskin, malah terjadi penurunan. Kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin sampai Maret 2020 disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Jadi walaupun terjadi peningkatan biaya hidup yang diperlihatkan oleh garis kemiskinan, namun perubahan pendapatan perkapita cenderung lebih besar sehingga jumlah penduduk kategori miskin mengalami penurunan.

Jika dikaitkan dengan kepemilikan rumah, penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga tidak serta merta dapat meningkatkan persentase penduduk, atau berbanding terbalik. Ini berarti hubungan antara akses kepemilikan dengan penduduk miskin memiliki hubungan yang tidak langsung, namun melalui tingkat pendapatan dan harga kebutuhan (makanan dan non makanan). Hal ini diperlihatkan oleh tingkat inflasi yang mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir yang dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Mengingat indikator menyangkut perubahan indeks harga-harga seluruh kebutuhan pokok dan tidak pokok, dimana harga kebutuhan pokok merupakan proksi dari garis kemiskinan yang nilainya cenderung meningkat namun tidak secara nyata

meningkatkan persentase penduduk miskin. Hal ini dapat diduga bahwa belanja (pengeluaran) konsumsi dari pendapatan yang diperoleh masyarakat Sumatera Barat umumnya ditujukan untuk pengeluaran non kebutuhan pokok sehingga terjadi penurunan tingkat inflasi maka persentase penduduk miskin juga berkurang.

Selain disebabkan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat juga disebabkan oleh semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Ini berarti bahwa peningkatan garis kemiskinan yang diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat. Mengingat tingkat kemiskinan, keparahan dan kedalaman kemiskinan desa di Provinsi Sumatera Barat sangat ekstrim,

4.2 Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan tidak hanya dari segi jumlah dan capaian, melainkan juga dari segi kualitas belanja dan kebermanfaatan guna menjawab tantangan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang mandiri dan sejahtera. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut terkait perkembangan dan komposisi APBD Provinsi Sumatera Barat.

4.2.1 Komposisi APBD Berdasarkan Pendapatan dan Belanja

4.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016-2020. Dalam periode tersebut terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan

terhadap pelaksanaan APBD. Perubahan pertama sehubungan dengan tambahan kewenangan daerah provinsi sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Tambahan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017. Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 berdampak besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah Dana Alokasi Umum tetapi juga kebijakan *refocusing* Belanja Daerah. Perubahan ketiga, pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Tambahan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat sebagai yang dijelaskan di atas mengakibatkan peningkatan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang signifikan. Hal ini terjadi karena jumlah PNS merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah. Akibat tambahan jumlah pegawai tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang juga meningkat signifikan. Demikian juga dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur Belanja Daerah; terjadi lonjakan yang signifikan terhadap Belanja Tidak Terduga. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai PP 12 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1. Sedangkan Kontribusi setiap jenis Pendapatan Daerah dan proporsi setiap Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.065,76	8,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.964.148,97	2.134.010,52	2.275.090,07	2.328.432,87	2.255.072,99	3,51
Pendapatan Pajak Daerah	1.522.119,23	1.626.923,37	1.797.677,16	1.872.933,99	1.809.809,96	4,42
Pendapatan Retribusi Daerah	19.362,26	22.906,56	19.506,41	19.475,96	7.926,60	(20,01)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.986,73	94.610,44	81.374,33	94.938,38	94.747,26	1,30
Lain-lain PAD Yang Sah	332.680,75	389.570,15	376.532,17	341.084,54	342.589,17	0,74
PENDAPATAN TRANSFER	2.618.608,27	3.917.012,19	4.002.064,21	4.045.668,56	4.046.890,19	11,50
Dana Perimbangan	2.576.754,99	3.866.663,23	3.930.814,21	4.027.349,12	4.002.468,88	11,64
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	134.500,32	152.435,93	131.766,54	106.119,22	145.620,97	2,01
Dana Alokasi Umum	1.261.915,86	2.014.646,64	2.014.646,64	2.076.398,19	1.891.323,98	10,65
Dana Alokasi Khusus	1.180.338,81	1.699.580,67	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.523,94	13,60
Transfer Dari Pusat Lainnya	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	1,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	1,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.854,74	15.804,15	15.133,35	16.235,77	62.102,58	10,37
Pendapatan Hibah	5.472,27	15.804,15	15.133,35	15.024,97	57.535,78	80,07
Bantuan Keuangan	12.499,95	-	-	1.210,80	4.566,80	(22,25)
Pendapatan Lainnya	23.882,52	-	-	-	-	
BELANJA DAERAH	4.504.037,26	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.408.293,79	9,22
Belanja Operasional	2.678.724,66	4.079.108,49	4.360.888,77	4.576.156,01	4.460.427,08	13,60
Belanja Pegawai	704.125,02	2.024.083,09	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32	31,13
Belanja Barang dan Jasa	895.361,39	1.238.156,83	1.489.060,37	1.524.405,21	1.229.706,71	8,26
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Belanja Hibah	1.079.238,25	816.868,57	819.237,02	880.838,34	1.149.133,05	1,58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
Belanja Modal	989.929,77	832.177,37	1.099.701,41	1.062.230,45	736.888,36	(7,11)
Belanja Tidak Terduga	1.363,58	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	325,19
Belanja Tidak Terduga	1.363,58	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	325,19
Belanja Transfer	834.019,25	847.303,76	804.617,17	910.946,51	765.317,56	(2,13)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	698.437,48	759.780,37	796.770,50	877.337,64	764.437,56	2,28
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	135.581,77	87.523,39	7.846,67	33.608,87	880,00	(71,62)
SURPLUS/(DEFISIT)	120.637,29	307.008,46	24.911,40	(160.941,68)	(44.228,03)	
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66	7,63
Penggunaan SilPA	251.496,99	297.134,28	530.424,08	502.062,67	332.762,66	7,25
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	61.712,00	4.723,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00	(18,92)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000,00	73.000,00	53.430,00	20.413,10	20.000,00	(28,14)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	54.028,00	12.407,00	
PEMBIAYAAN NETTO	176.496,99	224.134,28	476.994,08	489.333,57	305.078,66	14,66
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Sebelum Koreksi	297.134,28	531.142,74	501.905,48	328.391,90	260.850,62	(3,20)
Koreksi Silpa	(12.491,08)	(10.206,63)	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	284.643,20	520.936,11	501.905,48	328.391,90	260.850,62	(2,20)

Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Tabel 4.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah, Proporsi Jenis Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,47	35,18	36,16	36,44	35,43	(4,43)
A.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32,91	26,82	28,57	29,31	28,44	(3,59)
A.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,42	0,38	0,31	0,30	0,12	(26,15)
A.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,95	1,56	1,29	1,49	1,49	(6,47)
A.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	7,19	6,42	5,98	5,34	5,38	(6,99)
A.2	PENDAPATAN TRANSFER	56,62	64,56	63,60	63,31	63,59	2,94
A.2.1	Dana Perimbangan	55,72	63,73	62,47	63,02	62,89	3,07
A.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,91	2,51	2,09	1,66	2,29	(5,82)
A.2.1.2	Dana Alokasi Umum	27,29	33,21	32,02	32,49	29,72	2,16
A.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	25,52	28,01	28,36	28,87	30,88	4,88
A.2.2	Transfer Dari Pusat Lainnya	0,91	0,83	1,13	0,29	0,70	(6,29)
A.2.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,91	0,83	1,13	0,29	0,70	(6,29)
A.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,91	0,26	0,24	0,25	0,98	1,90
A.3.1	Pendapatan Hibah	0,12	0,26	0,24	0,24	0,90	66,26
A.3.2	Bantuan Keuangan	0,27	-	-	0,02	0,07	(28,22)
A.3.3	Pendapatan Lainnya	0,52	-	-	-	-	
B	BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
			0	0	0	0	
B.1	Belanja Operasi	59,47	70,82	69,58	69,85	69,60	4,01
B.1.1	Belanja Pegawai	15,63	35,14	32,75	33,14	32,48	20,06
B.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,88	21,50	23,76	23,27	19,19	(0,88)
B.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
B.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
B.1.5	Belanja Hibah	23,96	14,18	13,07	13,45	17,93	(6,99)
B.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
B.2	Belanja Modal	21,98	14,45	17,55	16,21	11,50	(14,95)
B.3	Belanja Tidak Terduga	0,03	0,02	0,03	0,03	6,95	289,31
B.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,03	0,02	0,03	0,03	6,95	289,31
B.4	Belanja Transfer	18,52	14,71	12,84	13,90	11,94	(10,38)
B.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15,51	13,19	12,71	13,39	11,93	(6,35)
B.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	3,01	1,52	0,13	0,51	0,01	(74,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)		-	-	-	-	
C	PEMBIAYAAN DAERAH						
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
C.1.1	Penggunaan SiLPA	100,00	100,00	100,00	89,05	98,60	(0,35)
C.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	10,95	1,40	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
			0	0	0	0	
C.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	27,42	61,72	(11,37)
C.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	72,58	38,28	

Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

4.2.1.2 Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasi Pendapatan Daerah atas 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan kewenangan provinsi yang diikuti dengan penambahan PNS sebagaimana yang dijelaskan di atas mengakibatkan terjadi peningkatan Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang signifikan tahun 2017, yaitu dari Rp4.624.611,99 juta tahun 2016 menjadi Rp6.066.826,85 juta tahun 2017. Peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang relatif stabil, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp15.804,15 juta tahun 2017.

Pademi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.271,45 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama untuk berasal daerah Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp2.328.432,87 juta tahun 2019 menjadi Rp2.255.072,99 juta tahun 2020. Sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari Rp16.235,77 juta tahun 2019 menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020. Sedangkan Pendapatan Transfer relatif tidak mengalami perubahan yang berarti.

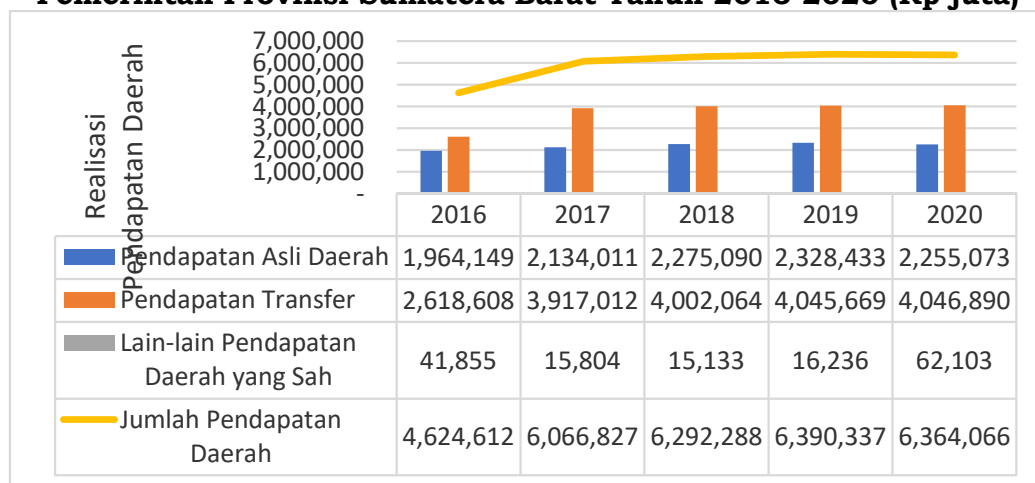
Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan rata-rata yang rendah, hanya sebesar 2,63% per tahun, yaitu dari Rp6.066.826,85 juta tahun 2017 menjadi Rp6.390.337,20 juta tahun 2019. Dari 3 sumber Pendapatan Daerah, pertumbuhan rata-rata per tahun yang lebih tinggi dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,46%, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing mengalami pertumbuhan 1,63% dan 1,36%.

Jika digunakan data tahun 2016-2020, pertumbuhan Pendapatan Transfer jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 sumber Pendapatan

Pemerintah Sumatera Barat lainnya. Pendapatan Transfer naik dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp4.046.890,19 juta tahun 2020, atau tumbuh 11,50% per tahun. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp1.964.211,53 juta tahun 2016 menjadi Rp2.255.072,99 juta tahun 2020, atau tumbuh 3,51% per tahun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 10,37%; dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020.

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

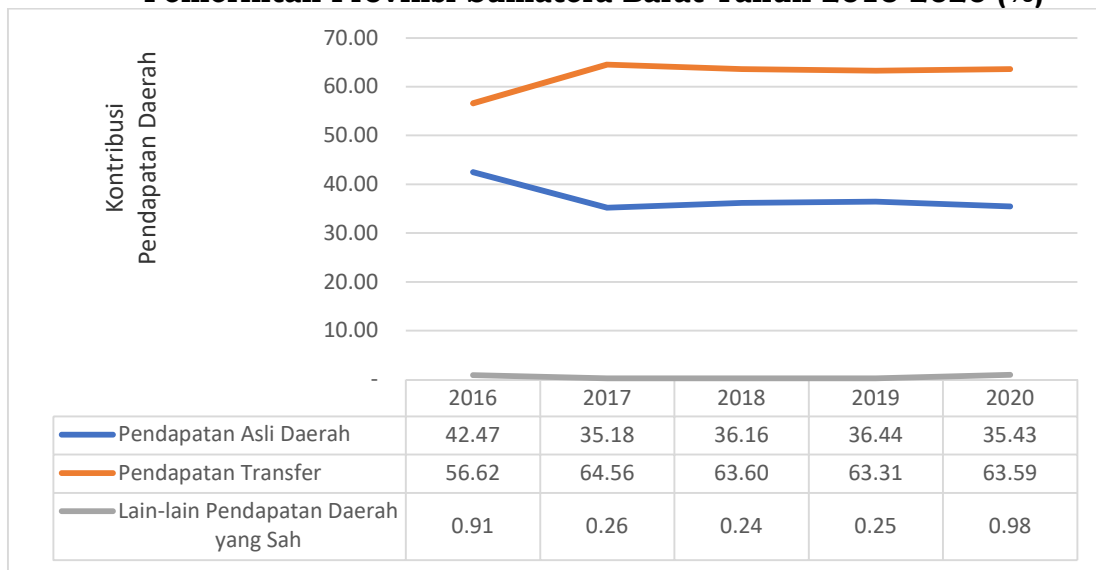


Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 sumber Pendapatan Daerah lainnya, mengakibatkan ketergantungan sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat atau dari sumber lainnya semakin tinggi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah 42,47% dan mengalami penurunan tahun-tahun berikutnya menjadi 35,43% tahun 2020.

Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari 56,62% tahun 2016 menjadi menjadi 63,59% tahun 2020. Dengan demikian, perbedaan kontribusi PAD dengan Pendapatan Transfer tahun 2016 menjadi semakin melebar sampai tahun 2020, sebagaimana yang dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD.

Sumber Pendapatan Asli Daerah utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Secara rata-rata selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,42% per tahun dari Rp1.522.119,23 juta tahun 2016 menjadi Rp1.809.809,96 juta tahun 2020. Namun laju pertumbuhan Pajak Daerah ini cenderung mengalami tren penurunan. Laju pertumbuhan seperti ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang menunjukkan kecenderungan perlambatan dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 pada tahun 2019. Karena secara konseptual, perkembangan sumber pendapatan Pajak Daerah dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian; semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2016 berjumlah Rp19.362,26 juta dan meningkat menjadi Rp22.906,56 juta tahun 2017, tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan perubahan pola pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Puncaknya tahun 2020 jumlah Pendapatan Retribusi turun sebesar 59,30% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp7.926,60 juta tahun 2020. Penyebab utama penurunan tahun 2020 ini adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil dan mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp89.986,73 juta tahun 2016 menjadi Rp94.747,26 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,30%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari, PT Askrida, dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Sedangkan BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Oleh sebab itu, perlu strategi dan kebijakan khusus agar semua BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat

memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

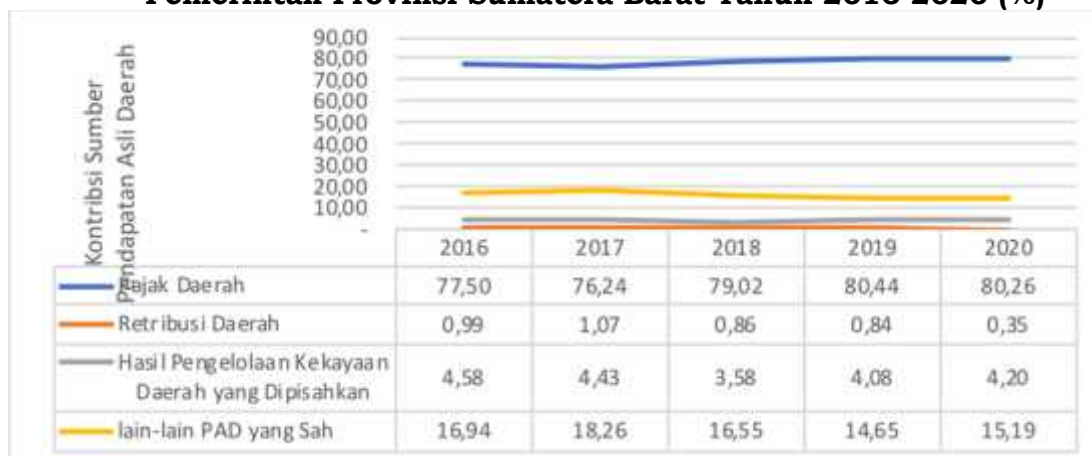


Sumber: Bakeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Kecendrungan jumlah Pajak Daerah yang mengalami tren peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber PAD lainnya sebagaimana tergambar pada Grafik 3.3, mengakibatkan kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah 77,50%, meningkat menjadi 80,26% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Lain-lain PAD yang Sah, namun kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 16,94% tahun 2016 menjadi 15,19% tahun 2020. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan, yaitu dari 4,58% tahun 2016 menjadi 4,20% tahun 2020. Selain memberikan kontribusi terendah, Retribusi Daerah juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 0,99% tahun 2016 menjadi 0,35% tahun 2020. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Retribusi Daerah selama ini belum berdampak signifikan. Oleh sebab itu, terobosan dan kebijakan yang lebih tegas harus dilakukan agar peningkatan Retribusi Daerah ke depan dapat dihasilkan.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 4.4 berikut :

Grafik 4.4
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya, dalam PP Nomor 12 tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Transfer ke daerah dalam 2 kategori, yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari

Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- 2) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 4) DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 6) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar-Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- 1) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Peningkatan jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017 dikarenakan adanya pelimpahan pegawai (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, mengakibatkan peningkatan Pendapatan Transfer dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 dan menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan peningkatan tahun-tahun berikutnya relatif sangat kecil sehingga tahun 2019 menjadi Rp4.045.668,56

juta. Dengan demikian, antara tahun 2017-2019, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,63%.

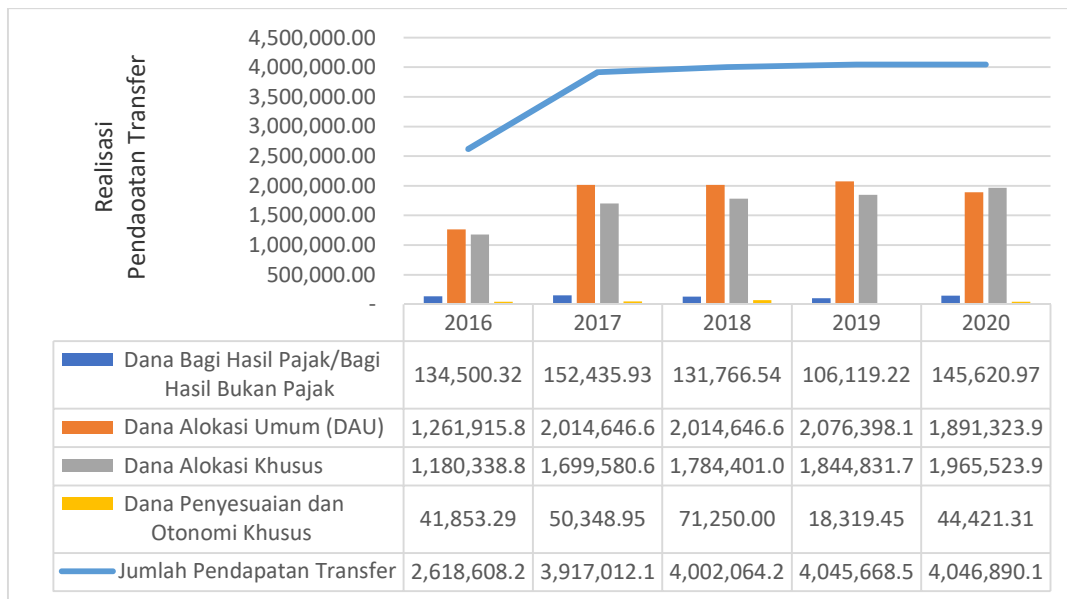
Sumber utama Pendapatan Transfer ini berasal dari DAU dan DAK. Perhitungan DAK dalam pembahasan ini termasuk DAK Fisik dan Non Fisik. Analisis laju pertumbuhan per tahun menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan DAK tertinggi dibandingkan dengan 3 sumber Pendapatan Transfer lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun DAU adalah 1,52%, yaitu dari Rp2.014.646,64 juta tahun 2017 menjadi Rp2.076.398,19 juta tahun 2019. Sedangkan DAK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,19% per tahun, yaitu dari Rp1.699.580,67 juta tahun 2017 menjadi Rp1.844.831,70 juta tahun 2019.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi Dampak Pandemi Covid-19, maka pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang berasal dari DAU mengalami penurunan Rp185.074,21 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi, pada tahun yang sama, DAK mengalami peningkatan Rp120.692,23 juta dari tahun sebelumnya.

Komponen Pendapatan Transfer lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mengalami penurunan yang signifikan antara 2017-2019, yaitu dari Rp152.435,93 juta menjadi Rp106.119,22 juta. Tetapi, tahun 2020 kembali naik menjadi Rp145.620,97. Untuk meningkatkan pendapatan Bagi Hasil Pajak pada masa datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengupayakan agar setiap pelaku ekonomi yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alamat di Sumatera Barat agar pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Pusat diterima kembali (Bagi Hasil) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendapatan Pendapatan Transfer lainnya berasal dari Dana Penyesuaian yang mengalami peningkatan relatif lebih kecil yaitu sebesar 1,50%, dari Rp41.853,29 juta tahun 2016 menjadi Rp44.421,31 tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 4.5.

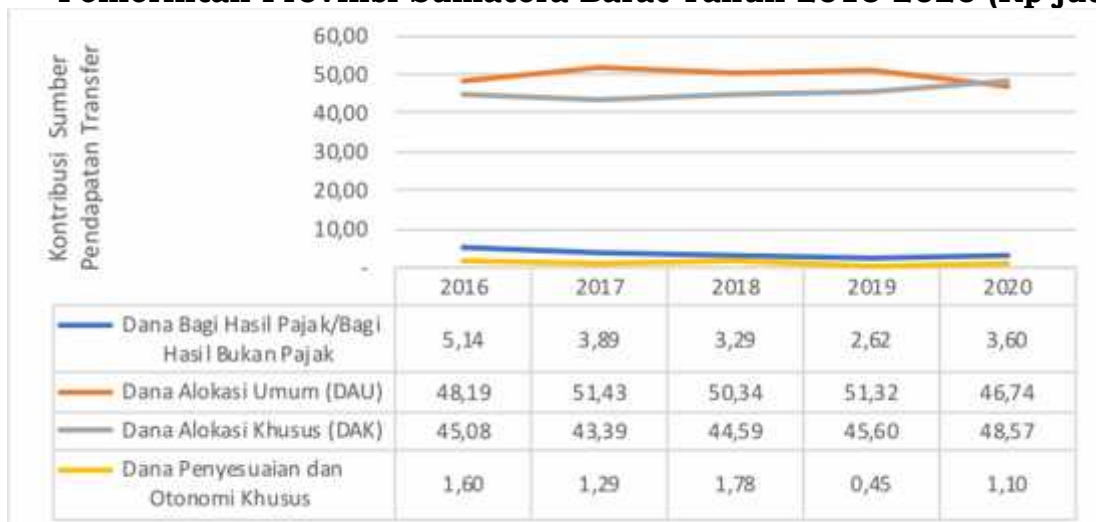
Grafik 4.5
Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Akibat pertumbuhan DAK yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka peranan DAU dan DAK dalam pembentukan Pendapatan Transfer mengalami perubahan, khususnya tahun 2020. Pada tahun 2016 peranan DAU lebih tinggi dari DAK, yaitu 48,19% berbanding 45,08%. Namun tahun 2020, peranan DAK lebih tinggi dibandingkan DAU, yaitu 48,57% berbanding 46,74%. Grafik perkembangan kontribusi Pendapatan Transfer dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4.6
Kontribusi Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

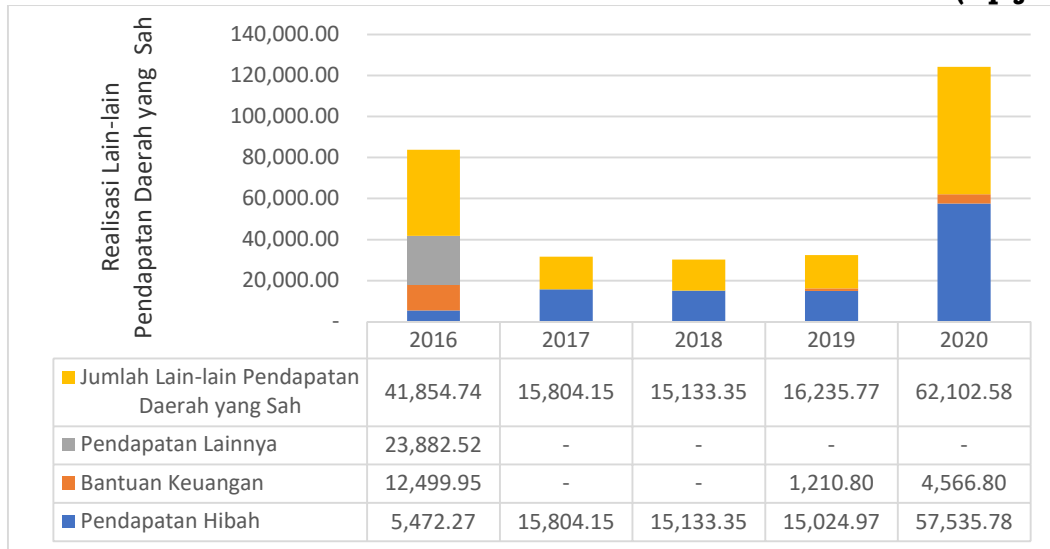


Sumber: Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan tidak banyak berubah, baik jumlah maupun perkembangannya. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pun relatif kecil. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah tahun 2016 berjumlah Rp41.854,74 juta dan dalam 3 tahun berikutnya mengalami penurunan, tetapi meningkat menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020, yang berasal dari Pendapatan Hibah. Grafik perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 4.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

4.2.1.3. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan Belanja Daerah atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Sejalan dengan penambahan jumlah pegawai PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akibat implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka Belanja Operasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 152,28% dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2.678.724,66 juta menjadi Rp4.079.108,49 juta. Namun, tahun-tahun berikutnya relatif stabil, sehingga antara tahun 2017-2019 terjadi pertumbuhan sebesar 5,92% per tahun. Sedangkan tahun 2020, jumlah Belanja Operasi

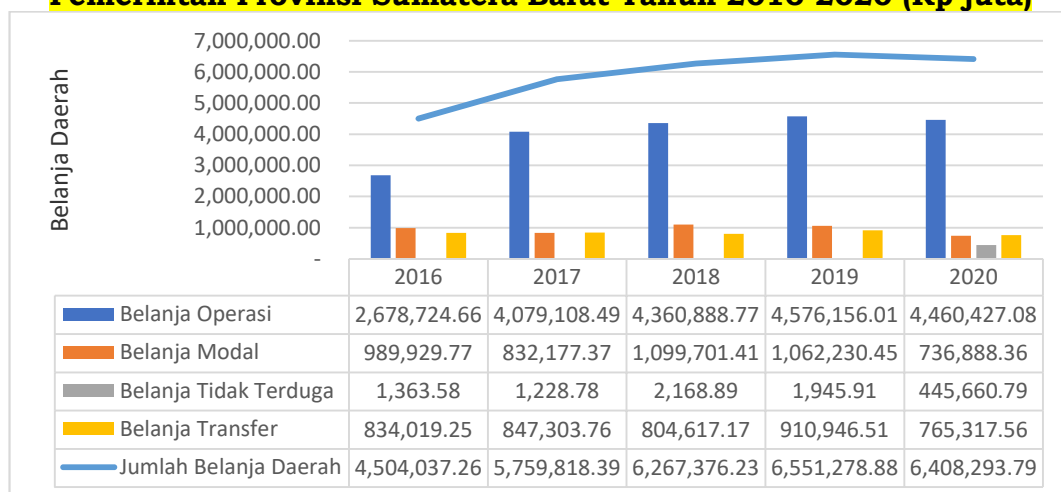
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi Rp4.460.427,08 juta.

Dalam merespon Instruksi Presiden (INPRES) tentang *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, maka Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp989.929,77 juta dan meningkat menjadi Rp1.062.230,45 juta tahun 2019, tetapi turun menjadi Rp736.888,36 juta tahun 2020.

Sejalan dengan pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, maka Belanja Transfer (Bagi Hasil) ke kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Belanja Transfer tahun 2016 berjumlah Rp834.019,25 juta dan meningkat menjadi Rp910.946,51 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp765.317,56 juta tahun 2020.

Jumlah Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun akibat pandemi COVID-19, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah Belanja Tidak Terduga tahun 2016 hanya sebesar Rp1.363,58 juta dan meningkat signifikan menjadi Rp 445.660,79 juta tahun 2020. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut :

Grafik 4.8
Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Proporsi terbesar dari Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk Belanja Operasi, di mana proporsi rata-rata tahun 2017-2019 sebesar 70,08%. Proporsi Belanja Operasi tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, masing-masing sebesar 48,00% dan 32,66% dan sisanya sebesar 19,34% merupakan Belanja Hibah.

Proporsi kedua terbesar dari Belanja Daerah adalah Belanja Modal, dengan proporsi rata-rata dalam tahun 2017-2019 sebesar 16,07%. Rendahnya Belanja Modal ini adalah karena terbatasnya sumber Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan Belanja Operasi. Proporsi ketiga terbesar adalah Belanja Bagi Hasil kepada Kota/Kabupaten, yaitu sebesar 13,82%. Perkembangan proporsi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik 4.9 berikut:

Grafik 4.9
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Bakeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Selama periode 2016-2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami 3 kali surplus dan 2 kali defisit. Secara umum defisit yang terjadi menunjukkan efektifitas pelaksanaan APBD. Sebaliknya, surplus yang terjadi menunjukkan pelaksanaan APBD yang kurang efektif, kecuali ada kebijakan khusus untuk Pengeluaran Pembiayaan. Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjadi tahun 2016, 2017, dan 2018, masing-masing sebesar Rp120.637,29 juta, Rp307.008,46 juta, dan Rp24.911,40 juta. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 berubah menjadi defisit sebesar Rp160.941,68 juta dan Rp44.228,03 juta.

4.2.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp251.496,99 juta tahun 2016 menjadi Rp563.7744,67 juta tahun 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp337.485,66 juta atau mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 7,63 % per tahun. Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terutama digunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD, dan pada 2 tahun terakhir juga untuk Pembayaran Pokok Pinjaman. Namun demikian, dari tahun 2016-2020 terjadi penurunan Pengeluaran Pembiayaan dari Rp75.000,00 juta tahun 2016 menjadi Rp32.407,00 juta tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 18,92% per tahun. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 4.3
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66	7,63
Penggunaan SiLPA	251.496,99	297.134,28	530.424,08	502.062,67	332.762,66	7,25
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	61.712,00	4.723,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00	(18,92)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000,00	73.000,00	53.430,00	20.413,10	20.000,00	(28,14)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	54.028,00	12.407,00	
PEMBIAYAAN NETTO	176.496,99	224.134,28	476.994,08	489.333,57	305.078,66	14,66
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Sebelum Koreksi	297.134,28	531.142,74	501.905,48	328.391,90	260.580,62	(3,65)
Koreksi SiLPA	(12.491,08)	(10.206,63)	-	-	-	(100,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	284.643,20	520.936,11	501.905,48	328.391,90	260.580,62	(2,61)

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

4.2.1.5. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan indikator rasio sederhana untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang.

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran riil dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020, dapat dilakukan analisis perbandingan kesehatan fiskal seluruh Provinsi Indonesia tahun 2017-2019. Analisis perbandingan kesehatan fiskal tahun 2016 dan 2020 tidak dapat dilakukan karena masih berupa anggaran.

Analisis data penduduk dan pendapatan daerah provinsi se Indonesia tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat di atas rata-rata Indonesia, dan jumlah serta pertumbuhan rata-rata per tahun dari pendapatan daerah, jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengakibatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya jauh di bawah rata-rata nasional.

Secara nasional, rata-rata kemampuan provinsi se Indonesia dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2019 adalah Rp2,05 Juta, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya mampu membiayai sebesar Rp1,17 Juta. Kemampuan membiayai pelayanan ini pun menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi se Indonesia. Laju pertumbuhan kemampuan membiayai pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 1,34%, sedangkan secara rata-rata nasional adalah 7,42%.

Kemampuan membiayai pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menduduki Ranking 24 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 4.4
Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Provinsi
Tahun 2017-2019 (Rp Juta)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	2,78	2,75	2,96	3,31	6
2	Sumatera Utara	0,86	0,88	0,89	2,22	29
3	Sumatera Barat	1,14	1,16	1,17	1,34	24
4	R i a u	1,20	1,26	1,27	3,11	22
5	J a m b i	1,23	1,25	1,28	1,94	21
6	Sumatera Selatan	0,99	1,09	1,09	5,02	25
7	Bengkulu	1,46	1,46	1,49	1,06	18
8	Lampung	0,82	0,85	0,86	2,28	31
9	Bangka Belitung	1,59	1,79	1,86	7,94	9
10	Kepulauan Riau	1,54	1,61	1,75	6,59	11

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)	Ranking Tahun 2019
11	DKI Jakarta	6,26	5,87	5,93	(2,70)	2
12	Jawa Barat	0,67	0,70	0,74	4,66	34
13	Jawa Tengah	0,69	0,72	0,75	3,85	33
14	D I Yogyakarta	1,35	1,43	1,47	4,48	19
15	Jawa Timur	0,76	0,81	0,84	5,23	32
16	Banten	0,79	0,82	0,88	5,86	30
17	B a l i	1,41	1,45	1,52	4,02	16
18	Nusa Tenggara Barat	1,02	0,97	1,01	(0,37)	27
19	Nusa Tenggara Timur	0,89	0,89	0,98	5,20	28
20	Kalimantan Barat	1,09	1,14	1,18	3,70	23
21	Kalimantan Tengah	1,59	1,79	1,88	8,74	8
22	Kalimantan Selatan	1,36	1,58	1,60	8,36	13
23	Kalimantan Timur	2,31	2,99	3,25	18,62	5
24	Kalimantan Utara	3,32	3,55	3,75	6,33	4
25	Sulawesi Utara	1,52	1,53	1,58	1,92	14
26	Sulawesi Tengah	1,23	1,29	1,36	5,09	20
27	Sulawesi Selatan	1,04	1,06	1,09	1,97	26
28	Sulawesi Tenggara	1,37	1,44	1,56	6,92	15
29	Gorontalo	1,53	1,54	1,65	3,70	12
30	Sulawesi Barat	1,39	1,36	1,50	3,90	17
31	M a l u k u	1,63	1,76	1,76	3,91	10
32	Maluku Utara	1,89	2,04	2,18	7,18	7
33	Papua Barat	7,67	7,76	11,77	23,84	1
34	P a p u a	4,00	4,05	4,85	10,07	3
	Rata-Rata	1,78	1,84	2,05	7,42	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total Pendapatan Daerah.

Data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya masih pada batas rata-rata nasional. Jika dalam 3 tahun periode analisis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu menghasilkan PAD sebesar 35,92% dari Pendapatan Daerah, dan rata-rata nasional mampu menghasilkan 35,78%. Namun, pertumbuhan rata-rata per tahun dari rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedikit di bawah rata-rata nasional, yaitu 1,78% berbanding 2,26%. Dengan demikian, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak berusaha secara optimal untuk peningkatan penerimaan PAD maka pada tahun-tahun mendatang, maka kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan turun di bawah rata-rata nasional.

Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berada pada ranking 16 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio kemandirian daerah se Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Provinsi
Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	15,86	16,35	17,13	3,93	30
2	Sumatera Utara	43,22	44,39	44,05	0,96	9
3	Sumatera Barat	35,18	36,16	36,44	1,78	16
4	R i a u	42,52	42,92	40,88	(1,94)	12
5	J a m b i	36,71	37,54	36,09	(0,85)	17
6	Sumatera Selatan	36,99	38,59	37,60	0,82	14
7	Bengkulu	28,69	30,59	28,18	(0,90)	23
8	Lampung	40,37	40,35	41,53	1,43	11
9	Bangka Belitung	31,53	33,26	30,68	(1,36)	22
10	Kepulauan Riau	33,66	34,88	33,08	(0,87)	20
11	DKI Jakarta	67,72	70,75	73,37	4,08	1
12	Jawa Barat	56,22	57,91	58,95	2,40	4
13	Jawa Tengah	52,94	55,51	55,83	2,70	6
14	D I Yogyakarta	36,42	37,50	36,54	0,17	15
15	Jawa Timur	58,01	58,02	57,77	(0,21)	5
16	Banten	59,31	61,33	62,69	2,81	2
17	B a l i	56,72	59,41	60,54	3,32	3
18	Nusa Tenggara Barat	33,14	33,60	34,77	2,44	19
19	Nusa Tenggara Timur	22,29	22,91	23,51	2,72	27
20	Kalimantan Barat	36,10	38,78	38,74	3,59	13
21	Kalimantan Tengah	32,73	34,53	35,59	4,28	18
22	Kalimantan Selatan	50,83	53,96	51,78	0,93	8
23	Kalimantan Timur	56,27	54,36	55,68	(0,53)	7
24	Kalimantan Utara	21,71	23,72	25,13	7,59	26
25	Sulawesi Utara	30,73	33,17	32,64	3,06	21
26	Sulawesi Tengah	26,34	26,19	26,42	0,17	25
27	Sulawesi Selatan	40,63	42,67	43,23	3,15	10
28	Sulawesi Tenggara	22,81	23,88	27,08	8,96	24
29	Gorontalo	19,64	21,36	22,33	6,62	28
30	Sulawesi Barat	16,21	16,57	16,97	2,31	31
31	M a l u k u	15,29	15,15	15,53	0,76	33
32	Maluku Utara	14,39	14,40	16,12	5,85	32
33	Papua Barat	6,62	6,28	4,27	(19,73)	34
34	P a p u a	7,81	6,92	18,60	54,32	29
	Rata-Rata	34,87	36,00	36,46	2,26	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki *earmark* (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan perbandingan Ruang Fiskal Daerah dengan Total Pendapatan Daerah.

Tambahan kewenangan provinsi akibat implementasi UU 23 tahun 2014 telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dari dana *earmark* yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan, dalam anggaran tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran pendapatan *earmark* menjadi Rp2.173.959,17 juta. Sedangkan pendapatan DAU dan sumber pendapatan daerah lainnya tidak sebanding dengan tambahan jumlah PNS dari tambahan kewenangan provinsi. Akibatnya, fleksibilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah semakin berkurang.

Hasil olahan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah akibat tambahan kewenangan provinsi dari 58,23% menjadi 37,53%. Sedangkan tahun-tahun berikutnya Ruang Fiskal Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda. Dengan demikian, kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.6
Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.065,76
B 1	Dana Alokasi Khusus	1.180.338,81	1.699.580,67	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.523,94
B 2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31
B 3	Pendapatan Hibah	5.472,27	15.804,15	15.133,35	15.024,97	57.535,78
B 4	Belanja Pegawai	704.125,02	2.024.083,09	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32
B	Selisih	2.692.822,60	2.277.010,00	2.368.911,87	2.341.248,62	2.214.997,41
C	Ruang Fiskal Daerah (%)	58,23	37,53	37,65	36,64	34,80

Sumber: Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan

perbandingan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan PDRB berdasarkan harga berlaku.

Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat relatif kecil; di bawah capaian nasional. Dalam 3 tahun periode analisis pun, kinerja ini tidak mengalami banyak perubahan, sekalipun pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan. Rasio yang dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkisar 0,77% sedangkan rata-rata nasional adalah 0,85%. Sekalipun rata-rata nasional juga belum menggambarkan kondisi yang ideal, namun sebatas kewenangan provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak BPNKB, PBBKB, maka penegakan disiplin dan intensifikasi pemungutan perlu ditingkatkan.

Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditngkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 menunjukkan tren penurunan, dan tahun 2019 berada pada ranking 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Provinsi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB
Menurut Provinsi Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	0,91	0,85	0,87	(2,18)	17
2	Sumatera Utara	0,71	0,71	0,64	(5,34)	28
3	Sumatera Barat	0,77	0,79	0,77	(0,22)	20
4	R i a u	0,39	0,41	0,39	0,00	34
5	J a m b i	0,70	0,67	0,63	(5,65)	29
6	Sumatera Selatan	0,74	0,76	0,71	(2,28)	24
7	Bengkulu	0,99	1,03	0,87	(6,49)	16
8	Lampung	0,80	0,77	0,73	(4,46)	23

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
9	Bangka Belitung	0,91	1,09	1,02	5,72	6
10	Kepulauan Riau	0,43	0,45	0,44	1,32	31
11	DKI Jakarta	1,57	1,47	1,44	(4,24)	2
12	Jawa Barat	0,93	0,93	0,93	0,05	12
13	Jawa Tengah	0,91	0,92	0,89	(1,38)	14
14	D I Yogyakarta	1,36	1,36	1,28	(2,97)	4
15	Jawa Timur	0,72	0,69	0,67	(3,78)	27
16	Banten	0,98	0,98	1,01	1,86	7
17	B a l i	1,37	1,40	1,38	0,53	3
18	Nusa Tenggara Barat	0,97	1,04	1,08	5,16	5
19	Nusa Tenggara Timur	0,92	0,90	0,91	(0,94)	13
20	Kalimantan Barat	0,96	1,01	0,94	(0,69)	11
21	Kalimantan Tengah	0,88	0,99	0,99	5,99	9
22	Kalimantan Selatan	1,42	1,66	1,55	4,61	1
23	Kalimantan Timur	0,60	0,74	0,77	13,50	21
24	Kalimantan Utara	0,40	0,45	0,43	4,44	33
25	Sulawesi Utara	0,96	0,95	0,89	(4,08)	15
26	Sulawesi Tengah	0,60	0,56	0,55	(4,32)	30
27	Sulawesi Selatan	0,80	0,77	0,74	(3,60)	22
28	Sulawesi Tenggara	0,59	0,60	0,69	8,12	25
29	Gorontalo	0,91	0,96	1,00	4,44	8
30	Sulawesi Barat	0,70	0,64	0,68	(1,58)	26
31	M a l u k u	1,01	1,03	0,95	(2,92)	10
32	Maluku Utara	0,95	0,76	0,84	(6,05)	18
33	Papua Barat	0,43	0,44	0,44	1,56	32
34	P a p u a	0,44	0,39	0,80	34,32	19
	Rata-Rata	0,85	0,86	0,85	0,84	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun dari tahun 2016-2020 kecenderungannya menunjukkan tren penurunan. Jika tahun 2017 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sebesar 109,11% tetapi selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan sehingga menjadi 104,96% tahun 2019 dan 103,97 tahun 2020. Oleh sebab itu, penentuan prioritas pembangunan daerah menjadi sesuatu hal yang mutlak harus diupayakan secara maksimal, agar dana yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif. Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Penerimaan Daerah	4.876.108,98	6.363.961,13	6.822.711,71	6.954.111,88	6.701.635,41
1	Pendapatan Daerah	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.149,76
2	Penerimaan Pembiayaan	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66
B	Pengeluaran Daerah	4.579.037,26	5.832.818,39	6.320.806,23	6.625.719,98	6.445.606,79
1	Belanja Daerah	4.504.037,26	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.413.199,79
2	Pengeluaran Pembiayaan	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah		106,49	109,11	107,94	104,96	103,97

Sumber: Bakeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

6. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 19,33% dan turun menjadi 16,21% tahun 2019. Di samping karena prioritas pembangunan nasional dan daerah, penurunan ini juga disebabkan keterbatasan Pendapatan Daerah sehingga analisis prioritas belanja yang ketat akan menjadi dasar utama menentukan Belanja Modal, khususnya jika kondisi Jalan atau infrastruktur lainnya sudah semakin Mantap.

Apabila dibandingkan rasio Belanja Modal secara nasional, capaian kinerja rata-rata Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun periode analisis (2017-2019) sedikit di atas rata-rata nasional. Namun demikian, capaian kinerja ini perlu ditingkatkan karena tahun 2019, rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menduduki ranking 19 dari

34 provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio Belanja Modal menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rasio Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	15,67	20,35	21,55	17,25	6
2	Sumatera Utara	15,33	12,46	9,30	(22,13)	30
3	Sumatera Barat	19,33	17,55	16,21	(8,42)	19
4	R i a u	21,13	12,36	13,36	(20,48)	25
5	J a m b i	21,67	18,69	17,96	(8,96)	14
6	Sumatera Selatan	21,49	19,36	17,11	(10,76)	17
7	Bengkulu	24,80	20,76	23,79	(2,06)	4
8	Lampung	20,89	22,94	14,36	(17,07)	24
9	Bangka Belitung	15,61	13,34	15,89	0,91	20
10	Kepulauan Riau	6,21	18,14	17,36	67,14	16
11	DKI Jakarta	21,63	22,99	17,79	(9,31)	15
12	Jawa Barat	7,07	9,44	7,06	(0,04)	34
13	Jawa Tengah	6,36	6,87	8,03	12,39	33
14	D I Yogyakarta	21,27	21,40	18,67	(6,32)	11
15	Jawa Timur	10,70	9,26	8,16	(12,69)	32
16	Banten	14,19	13,64	12,18	(7,35)	27
17	B a l i	10,88	7,35	8,54	(11,39)	31
18	Nusa Tenggara Barat	21,95	17,02	13,01	(23,01)	26
19	Nusa Tenggara Timur	10,42	10,93	15,13	20,49	22
20	Kalimantan Barat	18,16	12,66	15,35	(8,04)	21
21	Kalimantan Tengah	15,33	23,32	25,54	29,08	2
22	Kalimantan Selatan	19,05	24,59	19,03	(0,05)	9
23	Kalimantan Timur	11,39	19,57	10,61	(3,50)	28
24	Kalimantan Utara	26,04	24,11	21,69	(8,72)	5
25	Sulawesi Utara	21,17	19,73	21,49	0,78	7
26	Sulawesi Tengah	13,50	12,67	20,41	22,97	8
27	Sulawesi Selatan	11,82	11,60	10,21	(7,06)	29
28	Sulawesi Tenggara	25,41	22,17	28,94	6,72	1
29	Gorontalo	14,66	15,34	14,44	(0,75)	23
30	Sulawesi Barat	23,86	18,43	18,16	(12,76)	13
31	M a l u k u	19,26	19,60	18,29	(2,56)	12
32	Maluku Utara	24,86	21,05	25,26	0,79	3
33	Papua Barat	10,97	22,16	18,97	31,48	10
34	P a p u a	17,50	14,51	16,71	(2,27)	18
	Rata-Rata	17,05	16,95	16,49	(1,65)	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan

semakin besar proporsi Belanja Daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah.

Tambahan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Tambahan DAU tahun 2017 akibat tambahan pegawai tersebut adalah Rp752.730,78 juta, namun tambahan ini diikuti dengan tambahan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.314.751,48 juta. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terpaksa harus mengatur ulang alokasi belanja untuk Perangkat Daerah lainnya.

Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia adalah 24,61% dari Belanja Daerah. Sedangkan proporsi belanja ini di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah 34,73% dan menurun menjadi 32,59% tahun 2019. Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar ini merupakan No. 3 terbesar di Indonesia, di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bengkulu. Dalam beberapa tahun kedepan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan penambahan pegawai, agar proporsi belanja ini tidak terus meningkat. Jika pun terpaksa maka harus dilakukan analisis yang rinci tentang kompetensi yang sangat dibutuhkan.

Tabel 3.10 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia.

Tabel 3.10
Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking
1	A c e h	16,18	18,30	16,45	0,83	30
2	Sumatera Utara	25,08	27,58	25,61	1,05	16
3	Sumatera Barat	34,73	32,31	32,59	(3,13)	3
4	R i a u	21,54	26,36	26,36	10,63	14
5	J a m b i	26,01	29,49	28,66	4,97	10
6	Sumatera Selatan	22,71	20,80	18,20	(10,47)	29
7	Bengkulu	33,44	34,18	32,95	(0,72)	2
8	Lampung	22,73	22,03	24,96	4,78	18
9	Bangka Belitung	26,32	27,90	27,73	2,65	11
10	Kepulauan Riau	26,95	19,16	23,85	(5,94)	21
11	DKI Jakarta	34,51	35,58	29,26	(7,92)	9
12	Jawa Barat	15,75	16,63	15,64	(0,35)	32
13	Jawa Tengah	24,59	23,53	22,45	(4,46)	24
14	D I Yogyakarta	25,57	24,23	23,37	(4,40)	22
15	Jawa Timur	19,66	19,01	21,13	3,68	25
16	Banten	17,27	17,41	19,05	5,01	28
17	B a l i	24,61	26,20	24,05	(1,14)	20

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking
18	Nusa Tenggara Barat	24,41	25,59	26,98	5,11	13
19	Nusa Tenggara Timur	27,23	26,53	27,13	(0,17)	12
20	Kalimantan Barat	21,21	21,44	20,53	(1,61)	26
21	Kalimantan Tengah	30,25	25,70	23,16	(12,50)	23
22	Kalimantan Selatan	22,16	22,30	19,69	(5,73)	27
23	Kalimantan Timur	17,64	16,15	14,90	(8,08)	33
24	Kalimantan Utara	16,30	21,28	24,08	21,55	19
25	Sulawesi Utara	31,19	32,58	29,79	(2,28)	7
26	Sulawesi Tengah	30,65	33,44	29,44	(2,00)	8
27	Sulawesi Selatan	31,27	32,76	33,93	4,16	1
28	Sulawesi Tenggara	32,33	33,82	30,69	(2,57)	6
29	Gorontalo	31,73	32,33	31,56	(0,27)	5
30	Sulawesi Barat	24,62	29,26	26,31	3,37	15
31	Maluku	33,25	30,57	31,96	(1,95)	4
32	Maluku Utara	24,73	22,94	25,33	1,20	17
33	Papua Barat	6,63	7,98	7,28	4,75	34
34	Papua	8,35	12,22	15,70	37,11	31
	Rata-Rata	24,46	24,93	24,43	(0,05)	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

8. Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah.

Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah provinsi yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Utang yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Utang Belanja dan Utang Lainnya. Utang Lainnya ini bukan Utang Riil, karena hanya merupakan kebijakan akuntansi atas Dana Rajawali. Dengan demikian, tidak ada pokok dan bunga utang yang harus dibayar secara berkala.

Tabel 3.11 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan rasio Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga Hutang seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia.

Tabel 3.11
Rasio Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga Hutang Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	-	-	-

No	Provinsi	2017	2018	2019
5	J a m b i	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	0,03	0,46
9	Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	0,05	0,07	0,10
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	D I Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	0,00	0,02	0,03
16	Banten	-	-	-
17	B a l i	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	0,10
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	0,11	0,01	-
28	Sulawesi Tenggara	0,35	0,17	0,06
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,65	1,02	0,93
31	M a l u k u	0,01	-	-
32	Maluku Utara	-	-	0,02
33	Papua Barat	0,02	-	-
34	P a p u a	-	-	-
	Rata-Rata	0,04	0,04	0,05

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

4.2.4. Relevansi dan Efektivitas APBD Terhadap Kondisi Kemiskinan Daerah

Data kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020 berada di angka 12,92 persen (BPS, 2020). Tren angka kemiskinan Sumatera Barat lima tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas capaian nasional bahkan masuk kedalam 10 besar tingkat kemiskinan tertinggi nasional Tahun 2020. Hal ini nampak tidak relevan dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan APBD pun turut andil dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan, serta kebijakan yang lebih efektif dan efisien menjadi unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, perlu komitmen dan upaya bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut ini anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah lewat OPD terkait penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.1 Anggaran Belanja Menurut Urusan

Bidang Urusan		Belanja 2020	Belanja 2021	Growth (%)	OPD
Wajib-yandas	Pendidikan	1.054.508.073.454	1.564.261.741.007	48,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan	491.749.889.610	393.554.677.623	-19,97	1. Dinas Kesehatan
					2. BLUD RSUD Undata
					3. BLUD RSUD Madani
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	338.941.030.372	404.749.215.673	19,42	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
					2. Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	37.585.708.601	51.390.333.642	36,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Sosial	23.932.502.520	28.917.705.931	20,83	Dinas Sosial Provinsi
Wajib non yandas	Tenaga Kerja	34.480.512.377	36.032.282.368	4,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak	14.966.887.144	18.051.935.133	20,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan	61.513.922.616	66.707.520.460	8,44	Dinas Pangan Provinsi
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.523.634.168	17.189.791.868	4,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16.677.385.522	24.346.377.076	45,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Urusan Pilihan	Kelautan Dan Perikanan	44.243.941.920	68.368.652.879	54,53	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata	16.519.531.298	21.916.430.003	32,67	Dinas Pariwisata.
	Pertanian	76.049.059.231	95.829.067.476	26,01	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		71.349.816.401	89.153.795.004	24,95	2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Kehutanan	60.447.204.719	83.214.220.266	37,66	Dinas Kehutanan Provinsi
	Energi Dan Sumber Daya	17.354.608.908	21.472.929.311	23,73	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Perdagangan perindustrian	29.461.909.984	34.281.666.619	16,36	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Sumber: Perda No.5 Thn 2020 tentang APBD -P 2020 dan Pergub No.3 Thn 2021 Tentang Penjabaran APBD

Gambar di atas menunjukkan besaran alokasi belanja menurut urusan. Adapun Alokasi anggaran **pendidikan telah memenuhi aturan dimana telah ditetapkan bahwa sebesar 20% dari APBD** sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Hasil olah data menunjukkan bahwa persentasi anggaran Belanja untuk pendidikan adalah sebesar 23 persen Tahun 2020 dan sebesar 36 persen Tahun 2021. Walaupun jika ditilik lebih dalam dan dipisahkan dari administrasi keuangan perangkat daerah yang didalamnya menyangkut gaji ASN dan pelaksanaan Akuntansi SKPD, persentase yang dicapai untuk bidang pendidikan hanya berkisar 10,76 persen Tahun 2020 dan 11, 27 persen Tahun 2021 dari Total Belanja Daerah

Besar anggaran **kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10%** (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah **di luar gaji** sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun pada praktiknya, anggaran kesehatan diluar gaji untuk daerah Sumatera Barat masih belum dapat diterapkan. **Karena Anggaran Kesehatan Tahun 2020 hanya sebesar 8,03 persen dari APBD. Angka ini turun menjadi 6 persen di Tahun 2021 menjadi sebesar 6,19 persen dari APBD.** Oleh sebab itu, APBD untuk bidang kesehatan dinilai kurang relevan dengan amanah dan ketentuan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, belanja daerah yang berkenaan dengan bidang-bidang penanggulangan kemiskinan mengalami pertumbuhan anggaran dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Namun hal ini bertolak belakang dengan belanja bidang

kesehatan Tahun 2021 yang justru mengalami penurunan 19,97 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk menyoroti kebijakan anggaran dan memperbaiki kinerja OPD khususnya bidang kesehatan.

Kebijakan anggaran dinilai belum efektif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan mengingat angka kemiskinan Sumatera Barat masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Selain itu kebijakan anggaran dinilai belum relevan pemanfaatannya mengingat bidang kesehatan mengalami penurunan nilai alokasi belanja serta sebagian besar anggaran dipergunakan untuk membiayai pegawai pada unit kerja pemerintah, pembiayaan jasa kantor, perjalanan dinas dan belanja lainnya yang tidak berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan maupun infrastruktur bagi pemenuhan kebutuhan rakyat.

Adapun harapan kedepan dalam hal pelaksanaan kebijakan anggaran agar tersedianya alokasi anggaran dan program penanggulangan kemiskinan secara lebih besar, baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi keterlibatan OPD. Selain itu, Pemanfaatan data mutakhir terkait kemiskinan oleh seluruh OPD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perlu lebih ditingkatkan.

4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1. Faktor Pendorong

4.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,27 dan 5,30 persen menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,14 dan 5,01 persen, serta akibat pandemi berkontraksi -1,60 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung melambat, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat tipis, sehingga pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera barat lebih rendah daripada nasional. Padahal sebelumnya 2016-2018 tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi daripada nasional. Pada tingkat regional Sumatera, pada tahun 2020 Sumatera Barat berada pada rangking ketujuh dari 10 provinsi. Padahal selama empat tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada dalam lima besar di regional Sumatera, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun
2016-2020 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	3,2	4,1	4,61	4,14	-0,37
2. Sumatera Utara	5,1	5,1	5,18	5,22	-1,07
3. Sumatera Barat	5,2	5,3	5,14	5,01	-1,60
4. Riau	2,1	2,6	2,35	2,81	-1,12
5. Jambi	4,3	4,6	4,69	4,37	-0,46
6. Sumatera Selatan	5,0	5,5	6,01	5,69	-0,11
7. Bengkulu	5,2	4,9	4,97	4,94	-0,02
8. Lampung	5,1	5,1	5,23	5,26	-1,67
9. Kep.Bangka Belitung	4,1	4,4	4,45	3,32	-2,30
10. Kep.Riau	4,9	1,9	4,47	4,84	-3,80
Nasional	5,0	5,0	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

4.3.1.2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 37, 28 juta pada 2016 menjadi Rp. 44,03 juta pada tahun 2020. Namun angka ini masih berada dibawah nasional sebesar Rp. 47,97 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 56,9 juta pada 2020. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Barat sebagai salahsatu ukuran kesejahteraan rakyat dibandingkan rata-rata nasional.

Hasil serupa ditunjukkan pula dengan menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita sebagai salahsatu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 10,126 juta lebih rendah daripada angka nasional sebesar Rp. 10,420 juta per tahun. Begitupula pada tahun 2020, pengeluaran Sumatera Barat sebesar Rp. 10,733 juta dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp. 11,013. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya beli masyarakat Sumatera Barat.

Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan nasional memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Sumatera Barat berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, rata-rata nasional telah mencapai Rp. 56,09 juta. Capaian penting dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi konvergensi atau semakin mengecilnya selisih PDRB per kapita Sumatera Barat dengan rata-rata nasional.

Perbandingan PDRB per kapita secara regional di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	26,85	28,10	29,52	30,56	30,47
2. Sumatera Utara	44,39	48,00	51,43	54,91	55,18
3. Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03
4. Riau	104,86	105,84	110,38	109,09	102,29
5. Jambi	49,49	53,99	58,22	59,88	56,24
6. Sumatera Selatan	43,36	46,31	50,10	53,55	53,50
7. Bengkulu	29,07	31,36	33,82	36,20	36,30
8. Lampung	34,05	37,00	39,72	42,23	41,62
9. Kep.Bangka Belitung	46,40	48,83	50,08	50,91	49,77
10. Kep.Riau	106,50	109,33	116,46	122,24	113,39

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

4.3.1.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Sumatera Barat selama 2016-2020 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia terus meningkat. Angkanya dari 70,73 persen pada tahun 2016 menjadi 72,38 pada 2020 (lihat tabel 2.31). Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 9 secara nasional dan secara regional Pulau Sumatera berada pada peringkat 3 setelah Kepulauan Riau dan Riau, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
IPM Pulau Sumatera Tahun 2020

PROVINSI	TAHUN 2020
Aceh	71,9
Sumatera Utara	71,7
Sumatera Barat	72,3
Riau	72,7
Jambi	71,2
Sumatera Selatan	70,0
Bengkulu	71,4
Lampung	69,6
Kep. Bangka Belitung	71,4
Kep. Riau	75,5

4.3.2. Faktor Penghambat

4.3.2.1. Pandemi Covid-19

Sejak mewabahnya virus corona (Covid-19) semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang terjangkit positif covid. Sehingga mengancam upaya peningkatan produksi dan perbaikan ekonomi yang dikhawatirkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan interaksi masyarakat (*social and physical distancing*). Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

telah meninjau kembali pengalokasian anggarannya ke tujuan mempercepat pengentasan dampak corona, terutama dari sisi kesehatan masyarakat.

Kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dilakukan dengan membatasi Pergerakan Arus Barang dengan Penumpang yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Adanya pembatasan interaksi masyarakat dan pergerakan arus barang dalam mencegah meluasnya penularan wabah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kondisi tersebut adalah: (1) menurunnya interaksi antar masyarakat menyebabkan penurunan pendapatan, dan dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan masyarakat miskin baru (2) menurunnya penghasilan masyarakat Provinsi Sumatera Barat terutama pusat konsumen di Kota Padang akibat terbatasnya lapangan pekerjaan berkonsekuensi pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses pangan terbatas termasuk pangan hewani dari jenis ikan. (3) terbatasnya aliran barang dan jasa menyebabkan tersendatnya distribusi kebutuhan rumah tangga dan operasional seperti bahan bakar minyak, konsumsi, dan penunjang lain.

Realitas menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah belum secara signifikan mengatasi penularan wabah covid-19, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi terutama daerah-daerah yang tingkat penularan covid-19 rendah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini ditujukan agar ketersediaan bahan pokok terjamin, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil).

4.3.2.2. PDRB per kapita dan Pengeluaran Riil per kapita yang rendah

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 37, 28 juta pada 2016 menjadi Rp. 44,03 juta pada tahun 2020. Namun angka ini masih berada dibawah nasional sebesar Rp. 47,97 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 56,9 juta pada 2020. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Barat sebagai salahsatu ukuran kesejahteraan rakyat dibandingkan rata-rata nasional.

Hasil serupa ditunjukkan pula dengan menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita sebagai salahsatu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 10,126 juta lebih rendah daripada angka nasional sebesar Rp. 10,420 juta per tahun. Begitupula pada tahun 2020, pengeluaran Sumatera Barat sebesar Rp. 10,733 juta dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp. 11,013. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya beli masyarakat Sumatera Barat.

Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan nasional memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Sumatera Barat berada dibawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2020, rata-rata nasional telah mencapai Rp. 56,09 juta. Capaian penting dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi konvergensi atau semakin mengecilnya selisih PDRB per kapita Sumatera Barat dengan rata-rata nasional.

4.3.2.3. Ketimpangan Wilayah Yang Cenderung Meningkat

Indeks Williamson yang mengukur ketimpangan wilayah dalam ukuran pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu dari 0,2661 pada tahun 2016 menjadi 0,2736 pada tahun 2019. Rentang PDRB per kapita dari terendah dan tertinggi pada tahun 2016 berkisar dari Rp. 24,836 juta per kapita per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan hingga Rp. 54,388 juta di Kota Bukittinggi. Selisih diantara keduanya mencapai Rp. 29,552 juta. Pada tahun 2020, rentang PDRB berkisar dari yang terendah di Pesisir Selatan sebesar Rp. 29,964 juta hingga yang tertinggi di Bukittinggi sebesar Rp. 65,004 juta. Sebagai gambaran, terjadi peningkatan selisih antara tertinggi terendah menjadi Rp. 35,04 juta. Ketimpangan wilayah yang semakin melebar ini perlu memberikan perhatian pada kebijakan-kebijakan afirmasi yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat.

4.3.2.4. Lebih Tingginya Tingkat Kemiskinan Dan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan Daripada Perkotaan.

Tingkat kemiskinan Sumatera Barat menurun dari 7,14 persen pada tahun 2016 menjadi 6,29 persen pada tahun 2019. Meskipun mengalami kenaikan menjadi 6,56 persen pada tahun 2020, relatif lebih rendah daripada kenaikan tingkat kemiskinan nasional, sehingga tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih cukup jauh berada dibawah rata-rata nasional. Dari persentase tingkat kemiskinan, capaian September 2020 yang sebesar 6,56% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2019 sebesar 6,29% atau sekitar 0,27 poin, dan jika dibandingkan dengan Maret 2020 dengan capaian 6,28 % atau naik sebesar 0,28 poin. Akan tetapi angka tingkat kemiskinan di Sumatera Barat ini selalu berada dibawah angka Nasional, dimana angka kemiskinan Nasional pada September 2020 sebesar 10,19 %.

Permasalahannya terlihat bila dipilah secara kewilayahan antara perdesaan dan perkotaan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 7,43 persen yang cukup lebar dibandingkan perkotaan sebesar 4,97 persen. Hingga September 2020, jumlah penduduk miskin di pedesaan berjumlah 223,47 ribu orang dibandingkan perkotaan sebanyak 141,31 ribu jiwa.

Dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, wilayah perdesaan memiliki kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) daerah pedesaan 1,171 dibandingkan daerah perkotaan sebesar 0,803. Angka ini mengindikasikan relatif lebih dalamnya penduduk miskin pedesaan untuk dari

garis kemiskinan. Sekaligus mengimplikasikan perlunya upaya yang lebih serius dengan efektivitas sasaran dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

4.4 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis ToC, causal attribution, analisis faktor pendukung dan penghambat serta analisis situasi terkait pendapatan dan belanja kemiskinan maka dirumuskan isu strategis, seperti yang tertera pada Tabel berikut.

Tabel 4.4.
Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Bidang	Rumusan Isu Strategis
Pendidikan	Peningkatan akses hak dasar pendidikan melalui kebijakan Penerapan kebijakan merdeka belajar di daerah, Menyelenggarakan sekolah gratis anak usia SMA yang putus sekolah dengan alasan ekonomi, Menyelenggarakan pendidikan vokasi, Meningkatkan mutu dan pemerataan distribusi tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah, dan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sasaran kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin.
Kesehatan	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kebijakan penurunan angka stunting, penurunan penduduk dengan pengobatan sendiri, dan penurunan persentase morbiditas. Sasaran kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang berada pada wilayah prioritas.
Infrastruktur Dasar Perumahan	Peningkatan rumah hunian yang layak dan terjangkau melalui kebijakan peningkatan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pembangunan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah dengan air minum layak dan sanitasi layak.
Ketenagakerjaan dan sosial	Peningkatan kesempatan bekerja melalui kebijakan kemudahan berinvestasi, pengembangan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan energi listrik, perbaikan jalan dari sumber bahan baku ke kawasan industri, pembinaan UKM dan wirausaha, dan peningkatan program padat karya. Pembangunan diprioritaskan bagi masyarakat kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki tingkat pengangguran terbuka.
Ketahanan Pangan	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal terutama padi, jagung, ubi kayu, sagu, ubi banggai, dan ubi jalar melalui diversifikasi pangan, penciptaan produk olahan pangan tahan lama dan higienis, dan penerapan pola pangan harapan (PPH). Sasaran masyarakat melalui kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) di daerah-daerah rawan pangan.
Pertanian	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura,

	perkebunan dan populasi ternak unggulan daerah melalui intensifikasi lahan pertanian, penggunaan benih/bibit unggul lokal tahan hama/penyakit, penggunaan pupuk organik, pemanfaatan teknologi mesin dalam penanaman dan pemanenan, serta peningkatan peran PPL dalam perubahan pola pikir petani dan kelompoknya. Kebijakan ini diprioritaskan pada daerah-daerah yang ketersediaan pangan utama rendah.
Perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya (terutama rumput laut), serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan perikanan melalui penggunaan kapal dan alat tangkap dengan kapasitas tangkap yang cukup besar, penyediaan sarana produksi bagi perikanan budidaya seperti bibit dan pakan murah bagi tambak dan kolam hemat air, serta bibit rumput laut tahan hama/penyakit, serta perbaikan mutu dan penanganan hasil perikanan pasca produksi.

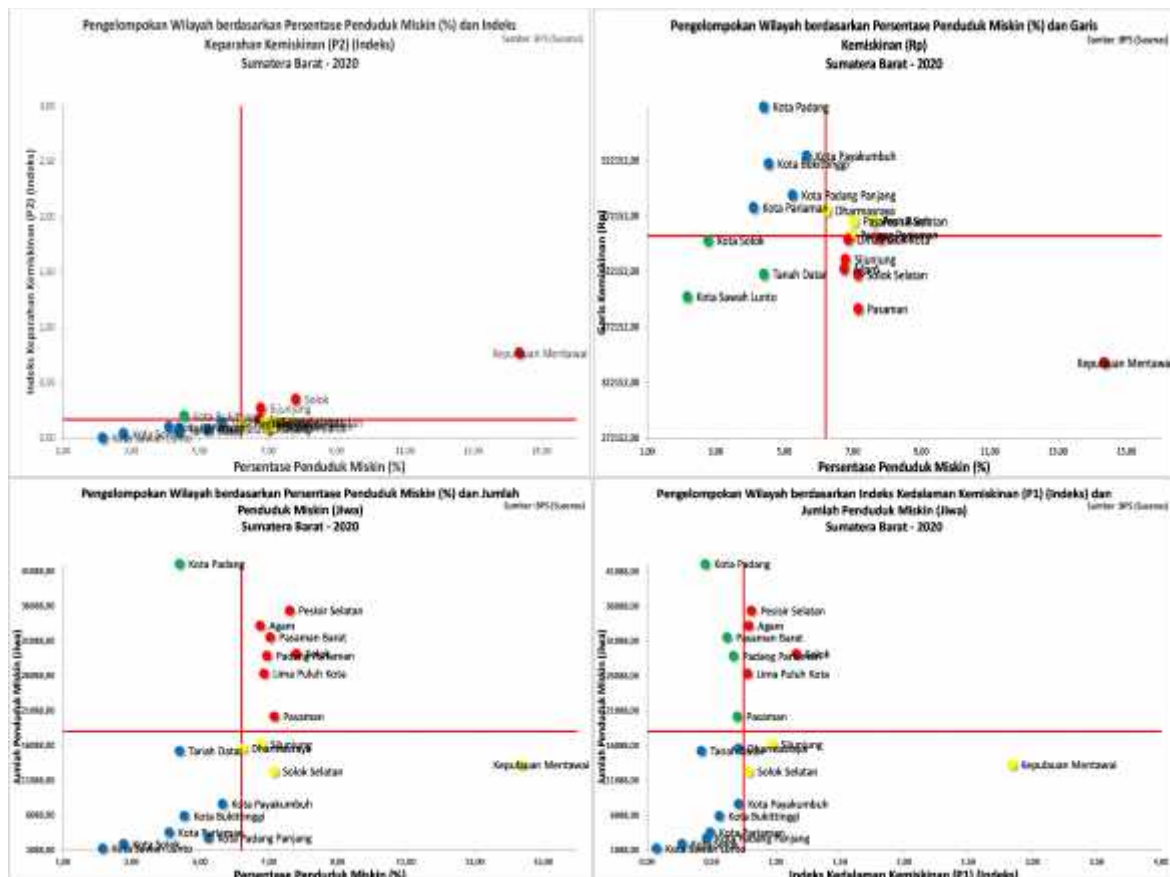
Bab V

LOKASI PRIORITAS

5.1. Penentuan Lokasi Prioritas Program

5.1.1 Bidang Kemiskinan Konsumsi

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5.1.
Hasil Analisis Prioritas Lokasi Berdasarkan Indikator
Kemiskinan Konsumsi di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa jika indikator persentase penduduk miskin (indikator utama) dimasukkan sebagai dasar penentuan wilayah intervensi program, maka kabupaten prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara berdasarkan indikator indeks keparahan kemiskinan, persentase penduduk miskin, indikator garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin serta kedalaman kemiskinan sebagai indikator pendukung, maka ada beberapa kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Berdasarkan analisa perbandingan keempat indikator kemiskinan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan

untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat secara berurutan disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Konsumsi

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% penduduk miskin)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Jml Pddk miskin-Indeks Kedalaman Kemiskinan	
Kab. Kepulauan Mentawai						1
Kab. Pesisir Selatan						3
Kab. Solok						2
Kab. Sijunjung						9
Kab. Tanah Datar						16
Kab. Padang Pariaman						8
Kab. Agam						10
Kab. Lima Puluh Kota						6
Kab. Pasaman						5
Kab. Solok Selatan						7
Kab. Dharmasraya						11
Kab. Pasaman Barat						4
Kota Padang						15
Kota Solok						18
Kota Sawahlunto						19
Kota Padang Panjang						13
Kota Bukittinggi						14
Kota Payakumbuh						12
Kota Pariaman						17

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.

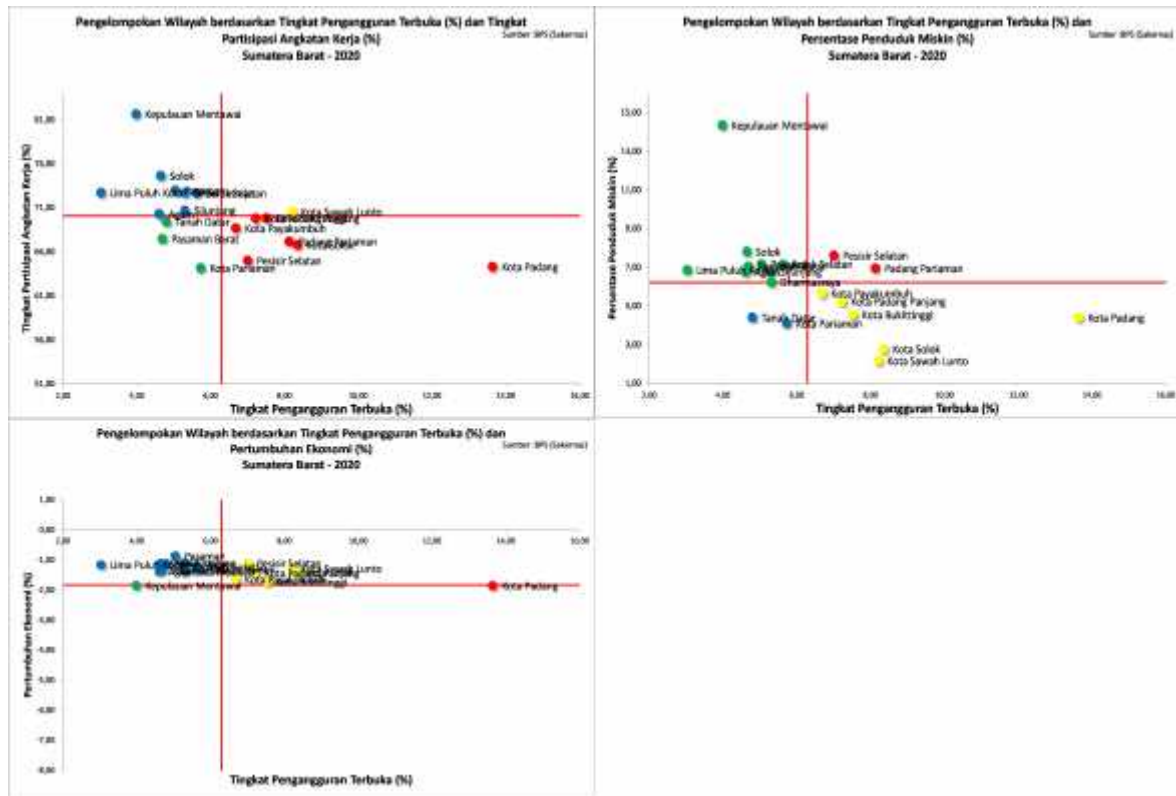
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang konsumsi, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi Kabupaten/Kota: Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Padang,
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman.

5.1.2. Bidang Ketenagakerjaan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 5.2. sebagai berikut.



Gambar 5.2.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tingkat pengangguran terbuka (indikator utama), kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat adalah Kota Padang, Kota Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman. Jika indikator TPAK, persentase penduduk miskin, pertumbuhan perkapita dan pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai dasar penentuan wilayah intervensi program, maka terdapat beberapa kabupaten yang prioritas berbeda dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat secara berurutan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% TPT)	Indikator Pendukung			Prioritas
		TPAK(%)	Persentase Penduduk miskin(%)	Pertumbuhan ekonomi	
Kab. Kepulauan Mentawai					18
Kab. Pesisir Selatan					7
Kab. Solok					16
Kab. Sijunjung					12
Kab. Tanah Datar					14
Kab. Padang Pariaman					3
Kab. Agam					17
Kab. Lima Puluh Kota					19
Kab. Pasaman					13
Kab. Solok Selatan					11
Kab. Dharmasraya					10
Kab. Pasaman Barat					15
Kota Padang					1
Kota Solok					2
Kota Sawahlunto					4
Kota Padang Panjang					5
Kota Bukittinggi					6
Kota Payakumbuh					8
Kota Pariaman					9

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang ketenagakerjaan, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Kota Padang, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Sawahlunto
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya

5.1.3 Bidang Kesehatan

Berangkat dari permasalahan bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka ditetapkan beberapa program dalam upaya perbaikan kualitas kesehatan daerah. Adapun program urusan pemerintahan Bidang Kesehatan diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

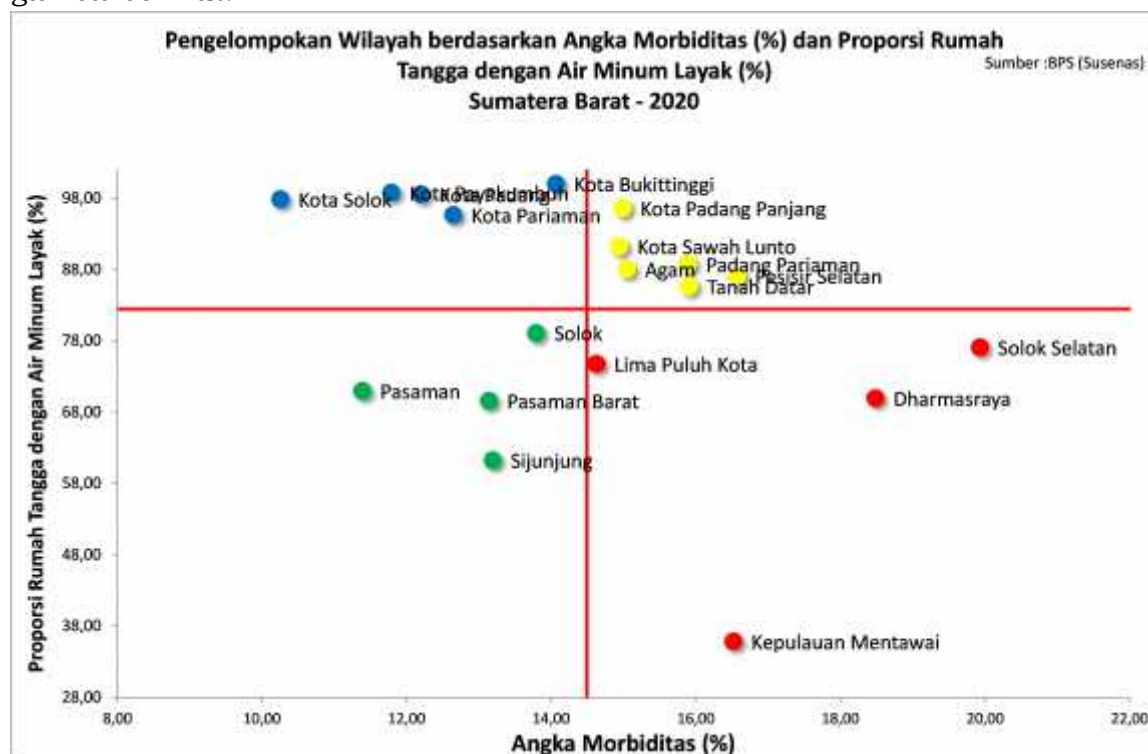
Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

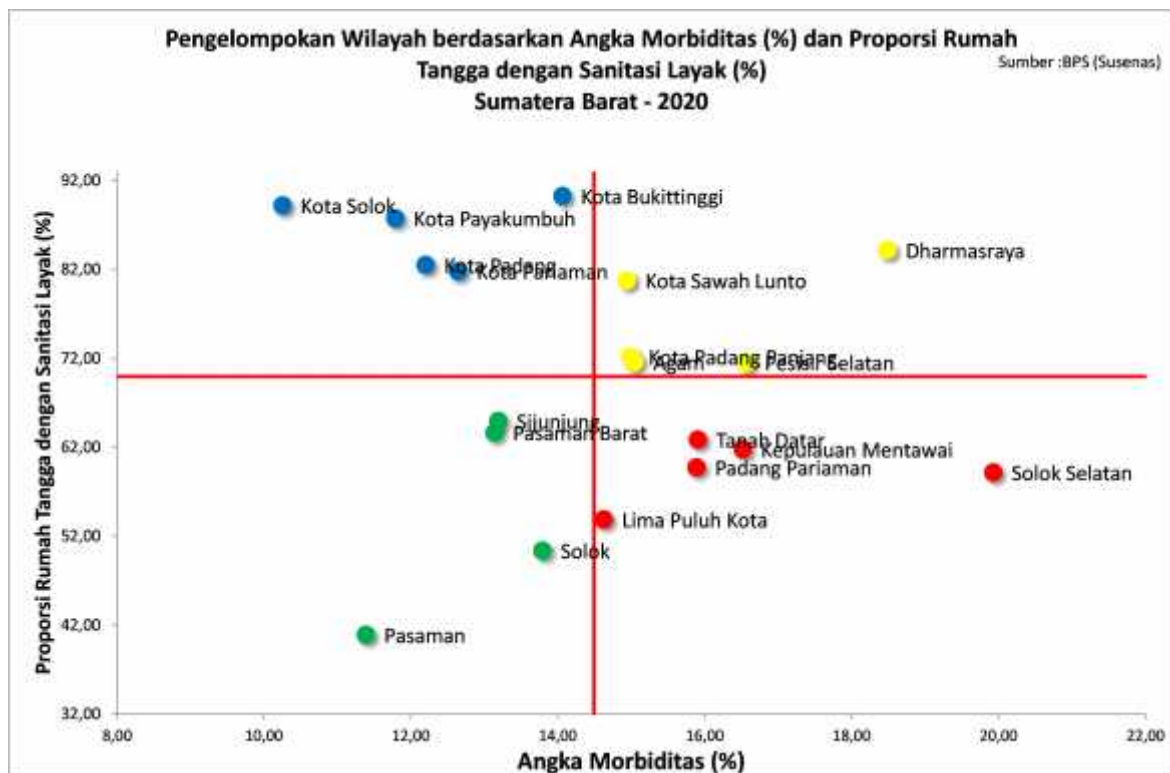
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, yang berkolaborasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lain serta pemangku kepentingan, dengan tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kesehatan.

1. Indikator Utama Angka Morbiditas

Berikut gambaran analisis pengelompokan wilayah berdasarkan angka morbiditas (indikator utama), dan 3 (tiga) indikator pendukung: proporsi rumah tangga dengan air minum layak, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, yang disajikan dalam gambar berikut.





Gambar 5.3.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah
Berdasarkan Indikator Utama Persentase Angka Morbiditas

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama: angka morbiditas dan hubungannya dengan indikator pendukung, menunjukkan wilayah yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Selengkapnya uraian hasil analisis prioritas berdasarkan indikator utama Angka Mordibitas duraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Indikator Utama Angka Morbiditas
Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Ind. Utama	Indikator Pendukung		Prioritas
	(% Morbiditas)	Air Minum Layak (%)	Sanitasi Layak (%)	
Kab. Kepulauan Mentawai				3
Kab. Pesisir Selatan				5
Kab. Solok				11
Kab. Sijunjung				13
Kab. Tanah Datar				6
Kab. Padang Pariaman				7
Kab. Agam				8
Kab. Lima Puluh Kota				4
Kab. Pasaman				14

Kab. Solok Selatan				1
Kab. Dharmasraya				2
Kab. Pasaman Barat				12
Kota Padang				17
Kota Solok				19
Kota Sawahlunto				10
Kota Padang Panjang				9
Kota Bukittinggi				15
Kota Payakumbuh				18
Kota Pariaman				16

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator utama Angka Morbiditas dan indikator pendukungnya, diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota sebagai berikut:

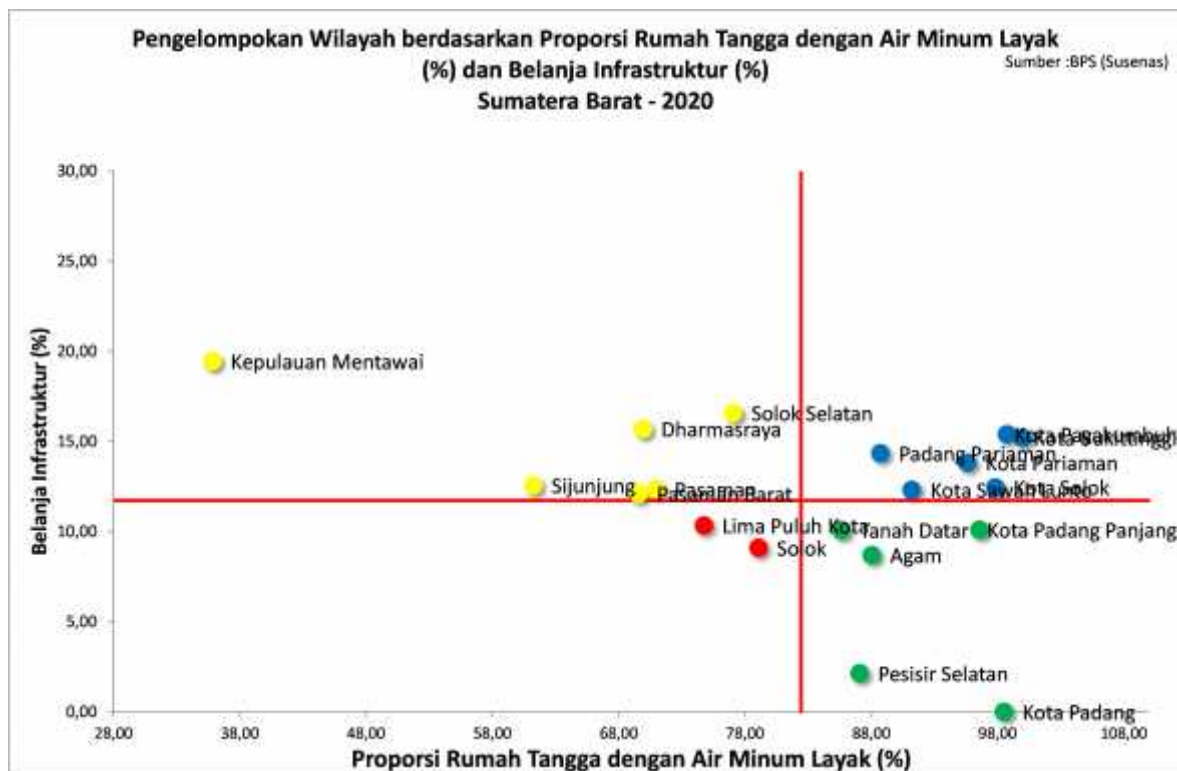
Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman.
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang.
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat .
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

5.1.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Berangkat dari permasalahan bidang Infrastruktur Dasar yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dirumuskan beberapa program. Program-program urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur Dasar dimaksud, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020. Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, yang disajikan sebagai berikut.

1. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut.



Gambar 5.4.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan prioritas sebagai berikut.

Tabel 5.4.

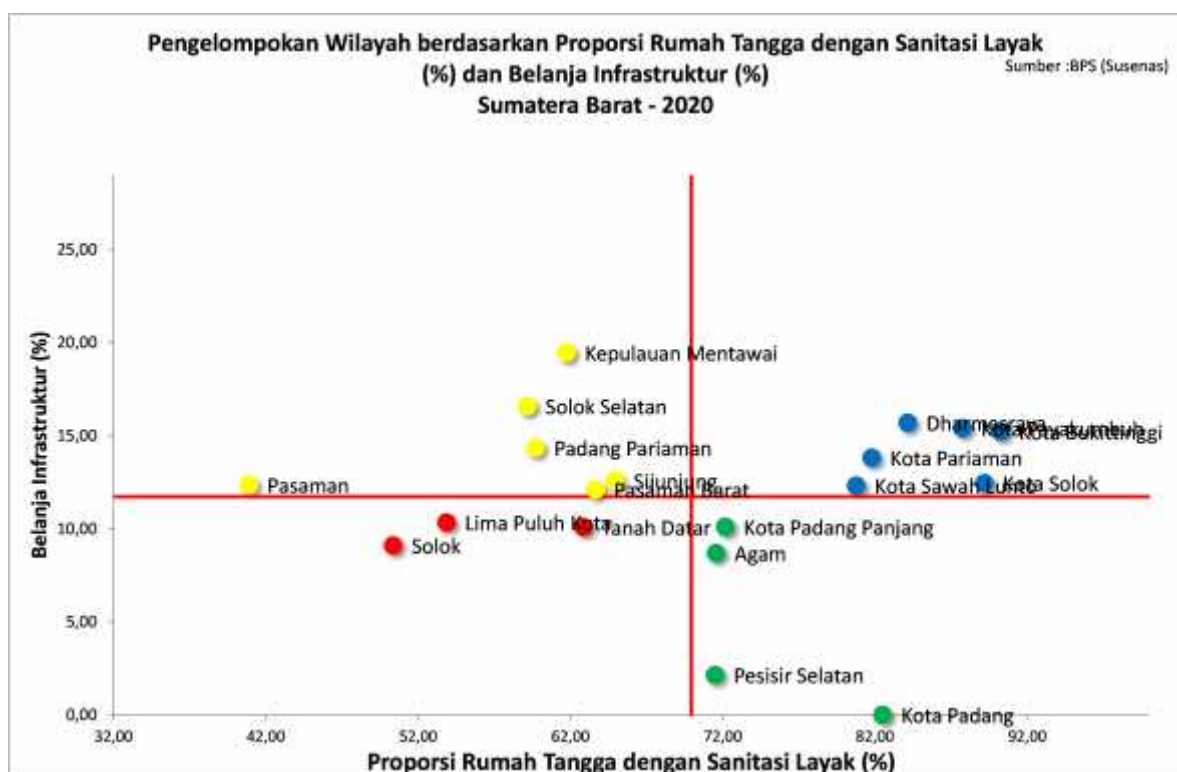
Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	2	
2.	Kab. Pesisir Selatan	3	
3.	Kab. Solok	1	
4.	Kab. Sijunjung	2	
5.	Kab. Tanah Datar	3	
6.	Kab. Padang Pariaman	4	
7.	Kab. Agam	3	
8.	Kab. Lima Puluh Kota	1	
9.	Kab. Pasaman	2	
10.	Kab. Solok Selatan	2	
11.	Kab. Dharmasraya	2	
12.	Kab. Pasaman Barat	2	

13.	Kota Padang	3	
14.	Kota Solok	4	
15.	Kota Sawahlunto	4	
16.	Kota Padang Panjang	3	
17.	Kota Bukittinggi	4	
18.	Kota Payakumbuh	4	
19.	Kota Pariaman	4	

2. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut.



Gambar 5.5.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan daerah berada pada wilayah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan sebagai berikut.

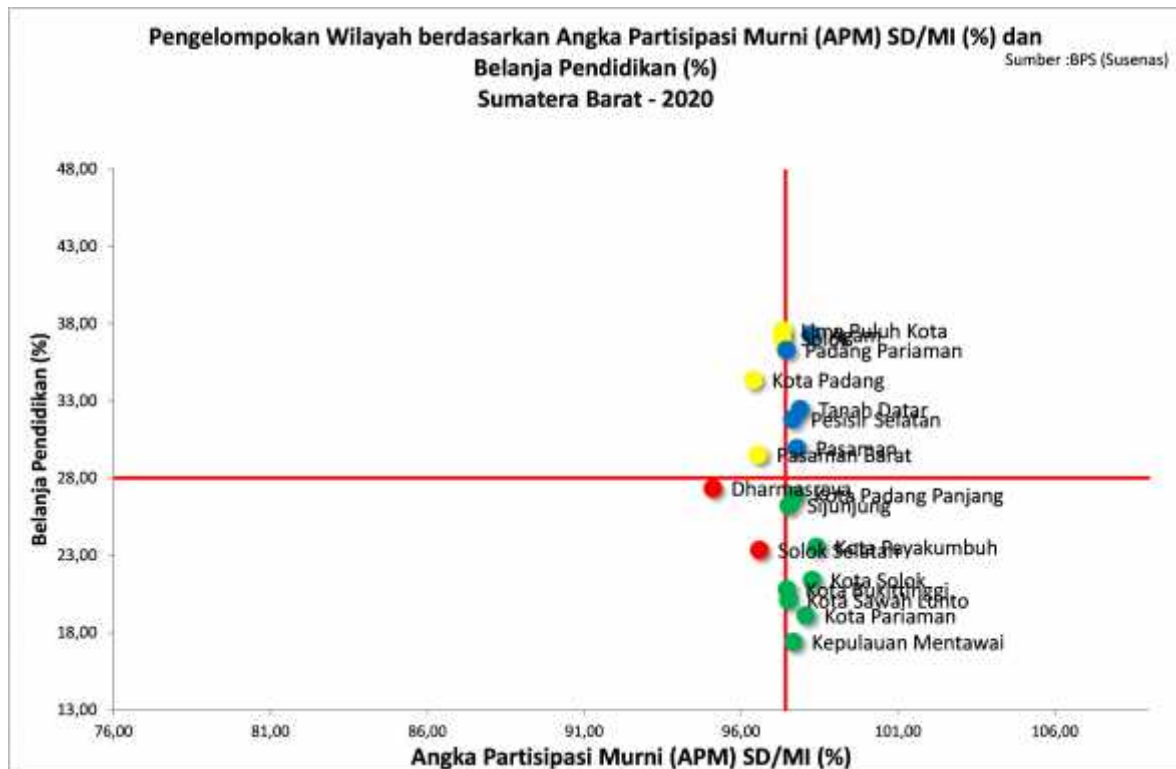
Tabel 5.5.

**Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak**

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	2	
2.	Kab. Pesisir Selatan	3	
3.	Kab. Solok	1	
4.	Kab. Sijunjung	2	
5.	Kab. Tanah Datar	1	
6.	Kab. Padang Pariaman	2	
7.	Kab. Agam	3	
8.	Kab. Lima Puluh Kota	1	
9.	Kab. Pasaman	2	
10.	Kab. Solok Selatan	2	
11.	Kab. Dharmasraya	4	
12.	Kab. Pasaman Barat	2	
13.	Kota Padang	3	
14.	Kota Solok	4	
15.	Kota Sawahlunto	4	
16.	Kota Padang Panjang	3	
17.	Kota Bukittinggi	4	
18.	Kota Payakumbuh	4	
19.	Kota Pariaman	4	

5.1.5. Bidang Pendidikan

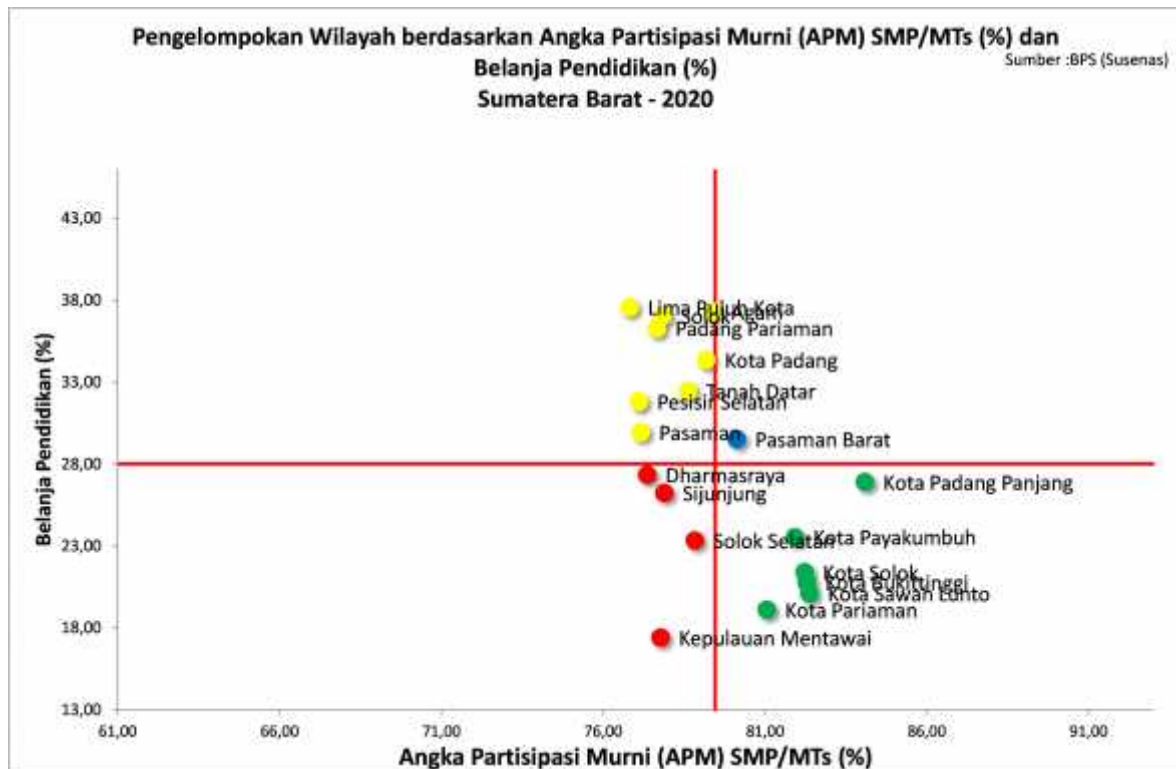
Beranjak dari identifikasi permasalahan bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa program dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Program urusan pemerintahan bidang Pendidikan diuraikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.



Gambar 5.6.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SD/MI dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.6 menunjukkan, berdasarkan indikator utama APM SD/MI dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan merujuk data tahun 2020, maka terdapat dua kabupaten kota menempati kwadran pertama dan menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Kelima kabupaten kota tersebut angka APM tingkat SD/MI masih dibawah 97 persen dengan anggaran pendidikan bersumber dari APBD belum mencapai 28 persen sebagaimana disyaratkan.

Gambar 5.6 juga menunjukkan pada kwadran kedua, terdapat empat kabupaten capaian belanja pendidikannya diatas 28 persen namun APM yang di capai masih dibawah 90 persen. Keempat Kabupaten tersebut yang perlu mendapat prioritas kedu adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat.

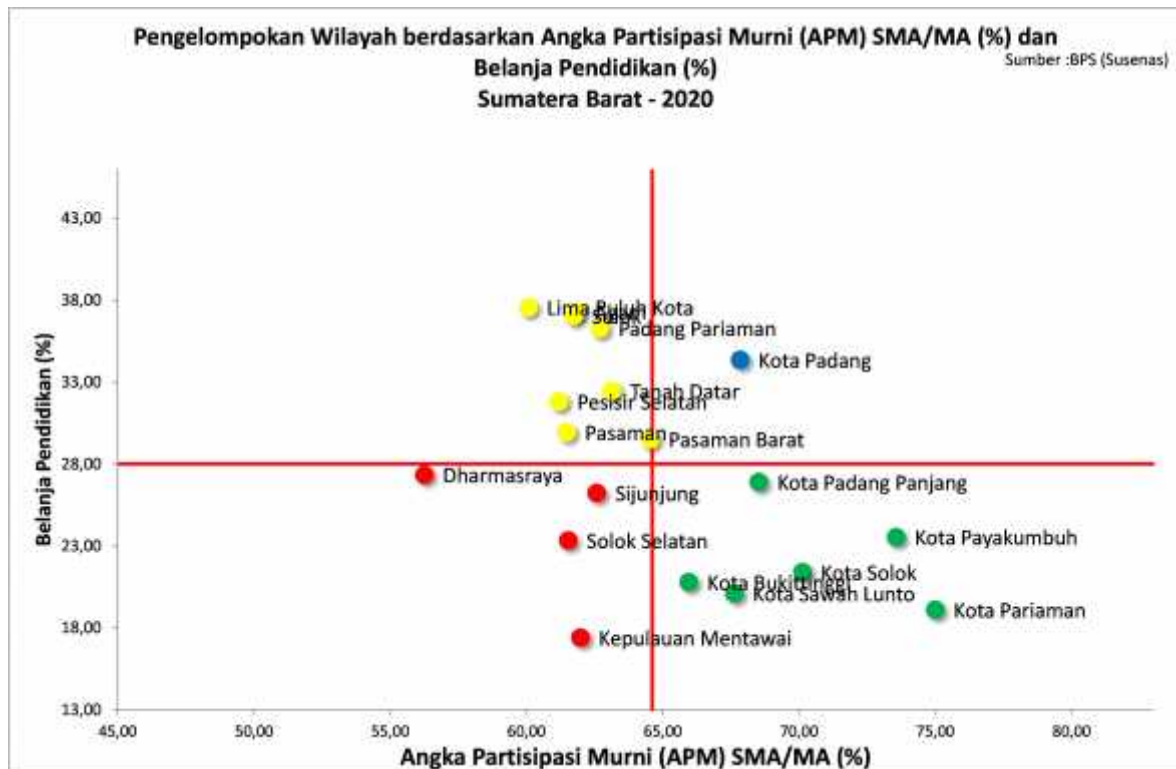


Gambar 5.7.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMP/MTs dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada Gambar 5.7. dengan melihat indikator utama APM SMP/MTs dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan sesuai data tahun 2020, terdapat empat kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Keempat kabupaten/kota tersebut angka APM yang dicapai untuk tingkat SMP/MTs masih dibawah 80 persen dengan khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai anggaran pendidikan bersumber dari APBD kurang dari 20 persen sebagaimana disyaratkan.

Pada gambar 5.7 juga menunjukkan bahwa terdapat delapan kabupaten belanja pendidikannya diatas 28 persen namun capaian APM masih dibawah 80 persen yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 5.8.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMA/MA dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Pada Gambar 5.8 memperlihatkan, terdapat empat kabupaten (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya) perlu mendapat prioritas utama karena jika merujuk pada indikator utama APM SMA/MA, persentase penduduk usia 16-18 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MT masih dibawah 65 persen. Dari aspek dukungan belanja pendidikan, dari keempat kabupaten tersebut terdapat satu kabupaten belanja pendidikannya pada Tahun Anggaran 2020 kurang dari 20 persen, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jika diyakini hipotesis bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini pendidikan, maka terdapat delapan kabupaten perlu mendapat penanganan khusus yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga kabupaten tersebut belanja pendidikannya diatas 28 persen namun capaian APM untuk SMA/MT masih dibawah 65 persen.

5.2. Target Penurunan Persentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, dibutuhkan penyusunan RPKD. RPKD menjadi bagian RPJMD dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Dari itu, tujuan penanggulangan kemiskinan daerah disebutkan sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Atas tujuan penanggulangan kemiskinan daerah dimaksud, lebih lanjut diuraikan dalam Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang memuat target persentase penurunan kemiskinan dari kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat, selengkapnya disebutkan sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kepulauan Mentawai	14,83	14,71	14,57	14,44	14,31	14,17
2	Kab. Pesisir Selatan	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
3	Kab. Solok	8,00	7,88	7,75	7,62	7,49	7,36
4	Kab. Sijunjung	6,93	6,81	6,69	6,56	6,43	6,30
5	Kab. Tanah Datar	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
6	Kab. Padang Pariaman	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48
7	Kab. Agam	6,90	6,78	6,66	6,53	6,40	6,27
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39
9	Kab. Pasaman	7,33	7,20	7,08	6,95	6,81	6,68
10	Kab. Solok Selatan	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68
11	Kab. Dharmasraya	6,36	6,24	6,12	6,00	5,87	5,74
12	Kab. Pasaman Barat	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58
13	Kota Padang	4,45	4,33	4,22	4,10	3,98	3,85
14	Kota Solok	2,74	2,63	2,51	2,39	2,26	2,14
15	Kota Sawahlunto	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,95
16	Kota Padang Panjang	5,32	5,20	5,08	4,96	4,83	4,71
17	Kota Bukittinggi	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99
18	Kota Payakumbuh	5,75	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16

19	Kota Pariaman	4,13	4,01	3,89	3,76	3,64	3,51
	Provinsi Sumatera Barat	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77

Sumber: Data Proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, diproyeksikan target capaian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 sejumlah 6,40, tahun 2022 sejumlah 6,28 persen, tahun 2023 sejumlah 6,16 persen, tahun 2024 sejumlah 6,03 persen, tahun 2025 sejumlah 5,90 persen dan hingga tahun 2026 sejumlah 5,77 persen. Target capaian optimis dimaksud dapat dicapai lewat serangkaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi lintas perangkat daerah dengan melibatkan pihak terkait utamanya swasta (badan usaha) dan lembaga swadaya masyarakat, lewat wadah bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas program yang menjadi kewenangan daerah dalam dokumen penanggulangan kemiskinan daerah ini, ditentukan indikator program yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk selanjutnya disusun target (target kinerja dan target pagu anggaran) tahun 2021-2026, yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Selengkapnya matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disebutkan dalam tabel berikut.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		bergerak (PKB)																				
		Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA	kabupaten/kota	4	4												6	6	8	8	8	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	17	17												18	18	18	19	19	DINAS KESEHATAN
		Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	34,4	35												37	38	39	40	40	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	90	92												94	96	98	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	9	8,9												8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	78,6	79,6												81	83	85	87	87	DINAS KESEHATAN
		Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	100	100												100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	85,53	86,84												88,16	89,47	90,79	92,11	92,11	DINAS KESEHATAN
		Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100												100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	21,1	18,44												15,43	14	12,50	10,60	10,60	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92	11.516.389.000	93	11.663.226.000	94	11.949.880.000	95	12.372.575.000	96	12.965.236.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI						
1.02.02	PROGRAM	Indeks Kepuasan	%	85	86	3.433.164.000	87	3.476.938.000	88	3.562.392.000	89	3.688.402.000	90	3.865.081.000	90	RUMAH SAKIT JIWA						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Masyarakat (IKM)														PROF. HB. SAANIN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	%	81	82	16.602.193.000	83	16.813.875.000	84	17.227.119.000	85	17.836.482.000	86	18.690.871.000	86	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92		93		94		95		96		96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	92	6.101.200.000	93	6.178.992.000	94	6.330.856.000	95	6.554.793.000	96	6.868.775.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan	strata		B	1.691.829.000	B	1.713.401.000	A	1.755.512.000	A	1.817.608.000	A	1.904.674.000	A	DINAS KESEHATAN
		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang		420		480		530		580		630		630	DINAS KESEHATAN
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%		73,7		79,9		87		95		100		100	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	44	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
---------	---	--	---	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	--

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%		100	158.691.000	100	160.714.000	100	164.664.000	100	170.489.000	100	178.655.000	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%		100		100		100		100		100		100	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota		8	2.341.013.000	11	2.370.862.000	14	2.429.132.000	17	2.515.056.000	19	2.635.530.000	19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota		8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota		8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					374.570.378.000		379.346.254.000		388.669.653.000		402.417.791.000		421.694.086.000		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	139.275.433.000	55,28	141.051.233.000	56,78	144.517.926.000	58,28	149.629.857.000	59,78	156.797.306.000	59,78	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		76,6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		73,5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	82	82	4.188.865.000	84	4.242.274.000	86	4.346.539.000	88	4.500.286.000	90	4.715.855.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional	lokasi	2	2	634.975.000	3	643.071.000	3	658.876.000	3	682.182.000	3	714.859.000	3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	81	83	707.627.000	85	716.650.000	87	734.263.000	88	760.236.000	90	796.652.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi	Km	1	2	529.075.000	10	535.821.000	15	548.990.000	25	568.409.000	36	595.637.000	36	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya pembangunan Bangunan Gedung	unit	10	3	22.787.495.000	7	23.078.042.000	2	23.645.244.000	3	24.481.630.000	2	25.654.330.000	27	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	kawasan	2	1	1.577.454.000	1	1.597.567.000	1	1.636.831.000	2	1.694.729.000	3	1.775.909.000	10	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	2,01	7,91	4.231.756.000	13,81	4.285.712.000	19,72	4.391.044.000	25,62	4.546.366.000	31,52	4.764.142.000	31,52	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	100	100		100		100		100		100		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
		Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	%	5	10		15		20		25		30		30	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyusunan RRTR Provinsi dan Fasilitasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	%	84	86	1.989.116.000	87	2.014.478.000	88	2.063.989.000	89	2.136.997.000	90	2.239.362.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.679.513.000		14.866.681.000		15.232.067.000		15.770.860.000		16.526.303.000		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	%	0	3	1.695.724.000	3	1.717.345.000	3	1.759.553.000	3	1.821.792.000	3	1.909.058.000	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	0	8	11.363.910.000	8	11.508.803.000	8	11.791.661.000	8	12.208.759.000	8	12.793.573.000	8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%		100	157.961.787.000	100	159.975.843.000	100	163.907.657.000	100	169.705.447.000	100	177.834.541.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
		Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak	orang		25	892.531.000	25	903.911.000	25	926.127.000	25	958.886.000	25	1.004.818.000	25	DINAS SOSIAL
		Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid	%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
		Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen		30		35	40	50	60					DINAS SOSIAL	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%		100	507.215.000	100	513.682.000	100	526.307.000	100	544.924.000	100	571.027.000	100	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pelestarian Taman makam Pahlawan	%		100	125.133.000	100	126.729.000	100	129.844.000	100	134.437.000	100	140.876.000	100	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					142.996.664.000		144.819.908.000		148.379.223.000		153.627.740.000		160.986.692.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.003.295.000		3.041.588.000		3.116.344.000		3.226.575.000		3.381.131.000		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	dokumen	0	2	212.000	1	214.000	1	220.000	1	227.000	1	238.000	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	%	31,77	35,52	240.222.000	36,01	243.285.000	36,5	249.265.000	36,99	258.082.000	37,97	270.444.000	37,97	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10,69	11,26	192.193.000	11,83	194.644.000	12,41	199.428.000	12,98	206.482.000	13,56	216.372.000	13,56	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	8,14	20	677.104.000	40	685.737.000	60	702.591.000	80	727.443.000	100	762.288.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.131.472.000		2.158.647.000		2.211.701.000		2.289.934.000		2.399.627.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	11,54	11,54	262.261.000	13,2	265.604.000	13,2	272.132.000	15,09	281.758.000	15,09	295.255.000	15,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	81	84	486.925.000	88	493.133.000	92	505.253.000	96	523.125.000	100	548.184.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
---------	--------------------------------------	--	---	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	-----	-------------	-----	--

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	69,5	70	112.406.000	70,50	113.839.000	71	116.637.000	71,50	120.763.000	72	126.548.000	72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	80	90,62	136.421.000	90,62	138.161.000	93,75	141.556.000	93,75	146.563.000	93,75	153.584.000	93,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota	2	3	348.115.000	4	352.553.000	5	361.218.000	6	373.995.000	7	391.910.000	7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	81	84	785.344.000	88	795.357.000	92	814.905.000	96	843.730.000	100	884.146.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					42.766.141.000		43.311.420.000		44.375.909.000		45.945.586.000		48.146.435.000		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	290,59	291,79	9.557.421.000	292,98	9.679.280.000	294,15	9.917.173.000	295,31	10.267.966.000	296,4	10.759.814.000	296,4	DINAS PANGAN
		Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	82	82,5		83		84		84,5		85		85	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	21	22	23.013.958.000	24	23.307.392.000	27	23.880.231.000	28	24.724.929.000	30	25.909.283.000	30	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM	Persentase Keamanan	%	82	83	10.194.762.000	83,5	10.324.748.000	84	10.578.505.000	84,5	10.952.691.000	85	11.477.338.000	85	DINAS PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	pangan masyarakat														
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					761.718.000		771.428.000		790.386.000		818.347.000		857.545.000		
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	%	80	85	370.279.000		375.000.000		384.216.000		397.807.000		416.862.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	65	70	95.215.000		96.429.000		98.798.000		102.293.000		107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	65	70	95.215.000		96.429.000		98.798.000		102.293.000		107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	%	65	70	42.318.000		42.857.000		43.910.000		45.464.000		47.641.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	%	75	80	52.897.000		53.571.000		54.888.000		56.830.000		59.552.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	65	70	52.897.000		53.571.000		54.888.000		56.830.000		59.552.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	50	55	52.897.000		53.571.000		54.888.000		56.830.000		59.552.000	80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.709.135.000		9.832.930.000		10.074.598.000		10.430.959.000		10.930.616.000		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase kesesuaian antara dokumen	%	100	100	211.588.000		214.286.000		219.552.000		227.318.000		238.207.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	LINGKUNGAN HIDUP	rencana dengan implementasi														
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	60	60	1.803.786.000	65	1.826.785.000	70	1.871.683.000	75	1.937.888.000	80	2.030.715.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kabupaten/Kota	19	19	134.339.000	19	136.052.000	19	139.396.000	19	144.327.000	19	151.240.000	19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	100	2.835.276.000	100	2.871.427.000	100	2.942.000.000	100	3.046.065.000	100	3.191.975.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	50	158.691.000	50	160.714.000	50	164.664.000	50	170.489.000	50	178.655.000	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	48.559.000	100	49.179.000	100	50.387.000	100	52.170.000	100	54.669.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	75	317.382.000	75	321.428.000	75	329.328.000	75	340.977.000	75	357.311.000	75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang	%	10	10	100.000.000	10	101.275.000	10	103.764.000	10	107.434.000	10	112.581.000	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)	
		lingkungan hidup															
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%		90	105.794.000	90	107.143.000	90	109.776.000	90	113.659.000	90	119.104.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%		60	3.993.720.000	65	4.044.641.000	70	4.144.048.000	75	4.290.632.000	80	4.496.159.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.695.877.000		1.717.499.000		1.759.712.000		1.821.956.000		1.909.229.000			
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	26,66	40	491.942.000	50	498.214.000	60	510.459.000	70	528.515.000	80	553.831.000	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	97,16	97,75		98		98,25		98,5		99		99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	91,47	94	491.942.000	95	498.214.000	96	510.459.000	97	528.515.000	98	553.831.000	98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	inovasi	3	6	510.985.000	9	517.500.000	12	530.219.000	15	548.974.000	18	575.270.000	18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
		Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	%	1,5	1,4		1,3		1,2		1,1		1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	dokumen	3	3	201.008.000	3	203.571.000	3	208.575.000	3	215.952.000	3	226.297.000	3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.083.149.000		6.160.712.000		6.312.126.000		6.535.401.000		6.848.455.000		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang terbentuk	Desa	0	1	105.794.000	1	107.143.000	2	109.776.000	2	113.659.000	3	119.104.000	3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa	dokumen	118	130	1.586.908.000	145	1.607.142.000	160	1.646.642.000	180	1.704.887.000	200	1.786.553.000	200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	Desa/Nagari/Kelurahan	381	410	1.269.527.000	450	1.285.714.000	500	1.317.313.000	550	1.363.910.000	600	1.429.243.000	600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	10.800	11.300	3.120.920.000	11.800	3.160.713.000	12.300	3.238.395.000	12.800	3.352.945.000	13.300	3.513.555.000	13.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	299	350		400		450		500		544		544	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah LPM Mandiri	LPM	0	7		15		25		37		50		50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2.319	2.400		2.500		2.600		2.700		2.800		2.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					719.399.000		728.572.000		746.477.000		772.882.000		809.904.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BERENCANA															
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	80	80	211.588.000	85	214.286.000	90	219.552.000	90	227.318.000	90	238.207.000	90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	%	54,44	55,12	211.588.000	55,46	214.286.000	55,89	219.552.000	56,32	227.318.000	56,75	238.207.000	56,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	51,74	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.111.966.000		5.177.144.000		5.304.386.000		5.492.015.000		5.755.088.000		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	%	39,07	40,27	3.789.134.000	41,51	3.837.446.000	42,17	3.931.761.000	43,65	4.070.837.000	44,81	4.265.834.000	44,81	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	2,45		2,45		2,45		2,45		2,45		DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	1	1	1.168.373.000	1	1.183.270.000	1	1.212.352.000	1	1.255.236.000	1	1.315.363.000	5	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	4	4		4		4		5		5		DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA	dokumen	1	1	154.459.000	1	156.428.000	1	160.273.000	1	165.942.000	1	173.891.000	5	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		yang merupakan kewenangan provinsi														
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					25.510.604.000		25.835.871.000		26.470.854.000		27.407.189.000		28.720.026.000		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	5	10	9.424.751.000	20	9.544.919.000	30	9.779.510.000	40	10.125.434.000	50	10.610.454.000	50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3	3,2	16.085.853.000	3,3	16.290.952.000	3,4	16.691.344.000	3,5	17.281.755.000	3,6	18.109.572.000	3,6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.409.634.000		7.504.111.000		7.688.543.000		7.960.505.000		8.341.822.000		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	%	1,81	1,94	65.592.000	2,58	66.429.000	3,25	68.061.000	3,95	70.469.000	4,03	73.844.000	4,03	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	60	60	402.017.000	63	407.143.000	65	417.149.000	67	431.905.000	69	452.593.000	69	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	koperasi	38	40	47.607.000	41	48.214.000	43	49.399.000	45	51.147.000	50	53.597.000	50	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUKM yang dilatih	orang	1.000	1.100	3.025.536.000	1.250	3.064.113.000	1.500	3.139.421.000	1.650	3.250.469.000	1.800	3.406.171.000	7.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	koperasi	50	50	1.329.829.000	60	1.346.785.000	70	1.379.886.000	80	1.428.695.000	90	1.497.132.000	90	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM	Meningkatnya usaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	PENGEMBANGAN UMKM	kecil yang menjadi wirausaha														USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.118.669.000		4.171.184.000		4.273.702.000		4.424.873.000		4.636.829.000		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	100	1.005.042.000	100	1.017.857.000	100	1.042.873.000	100	1.079.762.000	100	1.131.484.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	4	793.454.000	4	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	23	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	1.476.581.000	82,75 / 3,41	1.495.408.000	82,90 / 3,43	1.532.162.000	83,05 / 3,45	1.586.358.000	83,20 / 3,47	1.662.346.000	83,20 / 3,47	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	85		85,52		86,38		87,27		88,13		88,13	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	4,8	5,1	774.826.000	5,6	784.705.000	6,1	803.992.000	6,7	832.431.000	7,5	872.305.000	7,5	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	15	20	68.766.000	40	69.643.000	60	71.354.000	80	73.878.000	100	77.417.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.069.598.000		18.299.989.000		18.749.758.000		19.412.981.000		20.342.885.000		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	14	15	3.681.628.000	16	3.728.569.000	17	3.820.208.000	18	3.955.338.000	20	4.144.803.000	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	230	268		348		348		348		348		1890	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	14	26	13.287.713.000	26	13.457.135.000	41	13.787.879.000	29	14.275.588.000	29	14.959.405.000	29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	0,8	0,85		0,9		0,95		1		1,05		1,05	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	4,44	4,84	1.100.257.000	5,04	1.114.285.000	5,24	1.141.671.000	5,44	1.182.055.000	5,64	1.238.677.000	5,64	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					881.282.000		892.519.000		914.455.000		946.801.000		992.154.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50	60	881.282.000	70	892.519.000	80	914.455.000	90	946.801.000	100	992.154.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	60		70		80		90		100		100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					881.282.000		892.519.000		914.455.000		946.801.000		992.154.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	%	44	45	881.282.000	47	892.519.000	50	914.455.000	55	946.801.000	60	992.154.000	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.053.108.000		12.206.788.000		12.506.801.000		12.949.195.000		13.569.479.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya		8	2.168.775.000	8	2.196.427.000	8	2.250.410.000	8	2.330.012.000	8	2.441.623.000		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional		21	3.231.343.000	23	3.272.544.000	23	3.352.975.000	23	3.471.577.000	23	3.637.870.000		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen		3	2.487.284.000	4	2.518.997.000	5	2.580.908.000	6	2.672.201.000	7	2.800.203.000		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya		11	2.480.198.000	16	2.511.821.000	21	2.573.555.000	26	2.664.588.000	31	2.792.225.000		DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah warisan budaya benda yang	Cagar Budaya		15		15		15		15		15			DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
		ditetapkan														
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali		15	1.685.508.000	15	1.706.999.000	15	1.748.953.000	15	1.810.817.000	15	1.897.558.000		DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang		30000		35000		40000		45000		50000			DINAS KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.794.112.000		1.816.987.000		1.861.644.000		1.927.495.000		2.019.824.000		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	%		1,41	1.126.705.000	1,52	1.141.071.000	1,62	1.169.116.000	1,72	1.210.470.000	1,82	1.268.453.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	jumlah		223	667.407.000	223	675.916.000	223	692.528.000	223	717.025.000	223	751.371.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					296.223.000		300.000.000		307.372.000		318.245.000		333.489.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	%		71,5	158.691.000	72	160.714.000	72,5	164.664.000	73	170.489.000	73,5	178.655.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	%		76,66	68.766.000	76,66	69.643.000	76,66	71.354.000	76,66	73.878.000	76,66	77.417.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	regulasi		1	68.766.000	1	69.643.000	1	71.354.000	1	73.878.000	1	77.417.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					389.621.071.000		394.614.684.000		404.313.345.000		418.614.833.000		438.666.984.000		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					67.146.931.000		68.003.072.000		69.674.421.000		72.138.965.000		75.594.507.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	41,18	47,06	5.580.628.000	52,94	5.651.783.000	58,82	5.790.690.000	64,71	5.995.520.000	70,59	6.282.712.000	70,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	kawasan	7	7		7		7		7		7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir	batang	20.000	20.000		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2)	M2	250	250		300		350		350		350		350	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,93	0,99	37.620.310.000	1,07	38.099.979.000	1,09	39.036.383.000	1,11	40.417.189.000	1,17	42.353.221.000	1,17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan	unit	1.400	1.423		1.590		1.739		1.768		1.800		1.800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan	unit	3	3		3		3		3		3		3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	dokumen	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap	ton	220.615	222.693		225.081		227.546		230.081		232.762		232.762	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,32	3,33	10.701.053.000	3,39	10.837.494.000	3,71	11.103.853.000	3,78	11.496.622.000	3,97	12.047.324.000	3,97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	ton	256.747	262.256		274.280		284.467		295.226		306.934		306.934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna	unit	5	20		40		60		80		100		100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	17	17		17		19		19		19		19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya produksi budidaya laut	ton	52	67		72		79		85		93		93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan	%	80	82	4.781.884.000	84	4.842.854.000	86	4.961.880.000	90	5.137.393.000	92	5.383.480.000	92	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	PERIKANAN	yang berlaku														
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	6,30	6,49	8.463.056.000	7,26	8.570.962.000	7,95	8.781.615.000	8,05	9.092.241.000	11	9.527.770.000	11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	ton	15.633	16.652		17.861		19.280		20.832		22.742	22.742	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya konsumsi ikan	Kg/kap/th	39,27	40		40,5		41,6		42,4		43,5	44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					24.277.136.000		24.586.677.000		25.190.958.000		26.082.019.000		27.331.378.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	4	6	10.896.771.000	10	11.035.708.000	12	11.306.939.000	15	11.706.891.000	17	12.267.665.000	17	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	11	19		19		19		19		19	19	DINAS PARIWISATA	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	1	2,5	4.602.034.000	4	4.660.712.000	5,5	4.775.261.000	7	4.944.172.000	8,5	5.181.004.000	8,5	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	1,5	3		4,5		6		7,5		9	9	DINAS PARIWISATA	
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,19	3,21		3,23		3,25		3,27		3,29	3,29	DINAS PARIWISATA	
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,58	1,64		1,7		1,76		1,82		1,88	1,88	DINAS PARIWISATA	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	0	50	2.576.081.000	100	2.608.927.000	150	2.673.048.000	200	2.767.600.000	250	2.900.171.000	250	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6.202.250.000	396	6.281.330.000	496	6.435.710.000	596	6.663.356.000	696	6.982.538.000	696	DINAS PARIWISATA
		Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12	12	DINAS PARIWISATA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					215.557.702.000		218.306.122.000		223.671.550.000		231.583.326.000		242.676.446.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	5	42.220.051.000	5	42.758.368.000	5	43.809.264.000	5	45.358.898.000	5	47.531.644.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	%	1,40	1,45	76.436.090.000	1,51	77.410.671.000	1,57	79.313.236.000	1,62	82.118.727.000	1,68	86.052.312.000	1,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	5	42.527.793.000	5	43.070.034.000	5	44.128.590.000	5	45.689.519.000	5	47.878.102.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	20	8.518.724.000	20	8.627.340.000	20	8.839.379.000	20	9.152.048.000	20	9.590.442.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,1	3,41	18.135.328.000	4,71	18.366.558.000	4,94	18.817.963.000	5,19	19.483.598.000	5,48	20.416.885.000	5,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,65	0,63	2.761.221.000	0,6	2.796.427.000	0,57	2.865.156.000	0,54	2.966.503.000	0,53	3.108.603.000	0,53	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	3	5	264.485.000	7	267.857.000	8	274.440.000	10	284.148.000	12	297.759.000	12	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	%	3	3	476.073.000	3	482.143.000	3	493.992.000	3	511.466.000	3	535.966.000	15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian	orang	1.000	1.000	22.075.611.000	1.000	22.357.082.000	1.000	22.906.564.000	1.000	23.716.821.000	1.000	24.852.886.000	6.000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM	Peningkatan SDM	%	20	20	2.142.326.000	20	2.169.642.000	20	2.222.966.000	20	2.301.598.000	20	2.411.847.000	100	DINAS PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	PENYULUHAN PERTANIAN	Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan														DAN KESEHATAN HEWAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					68.542.420.000		69.416.355.000		71.122.439.000		73.638.202.000		77.165.561.000		
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks	61,41	60,98	22.226.299.000	60,55	22.509.690.000	60,12	23.062.923.000	59,69	23.878.712.000	59,26	25.022.531.000	59,26	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	20		20		20		20		20		20	DINAS KEHUTANAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi	lokasi	1	10	21.840.703.000	10	22.119.178.000	10	22.662.814.000	10	23.464.449.000	10	24.588.425.000	10	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	50.000	22.147.952.000	50.000	22.430.345.000	50.000	22.981.628.000	50.000	23.794.540.000	50.000	24.934.327.000	50.000	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	1	3	2.327.466.000	3	2.357.142.000	3	2.415.074.000	3	2.500.501.000	3	2.620.278.000	3	DINAS KEHUTANAN
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					1.250.907.000		1.292.693.000		1.324.464.000		1.371.313.000		1.437.000.000		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	29,37	37,5	264.485.000	55	267.857.000	67	274.440.000	83	284.148.000	100	297.759.000	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	NA	NA	0.000	40	25.836.000	55	26.471.000	70	27.407.000	90	28.720.000	90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	28	29	359.699.000	33,3	364.286.000	35,7	373.239.000	51,7	386.441.000	51,8	404.952.000	51,8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	99,3	99,50	626.723.000	99,60	634.714.000	99,70	650.314.000	99,80	673.317.000	99,90	705.569.000	99,90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.487.251.000		5.557.215.000		5.693.798.000		5.895.201.000		6.177.588.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN	Jumlah perusahaan	jumlah usaha		5.450	185.139.000	5.540	187.500.000	5.630	192.108.000	5.720	198.903.000	5.810	208.431.000		DINAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	yang didata														PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%		5,5	370.279.000	5,8	375.000.000	6,2	384.216.000	6,5	397.807.000	6,8	416.862.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%		6	502.871.000	6	509.282.000	6	521.799.000	6	540.257.000	6	566.135.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$		1.420,99	417.029.000	1.449,41	422.346.000	1.478,4	432.727.000	1.507,97	448.033.000	1.538,12	469.495.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%		72	3.218.479.000	74	3.259.516.000	76	3.339.627.000	78	3.457.757.000	80	3.623.388.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%		23		25		26		26		26,5			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%		88		89		89		90		90			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%		5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					6.970.624.000		7.059.501.000		7.233.007.000		7.488.854.000		7.847.579.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra		20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%		72	168.406.000	74	170.553.000	76	174.745.000	78	180.926.000	80	189.592.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha		41.373	80.920.000	43.263	81.952.000	45.363	83.966.000	47.673	86.936.000	50.193	91.100.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					388.100.000		393.049.000		402.708.000		416.953.000		436.925.000		
3.32.02	PROGRAM	Persentase fasilitas	%	100	100	40.640.000	100	41.158.000	100	42.169.000	100	43.661.000	100	45.752.000	100	DINAS TENAGA

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)	
		kepada pengambilan kebijakan															
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual	dokumen		4	10.013.475.000	8	10.141.150.000	12	10.390.395.000	16	10.757.927.000	20	11.273.244.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	90	90	2.054.223.000	90	2.080.415.000	90	2.131.547.000	90	2.206.944.000	90	2.312.660.000	90	BIRO HUKUM	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	90	90	2.525.139.000	90	2.557.336.000	95	2.620.189.000	95	2.712.871.000	100	2.842.820.000	100	BIRO PEREKONOMIAN	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	skor		93	1.973.056.000	93	1.998.213.000	97	2.047.324.000	97	2.119.743.000	97	2.221.281.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	90	91	2.406.198.000	92	2.436.878.000	93	2.496.770.000	94	2.585.087.000	95	2.708.916.000	95	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	%	90	91		92		93		94		95		95	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Pergub	4	2		1		1		1		1		10	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					42.879.074.000		43.425.794.000		44.493.094.000		46.066.917.000		48.273.577.000			
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	%	100	100	42.879.074.000	100	43.425.794.000	100	44.493.094.000	100	46.066.917.000	100	48.273.577.000	100	SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	100	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	100	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.292.135.708.000		1.308.610.794.000		1.340.773.239.000		1.388.199.463.000		1.454.695.882.000			
5.01	PERENCANAAN					11.876.603.000		12.028.033.000		12.323.654.000		12.759.569.000		13.370.768.000			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target	%		85	4.549.391.000	87	4.607.397.000	90	4.720.636.000	92	4.887.615.000	95	5.121.738.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi														DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	%		100	7.327.212.000	100	7.420.636.000	100	7.603.018.000	100	7.871.954.000	100	8.249.030.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02	KEUANGAN					1.253.689.064.000		1.269.673.944.000		1.300.879.416.000		1.346.894.504.000		1.411.412.366.000		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1.244.409.590.000	tepat waktu	1.260.276.153.000	tepat waktu	1.291.250.652.000	tepat waktu	1.336.925.148.000	tepat waktu	1.400.965.466.000	tepat waktu	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	persen		91	2.327.466.000	92	2.357.142.000	93	2.415.074.000	94	2.500.501.000	95	2.620.278.000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	%		3,5	6.952.008.000	3,1	7.040.649.000	7,1	7.213.690.000	8,1	7.468.855.000	9,1	7.826.622.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	KEPEGAWAIAN					7.353.632.000		7.447.393.000		7.630.431.000		7.900.337.000		8.278.773.000		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	270	300	7.353.632.000	325	7.447.393.000	340	7.630.431.000	350	7.900.337.000	370	8.278.773.000	370	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					7.072.106.000		7.162.278.000		7.338.309.000		7.597.882.000		7.961.829.000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	85	86	7.072.106.000	87	7.162.278.000	88	7.338.309.000	89	7.597.882.000	90	7.961.829.000	90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	20	20		22		22		24		24		24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.232.677.000		8.337.646.000		8.542.565.000		8.844.735.000		9.268.409.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	42,85	50	8.232.677.000	50	8.337.646.000	62,5	8.542.565.000	62,5	8.844.735.000	62,5	9.268.409.000	62,5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
		Persentase SKPD yang terinovatif	%	20	30		30		40		40		50		50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	2	10		10		10		12		12		12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG					3.911.626.000		3.961.500.000		4.058.864.000		4.202.436.000		4.403.737.000		
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	%		100	3.911.626.000	100	3.961.500.000	100	4.058.864.000	100	4.202.436.000	100	4.403.737.000		BADAN PENGHUBUNG
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan	%		100		100		100		100		100		BADAN PENGHUBUNG	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					10.983.732.000		11.123.778.000		11.397.174.000		11.800.318.000		12.365.567.000		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					10.983.732.000		11.123.778.000		11.397.174.000		11.800.318.000		12.365.567.000		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	6.023.337.000	78	6.100.136.000	79	6.250.063.000	80	6.471.142.000	80	6.781.117.000	80	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	65	70	4.960.395.000	75	5.023.642.000	80	5.147.111.000	85	5.329.176.000	90	5.584.450.000	90	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.491.098.000		4.548.360.000		4.660.148.000		4.824.988.000		5.056.112.000		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.491.098.000		4.548.360.000		4.660.148.000		4.824.988.000		5.056.112.000		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	2,70	2,71	275.064.000	2,72	278.571.000	2,73	285.418.000	2,74	295.514.000	2,75	309.669.000	2,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	nilai	3,26	3,27	3.226.861.000	3,28	3.268.004.000	3,29	3.348.324.000	3,30	3.466.762.000	3,31	3.632.824.000	3,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	%	100	100	79.345.000	100	80.357.000	100	82.332.000	100	85.244.000	100	89.328.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	3,09	3,10	317.382.000	3,11	321.428.000	3,12	329.328.000	3,13	340.977.000	3,14	357.311.000	3,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	3	3,01	592.446.000	3,02	600.000.000	3,03	614.746.000	3,04	636.491.000	3,05	666.980.000	3,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	PENUNJANG URUSAN					3.816.680.384.000		3.865.318.271.000		3.960.318.318.000		4.100.403.854.000		4.296.818.119.000		
X.XX	PENUNJANG URUSAN					3.816.680.384.000		3.865.318.271.000		3.960.318.318.000		4.100.403.854.000		4.296.818.119.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	2.475.985.671.000	100	2.507.555.167.000	100	2.569.184.727.000	100	2.660.062.682.000	100	2.787.482.873.000	100	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	61.575.175.000	100	62.360.276.000	100	63.892.938.000	100	66.152.978.000	100	69.321.785.000		DINAS KESEHATAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	167.879.516.000	100	170.020.026.000	100	174.198.701.000	100	180.360.509.000	100	188.999.993.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%		44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	46.474.754.000	100	47.067.320.000	100	48.224.119.000	100	49.929.917.000	100	52.321.620.000		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
		Tingkat Kemandirian	%		44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT JIWA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
		Kuangan Rumah Sakit BLUD														PROF. HB. SAANIN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	133.534.974.000	100	135.237.582.000	100	138.561.390.000	100	143.462.624.000	100	150.334.656.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%		52		56		58		63		65		65	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	97.622.830.000	100	98.867.548.000	100	101.297.470.000	100	104.880.594.000	100	109.904.500.000	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%		44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	43.370.337.000	100	43.923.321.000	100	45.002.848.000	100	46.594.702.000	100	48.826.644.000		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	23.412.462.000	100	23.710.977.000	100	24.293.735.000	100	25.153.060.000	100	26.357.922.000		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.358.078.000	100	9.477.396.000	100	9.710.327.000	100	10.053.803.000	100	10.535.393.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	9.760.576.000	100	9.885.026.000	100	10.127.976.000	100	10.486.225.000	100	10.988.528.000	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	31.273.122.000	100	31.671.862.000	100	32.450.279.000	100	33.598.120.000	100	35.207.510.000		DINAS SOSIAL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	26.064.470.000	100	26.396.799.000	100	27.045.567.000	100	28.002.231.000	100	29.343.572.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		provinsi														
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	10.343.868.000	100	10.475.755.000		10.733.223.000		11.112.882.000		11.645.202.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	16.383.816.000	100	16.592.714.000		17.000.523.000		17.601.870.000		18.445.021.000	100	DINAS PANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	12.300.623.000	100	12.457.459.000		12.763.633.000		13.215.112.000		13.848.132.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	7.808.437.000	100	7.907.997.000		8.102.356.000		8.388.955.000		8.790.796.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	9.349.961.000	100	9.469.175.000		9.701.905.000		10.045.083.000		10.526.255.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	14.087.454.000	100	14.267.073.000		14.617.723.000		15.134.785.000		15.859.759.000		DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	7.503.449.000	100	7.599.120.000		7.785.888.000		8.061.293.000		8.447.438.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	12.603.796.000	100	12.764.498.000		13.078.218.000		13.540.824.000		14.189.446.000	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	9.251.795.000	100	9.369.758.000		9.600.043.000		9.939.619.000		10.415.739.000		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		provinsi														PINTU
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	16.335.596.000	100	16.543.879.000	100	16.950.487.000	100	17.550.065.000	100	18.390.734.000	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	8.213.229.000	100	8.317.950.000	100	8.522.385.000	100	8.823.841.000	100	9.246.513.000		DINAS KEBUDAYAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	13.645.446.000	100	13.819.429.000	100	14.159.076.000	100	14.659.915.000	100	15.362.143.000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	27.228.914.000	100	27.576.090.000	100	28.253.843.000	100	29.253.246.000	100	30.654.511.000	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	11.452.663.000	100	11.598.688.000	100	11.883.755.000	100	12.304.111.000	100	12.893.493.000		DINAS PARIWISATA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	61.637.521.000	100	62.423.417.000	100	63.957.631.000	100	66.219.959.000	100	69.391.975.000	100	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	24.459.019.000	100	24.770.878.000	100	25.379.686.000	100	26.277.424.000	100	27.536.144.000		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	58.422.508.000	100	59.167.411.000	100	60.621.601.000	100	62.765.926.000	100	65.772.490.000		DINAS KEHUTANAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	12.853.018.000	100	12.991.061.000	100	13.310.350.000	100	13.781.167.000	100	14.441.302.000	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketercapaian	%		100	17.556.575.000	100	17.780.426.000	100	18.217.425.000	100	18.861.818.000	100	19.765.321.000		DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi														DAN PERDAGANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	22.807.865.000	100	23.098.672.000	100	23.666.381.000	100	24.503.515.000	100	25.677.263.000		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	13.942.611.000	100	14.120.383.000	100	14.467.428.000	100	14.979.174.000	100	15.696.694.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	14.659.247.000	100	14.846.156.000	100	15.211.038.000	100	15.749.087.000	100	16.503.487.000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	11.700.294.000	100	11.849.476.000	100	12.140.707.000	100	12.570.151.000	100	13.172.277.000	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	14.989.147.000	100	15.180.263.000	100	15.553.356.000	100	16.103.514.000	100	16.874.892.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	7.844.834.000	100	7.944.858.000	100	8.140.123.000	100	8.428.058.000	100	8.831.772.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	11.619.253.000	100	11.767.402.000	100	12.056.616.000	100	12.483.086.000	100	13.081.041.000		BADAN PENGHUBUNG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.798.496.000	100	1.821.428.000	100	1.866.194.000	100	1.932.205.000	100	2.024.760.000	100	BIRO PEMERINTAHAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan	Nilai	76,65	78,85	10.610.167.000	80,15	10.745.450.000	82,35	11.009.547.000	84,55	11.398.979.000	86,75	11.945.004.000	86,75	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap	Nilai	76,65	78,85		80,15		82,35		84,55		86,75		86,75	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)
		layanan administrasi kepegawaian														
		Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	%	80	80		80		80		80		80		80	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.143.418.000	100	1.157.997.000	100	1.186.458.000	100	1.228.426.000	100	1.287.269.000	100	BIRO HUKUM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	569.861.000	100	577.127.000	100	591.311.000	100	612.227.000	100	641.554.000	100	BIRO PEREKONOMIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	649.736.000	100	658.021.000	100	674.193.000	100	698.041.000	100	731.478.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	1.073.707.000	100	1.087.397.000	100	1.114.123.000	100	1.153.532.000	100	1.208.787.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	782.580.000	100	792.558.000	100	812.037.000	100	840.760.000	100	881.034.000		BIRO ORGANISASI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	61.114.211.000	100	61.893.434.000	100	63.414.623.000	100	65.657.743.000	100	68.802.828.000		BIRO UMUM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	1.248.410.000	100	1.264.328.000	100	1.295.402.000	100	1.341.223.000	100	1.405.469.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	68.899.891.000	100	69.778.383.000	100	71.493.365.000	100	74.022.249.000	100	77.568.004.000		SEKRETARIAT DPRD
		Persentase	%		100		100		100		100		100			SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi														
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	7.183.767.000	100	7.275.362.000	100	7.454.172.000	100	7.717.843.000	100	8.087.537.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	8.211.695.000	100	8.316.396.000	100	8.520.793.000	100	8.822.193.000	100	9.244.786.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	78.081.541.000	100	79.077.102.000	100	81.020.623.000	100	83.886.508.000	100	87.904.773.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH